

# SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Vol. 7 No. 02 Januari - April 2018

ISSN 2089 - 0338  
E-ISSN 2502-7921

Akreditasi  
Kemenristekdikti Nomor  
21/E/KPT/2018

- PROSES ADOPSI INOVASI LOKAL TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAWASAN MINAPOLITAN DESA KOTO MESJID PROVINSI RIAU

*Adianto, Muhadjir Darwin, dan Susetiawan*

- PERAN PENDAMPING DALAM MENINGKATKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL PADA PROGRAM PELAYANAN JARAK JAUH DI KECAMATAN LEMBANG DAN CILILIN, KABUPATEN BANDUNG BARAT

*Dedek Roslina dan Ety Rahayu*

- REHABILITASI SOSIAL BERBASIS INSTITUSI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA: STUDI KASUS PADA INTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR LINTAS NUSA DI KOTA BATAM

*Suradi*

- PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI PERUNDUNGAN PADA PELAJAR DI KOTA PANGKAL PINANG

*Hari Harjanto Setiawan*

- PELIBATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)

*Habibullah*

- PEMBERDAYAAN SUKU KAILI DA'A DI KABUPATEN SIGI

*Irmawan*

- "HEKA HITI HEKA LEHA" SPIRIT BUDAYA PEMERSATU DI TENGAH KELANGGENGAN KONFLIK ORANG KULUR DAN ORANG PORTO KECAMATAN SAPARUA MALUKU TENGAH

*Paulus Koritelu*

# SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Vol. 7 No. 02 Januari - April 2018

ISSN 2089 - 0338

E-ISSN 2502-7921

Akreditasi

Kemenristekdikti Nomor

21/E/KPT/2018

*Sebuah Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial menyajikan karangan ilmiah dalam bentuk hasil penelitian lapangan bidang kesejahteraan sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember.*

SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari "Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial" yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei - Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 Jurnal Ilmiah "SOSIO KONSEPSIA" menggunakan *Open Journal System (OJS)*. Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di Sosio Konsepsia melakukan pengiriman naskah melalui *Open Journal System (OJS)*: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

## Penyunting Ahli / Mitra Bestari

- |                                             |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Prof. Adi Fahrudin, Ph.D.                | <i>Praktek dan Pendidikan Pekerjaan Sosial, Psikososial, dan Disaster Management (Universitas Muhammadiyah Jakarta)</i> |
| 2. Prof. Irwanto, Ph.D.                     | <i>Psikologi, Perkembangan Anak dan Studi Keluarga, HIV/AIDS, Disabilitas (Universitas Atmajaya Jakarta)</i>            |
| 3. Prof. Isbandi Rukminto Adi, M.Kes, Ph.D  | <i>Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (Universitas Indonesia)</i>   |
| 4. Prof. Achmad Fedyani Saifuddin, MA, Ph.D | <i>Antropologi (Universiti Indonesia)</i>                                                                               |
| 5. Makmur Sunusi Ph.D                       | <i>Pekerjaan Sosial (Universitas Muhammadiyah, Jakarta)</i>                                                             |
| 6. DR. Santoso Tri Raharjo                  | <i>Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Sosiologi (Universitas Pajajaran, Bandung)</i>                                         |
| 7. DR. Bambang Rudito                       | <i>Antropologi, Interkultural, Corporate Social Responsibility (Institut Teknologi Bandung)</i>                         |

## Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

## Editor

Drs. Suradi, M.Si

## Editor Bagian

- |                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Drs. Setyo Sumarno, M.Si   | 5. Drs. Muhtar, M.Si                                   |
| 2. Dra. Indah Huruswati, M.Si | 6. DR. Hari Harjanto Setiawan                          |
| 3. Drs. Nurdin Widodo, M.Si   | 7. Badrun Susantyo, Ph.D ( <b>Copy Editor</b> )        |
| 4. Drs. B. Mujiyadi, M.SW     | 8. Habibullah, S.Sos, M.Kesos ( <b>Editor Layout</b> ) |

## Manager Jurnal/Proffreader

Irmayani, SH, M.Si

Diterbitkan oleh **Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial**



## Alamat

Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang III Jakarta Timur 13630 Telp. (021) 8017146, Fax (021) 8017126

Email : [sosiokonsepsia@gmail.com](mailto:sosiokonsepsia@gmail.com) Website: [puslit.kemsos.go.id](http://puslit.kemsos.go.id)

Ejournal: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

Percetakan: CV. Multi Inovasi Mandiri (isi diluar tanggungjawab percetakan)

Villa Inti Persada Blok A.12/6 Pamulang Kota, Tangerang Selatan. Email: [inovasiku\\_99@yahoo.com](mailto:inovasiku_99@yahoo.com)

# SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Volume 7, No. 02, Januari - April 2018

ISSN 2089-0338

E-ISSN 2502-7921

Akreditasi

Kemenristekdikti Nomor:

21/E/KPT/2018

## DAFTAR ISI

## HALAMAN

### ■ PENGANTAR REDAKSI

iii

- Proses Adopsi Inovasi Lokal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid Provinsi Riau

1 - 30

**Adianto, Muhadjir Darwin, dan Susetiawan**

- Peran Pendamping dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual pada Program Pelayanan Jarak Jauh di Kecamatan Lembang dan Cililin, Kabupaten Bandung Barat

31 - 44

**Dedek Roslina dan Ety Rahayu**

- Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi bagi Korban Penyalahgunaan Napza: Studi Kasus pada Intitusi Penerima Wajib Lapor Lintas Nusa di Kota Batam

45 - 61

**Suradi**

- Pengembangan Sistem Peringatan Dini Perundungan pada Pelajar di Kota Pangkal Pinang

62 - 78

**Hari Harjanto Setiawan**

- Pelibatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

79 - 90

**Habibullah**

- Pemberdayaan Suku Kaili Da'a di Kabupaten Sigi

91 - 100

**Irmawan**

- “*Heka Hiti Heka Leha*” Spirit Budaya Pemersatu di Tengah Kelanggengan Konflik Orang Kulur dan Orang Porto Kecamatan Saparua Maluku Tengah

101 - 118

**Paulus Koritelu**





## PENGANTAR REDAKSI

SOSIO KONSEPSIA Vol 7 No 02 Januari-April Tahun 2018 ini menyajikan hasil-hasil penelitian yang aktual dan menarik untuk menjadi bahan pustaka, terkait dengan kemiskinan, disabilitas, penyalahgunaan NAPZA, dan perundungan di kalangan anak sekolah.

Kemiskinan seringkali diidentikkan dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga menyebabkan ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan orang miskin, diperlukan dukungan atau fasilitasi dari luar. Hasil penelitian Adiarto membuktikan, bahwa proses adopsi inovasi bidang perikanan bagi nelayan miskin di Riau merupakan bentuk fasilitasi yang memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Disabilitas sebagai salah satu permasalahan sosial di sekitar kita, memerlukan dukungan dan pendampingan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Metode yang kini dapat dilakukan untuk memberikan pendampingan bagi disabilitas adalah program pelayanan jarak jauh. Dedek Roslina dan Ety Rahayu membahas dalam penelitiannya, bahwa program pelayanan jarak jauh bagi disabilitas memberikan dampak bagi peningkatan keberfungsian sosial.

Penanganan korban penyalahgunaan NAPZA memerlukan peran serta masyarakat melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Yayasan Lintas Nusa telah memberikan kontribusi dalam penanganan korban penyalahgunaan NAPZA di Kota Batam. Suradi membahas dalam penelitiannya, bahwa Yayasan Lintas Nusa telah memberikan kontribusi dalam penanganan korban penyalahgunaan NAPZA.

Anak-anak di sekolah berpotensi menjadi korban perundungan di lingkungan sekolahnya. Hari Harjanto Setiawan dalam penelitiannya, bahwa keluarga yang bermasalah kemungkinan besar menjadi penyebab seorang anak melakukan perundungan di sekolah. Selain lingkungan keluarga, faktor lainnya, seperti kepribadian anak, sekolah, masyarakat dan media. Untuk itu, disarankan perlu dikembangkan Sistem Peringatan Dini untuk menanggulangi terjadinya perundungan di sekolah.

Sistem Rujukan dan Layanan Terpadu (SLRT), merupakan model yang dibangun pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan secara efektif. Implementasi model ini memerlukan keterlibatan badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappda), khususnya dalam melakukan monitoring dan evaluasi (moneva). Habibullah membahas dalam penelitiannya, bahwa keterlibatan Bappeda tersebut sangat penting dan strategis, mengingat tugas dan fungsi OPD tersebut sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah.

Sekelompok orang yang dikenal dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT), adalah salah satu sasaran program Kementerian Sosial. Irmawan membahas dalam penelitiannya, bahwa program pemberdayaan bagi KAT berpengaruh terhadap tarafhidup KAT pada aspek perumahan, pendidikan, kesehatan dan agama. Dibalik keberhasilan program tersebut, ada seorang tokoh agama setempat

sebagai relawan, dan menyumbangkan tenaga untuk memberikan pendampingan KAT di bidang agama.

Di Kecamatan Saparua Maluku Tengah, khususnya pada Orang Kulur dan Orang Porto, dikenal nilai “Heka Hiti Heka Leha”, sebagai spirit budaya yang menghendaki kedamaian sosial pada masyarakat. Berdasarkan nilai yang dipegang bersama itu, apabila terjadi konflik maka dapat diselesaikan secara damai dan tidak berkepanjangan. Paulus Koritelu membahas dalam penelitiannya, bahwa nilai yang menjadi spirit budaya pemersatu tersebut hingga kini masih menjadi rujukan bagi masyarakat ketika terjadi konflik sosial yang tidak dapat dihindari.

Selamat membaca.

**Redaksi**

# SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

Adianto (Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau)

Muhadjir Darwin (Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta)

Susetiawan (Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta)

## PROSES ADOPTSI INOVASI LOKAL TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAWASAN MINAPOLITAN DESA KOTO MESJID PROVINSI RIAU

*SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.02, April 2018, hal: 1-30.*

### Abstrak

Pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau tidak terlepas dari pesatnya adopsi inovasi lokal yang dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat Desa Koto Mesjid. Masyarakat Desa Koto Mesjid hidup dalam tingkat kemiskinan sebelum ada inovasi di bidang perikanan yang diadopsi. Penelitian ini secara komprehensif mengkaji proses adopsi inovasi lokal bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid Provinsi Riau dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah penerima inovasi (adopter) yaitu inovator, pelopor, pengikut dini, pengikut akhir dan orang terakhir yang mengadopsi inovasi (*langgard*). Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan pola adopsi inovasi lokal bidang perikanan, meliputi: 1) Fase pembuatan keputusan yang terdiri dari tahap rasa ingin tahu, tahap dorongan keluarga, tahap desakan ekonomi dan tahap janji keuntungan; 2) Fase persuasi yang terdiri dari tahap contoh keberhasilan, tahap kemudahan akses dan tahap bimbingan; 3) Fase implementasi keputusan yang terdiri dari tahap mencoba dan tahap mengadopsi; dan adopsi inovasi tersebut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Inovasi, Adopsi Inovasi dan Proses adopsi Inovasi.

## THE PROCESS OF ADOPTION LOCAL INNOVATIONS ON IMPROVING THE WELFARE OF SOCIETY IN THE AREA MINAPOLITAN VILLAGE KOTO MESJID RIAU PROVINCE

*SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.02, April 2018, page: 1-30.*

### Abstract

The development of minapolitan area in district XIII Koto Kampar Regency, Riau Province is inspired by the rapid adoption of the innovations that undertaken by the local community, especially villagers Koto Mesjid. The process adoption of the innovations have increased people welfare gradually in the village of Koto Mesjid, that was poor before. This research has been conducted to examine the adoption process innovation of local fishery that gear up community welfare. The study was designed as a qualitative research. This informants consist of innovator, early adopter, second adopter, third adopter and the last adopter. The primary and secondary data have been collected, then analyzed in qualitative analysis. The study found

that the pattern of adoption of innovation for local fishery in the area of Minapolitan village of Koto Mesjid Riau Province, includes: 1). The decision-making phase consists of curiosity, encouragement of economic promises, urging family advantages. 2). Persuasion phase consisting of examples of success, ease of access and guidance. 3) Implementation phase decisions consist of try and adopt.

**Keywords:** Innovation, Adoption Innovation and Process of Adoption Innovation.

**Dedek Roslina (Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial)**

**Ety Rahayu (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia)**

**PERAN PENDAMPING DALAM MENINGKATKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL  
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL PADA PROGRAM PELAYANAN JARAK JAUH  
DI KECAMATAN LEMBANG DAN CILILIN, KABUPATEN BANDUNG BARAT**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.02, April 2018, hal: 31-44.*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas peran-peran pendamping dalam meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas intelektual melalui program berbasis *home care* bernama Program Pelayanan Jarak Jauh (PPJJ) Tahun 2017. Pendamping tersebut merupakan kader masyarakat yang memberikan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kepada penerima pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping yang berpengalaman menangani anak-anak disabilitas mampu menjalankan berbagai peranan dalam rehabilitasi penyandang disabilitas intelektual, antara lain sebagai pemercepat perubahan dalam mengungkap permasalahan dan kebutuhan penerima pelayanan, sebagai penghubung antara penerima pelayanan dengan sumber pelayanan, sebagai asisten personal yang mendampingi penerima pelayanan dalam proses bimbingan rehabilitasi dan mendorong keterlibatan keluarga dalam pelayanan *home care*, serta pembuatan laporan. Pendamping juga mampu berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses kedukaan yang dialami keluarga. Pemberdayaan pendamping dapat terus dikembangkan untuk memperluas pelayanan sosial. Namun, peran pekerja sosial profesional tetap dibutuhkan, sehingga keduanya diharapkan bekerjasama untuk meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas intelektual.

**Kata Kunci:** pendamping, disabilitas intelektual, pelayanan di rumah, keberfungsian sosial.

**COMMUNITY WORKER ROLE IN IMPROVING SOCIAL FUNCTION OF PEOPLE WITH  
INTELLECTUAL DISABILITIES ON HOME CARE PROGRAM, STUDIES IN LEMBANG AND  
CILILIN DISTRICTS, WEST BANDUNG REGENCY**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.02, April 2018, page: 31-44.*

**Abstract**

The research discusses about community worker roles in improving social functioning of people with intellectual disabilities on home-care based rehabilitation program, Program Pelayanan Jarak Jauh (PPJJ) in 2017. Those community workers are local community cadres who provide physically, mentally, social, and vocational services to beneficiaries (people with intellectual disabilities). This study used a qualitative approach with the type of descriptive research. The result of this study shows that community workers whose experienced in dealing with children with disabilities are capable of performing their roles in the rehabilitation program, such as enabler in revealing beneficiaries problems and needs, as a broker in connecting beneficiaries with service sources, as a care giver in accompanying beneficiaries in the rehabilitation guidance process and encouraging family involvement in home care services, and as a reporter. Some community workers are also capable in becoming a facilitator in grieving process experienced by the family. The empowerment of local community cadres as the program officer can be more improved to broaden the social services. However, social



*worker roles are still needed. Both of them should work together to improve the lives of people with intellectual disabilities.*

**Keywords:** *Community worker, intellectual disability, home care, social functioning.*

**Suradi (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)**

**REHABILITASI SOSIAL BERBASIS INSTITUSI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN  
NAPZA: Studi Kasus pada Intitusi Penerima Wajib Lapor Lintas Nusa di Kota Batam**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.02, April 2018, hal: 45-61.*

**Abstrak**

Penyalahgunaan napza di Kota Batam menempati urutan keempat secara nasional. Tingginya jumlah kasus penyalahgunaan napza tidak dapat dilepaskan dengan posisi geografis Kota Batam yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Kedua negara tersebut merupakan negara transit perdagangan narkoba sebelum memasuki Indonesia. Penelitian evaluatif dengan metode deskriptif diterapkan untuk mengetahui penanganan korban penyalahgunaan napza yang dilakukan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Penelitian ini berfokus pada aspek kelembagaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai. Pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam dengan pengurus IPWL dan klien, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian, bahwa IPWL Lintas Nusa selama tiga tahun telah melakukan rehabilitasi sosial, dan sebagian besar klien dapat berintegrasi kembali dengan keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian, IPWL masih perlu meningkatkan kapasitas sumber dayanya, terutama berkenaan dengan pekerja sosial, konselor adiksi, pendanaan dan jejaring kerja bagi kesinambungan lembaga dan pelayanan.

**Kata kunci:** *penyalahgunaan NAPZA, IPWL, rehabilitasi sosial.*

**INSTITUTIONAL-BASED SOCIAL REHABILITATION FOR DRUG ABUSER: Case Study at Lintas  
Nusa Reporting Recipient Institution in Batam City**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.02, April 2018, page: 45-61.*

**Abstract**

*Drug abuse cases in Batam City has the fourth ranks in Indonesia. The big number of cases of drug abuse related the geographical position of Batam City bordering Malaysia and Singapore. Those two countries are a transit country of drug trade before entering Indonesia. Evaluative research with descriptive method is applied to know on handling of drug abuse victim that conducted by institutions for recipients are required report (IRRR). This research focuses on institutional aspects, implementation of activities and results achieved. Data collection with in-depth interview techniques with IRRR administrator's and client, observation, and documentation studies. The research results, that IRRR Lintas Nusa for three years had conducted social rehabilitation, and the result 95.5 percent of clients can reintegrate with family and society. But, IRRR still needs to improve its resources, especially with regard to social workers, addiction counselors, funding and networking for the institusion and servicess continuity.*

**Keywords:** *drug abuse, IRRR, social rehabilitation.*

**Hari Harjanto Setiawan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian  
Sosial RI)**

**PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI PERUNDUNGAN PADA PELAJAR DI KOTA  
PANGKAL PINANG**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.02, April 2018, hal: 62-78.*

**Abstrak**

Berbagai kasus perundungan yang dilakukan oleh pelajar, akhir-akhir ini banyak terjadi di Indonesia, antara di Kota Pangkalpinang Bangka Belitung. Perundungan di sekolah adalah perilaku agresif yang dilakukan

berulang-ulang oleh seorang/kelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Penelitian ini mengungkap gejala perundungan yang akan terjadi apabila terus dibiarkan. Penelitian dilakukan di tiga sekolahan yang mewakili masing-masing tingkatan yaitu SD, SMP dan SMA. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data membagikan kuesioner kepada siswa. Hasil penelitian ini mengungkap pengetahuan dan pengalaman siswa mengenai perundungan. Penyebab seorang menjadi pelaku perundungan karena secara umum, tingkah laku *perundungan* ini berawal dari masalah yang dialami oleh pelaku, baik masalah keluarga maupun dengan lingkungan yang ada disekitar kehidupannya. Hal yang menyebabkan perundungan antara lain kepribadian (individu anak), sekolah, keluarga, masyarakat dan media. Penelitian ini juga mengungkap tentang intervensi sosial yang dibutuhkan untuk mengatasi perundungan yang diharapkan dapat dikembangkan menjadi Sistem Peringatan Dini (SPD) dalam mencegah terjadinya perundungan di sekolah.

**Kata Kunci:** Perundungan, Pelajar, Sistem Peringatan Dini (SPD)

**THE EARLY WARNING SYSTEM DEVELOPMENT OF BULLIYING ON STUDENTS IN PANGKAL PINANG CITY**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.02, April 2018, page: 62-78.*

**Abstract**

*Various cases of bullying have occurred in Indonesia, among the areas is Pangkalpinang City Bangka Belitung. Bullying in school areas commonly happened by an aggressive behavior perpetrated over and over by a student / group of students who have power, against other weaker students with the aim of hurting the person. The research was conducted in three schools representing each level of SD, SMP and SMA. This research uses descriptive quantitative method with data collection method of distributing anquet to students. The results of this study is to reveal the knowledge and experience of students about harassment. The cause of a perpetrator of harassment because in general, this behavior of abuse comes from problems experienced by the perpetrator, both family problems and with the environment around his life. Things that cause harassment include personality (individual child), school, family, community and media. The study also reveals the social interventions needed to overcome the harassment that is expected to be developed into the Early Warning System (EWS) in preventing the occurrence of abuse in schools.*

**Keywords:** Bullying, Student, Early Warning System (EWS).

**Habibullah (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)**

**PELIBATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.02, April 2018, hal: 79-90.*

**Abstrak**

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan inovasi baru dari Kementerian Sosial RI, dan merupakan program prioritas nasional. Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada monitoring dan evaluasi (Monev) SLRT merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti karena selama ini pada monev program-program Kementerian Sosial RI hanya dilakukan oleh internal Kementerian Sosial RI. Penelitian untuk mengetahui pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pelaporan Monev SLRT. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaksanaan monev di lingkungan Kementerian Sosial RI. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan, namun hasilnya belum sesuai dengan rencana. Pada perencanaan Bappeda Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Monev SLRT mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data di desa/

kelurahan dan FGD di Kabupaten/Kota dan menyusun *policy brief* pelaksanaan SLRT di Kabupaten/Kota. Namun, penyusunan *policy brief* tidak dapat terlaksana karena lamanya pengolahan dan analisis data oleh tim pusat serta dukungan SDM dan pembiayaan kegiatan. Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota mempunyai muatan strategis bagi pelaksanaan SLRT apalagi jika SLRT akan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah daerah. Disarankan pelaksanaan Monev SLRT tetap melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota dengan tahapan yang lebih ringkas dan mudah dipahami dan menggunakan aplikasi yang lebih mudah digunakan; dan Kementerian Sosial dan Tim Seknas SLRT perlu mengadvokasi Bappeda Kabupaten/Kota, sehingga ketika SLRT sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Bappeda Kabupaten/Kota sudah mengetahui SLRT sejak awal.

**Kata Kunci:** *sistem layanan dan rujukan terpadu, monitoring dan evaluasi, kemiskinan, inovasi.*

#### **INVOLVEMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANING AGENCY ON MONITORING AND EVALUATION OF THE INTEGRATED SERVICE AND REFERRAL SYSTEM**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.02, April 2018, page: 79-90.*

##### **Abstract**

*The Integrated Services and Referral System (SLRT) of social protection and poverty alleviation is a new innovation of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia and it is as a national priority program. The involvement of Bappeda Regency/City on Monitoring and Evaluation (M & E ) SLRT is an interesting thing to be observed because so far in the Ministry of Social Affairs M & E program has only done by internal Ministry of Social. The research is to know the involvement of Bappeda Regency/ City in the planning, implementation, utilization and reporting stages of M & E SLRT. The benefits of this study are expected to provide learning for the implementation of M & E in the Ministry of Social. This research is as descriptive qualitative. The results of the research show that in general the involvement of Bappeda Regency/City can be implemented but the result is not in accordance with the plan. In the planning of Bappeda Regency/City as the implementer of SLRT M & E starting from the preparation stage, collecting data in the village / kelurahan and FGD in the Regency / City and preparing the SLRT implementation policy brief in Regency / City. However, the preparation of the policy brief can not be accomplished due to the length of processing and data analysis by the central team and the support of human resources and financing activities. The involvement of Bappeda Regency / City has a strategic content for the implementation of SLRT especially if SLRT will be fully implemented by local government. The recommended to: Implementation of the SLRT M & E should still involve Bappeda Regency / City with a more concise and easily understood stage by implementers and using more user-friendly applications; and The Ministry of Social Affairs and the National Secretariat of SLRT team need to advocate to involve Bappeda Regency / City in SLRT activities so that when SLRT is fully implemented by Local Government, Bappeda Regency / City already know SLRT from the beginning.*

**Keywords:** *integrated service and referral system, monitoring and evaluation, poverty, innovation.*

**Irmawan (Balai Besar Penelitian, Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial)**

#### **PEMBERDAYAAN SUKU KAILI DA'A DI KABUPATEN SIGI**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.02, April 2018, hal: 91-100.*

##### **Abstrak**

Komunitas Adat Terpecil merupakan salah satu penyandang masalah sosial, dan menjadi sasaran program pemberdayaan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Suku Kaili Da'a setelah diberdayakan, yang dilihat dari aspek permukiman, pendidikan, kesehatan, agama dan kepercayaan, sarana dan prasarana serta mata pencaharian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan panduan wawancara, observasi, pemotretan, telaah dokumen dan internet. Analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa setelah

diberdayakan terbukti ada perubahan pada permukiman, pendidikan, kesehatan, kepercayaan dan agama, sarana prasarana serta mata pecaharaan. Rekomendasi kepada Kementerian Sosial RI dapat melanjutkan dan memperluas program pemberdayaan KAT.

**Kata Kunci:** pemberdayaan, komunitas adat terpencil, suku kaili da'a.

**EMPOWERING THE TRIBE KAILI DA'A ON SIGI REGENCY**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.02, April 2018, page: 91-100.*

**Abstract**

*Isolated Community is one among social problems that stated as a target of social empowerment that held by Ministry of Social Affairs of Indonesia. This research has aimed to dig up varies of social condition of Kaili Da'a ethnic, in terms of dwelling, education, health, religi and believe, and their income generating.. Data has been collected through interview, observation, mapping, and documentary study. Data has analized qualitatively. The result of study shows that after empowerment, those community have enhanced in terms of their dwelling, education, health, religi and belief, and also in their income generation. Hence, its recommended for the Ministry of Social Affairs to replicate the program in similar community*

**Keywords:** empowering, isolated community, tribe kaili da'a.

**Paulus Koritelu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura, Ambon)**

**"HEKA HITI HEKA LEHA" SPIRIT BUDAYA PEMERSATU DI TENGAH KELANGGENGAN KONFLIK ORANG KULUR DAN ORANG PORTO KECAMATAN SAPARUA MALUKU TENGAH**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.02, April 2018, hal: 101-118.*

**Abstrak**

Konflik merupakan sebuah konsep yang menjadi simbolisasi dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi dalam bentuk *dis-asosiatif* antara individu atau antar kelompok dalam satu komunitas atau antar komunitas. Dalam paradigma konfliktual, konflik menjadi penting dalam rangka menemukan arah perubahan sosial yang dikehendaki. Konflik dapat juga dijadikan sebuah rujukan atau pencapaian berbagai tujuan kehidupan sebuah komunitas. Sekalipun begitu banyak pandangan yang menolak gagasan ini. Bahwa kelanggengan konflik yang terjadi pada sebuah komunitas tidak serta merta dapat menjadi sebuah rujukan pencapaian berbagai kepentingan komunitas. Konflik biasanya menimbulkan perpecahan dan kehancuran. Tetapi dalam penelitian ini ada spirit budaya yang menjadi kekuatan pengikat antara dua kubu yang setiap waktu berkonflik untuk tetap bisa berdamai di dalam ikatan solidaritas dan kerjasama yang harmonis. Spirit budaya tersebut adalah: **Heka Hiti heka Leha** yang mengikat dan senantiasa mempersatukan Orang Kulur dan Porto.

**Kata Kunci:** Kelanggengan konflik, Perdamaian dan Budaya Lokal.

**"HEKA HITI HEKA LEHA" AS A UNIFYING CULTURE SPIRIT IN THE MIDDLE OF CONFLICT SUSTAINABILITY BETWEEN PEOPLE OF KULUR AND PORTO IN SAPARUA CENTRAL MOLLUCAS**

*SOSIO KONSEPSIA Vol.7, No.02, April 2018, page: 101-118.*

**Abstract**

*Conflict is symbolization concept of social interaction process that occurs in the form of dis-associative between individuals, groups within a community of between communities. In the conflictual paradigm, conflict becomes important in order to find the desired direction of social change. In the specific experience, conflict can also be used as a reference or achievement of various life goals of a community. Despite many views that reject this idea. That the conflict sustainability in a community does not necessarily become a reference to the achievement of various community interests. Conflicts cause discord and destruction. This*

*study found that there is a certain cultural spirit that becomes a binding force between two stronghold to remain in peace and stay in harminious solidarity bond and cooperation. It is Heka Hiti Heka Leha, the culture spirit that binds and has always be the unifier of people of Kulur and Porto.*

**Keywords:** *Conflict sustainability, peace and Local Culture.*





**PROSES ADOPSI INOVASI LOKAL  
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI KAWASAN MINAPOLITAN DESA KOTO MESJID PROVINSI RIAU**

***THE PROCESS OF ADOPTION LOCAL INNOVATIONS ON IMPROVING THE WELFARE  
OF SOCIETY IN THE AREA MINAPOLITAN VILLAGE KOTO MESJID RIAU PROVINCE***

**Adianto**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau  
Jalan H.R. Soebrantas KM 12,5 Simpang Baru Kampus Bina Widya Panam  
Pekanbaru, Riau  
Email: adi\_perfisi@yahoo.co.id

**Muhadjir Darwin**

Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL  
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta  
Jalan Sosio Yustitia Bulaksumur Yogyakarta  
Email: d\_muhadjir@yahoo.com

**Susetiawan**

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL  
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta  
Jalan Sosio Yustitia Bulaksumur Yogyakarta  
Email: soestindah@yahoo.com

Diterima: 17 Nopember 2017; Direvisi: 3 Februari 2018; Disetujui: 5 Februari 2018

**Abstrak**

Pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau tidak terlepas dari pesatnya adopsi inovasi lokal yang dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat Desa Koto Mesjid. Masyarakat Desa Koto Mesjid hidup dalam tingkat kemiskinan sebelum ada inovasi di bidang perikanan yang diadopsi. Penelitian ini secara komprehensif mengkaji proses adopsi inovasi lokal bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid Provinsi Riau dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah penerima inovasi (adopter) yaitu inovator, pelopor, pengikut dini, pengikut akhir dan orang terakhir yang mengadopsi inovasi (*langgard*). Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan pola adopsi inovasi lokal bidang perikanan, meliputi: 1) Fase pembuatan keputusan yang terdiri dari tahap rasa ingin tahu, tahap dorongan keluarga, tahap desakan ekonomi dan tahap janji keuntungan; 2) Fase persuasi yang terdiri dari tahap contoh keberhasilan, tahap kemudahan akses dan tahap bimbingan; 3) Fase implementasi keputusan yang terdiri dari tahap mencoba dan tahap mengadopsi; dan adopsi inovasi tersebut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Inovasi, Adopsi Inovasi dan Proses adopsi Inovasi.

**Abstract**

*The development of minapolitan area in district XIII Koto Kampar Regency, Riau Province is inspired by the rapid adoption of the innovations that undertaken by the local community, especially villagers Koto Mesjid. The process adoption of the innovations have increased people welfare gradually in the village of Koto Mesjid, that was poor before. This research has been conducted to examine the adoption process innovation of local fishery that gear up community welfare. The study was designed as a qualitative research. This*

*informants consist of innovator, early adopter, second adopter, third adopter and the last adopter. The primary and secondary data have been collected, then analyzed in qualitative analysis. The study found that the pattern of adoption of innovation for local fishery in the area of Minapolitan village of Koto Mesjid Riau Province, includes: 1). The decision-making phase consists of curiosity, encouragement of economic promises, urging family advantages. 2). Persuasion phase consisting of examples of success, ease of access and guidance. 3) Implementation phase decisions consist of try and adopt.*

**Keywords:** *Innovation, Adoption Innovation and Process of Adoption Innovation.*

## PENDAHULUAN

Masyarakat Desa Koto Mesjid merupakan masyarakat transmigrasi lokal dari suatu wilayah desa yang daerahnya ditenggelamkan sebagai dampak dari pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) satu-satunya di Provinsi Riau. Efek dari pembangunan ini, masyarakat diikutsertakan dalam program transmigrasi lokal dengan kompensasi: lahan karet 2,5 Ha, rumah layak huni, halaman pekarangan 0,5 Ha dan jaminan hidup selama 2 tahun. Awal mula relokasi masyarakat di wilayah baru mendapat penolakan, dikarenakan karakteristik wilayah baru yang dataran tinggi, perbukitan, sulit air dan jauh dari aliran sungai sangat berbeda dengan karakteristik daerah lama yang dataran rendah dan dekat dengan aliran sungai. Realitas ini membuat proses relokasi yang dilakukan dalam upaya penerapan program transmigrasi lokal berjalan dengan lambat dan membutuhkan periode waktu yang cukup lama. Kepindahan masyarakat di wilayah baru sebagai masyarakat transmigrasi lokal tentunya meninggalkan mata pencaharian yang biasa dilakukan yaitu sebagai pencari ikan di sungai menjadi masyarakat yang bertani karet dan memanfaatkan jaminan hidup yang disediakan oleh pemerintah sebagai kompensasi dari program transmigrasi lokal. Namun karena pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman masyarakat sebagai petani karet rendah, membuat pengelolaan kebun karet tidak berjalan dengan lancar dan tidak menghasilkan sesuai dengan periode waktu yang ditentukan. Ketidakberhasilan masyarakat dalam mengelola kebun karet yang diberikan,

membuat masyarakat hanya memanfaatkan jaminan hidup yang diberikan oleh pemerintah dengan batas waktu selama 2 tahun. Setelah batas waktu 2 tahun berakhir dan kebun karet yang diberikan tidak dapat menghasilkan, masyarakat Desa Koto Mesjid hidup dengan ketidakpastian mata pencaharian yang menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bahkan realitas ini membuat kehidupan masyarakat Desa Koto Mesjid berada pada level kemiskinan, yang penekanannya pada tingkat pendapatan yang rendah akibat tidak memiliki sumber pendapatan yang jelas.

Keterpurukan ekonomi masyarakat di Desa Koto Mesjid, akhirnya mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah setempat dengan berusaha memberikan solusi terhadap penemuan mata pencaharian baru bagi masyarakat. Ide untuk membuat berbudidaya ikan dengan sistem kolam lahir dari masyarakat Desa Koto Mesjid, yang akhirnya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan membuat kolam ikan di sekitar pekarangan tempat tinggalnya. Setiap masyarakat Desa Koto Mesjid mendapat bantuan kolam ikan dan bibit ikan dari Pemerintah Daerah sebagai modal awal dalam berbudidaya dan menemukan mata pencaharian baru sebagai sumber ekonomi keluarga. Proses berbudidaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Koto Mesjid hampir keseluruhannya mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman serta ketidaktahuan masyarakat akan komoditi ikan yang tepat untuk dibudidaya dengan karakteristik wilayah perbukitan, sulit

air dan pH tanah rendah. Realitas ini membuat keterpurukan ekonomi masyarakat Desa Koto Mesjid semakin parah, karena belum ada solusi yang ditemukan terhadap sumber mata pencaharian baru bagi masyarakatnya.

Persoalan ini akhirnya diberikan solusi oleh Pemerintah Daerah dengan menghadirkan tenaga penyuluh sebagai *agent of change* bagi masyarakat Desa Koto Mesjid, dalam upaya memberikan solusi terhadap permasalahan berbudidaya ikan dengan karakteristik wilayah perbukitan, sulit air dan pH tanah rendah. Hasil eksperimen yang dilakukan tenaga penyuluh merekomendasikan bahwa komoditi ikan yang tepat untuk dibudidaya dengan karakteristik wilayah perbukitan, sulit air dan pH tanah rendah adalah ikan patin. Hasil temuan yang direkomendasikan oleh tenaga penyuluh atau tidak langsung diterima oleh masyarakat Desa Koto Mesjid begitu saja. Sebab sebelumnya dalam praktek berbudidaya yang dilakukan, masyarakat Desa Koto Mesjid sudah pernah berbudidaya komoditi ikan patin tetapi gagal. Kegagalan masyarakat Desa Koto Mesjid dalam berbudidaya komoditi ikan patin sebelumnya, membuat masyarakat enggan menerima rekomendasi temuan yang diusulkan oleh tenaga penyuluh. Realitas ini membuat masyarakat Desa Koto Mesjid terus bertahan hidup dengan keterpurukan ekonomi yang dialaminya. Hingga akhirnya, tenaga penyuluh mengundurkan diri sebagai tenaga penyuluh dan melakukan proses hubungan sosial dengan masyarakat Desa Koto Mesjid untuk memperoleh lahan dalam upaya membuktikan rekomendasi temuan yang diusulkan.

Pembuktian praktek berbudidaya komoditi ikan patin yang dilakukan oleh tenaga penyuluh atau inovator memperoleh hasil yang memuaskan. Artinya pengelolaan budidaya komoditi ikan patin yang dilakukan mampu menghasilkan panen yang memuaskan.

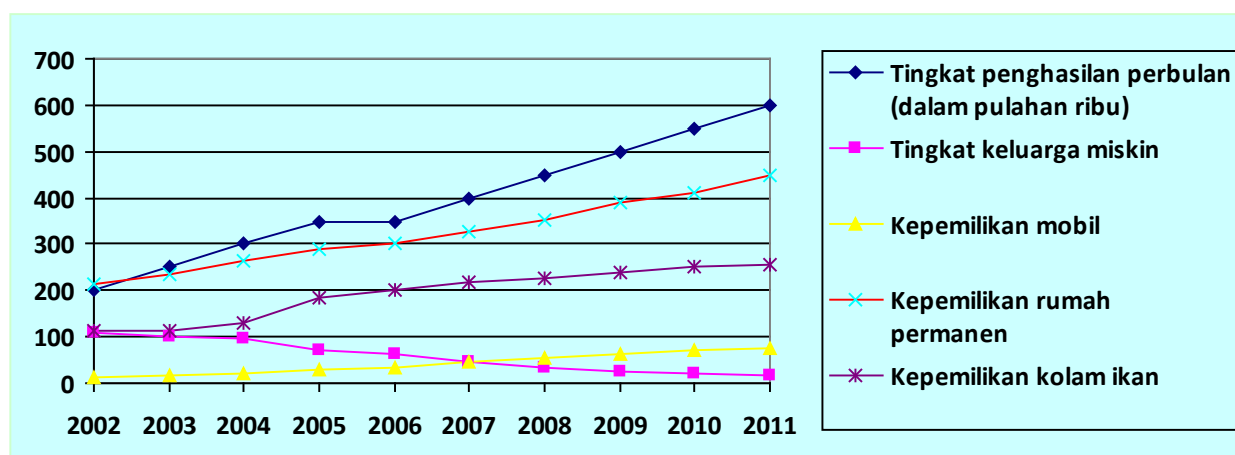
Keberhasilan tenaga penyuluh atau inovator tidak terlepas dari kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya dalam berbudidaya dengan pola modren yang sangat memperhitungkan secara teknis unsur-unsur dalam berbudidaya ikan dengan sistem kolam. Informasi keberhasilan tenaga penyuluh atau inovator mulai terdengar oleh masyarakat Desa Koto Mesjid dan menjadi perhatian untuk dicari tahu penyebab keberhasilannya oleh masyarakat. Awalnya masyarakat yang datang untuk mencari informasi kepada *agent of change* atau inovator hanya datang dari kalangan keluarga saja. Namun karena praktek berbudidaya komoditi ikan patin juga berhasil dilakukan oleh beberapa masyarakat dan memberikan janji keuntungan, membuat secara berangsur-angsur masyarakat di Desa Koto Mesjid mengadopsi inovasi berbudidaya komoditi ikan patin sebagai solusi terhadap penemuan mata pencaharian baru dan sumber ekonomi keluarga.

Proses adopsi inovasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Koto Mesjid tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan tingkat umur masyarakat. Karena rata-rata masyarakat Desa Koto Mesjid yang mengadopsi inovasi berpendidikan rendah dan tidak memperhatikan tingkat umur dalam mengadopsinya. Kemampuan masyarakat Desa Koto Mesjid dalam mengadopsi inovasi di bidang perikanan yaitu budidaya komoditi ikan patin secara bertahap memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat di Desa Koto Mesjid memberikan gambaran terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Trend* peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Koto Mesjid ditandai dengan kepemilikan rumah permanen yang bertambah, tingkat kemiskinan yang berkurang, naiknya tingkat

pendapatan masyarakat, bertambahnya aset pribadi dan bertambahnya kepemilikan usaha di bidang perikanan. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Tabel 1.** Potret Trand Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau

| No. | Indikator          | Tahun       |             |            |            |            |            |           |           |           |           | Trand     | Ket   |
|-----|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|     |                    | 2002        | 2003        | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |           |       |
| 1.  | Jumlah penduduk    | 1584        | 1602        | 1623       | 1641       | 1652       | 1669       | 1685      | 1696      | 1712      | 1732      | Meningkat | Lazim |
| 2.  | Jumlah keluarga    | 335         | 376         | 392        | 402        | 410        | 420        | 436       | 447       | 469       | 473       | Meningkat | Lazim |
| 3.  | Keluarga miskin    | 110<br>32 % | 102<br>27 % | 95<br>24 % | 72<br>17 % | 61<br>15 % | 47<br>11 % | 34<br>8 % | 27<br>6 % | 22<br>5 % | 16<br>3 % | Menurun   | Baik  |
| 4.  | Pemilik kolam ikan | 112         | 114         | 132        | 186        | 201        | 218        | 228       | 240       | 252       | 257       | Meningkat | Baik  |
| 5.  | Luas kolam (Ha)    | 19          | 20          | 22         | 24         | 30         | 32         | 41        | 45        | 48        | 52        | Meningkat | Baik  |
| 6.  | Jumlah rumah       | 355         | 366         | 384        | 398        | 403        | 418        | 431       | 444       | 457       | 468       | Meningkat | Baik  |
|     | Papan              | 95          | 91          | 83         | 71         | 65         | 60         | 51        | 31        | 28        | 9         | Menurun   | Baik  |
|     | Semi permanen      | 46          | 40          | 36         | 36         | 35         | 32         | 29        | 24        | 17        | 11        | Menurun   | Baik  |
|     | Permanen           | 214         | 235         | 265        | 291        | 303        | 326        | 351       | 389       | 412       | 448       | Meningkat | Baik  |
| 7.  | Jumlah mobil       | 14          | 15          | 20         | 28         | 35         | 47         | 54        | 62        | 70        | 76        | Meningkat | baik  |



Sumber: Desa Koto Mesjid, 2014

Keberhasilan adopsi inovasi yang dilakukan masyarakat di Desa Koto Mesjid mendorong Pemerintah Daerah untuk memfasilitasinya dengan kebijakan daerah dalam upaya mengembangkan wilayah Desa Koto Mesjid sebagai daerah sentral perikanan air tawar di daerahnya. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Desa Koto Mesjid sebagai sentral perikanan air tawar mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Per.12/

Men/2010 tentang Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Kep.32/Men/2010 yang direvisi menjadi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 35/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Dukungan kebijakan yang dilakukan membuat Desa Koto Mesjid menjadi salah satu daerah *cluster* bagi pengembangan bidang perikanan. Penetapan wilayah Desa Koto Mesjid menjadi *cluster* Kawasan Minapolitan semakin memberikan



efek positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sebab dengan adanya penetapan Kawasan Minapolitan ini, Desa Koto Mesjid diberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk mengembangkan bahan baku komoditi ikan patin menjadi produk. Oleh karena itu, permasalahan dalam riset ini adalah bagaimana proses adopsi inovasi lokal bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid yang berhasil memberikan konsekuensi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat ?

Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Amanah ini memberikan pemahaman ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritual nya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup. Mosher (1987) mengatakan hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah.

Mengacu pada Todaro dan Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan

perlindungan. *Kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. *Ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Realitas ini menggambarkan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan banyak indikator yang secara umumnya dapat dilihat dari kondisi rumah, sumber penerangan, tingkat pendidikan, aset rumah tangga yang dimiliki, tingkat pendapatan, kemudahan akses kesehatan dan akses modal.

Dalam literatur modern, inovasi sendiri memiliki pengertian yang sangat beragam serta banyak perspektif yang mencoba memaknainya. Salah satu pengertian menyebutkan bahwa inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses menciptakan dan menawarkan jasa atau barang baik yang sifatnya baru, lebih baik atau lebih murah dibandingkan dengan yang tersedia sebelumnya. Pengertian ini menekankan pemahaman inovasi sebagai sebuah kegiatan (proses) penemuan (*invention*). Sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Menurut Rogers (2003), salah satu penulis buku inovasi terkemuka, menjelaskan bahwa: “*an innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by individual or other unit of adopter*”. Jadi inovasi adalah sebuah

ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Inovasi dapat merupakan sesuatu yang berwujud (*tangible*) maupun sesuatu yang tidak berwujud (*intangible*). Memaknai inovasi sebagai sesuatu yang hanya identik dengan teknologi saja akan jadi menyempitkan konteks inovasi yang sebenarnya.

Pemikir lain yang mencoba memberikan limitasi dalam memahami inovasi, Halvorsen et. al (2005) yang membatasi pengertian inovasi yaitu: *“restricted themselves to novel products and processes finding a commercial application in the private sector”*. Dalam pembatasan ini menekankan 2 (dua) hal penting dari inovasi, yaitu: *Pertama*, sifat kebaruan (*novelty*) dari sebuah produk. Dengan kata lain inovasi hanya berhubungan dengan produk-produk yang bersifat baru. *Kedua*, inovasi berhubungan dengan proses pencarian aplikasi komersial di sektor bisnis.

Penulis lain yaitu Albury (2003) secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai *“new ideas that work”*. Ini berarti bahwa inovasi adalah berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya. Selanjutnya Albury secara rinci menjelaskan bahwa: *“successful innovation is the creation and implementation of new processes, products, services, and methods of delivery which result in significant improvements in outcomes efficiency, effectiveness, or quality”*. Ini menjelaskan bahwa ciri dari inovasi yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektivitas maupun kualitas.

Kesimpulan ini menjelaskan bahwa inovasi dapat hadir dalam wujud pengetahuan, cara, objek, teknologi dan atau penemuan baru. Oleh karenanya sifat mendasar dari sebuah inovasi adalah sifat kebaruan (*novelty*). Untuk itu sebuah produk (barang atau jasa) dapat dikatakan sebagai produk inovatif apabila memang dipandang baru oleh pasarnya (publik). Namun demikian, sifat kebaruan ini biasanya hanya berlaku dalam konteks limitasi geografis yang artinya sesuatu yang baru di satu tempat belum tentu baru di tempat yang lain.

Keputusan adopsi inovasi menurut Rogers (1995) adalah proses dimana individu atau unit adopsi yang disebut adopter menempuh tahapan-tahapan sejak mengetahui pertama sekali inovasi diperkenalkan, diikuti implementasi ide-ide baru dan pemastian keputusan menerima atau menolak inovasi. Disisi lain, individu atau kelompok tidak begitu saja akan menerima ide-ide baru yang masih asing bagi mereka sehingga dibutuhkan suatu proses keputusan untuk mengadopsi inovasi. Selanjutnya Slamet (1978) memaparkan proses adopsi adalah proses yang terjadi sejak pertama sekali seseorang tersebut mengadopsi (menerima, menerapkan, menggunakan hal baru tersebut). Penerimaan atau penolakan suatu inovasi ialah keputusan yang dibuat oleh seseorang. Untuk mengadopsi suatu inovasi memerlukan jangka waktu tertentu, dari mulai seseorang mengetahui sesuatu yang baru hingga terjadi adopsi.

Rogers dan Shoemaker (1981) memberikan definisi tentang proses pengambilan keputusan untuk melakukan adopsi inovasi adalah sebagai berikut: *“the innovation decision process is the mental process through which an individual passes from first knowledge of an innovation to a decision to adopt or reject and to confirmation of this decision”*. Definisi ini menjelaskan bahwa terdapat elemen penting yang perlu

diperhatikan dalam adopsi inovasi, yaitu: *Pertama*, adanya sikap mental untuk melakukan adopsi inovasi. *Kedua*, adanya konfirmasi dari keputusan yang telah diambil. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan untuk melakukan adopsi inovasi sangat diperlukan adanya komitmen dari adopter dan perlu dijaga konsistensinya. Sebab hal ini perlu didasarkan atas kemampuan yang dimiliki oleh calon adopter dalam rangka proses adopsi inovasi.

Rogers dan Shoemakers (1981) dan Rogers (1983) mengemukakan penerimaan atau penolakan suatu inovasi adalah keputusan yang dibuat oleh seseorang. Apabila seseorang menerima suatu inovasi maka ia mulai menggunakan ide tersebut dalam kehidupannya dan menggantikan penggunaan ide-ide lama. Keputusan dalam menerima suatu ide baru akan melibatkan individu secara aktif untuk memilih apakah menerima atau menolak yang diwujudkan dalam perbuatan nyata. Selanjutnya individu melakukan konfirmasi atau pemantapan untuk memperkuat keputusan yang telah diambilnya. Keputusan seseorang untuk menerima atau menolak inovasi bukanlah tindakan yang sekali jadi, melainkan lebih menyerupai suatu proses yang terdiri dari serangkaian tindakan dalam jangka waktu tertentu. Ada dua model yang biasa digunakan untuk menjelaskan proses keputusan adopsi secara opsional, yaitu: (Siti Fatonah dan Subhan Afifi, 2008)

#### a) Model klasik (*classical model*)

Keputusan seseorang untuk menerima atau menolak inovasi bukanlah tindakan yang sekali jadi, melainkan lebih menyerupai suatu proses yang terdiri dari serangkaian tindakan dalam jangka waktu tertentu. Pandangan tradisional proses keputusan inovasi disebut dengan "*proses adopsi*", yang menurut ahli sosiologi pedesaan memiliki beberapa tahapan dalam

prosesnya: (Lestari, 2009)

#### 1) Tahap kesadaran

- Pengaruh faktor pribadinya terjadi dengan melakukan kontak dengan sumber-sumber informasi diluar masyarakatnya, kontak dengan individu dan kelompok dalam masyarakat.
- Pengaruh faktor lingkungannya terjadi dengan tersedianya media komunikasi, adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat, bahasa dan kebudayaan.

#### 2) Tahap minat

- Pengaruh faktor pribadinya terjadi karena tingkat kebutuhan, kontak dengan sumber-sumber informasi dan keaktifan mencari sumber informasi.
- Pengaruh faktor lingkungannya terjadi karena terdapat sumber-sumber informasi yang mendetail dan dorongan dari masyarakat.

#### 3) Tahap penilaian

- Pengaruh faktor pribadinya terjadi karena adanya pengetahuan tentang keuntungan relative dari praktek yang bersangkutan dan tujuan dari usaha yang akan digeluti.
- Pengaruh faktor lingkungan terjadi karena adanya penerangan atau penjelasan tentang keuntungan relative, pengalaman, tipe inovasi dan derajat komersialisasi.

#### 4) Tahap mencoba

- Pengaruh faktor pribadinya terjadi karena ketrampilan spesifik, kepuasan pada cara-cara baru dan keberanian dalam mengambil resiko.
- Pengaruh faktor lingkungannya terjadi karena adanya penerangan

atau penjelasan tentang cara-cara praktek spesifik, faktor alam dan faktor harga.

#### 5) Tahap adopsi

- Pengaruh faktor pribadinya terjadi karena kepuasan pada pengalaman pertama dan kemampuan mengelola usaha dengan cara baru.
- Pengaruh faktor lingkungannya terjadi karena adanya analisa keberhasilan/kegagalan dan tujuan/minat keluarga.

#### b) Model Rogers and Shoemaker

Proses pengambilan keputusan inovasi adalah proses mental dimana seseorang/individu berlalu dari pengetahuan pertama mengenai suatu inovasi dengan membentuk suatu sikap terhadap inovasi, sampai memutuskan untuk menolak atau menerima, melaksanakan ide-ide baru dan mengukuhkan terhadap keputusan adopsi inovasi. Dari pengalaman di lapangan ternyata proses adopsi tidak berhenti segera setelah suatu inovasi diterima atau ditolak. Kondisi ini akan berubah lagi sebagai akibat dari pengaruh lingkungan penerima adopsi. Oleh sebab itu, keputusan adopsi inovasi terdiri dari:

##### 1) Tahap pengetahuan

Tahap pengetahuan yakni seseorang belum memiliki informasi mengenai inovasi baru. Untuk itu informasi mengenai inovasi tersebut harus disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, bisa melalui media elektronik, media cetak, maupun komunikasi interpersonal diantara masyarakat. Tahapan ini juga dipengaruhi oleh beberapa karakteristik dalam pengambilan keputusan, yaitu

karakteristik sosial-ekonomi, nilai-nilai pribadi dan pola komunikasi.

##### 2) Tahap persuasi

Tahap persuasi yakni individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi/detail mengenai inovasi. Tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna. Inovasi yang dimaksud berkaitan dengan karakteristik inovasi itu sendiri, seperti: kelebihan inovasi, tingkat keserasian, kompleksitas, dapat dicoba dan dapat dilihat.

##### 3) Tahap pengambilan keputusan

Tahap pengambilan keputusan yakni individu mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan/kerugian dari menggunakan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi.

##### 4) Tahap implementasi

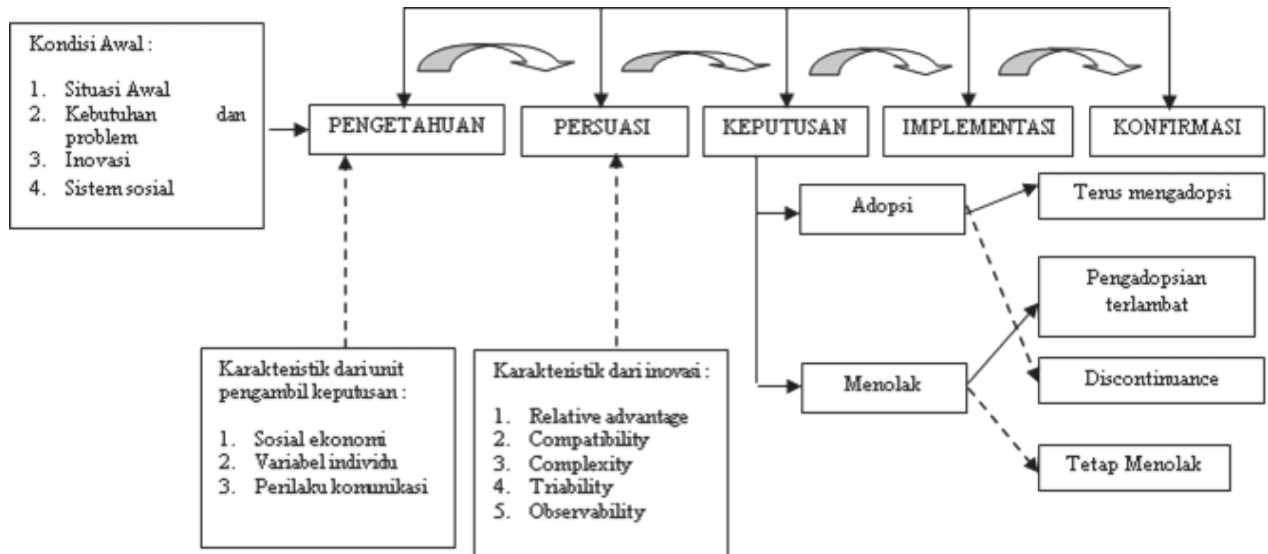
Tahap implementasi yakni mempekerjakan individu untuk inovasi yang berbeda-beda tergantung pada situasi. Selama tahap ini individu menentukan kegunaan dari inovasi dan dapat mencari informasi lebih lanjut tentang hal itu.

##### 5) Tahap konfirmasi

Tahap konfirmasi yakni seseorang kemudian akan mencari pembenaran atas keputusan mereka. Tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian mengubah keputusan yang tadinya menolak jadi menerima inovasi setelah melakukan evaluasi.

Proses pengambilan keputusan adopsi inovasi ini dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1. Model Proses Pengambilan Keputusan Adopsi Inovasi secara Opsional**



Sumber: Rogers dan Shoemaker dalam Hanafi, 1981

Model diatas menggambarkan tentang variabel yang berpengaruh terhadap tingkat adopsi suatu inovasi serta tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi yang dilakukan oleh individu. Proses adopsi inovasi pada model ini menekankan pada tahap pengetahuan dan tahap persuasi yang menjadi titik penting bagi setiap individu untuk memutuskan menerima atau menolak suatu inovasi. Karena dalam tahap pengetahuan, individu akan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, karakteristik individu dan perilaku komunikasi yang dikembangkan. Sedangkan dalam tahap persuasi, individu akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik inovasi yang meliputi keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba dan kemudahan diamati.

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan dengan desain kualitatif, yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Informan penelitian ini adalah: penerima inovasi (adopter) yaitu:

1. Inovator (*innovators*) yaitu petualang yang gemar sekali mencoba gagasan-gagasan baru. Minat ini seperti mendorong seorang inovator untuk mencari hubungan dengan pihak lain diluar dari sistem. Inovator harus memiliki kemampuan daya fikir yang cerdas untuk dapat menerapkan dan memahami pengetahuan tentang inovasi. Tidak jarang juga seorang inovator harus memiliki sumber keuangan yang kuat untuk selalu mencoba berbagai inovasi yang dipelajarinya. Dalam penelitian ini inovator merupakan individu yang pertama kali mempraktekkan inovasi yang ditemukan dalam bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid. Dimana yang menjadi inovator adalah pembudidaya ikan patin di Desa Koto Mesjid yang mulai berbudidaya dari tahun 1996 – 2000.
2. Pelopor (*early adopter*) yaitu seorang pelopor lebih berorientasi berada didalam sistem, dimana biasanya pelopor akan meneliti terlebih dahulu suatu inovasi sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Kelompok adopter ini sering berasal dari pemuka pendapat, biasanya anggota sistem sosial lainnya akan mencari mereka untuk meminta pendapat dan penjelasan



mengenai inovasi yang dilakukan dan pihak agen pembaharu akan berkerjasama dalam penyebaran inovasi untuk mempercepat proses difusi. Dalam penelitian ini pengguna awal merupakan individu yang pertama kali mengikuti inovator dalam menerapkan inovasi yang ditemukan dalam bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid. Dimana yang menjadi pengguna awal adalah pembudidaya ikan patin di Desa Koto Mesjid yang mulai berbudidaya dari tahun 2001 – 2003.

3. Pengikut dini (*early majority*) yaitu penerima ide-ide baru hanya beberapa saat setelah rata-rata anggota sistem sosial, ia akan banyak berinteraksi dengan anggota sistem lainnya. Sebelum menerima inovasi pengikut dini akan mempertimbangkan berulang kali akan menerima atau menolak inovasi. Sehingga dalam prosesnya, pengikut dini sangat penuh pertimbangan dalam pengadopsian inovasi. Dalam penelitian ini pengikut awal merupakan individu yang penerima inovasi setelah rata-rata anggota sistem sosial mulai mengikuti menerapkan inovasi yang ditemukan dalam bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid. Dimana yang menjadi pengikut awal adalah pembudidaya ikan patin di Desa Koto Mesjid yang mulai berbudidaya dari tahun 2004 – 2008.
4. Pengikut akhir (*late majority*) yaitu golongan pengikut terakhir mengadopsi ide baru setelah rata-rata anggota sistem sosial menerima inovasi. Pengadopsian terjadi mungkin karena kepentingan ekonomi atau tekanan sosial. setiap inovasi yang mereka dekati dengan sikap skeptis/curiga dan hati-hati, dimana dalam kelompok ini biasanya tidak mau mengadopsi inovasi sebelum sebagian besar anggota sistem sosial menerimanya. Kelompok ini akan menerima inovasi jika norma-norma sistem jelas-jelas menerima inovasi atau mereka dibujuk dan disadarkan tentang kegunaan

inovasi. Sehingga kelompok ini sangat membutuhkan dorongan atau tekanan-tekanan dari anggota-anggota sistem sosial lainnya. Dalam penelitian ini pengikut akhir merupakan individu yang penerima inovasi setelah rata-rata anggota sistem sosial mulai mengikuti menerapkan inovasi yang ditemukan dalam bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid. Dimana yang menjadi pengikut akhir adalah pembudidaya ikan patin di Desa Koto Mesjid yang mulai berbudidaya dari tahun 2009 – 2011.

5. Orang terakhir mengadopsi inovasi (*langgard*) yaitu orang yang paling akhir mengadopsi suatu inovasi, dikarenakan kesempitan pandangan dan wawasan yang mereka miliki. Kelompok ini selalu memutuskan untuk mengikuti suatu inovasi berdasarkan pengalaman masa lalunya dan mereka sangat memegang nilai-nilai tradisionalnya. Ketika kelompok ini mulai mengadopsi inovasi, mereka sudah jauh tertinggal dari anggota sistem sosial lainnya yang lebih dahulu menerima inovasi. Ketidاكلancaran kelompok ini menerima inovasi disebabkan oleh ketidakmampuan mereka memahami inovasi tersebut. Dalam penelitian ini *langgard* (kolot) merupakan individu yang paling akhir menerima inovasi karena rasa takut gagal, ketiadaan modal dan kondisi geografis wilayah yang tidak mendukung untuk mengikuti menerapkan inovasi yang ditemukan dalam bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid. Dimana yang menjadi *langgard* (kolot) adalah pembudidaya ikan patin di Desa Koto Mesjid yang mulai berbudidaya dari tahun 2012 – 2014.

Data primer didapatkan di lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui dokumentasi yang sudah tersedia ataupun yang diperoleh dari media cetak atau *website*. Instrumen untuk mendapatkan data primer digunakan

pedoman wawancara yang disusun dalam rangka menggali informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai penelitian studi kasus, dimana data dikumpulkan dengan mengungkapkan fenomena-fenomena yang menjadi fokus penelitian. Maka penelitian ini juga memperkaya data dengan triangulasi sumber data yang dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa sumber data yaitu wawancara mendalam, analisis data sekunder, penelusuran *website* dan penelusuran berita pada media cetak atas topik yang relevan. Kemudian analisis data penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Keputusan untuk mengadopsi inovasi dari setiap anggota sistem sosial dapat dilakukan secara bersama-sama, individual dan otoritas. Oleh karenanya setiap anggota sistem sosial memiliki hak masing-masing untuk memutuskan menerima atau menolak mengadopsi inovasi yang dikenalkan. Adopter yang berada di Desa Koto Mesjid, umumnya melakukan keputusan mengadopsi inovasi didorong oleh keputusan secara individual yang bersifat opsional. Dimana keputusan opsional merupakan keputusan yang dibuat oleh seseorang terlepas dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh anggota sistem. Sehingga proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh adopter merupakan keinginan dari adopter itu sendiri dan bukan karena adanya pengaruh dari pihak-pihak lain. Keputusan adopter untuk menerima atau menolak inovasi bukanlah tindakan yang sekali jadi, melainkan lebih menyerupai suatu proses yang terdiri dari serangkaian tindakan dalam jangka waktu tertentu. Adopter disini adalah setiap pembudidaya ikan patin yang ikut mengadopsi inovasi lokal yang dikenalkan berdasarkan tingkatannya. Rogers (2003) mengkategorikan adopter berdasarkan tingkat keinovatifannya,

yaitu: inovator, *early adopter*, *early majority*, *late majority* dan kolot/*laggards*. Oleh karenanya keputusan adopter untuk menerima inovasi lokal yang dikenalkan menjadi suatu keputusan yang datang dalam diri pembudidaya itu sendiri. Sehingga dalam membuat keputusan mengadopsi inovasi lokal di Desa Koto Mesjid ada tingkatan adopternya. Bentuk keputusan yang dilakukan oleh adopter dalam mengadopsi inovasi lokal merupakan suatu proses atau pola dari setiap tingkatan adopter. Oleh karena itu, untuk mengetahui pola adopsi inovasi lokal bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid dilakukan wawancara berdasarkan karakteristik adopter berdasarkan tingkat keinovatifannya, yaitu:

### 1. *Innovators* (Inovator)

Inovator dalam penelitian ini merupakan individu yang pertama kali memberikan ide dalam berbudidaya komoditi ikan patin di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid. Dimana yang menjadi inovator adalah pembudidaya ikan patin di Desa Koto Mesjid yang mulai berbudidaya dari tahun 1994 – 2000. Maka untuk mengetahui pola adopsi inovasi lokal yang dilakukan inovator, setelah hasil temuan dipraktekkan dapat dilihat dari tanggapan SH (informan dari kelompok inovator dan merupakan penyuluh yang berubah menjadi inovator) sebagai berikut:

*“Budidaya ikan patin pada dasarnya sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Koto Mesjid sebelumnya, dengan pola tradisional. Namun pola seperti ini banyak mengakibatkan kegagalan dalam berbudidaya ikan patin. Sehingga pada waktu awal inovasi ditemukan bahwa dengan wilayah Desa Koto Mesjid yang berkarakteristik wilayah perbukitan, sulit air, mengandalkan air tadah hujan dan daya resap air ke tanah rendah, komoditi ikan*

yang cocok untuk dibudidaya adalah ikan patin, faktanya ditolak oleh masyarakat. Karena sebelumnya beberapa masyarakat sudah mencoba berbudidaya ikan patin tetapi tidak berhasil. Kami sebagai penyuluh yang menemukan komoditi patin yang cocok untuk diwilayah itu, mencoba sendiri mempraktekkan hasil temuan itu dan berhasil. Kabar keberhasilan ini mulai didengar oleh masyarakat dan mendorong beberapa masyarakat untuk mencari tahu sendiri penyebab keberhasilannya. Rasa ingin tahu dari dalam diri masyarakat disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sudah tidak membaik. Keingintahuan masyarakat dan dorongan menemukan mata pencaharian baru sebagai sumber ekonomi keluarga membuat masyarakat memutuskan untuk mengadopsi inovasi lokal dalam berbudidaya ikan patin". (Wawancara, 5 April 2016)

Pendapat ini, didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh HB (informan dari kelompok inovator dan merupakan penyuluh yang berubah menjadi inovator) sebagai berikut:

"Keinginan masyarakat untuk mengikuti budidaya ikan patin muncul setelah adanya keberhasilan dalam mempraktekannya. Rasa ingin tahu masyarakat ini didorong oleh rasa penasaran yang menyebabkan keberhasilan berbudidaya ikan patin. Karena sebelumnya masyarakat juga sudah mencoba berbudidaya, tetapi tidak berhasil. Keingintahuan masyarakat didorong oleh kemauan sendiri untuk mempelajari berbudidaya ikan patin yang berhasil, sehingga nantinya dapat menjadi solusi terhadap masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Apalagi untuk berbudidaya ikan patin, masyarakat sudah memiliki lahannya dan modalnya juga tidak terlalu besar untuk mencobanya". (Wawancara, 6 April 2016)

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh WT dan UP (informan dari kelompok inovator dan merupakan orang pertama yang berani mencoba berbudidaya) sebagai berikut:

"Keputusan kami mengadopsi budidaya ikan patin yang sudah berhasil dilakukan karena desakan ekonomi dan rasa ingin tahu kenapa bisa berhasil dilakukan oleh penemunya. Sebab sebelumnya kami sudah mencoba berbudidaya ikan patin tetapi gagal. Kami mencari tahu sendiri informasi dan pengetahuan tentang keberhasilan berbudidaya ikan patin langsung dari penemunya. Penemunya juga dengan jelas memberikan informasi untuk diketahui kepada kami dan siap mengajarkan berbudidaya ikan patin yang benar. Kesalahan kami berbudidaya selama ini ternyata tidak memperhitungkan luas kolam dengan jumlah komoditi yang dimasukkan. Faktor itulah yang menyebabkan kami gagal berbudidaya ikan patin. Karena itu penemunya mau mengajarkan secara sukarela, maka kami pun mencoba untuk berbudidaya ikan patin". (Wawancara, 8 April 2016)

Pernyataan dan pendapat diatas menjelaskan bahwa dorongan inovator untuk mengadopsi inovasi lokal bidang perikanan yaitu budidaya ikan patin disebabkan oleh keinginan sendiri dan desakan ekonomi yang dialami. Keinginan sendiri muncul disebabkan oleh rasa ingin tahu masyarakat terhadap praktek budidaya ikan patin yang berhasil dilakukan oleh penemunya. Karena sebelum munculnya inovasi tentang berbudidaya ikan dengan komoditi ikan patin, masyarakat terlebih dahulu sudah mencobanya untuk berbudidaya dengan komoditi ikan patin tetapi hasilnya gagal. Rasa penasaran masyarakat akan keberhasilan penemunya

dalam mempraktekkan budidaya ikan patin, membuat masyarakat ingin mencari tahu informasinya sendiri dan mempelajarinya supaya bisa berbudidaya ikan dengan komoditi ikan patin dan berhasil. Proses mencari tahu dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa ada dorongan dari pihak lain, disebabkan oleh rasa penasaran yang ada pada diri masyarakat akan keberhasilan pihak lain dalam mempraktekkan budidaya ikan patin. Pencarian informasi dan pengetahuan dilakukan oleh masyarakat dengan langsung bertemu kepada penemunya. Masyarakat bertanya secara teknis bagaimana cara berbudidaya ikan patin yang berhasil dan mengapa sebelumnya budidaya ini sudah dicoba dan tidak berhasil. Pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat juga secara teknis dijelaskan oleh penemunya, bahwa dalam berbudidaya ikan patin dengan kondisi wilayah geografis perbukitan, sulit air, mengandalkan air tadah hujan dan daya serap air yang rendah secara teknis harus memperhatikan luas kolam ikan yang akan digunakan untuk berbudidaya dan jumlah ikan yang dimasukkan untuk dibudidaya. Karena secara teknis luas kolam yang akan dijadikan areal budidaya akan memberikan pengaruh kepada perkembangan ikan yang dimasukkan untuk dibudidaya. Apabila luas kolam budidayanya kecil dan ikan yang dimasukkan untuk dibudidaya terlalu banyak, maka ikan yang dibudidaya tidak dapat berkembang dengan baik dan banyak menyebabkan kematian ikan. Maka secara teknis ada perhitungan matematis dalam berbudidaya ikan patin dengan memperhitungkan luas kolam yang dimiliki dan banyaknya bibit ikan yang akan dibudidayakan. Informasi dan pengetahuan ini dijelaskan oleh penemunya untuk dipahami oleh masyarakat yang ingin berbudidaya ikan patin. Bahkan penemunya

juga siap memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat untuk memulai berbudidaya ikan patin yang benar dan bisa memberikan peluang untuk berhasil dilakukan.

Kemudian desakan ekonomi yang dialami oleh masyarakat juga menjadi sesuatu yang mendorong masyarakat untuk ingin mengetahui keberhasilan budidaya ikan patin yang ditemukan. Karena pada waktu budidaya ikan patin berhasil dilakukan oleh penemunya, kondisi ekonomi masyarakat di Desa Koto Mesjid berada pada level rendah. Sebab sumber ekonomi yang dibangun oleh masyarakat dari hasil kompensasi transmigrasi lokal berupa kebun karet belum dapat dimanfaatkan hasilnya sebagai ujung tombak ekonomi masyarakat. Oleh karenanya setelah jaminan hidup yang diberikan oleh pemerintah sebagai kompensasi dari transmigrasi lokal habis, masyarakat mulai mencari sumber ekonomi baru untuk bisa mempertahankan kehidupannya di Desa Koto Mesjid sebagai wilayah tempat tinggalnya yang baru. Awal pencarian masyarakat terhadap sumber ekonomi baru kembali kepada kearifan lokalnya, yaitu sebagai pencari ikan dan sungai. Walaupun letak sungai yang ada cukup jauh dari wilayah desa tempat tinggalnya yang berada di daerah perbukitan. Proses pencarian sumber ekonomi baru sebagai pencari ikan di sungai ternyata tidak memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Fakta ini membuat masyarakat di Desa Koto Mesjid yang hanya mengandalkan sisa jaminan hidup dan tidak memiliki sumber ekonomi yang lain, hidup pada level miskin. Kondisi ini akhirnya mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kampar,



melalui program dari Dinas Perikanan dan Kelautan dengan membangun kolam ikan bagi masyarakat yang ada di Desa Koto Mesjid. Artinya Pemerintah Daerah menginginkan masyarakat di Desa Koto Mesjid mulai berbudidaya ikan dengan sistem kolam sebagai sumber ekonominya yang baru. Karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman masyarakat akan berbudidaya ikan dengan sistem kolam pada kondisi geografis perbukitan, sulit air, pH tanah rendah dan mengandalkan air tadah hujan menyebabkan kegagalan dalam berbudidaya. Apalagi dalam proses berbudidaya ikan dengan sistem kolam masyarakat sudah berkali-kali mengganti komoditi ikan yang dibudidayakan, tetapi belum menemukan keberhasilan dalam berbudidaya. Faktor penyebab salah satunya karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam berbudidaya ikan dengan sistem kolam, karena selama ini pengetahuan masyarakat hanya ada pada pola budidaya ikan di sungai yang banyak air dan dengan sistem kerambah. Realitas inilah yang akhirnya membuat Pemerintah Daerah mengirim tenaga penyuluh bagi masyarakat di Desa Koto Mesjid untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang berbudidaya ikan dengan sistem kolam. Sehingga tugas awal dari penyuluh yang didatangkan adalah untuk mengenalkan pembibitan ikan, pembuatan pakan ikan dan pengelolaan budidaya dengan sistem kolam.

Rasa ingin tahu yang muncul dari dalam diri sendiri dan desakan ekonomi menjadi stimulus dasar bagi beberapa masyarakat untuk memutuskan mencoba berbudidaya dengan sistem kolam dan komoditi ikan patin. Keputusan masyarakat mencoba berbudidaya juga dilandasi oleh sudah

adanya lahan yang bisa diberdayakan untuk berbudidaya dan kekuatan *financial* yang cukup untuk mencobanya. Sebab pada waktu itu, untuk berbudidaya ikan patin bibit ikannya masih beli dari daerah lain dan pakan yang digunakan juga masih beli dari daerah lain, sehingga *cost* yang dikeluarkan cukup besar. Kondisi ini membuat masyarakat yang memiliki modal yang bisa memenuhi kriteria itu saja, yang dapat mencoba untuk memulai berbudidaya ikan patin sebagai salah satu solusi dari pencarian sumber ekonomi baru. Konsekuensi seperti ini menyebabkan tidak semua masyarakat langsung bisa mengadopsi inovasi lokal yang sudah ditemukan, karena kekuatan modal menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk bisa mengadopsi berbudidaya dengan sistem kolam dan komoditi ikan patin. Fakta ini akhirnya mengurungkan niat mayoritas masyarakat untuk mengadopsi inovasi lokal yang sudah berhasil dilakukan, sebagai salah satu solusi sumber ekonomi baru. Walaupun untuk modal lahan berbudidaya dengan sistem kolam, mayoritas masyarakat sudah memilikinya. Hingga akhirnya hanya sebagian kecil atau beberapa masyarakat saja yang mampu mengadopsi inovasi lokal berbudidaya dengan sistem kolam dan komoditi ikan patin di Desa Koto Mesjid.

## 2. *Early Adopter* (Pengguna Awal)

Pengguna awal dalam penelitian ini merupakan individu yang pertama kali mengikuti inovator dalam menerapkan inovasi yang ditemukan dalam bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid. Dimana yang menjadi pengguna awal adalah pembudidaya ikan patin di Desa Koto Mesjid yang mulai berbudidaya dari tahun 2001 – 2002. Maka untuk mengetahui pola adopsi inovasi lokal bidang perikanan yang dilakukan pengguna



awal (*early adopter*), dapat dilihat dari tanggapan ZR (informan dari kelompok pengguna awal dan merupakan pensiunan PNS) sebagai berikut:

*“Munculnya inovasi dalam berbudidaya dengan sistem kolam dengan komoditi patin, awalnya tidak begitu menjadi perhatian. Namun karena desakan kebutuhan ekonomi yang semakin kuat, sementara sumber pendapatan baru yang dicari juga tidak ditemukan, akhirnya baru mulai berfikir tentang berbudidaya ikan patin, apalagi sudah ada yang berhasil menjalankannya. Kami pergi mencari informasi sendiri langsung ke sumber inovasinya dengan kemauan sendiri tanpa ada dorongan dari pihak lain, kecuali keluarga. Inovator ternyata sangat terbuka dalam memberikan informasi tentang budidaya ikan patin, bahkan menceritakan juga penyebab kegagalan dari beberapa masyarakat yang dulu pernah mencobanya dan butuh biaya awal untuk memulai berbudidaya ikan patin. Apalagi inovator siap membimbing langsung bagi masyarakat yang ingin mencoba berbudidaya. Peluang inilah yang membuat kami tidak takut untuk mencoba berbudidaya ikan patin”. (Wawancara 10 April 2016)*

Pernyataan ini, didukung oleh pendapat yang disampaikan oleh AA (informan dari kelompok pengguna awal dan merupakan PNS) sebagai berikut:

*“Keinginan untuk berbudidaya ikan patin, muncul dari melihat keberhasilan orang lain yang telah mempraktekkannya terlebih dahulu. Praktek budidaya yang dilakukan ternyata memberikan keuntungan dan dapat jadi solusi sumber pendapatan baru. Faktor ini yang mendorong kami untuk mencari informasi tentang kebenaran tersebut dengan sendirinya. Sebab kondisi ekonomi masyarakat pada waktu itu sungguh sangat memprihatinkan. Keterbukaan informasi*

*dari inovator sangat membantu kami untuk memahami tentang budidaya ikan patin yang dikembangkan. Apalagi berbudidaya ikan sebelumnya juga pernah dilakukan tetapi gagal. Dengan adanya bimbingan dan arahan langsung dari inovator dalam berbudidaya, menyakinkan kami untuk mencobanya. Walaupun dengan modal yang secukupnya kami memutuskan mencobanya dan berhasil serta memutuskan menerima inovasi budidaya ikan patin”. (Wawancara 10 April 2016)*

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh AF dan AZ (informan dari kelompok pengguna awal dan merupakan pedagang) sebagai berikut:

*“Dorongan untuk berbudidaya ikan patin tidak terlepas dari adanya janji keuntungan yang diberikan. Sebab waktu itu kondisi ekonomi sedang terjepit dan masyarakat sibuk mencari sumber ekonomi baru, hingga ditemukan inovasi dalam berbudidaya ikan patin. Keberhasilan pendahulu kami dalam mempraktekkan budidaya ikan patin juga menjadi sumber motivasi untuk mencobanya. Sehingga kami mulai mencari informasi dan keterangan tentang berbudidaya ikan patin. Kemauan dari diri kami sendiri yang mendorong untuk mempelajari budidaya ikan patin. Walaupun untuk memulai berbudidaya tetap membutuhkan modal, terutama modal uang. Tetapi inovator yang terlebih dahulu berbudidaya, telah menemukan inovasi baru dalam pembibitan ikan, sehingga dapat mengurangi pembiayaan dalam berbudidaya. Apalagi inovator mau dibayar setengah dahulu atau meminjamkan bibitnya dahulu, setelah panen baru dibayar. Kemudahan dalam memperoleh akses informasi dan ada rasa percaya dari inovator untuk meminjamkan modalnya, membuat kami memutuskan untuk mencoba berbudidaya. Efeknya dari bimbingan*

*dan arahan langsung dari inovator, kami berhasil melakukannya dan mengadopsinya hingga saat ini". (Wawancara 10 April 2016)*

Pernyataan dan pendapat diatas menjelaskan bahwa munculnya keinginan dan dorongan masyarakat pengguna awal untuk berbudidaya dengan sistem kolam dan komoditi ikan patin adalah desakan ekonomi. Fakta ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat diwaktu inovasi dikenalkan, memang dalam kondisi sangat memprihatinkan. Sebab ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat terpenuhi dari perkebunan karet yang diberikan oleh pemerintah, ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan. Sehingga masyarakat harus berjuang masing-masing untuk mencari sumber pendapatan baru dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Kondisi ini memaksa masyarakat harus mencari kegiatan atau pekerjaan secara *serabutan* atau tidak menentu yang penting bisa memperoleh penghasilan dan dibawa pulang guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Beberapa masyarakat ada yang kembali kepada pekerjaan lamanya sebagai pencari ikan di sungai dan pencari batu, namun tidak jarang juga masyarakat yang mulai melamar sebagai tenaga honorer di instansi pemerintah maupun swasta. Realitas ini memang membawa masyarakat dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kehadiran kegiatan berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat, karena sebelumnya masyarakat sudah melakukan hal yang sama namun tidak ada sentuhan inovasi dan dikelola secara tradisional. Akibatnya kegagalan dalam berbudidaya ikan dengan sistem kolam sudah dialami oleh masyarakat. Rendahnya pengetahuan yang dimiliki

oleh masyarakat dalam berbudidaya ikan dengan sistem kolam di wilayah geografis perbukitan, sulit air dan pH tanah tinggi, membuat masyarakat jera untuk mencobanya kembali.

Kemunculan inovasi dalam berbudidaya ikan dengan sistem kolam, awalnya tidak menjadi perhatian bagi masyarakat. Tetapi berita atau kabar keberhasilan berbudidaya yang dilakukan oleh masyarakat yang lebih dahulu mencobanya (inovator), mengelitik masyarakat pengguna awal untuk mencari tahu sendiri tentang informasi keberhasilan berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam. Apalagi masyarakat yang berdomisili di Desa Koto Mesjid merupakan masyarakat serumpun yang memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat satu dengan yang lainnya. Sehingga apabila ada masyarakat yang datang untuk mencari informasi tentang sesuatu, tentunya masyarakat yang memiliki informasi yang terbuka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Hal ini juga terjadi bagi masyarakat pengguna awal yang dengan keinginan sendiri datang kepada masyarakat inovator untuk mencari tahu tentang keberhasilan berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam. Keterbukaan informasi yang diberikan oleh masyarakat inovator, mendorong masyarakat pengguna awal untuk menggali sebanyak-banyaknya pengetahuan tentang berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam. Termasuk salah satunya bahwa berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam mudah untuk dicoba apabila mengikuti ketentuan yang berlaku dan menjanjikan keuntungan dari setiap hasil berbudidaya yang dilakukan. Janji keuntungan yang diberikan dari berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam memotivasi masyarakat pengguna awal untuk mencobanya.

Kendala awal masyarakat pengguna awal untuk mencoba berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam adalah modal untuk operasionalnya. Karena masyarakat pengguna awal harus mempersiapkan biaya untuk memulai berbudidaya hingga waktu panen tiba. Ketidakberdayaan masyarakat pengguna awal dalam hal biaya terbantu dengan rasa kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat inovator dalam mengembangkan budidaya ikan patin dengan sistem kolam di desa tersebut. Modal sosial inilah yang menjadi langkah awal masyarakat pengguna awal untuk mencoba berbudidaya. Sebab masyarakat pengguna awal sudah terbantu dalam penyediaan bibit dan penyediaan pakan dengan sistem pinjam pakai tanpa ada ikatan bunga pembelian dan ikatan monopoli penjualan yang diberlakukan oleh masyarakat inovator. Artinya masyarakat inovator dengan sistem modal sosial memberikan kesempatan kepada siapa saja masyarakat yang ingin mencoba berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam dengan membantu menyediakan bibit dan pakan, dimana dalam berbudidaya harus mengikuti pola budidaya yang sudah dikembangkan oleh masyarakat inovator. Setelah hasil berbudidaya diperoleh, barulah masyarakat yang mencoba membayar bibit dan pakan yang digunakan selama berbudidaya. Kesempatan ini tidak semuanya dimanfaatkan oleh masyarakat, karena rasa takut untuk gagal dan apabila gagal akan menyebabkan hutang bagi masyarakat. Sehingga hanya beberapa masyarakat yang terkategori sebagai pengguna awal saja yang memberanikan diri untuk mencoba berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam.

Kerja keras masyarakat pengguna awal dalam berbudidaya dengan bimbingan dan arahan langsung dari masyarakat inovator

secara perlahan mulai menemukan hasil yang baik. Keberhasilan awal dalam mencoba berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam memberikan *spirit* kepada masyarakat pengguna awal untuk berani mencoba kembali dan memperoleh keuntungan yang lebih baik dari berbudidaya ikan patin. Sebab dengan adanya janji keuntungan dalam berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam akan memberi solusi terhadap masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Keberanian dan ketekunan masyarakat pengguna awal dalam mengikuti bimbingan dan arahan masyarakat inovator dalam berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam menguatkan masyarakat pengguna awal untuk memutuskan mengadopsi inovasi budidaya ikan patin. Keputusan mengadopsi inovasi budidaya ikan patin yang dilakukan oleh masyarakat pengguna awal menjadi titik awal untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang dialami. Karena setelah masyarakat pengguna awal mencoba beberapa kali berbudidaya dan berhasil, janji keuntungan yang diberikan dapat dinikmati untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

### 3. *Early Majority* (Pengikut Awal)

Pengikut awal dalam penelitian ini merupakan individu yang penerima inovasi setelah rata-rata anggota sistem sosial mulai mengikuti menerapkan inovasi yang ditemukan dalam bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid. Dimana yang menjadi pengikut awal adalah pembudidaya ikan patin di Desa Koto Mesjid yang mulai berbudidaya dari tahun 2003 – 2005. Maka untuk mengetahui pola adopsi inovasi lokal bidang perikanan yang dilakukan pengikut dini, dapat dilihat dari tanggapan KH (informan dari kelompok pengikut dini dan merupakan pedagang) sebagai berikut:

*“Keputusan mengadopsi inovasi budidaya ikan patin dilakukan setelah sebagian masyarakat mulai mencobanya. Apalagi modal awal berupa kolam ikan, kami sudah memilikinya. Tinggal lagi modal pengelolaannya yang perlu disediakan. Apalagi ada kemurahan hati dari para pembudidaya awal yang sudah memiliki tempat pembibitan ikan dan tempat pembuatan pakan yang bisa dibayar setengah dulu dan sisanya setelah panen. Kemudahan ini menjadi awal kami memberanikan diri untuk mencobanya. Karena desakan kebutuhan ekonomi yang semakin kuat, juga menjadi alasan bagi kami untuk segera mencoba budidaya ikan patin. Ditambah lagi beberapa masyarakat yang sudah dulu mencoba, mayoritas berhasil melakukannya”. (Wawancara 13 April 2016)*

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh JY (informan dari kelompok pengikut dini dan merupakan petani karet) sebagai berikut:

*“Berani mengadopsi inovasi budidaya ikan patin didorong oleh mulai banyak masyarakat mengikutinya dan berhasil. Keberhasilan berbudidaya ternyata dapat mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi dan berbudidaya juga memiliki nilai keuntungan yang tinggi. Kemudahan informasi untuk berbudidaya ikan patin juga dapat diperoleh, sehingga masyarakat yang ingin mencobanya dapat memperoleh sebanyak-banyaknya informasi dalam berbudidaya ikan patin dari setiap masyarakat yang berhasil. Inilah yang membuat masyarakat tidak ragu untuk mencoba dan mengadopsinya”. (Wawancara 13 April 2016)*

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh AN (informan dari kelompok pengikut dini dan merupakan petani karet) sebagai berikut:

*“Adopsi inovasi yang dilakukan tidak terlepas dari mulai banyaknya contoh keberhasilan berbudidaya ikan patin yang ditunjukkan oleh masyarakat yang sudah mencoba. Keberhasilan-keberhasilan ini memberikan semangat kepada masyarakat yang belum mencoba untuk mulai mencobanya. Apalagi masyarakat yang sudah berhasil rela membimbingnya dengan sepenuh hati, karena didasari nilai sepenanggungan dan nilai kekeluargaan diantara sesama masyarakat. Ditambah lagi pada tahun 2004 ini masyarakat yang mencoba sudah mendapat suntikan dana dari program CSR Telkom yang ditokohi oleh para inovator. Kesempatan ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut mulai mencoba dan mengadopsi inovasi budidaya ikan patin. Karena program ini memberikan suntikan modal dana, walaupun masyarakat harus berani menjamin hartanya untuk memperoleh modal. Tapi dukungan dari inovator yang kuat yang memberanikan kami untuk meminjam modal dari program CSR Telkom”. (Wawancara 14 April 2017)*

Tanggapan yang juga hampir sama, disampaikan oleh YA (informan dari kelompok pengikut dini dan merupakan buruh) sebagai berikut:

*“Hadirnya program CSR yang diprakarsai oleh inovator di kampung kami, membuat masyarakat memiliki kesempatan untuk memiliki modal untuk berbudidaya. Syaratnya masyarakat berani menjaminkan hartanya untuk agunan pinjaman. Tidak semua masyarakat berani menjadikan hartanya untuk agunan, karena takut gagal dalam mencoba berbudidaya. Apabila gagal, maka harta yang diagunkan akan melayang. Kami termasuk yang awalnya ragu-ragu untuk menjaminkan harta yang dimiliki untuk memperoleh modal. Tetapi karena desakan ekonomi yang semakin kuat dan adanya jaminan dari inovator akan*



*membimbing dalam berbudidaya, membuat kami berani meminjam dana dari program CSR Telkom. Modal yang diperoleh sepenuhnya digunakan untuk mencoba berbudidaya dan alhamdulillah berhasil dilakukan". (Wawancara 14 April 2017)*

Pernyataan dan pendapat diatas menjelaskan bahwa keputusan kelompok pengikut dini untuk mengadopsi inovasi dalam berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena kelompok pengikut dini sangat takut dengan kegagalan dalam mengadopsi inovasi. Sebab kegagalan yang diterimanya akan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial. Oleh karenanya kelompok pengikut dini sangat penuh pertimbangan dalam memutuskan untuk mengadopsi inovasi budidaya ikan patin. Dalam upaya menyakinkan diri, kelompok pengikut dini banyak mencari informasi dari para pembudidaya yang terlebih dahulu telah berhasil melaksanakannya. Dari para pembudidaya yang telah berhasil, kelompok pengikut dini banyak mendapatkan cerita tentang awal mula memutuskan berbudidaya hingga berhasil melakukan budidaya. Berbagai macam penjelasan dan cerita yang diperoleh menggambarkan bahwa berbudidaya ikan patin itu tidak terlalu rumit untuk dilakukan, karena komoditi ikan patin merupakan jenis ikan daya tahan hidupnya tinggi. Kemudian apabila berhasil melakukan budidaya dengan mengikuti bimbingan dan arahan dari inovator atau pengguna awal akan sangat menjanjikan keuntungan yang tinggi. Informasi yang detail ini diperlukan oleh kelompok pengikut dini untuk berani memutuskan mencoba melakukan budidaya. Rasa takut yang tinggi akan kegagalan menjadi alasan utama bagi kelompok pengikut dini untuk segera mencoba berbudidaya dan memutuskan untuk mengadopsinya.

Keberhasilan beberapa masyarakat awal yang telah mencoba berbudidaya ikan patin, menjadi *spirit* tambahan bagi kelompok pengikut dini untuk mulai mencobanya. Sebab dari para masyarakat yang sudah berhasil berbudidaya, terlihat kondisi ekonominya semakin membaik. Hal ini dikarenakan keberhasilan berbudidaya ikan patin menjanjikan nilai keuntungan yang tinggi. Selain itu juga untuk memulai berbudidaya kelompok pengikut dini sudah memiliki modal awal yaitu lahan kolam. Lahan kolam yang ada di sekitar rumah bisa dijadikan tempat berbudidaya ikan patin untuk awalnya. Apabila berhasil melakukan budidaya, bisa mengembangkannya dengan membuat kolam-kolam ikan yang baru. Peluang ini sebenarnya menjadi kesempatan yang besar bagi kelompok pengikut dini untuk segera mulai mencoba berbudidaya. Apalagi pihak pengguna awal dan inovator siap memberikan bimbingan dan arahan bagi kelompok pengikut dini yang akan berbudidaya ikan patin. Namun terkadang dengan kekuatan modal *financial* yang rendah mengurungkan niat bagi kelompok pengikut dini untuk mencobanya. Walaupun dengan sistem kekeluargaan yang berkembang diantara sesama masyarakat dan *trust* yang tinggi akibat serumpun, menjadi modal sosial bagi pengikut dini untuk mencoba berbudidaya. Tetapi karena kelompok pengikut dini ini merupakan individu yang penuh dengan pertimbangan membuat adanya keterlambatan dalam mengadopsi inovasi.

Ketakutan akan modal usaha yang cukup tinggi dalam berbudidaya ikan patin, terjawab dengan adanya terobosan program CSR pihak Telkom yang masuk ke Desa Koto Mesjid akibat prakarsa pihak inovator. Melalui program CSR ini,



kelompok pengikut dini bisa mengajukan pinjaman modal sesuai dengan kebutuhan dengan syarat memberikan agunan harta yang dimiliki. Persyaratan agunan yang diterapkan oleh program CSR Telkom membuat beberapa masyarakat mundur untuk tidak mengadopsi inovasi budidaya ikan patin. Karena masyarakat takut apabila kegagalan yang ditemui dalam berbudidaya ikan patin, maka agunan harta yang diberikan akan hilang. Realitas ini membuat masyarakat ada yang memutuskan mundur, tetapi ada juga masyarakat yang memutuskan untuk maju. Keberanian masyarakat untuk memberikan agunan supaya mendapatkan modal untuk berbudidaya, tidak terlepas dari tuntutan ekonomi yang semakin tinggi dari keluarganya. Sebab setiap keluarga masyarakat pengikut dini sudah ada yang mulai sekolah atau bahkan sudah sekolah di tingkat pertama dan menengah, yang tanpa disadari membutuhkan biaya yang banyak untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara sumber pendapatan masyarakat pengikut dini pada waktu itu baru hanya dari perkebunan karet yang mulai menghasilkan dengan hasil yang belum maksimal. Sehingga mengadopsi inovasi budidaya ikan patin merupakan salah satu solusi bagi sumber pendapatan baru dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang semakin bertambah dari waktu ke waktu.

#### 4. *Late Majority* (Pengikut Akhir)

Pengikut akhir (*late majority*) dalam penelitian ini merupakan individu yang penerima inovasi setelah rata-rata anggota sistem sosial mulai mengikuti menerapkan inovasi yang ditemukan dalam bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid. Dimana yang menjadi pengikut akhir adalah pembudidaya ikan patin di Desa Koto Mesjid yang mulai

berbudidaya dari tahun 2006 – 2011. Maka untuk mengetahui pola adopsi inovasi lokal bidang perikanan yang dilakukan pengikut akhir, dapat dilihat dari tanggapan FE (informan dari kelompok pengikut akhir dan merupakan pembudidaya dan pedagang) sebagai berikut:

*“Budidaya ikan patin awalnya bukan menjadi impian bagi saya, namun karena tidak ada lagi pekerjaan yang bisa saya kerjakan, akhirnya orang tua mendorong saya untuk berbudidaya. Sewaktu saya akan berbudidaya sudah banyak contoh keberhasilan yang ditunjukkan oleh masyarakat sebelumnya. Apalagi rata-rata masyarakat yang sudah berbudidaya dapat menjadikan pekerjaan ini sebagai sandaran bagi kehidupan keluarganya. Dorongan ini yang membuat saya mulai tertarik untuk mencobanya, sambil terus mencari informasi tentang berbudidaya yang baik dan benar. Hingga akhirnya yang memutuskan untuk berbudidaya dan berhasil saya lakukan. Bahkan saat ini saya juga sudah mengembangkan bahwa hasil budidaya bukan hanya sekedar bahan baku saja tetapi suatu produk. Maka saya dan beberapa pemuda di desa kami sudah mulai mengembangkan produk dari bahan baku patin, seperti ikan asap/salai, kerupuk ikan, nugget ikan dan sebagainya”. (Wawancara 18 April 2016)*

Penyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh YK (informan dari kelompok pengikut akhir dan merupakan pembudidaya, pedagang dan petani karet) sebagai berikut:

*“Adopsi budidaya ikan patin awalnya didorong oleh keinginan diri sendiri untuk bisa mencari sumber pendapatan baru dalam mengatasi kebutuhan ekonomi keluarga. Ternyata berbudidaya ikan patin bisa dijadikan sandaran untuk memenuhi*

kebutuhan hidup keluarga. Apalagi sudah banyak masyarakat yang mencoba berbudidaya ikan patin dan rata-rata berhasil. Sehingga tidak ada salahnya juga untuk dicoba dan diikuti berbudidaya ikan patin ini. Selain itu juga berbudidaya ikan merupakan kearifan lokal masyarakat sebelum dipindahkan sebagai masyarakat transmigrasi lokal. Cuma bedanya dulu berbudidaya di sungai, sedangkan kini berbudidaya di sekitar pekarangan dengan tidak ada sungai dan terbatas air". (Wawancara 20 April 2016)

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh RN (informan dari kelompok pengikut akhir dan merupakan pembudidaya) sebagai berikut:

*"Keputusan mengikuti berbudidaya ikan patin didorong karena sudah banyaknya masyarakat yang mencobanya dan berhasil sebagai solusi sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Apalagi pihak keluarga juga banyak yang mengusulkan untuk ikut berbudidaya, sebagai sumber pendapatan untuk keluarga. Selain itu juga berbudidaya ikan patin menjanjikan keuntungan yang tinggi, karena sudah banyak contoh masyarakat yang merasakannya. Sehingga mengikuti jejak masyarakat yang sudah berhasil berbudidaya apa salahnya. Apalagi untuk berbudidaya ikan patin, masyarakat sudah berani meminjam modal dari pihak ketiga, seperti bank untuk memulainya".* (Wawancara 21 April 2016)

Argumen yang hampir sama juga disampaikan oleh WT (informan dari kelompok pengikut akhir dan merupakan pembudidaya dan petani karet) sebagai berikut:

*"Dorongan mengikuti berbudidaya ikan patin adalah untuk mencari sumber pendapatan baru dalam upaya mengatasi masalah ekonomi keluarga. Karena waktu*

*itu kondisi ekonomi keluarga sangat memprihatinkan untuk bisa terpenuhi secara menyeluruh. Sehingga adanya kegiatan berbudidaya ikan patin menjadi alternatif sumber pendapatan baru. Selain itu juga dalam memutuskan berbudidaya ikan patin didorong oleh banyaknya contoh masyarakat yang berhasil berbudidaya dan memberikan nilai keuntungan kepada masyarakat yang sudah mengadopsinya. Ditambah lagi budidaya ini mudah dicoba, karena sudah banyak yang memberikan arahan dan membimbing dalam berbudidaya ikan patin".* (Wawancara 23 April 2016)

Pernyataan dan pendapat diatas menjelaskan bahwa keputusan kelompok pengikut akhir untuk mengadopsi inovasi dalam berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam karena dorongan keluarga, desakan ekonomi dan desakan sosial yang sudah berhasil berbudidaya terlebih dahulu. Karena kelompok pengikut akhir ini dihuni oleh masyarakat yang sangat berhati-hati dalam mengambil resiko untuk mengikuti suatu inovasi dan masyarakat generasi kedua yang meneruskan usaha budidaya milik keluarganya. Sebab masyarakat yang sangat berhati-hati terhadap resiko ini, sebelumnya pernah gagal dalam berbudidaya sebelum inovasi dikenalkan. Sehingga ada kesan *trauma* terhadap kegagalan yang sebelumnya pernah dialami oleh masyarakat dalam bentuk kegiatan berbudidaya ikan dengan sistem kolam. Realitas ini membuat masyarakat pengikut akhir sangat penuh pertimbangan untuk mengadopsi pola budidaya yang sama. Walaupun contoh keberhasilan dari masyarakat yang terlebih dahulu mencobanya sudah ada, tetapi masyarakat pengikut akhir tidak semerta-merta langsung bisa memutuskan untuk mengadopsinya. Karena sangat

mempertimbangkan pengalaman kegagalan yang pernah dilakukan dalam berbudidaya ikan. Sedangkan bagi masyarakat generasi kedua, berbudidaya ikan patin ini bukan merupakan impian utama sebagai sandaran kekuatan ekonominya. Karena para generasi kedua yang memiliki usia produktif masih memiliki keinginan berpetualang untuk mencari sumber ekonominya yang akan dijadikan sandaran dalam kehidupan. Tetapi karena proses pencarian yang tidak kunjung ditemukan, akhirnya para generasi kedua ini memutuskan untuk mulai mempelajari berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam.

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok pengikut akhir juga sangat mendalam untuk memperhitungkan segala resiko yang akan dihadapi dalam berbudidaya ikan. Karena kelompok pengikut akhir sangat takut dengan kegagalan, sehingga sangat detail dalam memperhitungkan setiap peluang gagal dan peluang berhasil yang akan dihadapi. Oleh karenanya sebelum memutuskan untuk mengadopsi inovasi, kelompok pengikut akhir) banyak menggali ilmu berbudidaya ikan patin dari para pendahulunya yang sudah berhasil mengadopsinya. Hal ini dilakukan supaya *spirit* yang kuat hadir dalam diri pengikut akhir untuk segera memutuskan mengadopsi inovasi budidaya ikan patin dengan sistem kolam. Pembelajaran yang dilakukan juga menelusuri nilai keuntungan yang akan diperoleh, apabila mulai berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam. Selain itu juga masyarakat pengikut akhir mencari informasi tentang cara dan teknik berbudidaya yang baik dan benar, sehingga jauh dari kemungkinan kegagalan. Sebab masyarakat pengikut akhir sudah mulai bekerjasama dengan pihak ketiga

untuk memperoleh modal dalam upaya untuk berbudidaya ikan patin. Sehingga tidak ada kategori gagal dalam ikut serta mengadopsi budidaya ikan patin dengan sistem kolam. Karena apabila gagal, maka akan menyebabkan hutang bagi masyarakat pengikut akhir terhadap pihak ketiga. Maka dari itu, kejelian dan ketekunan masyarakat pengikut akhir dalam menggali informasi dan pengetahuan dalam berbudidaya ikan patin menjadi awal untuk memperoleh keberhasilan dalam berbudidaya ikan patin.

Ketersediaan para pendahulu pembudidaya dalam memberikan informasi, pengetahuan, membimbing dan mengarahkan kelompok pengikut akhir untuk berbudidaya juga menjadi *stimulus* yang penting dalam keputusan mengadopsi. Sebab rasa takut gagal akan berbudidaya menjadi tolak ukur bagi masyarakat pengikut akhir untuk penuh pertimbangan dalam memutuskan mengadopsi. Namun karena adanya janji keuntungan yang tinggi dan adanya kemudahan dalam mencoba berbudidaya mendorong masyarakat pengikut akhir untuk tidak takut dalam memutuskan mengadopsi. Apalagi sudah banyak contoh keberhasilan yang ditunjukkan oleh para pendahulunya dalam berbudidaya ikan patin. Artinya masyarakat pengikut akhir hanya tinggal mencontoh dan menirukan cara berbudidaya yang dikembangkan oleh masyarakat yang sudah berhasil untuk memperoleh keberhasilan dalam berbudidaya. Dampak dari dorongan-dorongan tersebut akhirnya masyarakat pengikut akhir memutuskan untuk mencoba berbudidaya dan mengadopsinya sebagai sumber pendapatan baru dan sandaran ekonomi keluarga. Tetapi tidak hanya sekedar mengadopsi saja, para masyarakat pengikut akhir yang berasal

dari generasi kedua mulai mempelajari untuk mengembangkan budidaya ikan patin bukan hanya menghasilkan bahan baku saja, namun berkembang menjadi produk. Melalui kegiatan pelatihan yang diikuti oleh masyarakat pengikut akhir generasi kedua terhadap pengolahan ikan patin, maka bahan baku ikan patin dapat dikembangkan menjadi produk. Hingga saat ini pengembangan produk yang berasal dari bahan baku ikan patin mulai beragam, mulai dari ikan asap/salai, bakso, kerupuk, nugget dan sebagainya.

### 1. *Langgard (Kolot)*

*Langgard* (kolot) dalam penelitian ini merupakan individu yang paling akhir menerima inovasi karena rasa takut gagal, ketiadaan modal dan kondisi geografis wilayah yang tidak mendukung untuk mengikuti menerapkan inovasi yang ditemukan dalam bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid. Dimana yang menjadi *langgard* (kolot) adalah pembudidaya ikan patin di Desa Koto Mesjid yang mulai berbudidaya dari tahun 2012 – 2014. Maka untuk mengetahui pola adopsi inovasi lokal bidang perikanan yang dilakukan kolot, dapat dilihat dari tanggapan SD (informan dari kelompok kolot dan merupakan pembudidaya dan pensiunan PNS) sebagai berikut:

*“Keterlambatan memutuskan untuk mengikuti berbudidaya ikan patin dikarenakan ketidakyakinan akan keberhasilan berbudidaya ikan patin. Walaupun sudah banyak contoh masyarakat yang sudah berhasil, tetapi rasa takut untuk mencoba berbudidaya ikan patin masih sangat tinggi. Apalagi pekarangan yang dimiliki tidak mendukung untuk melakukan budidaya ikan...ya misalnya rumah saya ini berada di bukit tertinggi dari Desa Koto Mesjid, sehingga sangat sulit untuk*

*memperoleh kolam ikan yang artesis atau memiliki volume air yang banyak. Sehingga rata-rata masyarakat di Dusun I memang sangat sulit untuk bisa berbudiaya ikan patin. Karena untuk membuat kolam ikan membutuhkan air tadah hujan atau mengalirkan air ke kolam ikan...yang hal ini membutuhkan modal yang cukup besar”.* (Wawancara 27 April 2017)

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh SD (informan dari kelompok kolot dan merupakan pembudidaya dan buruh), sebagai berikut:

*“Keputusan mengikuti berbudidaya ikan patin karena dorongan janji keuntungan yang tinggi dan mudah mencobanya. Walaupun hambatan dan tantangan dalam berbudidaya pasti ada, terutama hambatan modal dan kondisi geografis yang tidak menguntungkan. Selain itu juga melihat keberhasilan orang lain dalam berbudidaya ikan patin menjadi dasar untuk mengadopsinya. Sebab keberhasilan orang lain akan menjadi motivasi masyarakat yang belum berbudidaya untuk berprestasi terhadap seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Karena penjelasan banyak pembudidaya bahwa berbudidaya itu adalah tabungan yang apabila harga jual menjanjikan maka akan memperoleh keuntungan yang besar”.* (Wawancara 28 April 2017)

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh AG (informan dari kelompok kolot dan merupakan pembudidaya), sebagai berikut:

*“Dorongan untuk berbudidaya ikan patin karena adanya janji keuntungan yang tinggi dalam berbudidaya. Sebab apabila dapat menghasilkan keuntungan maka akan membantu perekonomian keluarga. Kemudian karena sudah banyak masyarakat yang mencoba dan berhasil.*



*Selanjutnya berbudidaya ikan patin dapat dijadikan sandaran ekonomi utama bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya". ((Wawancara 28 April 2017)*

Argumen yang hampir sama juga disampaikan oleh DF (informan dari kelompok kolot dan merupakan pembudidaya), sebagai berikut:

*"Berbudidaya ada pilihan terakhir dalam mencari pekerjaan, karena sudah bertualang untuk mencari pekerjaan lain tetapi tidak berhasil. Akhirnya kembali ke desa untuk mulai mempelajari berbudidaya, awalnya belajar dari para keluarga yang lebih dahulu berbudidaya. Dari mereka mendapat gambaran tentang berbudidaya yang menjanjikan keuntungan dan dapat dijadikan sandaran ekonomi, apabila serius mengelolanya. Apalagi bila memiliki lahan yang luas dapat bisa berbudidaya dengan maksimal dan hasil yang maksimal. Tapi kami kebetulan tinggal di Dusun I yang memiliki lahan lebih tinggi dibandingkan dengan dusun lainnya, sehingga membutuhkan modal yang lebih besar untuk berbudidaya. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang membuat kami terlambat memutuskan untuk ikut berbudidaya". (Wawancara 29 April 2017)*

Pernyataan dan pendapat diatas menjelaskan bahwa keputusan kelompok kolot untuk mengadopsi inovasi dalam berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam lebih cenderung disebabkan oleh adanya janji keuntungan dan kemudahan untuk mencobanya. Hal ini dikarenakan sudah banyak contoh keberhasilan yang ditunjukkan oleh para pembudidaya terdahulu. Dimana pembudidaya terdahulu yang sudah berhasil itu bisa saja adalah keluarga ataupun tetangga terdekat dengan rumahnya. Keterlambatan kelompok kolot dalam memutuskan mengadopsi inovasi

bidang perikanan, bukan tanpa alasan. Karena berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam itu bukan merupakan sesuatu yang terlalu asing bagi masyarakat. Sebab sebelum inovasi itu hadir, berbudidaya ikan dengan sistem kolam juga sudah pernah dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi penemuan sumber pendapatan baru yang disponsori oleh Pemerintah Daerah. Namun pola budidaya yang dilakukan, karena tidak diiringi oleh pengetahuan yang cukup dalam berbudidaya sistem kolam di wilayah geografis perbukitan, sulit air dan pH tanah tinggi menyebabkan kegagalan dan berbudidaya. Apalagi pada waktu itu masyarakat juga tidak dibekali dengan pengetahuan komoditi ikan yang cocok dengan kondisi geografis yang ada, akibatnya seluruh komoditi ikan air tawar sudah pernah dicoba masyarakat untuk berbudidaya. *Traumatis* kegagalan yang dialami oleh masyarakat sebelumnya dalam berbudidaya ikan dengan sistem kolam ini, membuat kelompok kolot sangat penuh pertimbangan dan perhitungan untuk memutuskan mengadopsi inovasi yang sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Desa Koto Mesjid. Kehati-hatian yang ditunjukkan oleh kelompok kolot dalam memutuskan mengadopsi budidaya ikan patin, juga didasari oleh keterbatasan modal yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Terutama modal *financial* yang menjadi ujung tombak dalam operasional kegiatan budidaya ikan patin dengan sistem kolam.

Selain kendala modal *financial* yang membuat kelompok kolot sangat hati-hati dan penuh pertimbangan dalam memutuskan berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam, yang tidak kalah pentingnya adalah kendala lahan. Kelompok kolot yang lambat



untuk mengadopsi juga disebabkan oleh kendala lahan, dimana dengan lokasi lahan yang dimiliki berada di wilayah perbukitan tertinggi di Desa Koto Mesjid membuat para calon pembudidaya membutuhkan modal *financial* yang lebih besar dari masyarakat lain yang lahannya lebih rendah dari kelompok ini. Wilayah Dusun I dan sebagian Dusun II di Desa Koto Mesjid, memang merupakan wilayah perbukitan tertinggi di desa itu. Sehingga apabila membuat kolam di wilayah tersebut, harus menunggu air tadah hujan atau mengalir bakal kolam dengan air sumur yang ada di rumah. Proses ini tentunya membutuhkan modal yang cukup besar untuk bisa membuat satu kolam ikan saja. Apabila dibandingkan dengan wilayah di Dusun III dan Dusun IV yang lebih rendah bahkan lereng lembah di Desa Koto Mesjid, kondisi air lebih baik. Karena wilayah ini hampir rata-rata merupakan daerah *artesis*, dimana setiap dilakukan pembuatan kolam ikan masyarakat hanya tinggal menunggu kolam ikannya penuh dengan air dan siap untuk dikelola untuk berbudidaya. Kelebihan secara teknis yang dimiliki oleh wilayah Dusun III dan Dusun IV ini memberikan keberuntungan kepada masyarakat di wilayah tersebut untuk lebih dahulu mengadopsi inovasi yang dikenalkan. Sementara bagi kelompok kolot yang dominan berdomisili di wilayah Dusun I dan Dusun II, harus menunggu air hujan memenuhi kolam yang sudah dibangun baru bisa melakukan budidaya. Realitas ini membuat banyak masyarakat di wilayah Dusun I dan Dusun II enggan mengadopsi inovasi budidaya ikan patin, disebabkan membutuhkan modal yang besar dan waktu yang lebih lama. Faktanya lagi banyak masyarakat di wilayah ini, lebih cenderung menjadi kelompok masyarakat pengelola produk ikan patin di lokasi Minapolitan

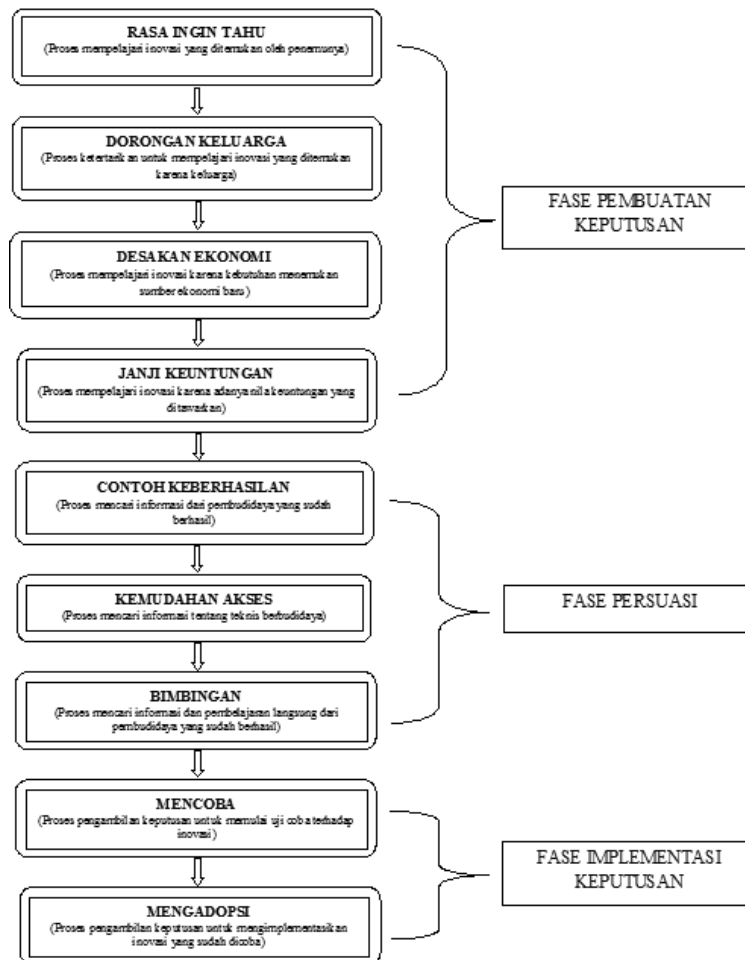
yang sudah dibangun oleh Pemerintah Pusat sejak ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan.

Ketidakberpihakan lahan pekarangan yang dimiliki oleh kelompok kolot ternyata tidak mengurungkan niat untuk tetap berbudidaya. Walaupun proses berbudidaya yang diikuti membutuhkan waktu yang lebih lama, karena kelompok kolot harus mempersiapkan segalanya dengan waktu yang lebih lama. Keputusan adopsi dari kelompok kolot juga didorong oleh adanya kesediaan dari para pembudidaya terdahulu untuk membantu membimbing, mencontohkan dan mengarahkan kelompok ini dalam berbudidaya. Karena dengan adanya contoh dan bimbingan yang dilakukan akan lebih meyakinkan kelompok kolot untuk memperoleh keberhasilan dalam berbudidaya. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan untuk mencoba dan mengadopsi budidaya ikan patin dengan sistem kolam, kelompok kolot banyak yang menggali pengetahuan, informasi dan keterangan tentang berbudidaya ikan patin dari para pendahulunya. Bahkan kelompok kolot juga tidak segan menanyakan peluang terkecil apa yang menyebabkan kegagalan dalam berbudidaya ikan patin dengan sistem kolam ini. Kebanyakan para pembudidaya sebelumnya menjelaskan bahwa peluang kegagalan dalam berbudidaya sangat kecil, selama pembudidaya itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan utama yang perlu diperhatikan dalam berbudidaya adalah jumlah komoditi yang dibudidaya harus disesuaikan dengan luas kolam yang dimiliki, apabila ketentuan ini tidak diperhatikan maka kegagalan panen akan terjadi. Realitas ini menunjukkan bahwa dalam berbudidaya ikan patin juga harus memperhatikan adat, dimana setiap

pembudidaya harus mengikuti adab yang telah ditentukan untuk memperoleh hasil panen yang maksimal.

Kemudian dari hasil keseluruhan wawancara yang dilakukan maka dapat

disimpulkan bahwa pola adopsi inovasi lokal bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid Provinsi Riau yang dapat memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.** Proses Adopsi Inovasi Lokal Bidang Perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid Provinsi Riau

Gambar diatas, menjelaskan bahwa pola adopsi inovasi lokal bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid Provinsi Riau, memiliki tiga fase atau tahapan, yaitu:

#### 1. Fase pembuatan keputusan

Fase pembuatan keputusan merupakan proses individu dalam mempelajari dan memahami suatu inovasi yang dikenalkan. Dimana dalam fase ini nantinya akan

menimbulkan ketertarikan dalam diri individu untuk mengadopsinya. Fase ini meliputi beberapa proses, yaitu:

##### a. Rasa ingin tahu

Rasa ingin tahu merupakan proses mempelajari inovasi yang ditemukan oleh penemunya. Proses ini didorong oleh rasa penasaran yang tinggi dalam diri individu terhadap keberhasilan berinovasi yang dilakukan oleh penemunya. Sebab kegiatan yang

dilakukan oleh penemu inovasi sebelumnya pernah dilakukan oleh masyarakat, tetapi gagal untuk berhasil.

b. Dorongan keluarga

Dorongan keluarga merupakan proses mempelajari inovasi yang ditemukan karena adanya *spirit* dari keluarga untuk menemukan sumber pendapatan baru. Proses ini didorong oleh para inovator yang menerapkan inovasi pada dasarnya masih memiliki hubungan kekeluargaan. Sehingga ada keinginan untuk bersilaturahmi dengan inovator guna mempelajari kemungkinan mengikuti inovasi yang ditemukan. Apalagi masyarakat di Desa Koto Mesjid ini merupakan masyarakat yang serumpun dan satu nenek moyang, akibatnya memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi antara satu sama lainnya.

c. Desakan ekonomi

Desakan ekonomi merupakan proses mempelajari inovasi yang ditemukan karena adanya desakan menemukan sumber pendapatan baru. Proses ini didorong oleh kondisi ekonomi yang memprihatinkan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga dibutuhkan solusi menemukan sumber pendapatan baru. Dimana sumber pendapatan baru tersebut, dapat dijadikan sandaran ekonomi bagi masyarakat.

d. Janji keuntungan

Janji keuntungan merupakan proses mempelajari inovasi yang ditemukan dari nilai-nilai keuntungan yang ditawarkan. Proses ini mencari informasi terhadap nilai keuntungan yang akan diperoleh apabila mengikuti inovasi, mulai dari pembiayaan operasional sampai harga jual hasil inovasi yang diadopsi. Melalui informasi nilai keuntungan yang diperoleh, maka masyarakat bisa memperhitungkan untung dan ruginya

dalam mengikuti inovasi.

2. Fase persuasi

Fase persuasi merupakan proses individu dalam mempertimbangkan sesuatu yang sudah dipelajari guna mampu memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi yang dikenalkan. Dimana dalam fase ini nantinya akan memberikan pertimbangan dengan segala bentuk peluang dan resiko yang akan dihadapi oleh individu apabila mengadopsi inovasi. Fase ini meliputi beberapa proses, yaitu:

a. Contoh keberhasilan

Contoh keberhasilan merupakan proses individu mencari informasi langsung dari sumber inovasi yang telah berhasil menerapkannya. Proses ini dilakukan atas dasar keingintahuan individu terhadap inovasi yang berhasil dilakukan. Sebab dengan mendapat informasi langsung dari sumber inovasi, maka akan banyak pengetahuan dan pembelajaran yang diperoleh dalam menerapkan inovasi yang berhasil.

b. Kemudahan akses

Kemudahan akses merupakan proses individu mencari informasi dan mempelajari secara teknis inovasi yang diterapkan dari sumbernya langsung. Proses ini dilakukan supaya proses pembelajaran teknis yang dilakukan, nantinya dapat diterapkan secara langsung apabila memutuskan untuk mengikuti inovasi.

c. Bimbingan

Bimbingan merupakan proses pembelajaran dan arahan yang dilakukan langsung oleh sumber inovasi kepada setiap individu yang ingin menerapkan inovasi. Proses ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan kegagalan dalam menerapkan inovasi. Bimbingan yang dilakukan dapat berupa

bimbingan teknis ataupun non teknis dalam upaya memberikan pemahaman kepada calon adopter.

### 3. Fase implementasi keputusan

Fase implementasi keputusan merupakan proses individu dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak inovasi yang dikenalkan. Dimana dalam fase ini akan memberikan keyakinan dan kepercayaan diri kepada individu untuk memutuskan mengadopsi atau menolak inovasi. Fase ini meliputi beberapa proses, yaitu:

#### a. Mencoba

Mencoba merupakan proses pengambilan keputusan untuk beruji coba atau bereksperimen terhadap inovasi yang dikenalkan. Proses ini dilakukan untuk lebih meyakinkan diri individu terhadap kerja dari inovasi yang dikenalkan. Apabila keberhasilan yang ditemukan dalam uji coba, maka akan menghapus rasa takut dan keragu-raguan dalam memutuskan untuk mengadopsi inovasi. Namun sebaliknya apabila kegagalan yang ditemukan dalam uji coba, maka akan menumbuhkan rasa takut yang berlebihan untuk memutuskan mengadopsi inovasi.

#### b. Mengadopsi

Mengadopsi merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan individu terhadap inovasi yang dikenalkan. Proses ini dilakukan setelah melalui rangkaian tahapan-tahapan yang membuat individu sangat yakin dan percaya bahwa mengadopsi adalah pilihan yang terbaik. Pada tahapan ini, setiap individu sudah tidak lagi memiliki rasa takut dan ragu-ragu untuk mengadopsi inovasi yang dikenalkan.

## KESIMPULAN

Proses adopsi inovasi lokal yang dilakukan oleh masyarakat pembudidaya di Kawasan

Minapolitan Desa Koto Mesjid Provinsi Riau juga sangat menentukan dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat tersebut. Karena setiap masyarakat pembudidaya dengan polanya masing-masing memiliki keputusan yang berbeda-beda dalam mengadopsi inovasi. Karena pola adopsi inovasi merupakan proses pengambilan keputusan adopsi pada masing-masing anggota sistem sosial. Dimana keputusan yang dilakukan oleh seseorang untuk menerima atau menolak inovasi bukanlah tindakan yang sekali jadi, melainkan lebih menyerupai suatu proses yang terdiri dari serangkaian tindakan dalam jangka waktu tertentu. Pola adopsi inovasi lokal bidang perikanan di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid Provinsi Riau terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: (a). Fase pembuatan keputusan merupakan proses individu dalam mempelajari dan memahami suatu inovasi yang dikenalkan, dimana fase ini memiliki beberapa langkah yaitu rasa ingin tahu, dorongan keluarga, desakan ekonomi dan janji keuntungan. (b). Fase persuasi merupakan proses individu dalam mempertimbangkan sesuatu yang sudah dipelajari guna mampu memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi yang dikenalkan, dimana fase ini memiliki beberapa langkah yaitu contoh keberhasilan, kemudahan akses dan bimbingan. (c). Fase implementasi keputusan merupakan proses individu dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak inovasi yang dikenalkan, dimana fase ini memiliki beberapa langkah yaitu mencoba dan mengadopsi. Proses adopsi pengetahuan dari luar masyarakat tentunya berkaitan dengan daya tampung sosial dan daya dukung sosial. Artinya bahwa daya tampung sosial dinyatakan dengan banyaknya orang yang dapat mengadopsi pengetahuan dan cara baru dan juga berkaitan dengan usia, kelompok usia dan jenis kelamin. Sedangkan daya dukung sosial dimaknai sebagai pengetahuan yang ada

di masyarakat seperti sudah menjadi kebiasaan atau kearifan lokal yaitu menangkap ikan secara tradisional dan perubahannya adalah dengan berbudidaya ikan dengan sistem kolam bukan lagi menangkap ikan.

## SARAN

Proses adopsi inovasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi masyarakat, hendaknya memperhatikan nilai-nilai yang terdapat didalam kehidupan masyarakat. Agar inovasi yang dikenalkan mampu diadopsi oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Inovasi yang dikenalkan tidak perlu melawan nilai dan kebiasaan masyarakat yang sudah ada atau bahkan merubah kebiasaan-kebiasaan tersebut. Sebab hal itu nantinya akan mendapatkan perlawanan dan penolakan dari masyarakat terhadap inovasi yang dikenalkan. Oleh karenanya kemampuan inovator dalam melihat kearifan lokal masyarakat menjadi langkah awal untuk diterimanya inovasi yang dikenalkan. Kemudian adanya keinginan dan kemauan inovator untuk mempraktekkan dan mencontohkan inovasi hingga berhasil, akan mempercepat masyarakat untuk memutuskan mengadopsi inovasi yang telah dipraktekkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penelitian ini, yaitu Pembudidaya Komoditi Ikan Patin di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid, Aparatur Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, yang telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi dan data yang mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya.*, Edisi Kedua. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed.* Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- David, A. (2003). *Innovation in the Public Sector.* London. Discussion paper. The Mall.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data.* Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, M. (1988). *Adoption and Bias of New Agricultural Innovation in Jawa Barat, Indonesia.* Unpublish Ph.D. Thesis. USA. University of Minnesota.
- Halvorsen, T. et al. (2005). *On the Differences between Public and Private Sector innovations.* Publin Report. Oslo.
- Harriss, B. (1972). *Innovation Adoption in Indian Agriculture—The High Yielding Varieties Programme.*, Published by: Cambridge University Press. Source: Modern Asian Studies, Vol. 6, No. 1.
- Lin, J. Y. (1991)., *Education and Innovation Adoption in Agriculture: Evidence from Hybrid Rice in China.*, Published by: on behalf of the Oxford University Press Agricultural & Applied Economics. Source: American Journal of Agricultural Economics, Vol. 73, No.3
- Muhajir, N. (1987). *Kepemimpinan Adopsi Inovasi untuk Pembangunan Masyarakat.* Yogyakarta. Penerbit Rake Press.



- Rogers, E. M. & Shoemaker, F. F. (1981). *Memasyarakatkan Ide-ide Baru.*, Penyusun Abdillah Hanafi. Surabaya. Penerbit Usaha Nasional.
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of Innovations Third Edition*. New York. The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
- ....., (1995). *Diffusion of Innovations 4th edition.*, New York. Free Press.
- ....., (2003). *Diffusion of Innovations 5th edition.*, New York. Free Press.
- Slamet, M. (1978). *Kumpulan Bahan Bacaan Penyuluhan Pertanian*. Institut Pertanian Bogor.
- Sumarno, M. (2010). *Tingkat Adopsi Inovasi Teknologi Pengusaha Sentra Industri Kecil Kerajinan Gerabah Kasongan Kabupaten Bantul*. Universitas Negeri Medan. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Volume 12 No. 1.
- Todaro, M. P & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta. Erlangga.
- Unwin Tim. (1987). *Household Characteristics and Agrarian Innovation Adoption in North-West Portugal*. Published by: The Royal Geographical Society. Source: Transactions of the Institute of British Geographers, Vol. 12, No. 2 (1987)
- Yin, R. K. (2014). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

**PERAN PENDAMPING DALAM MENINGKATKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL  
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL PADA PROGRAM PELAYANAN  
JARAK JAUH DI KECAMATAN LEMBANG DAN CILILIN, KABUPATEN BANDUNG  
BARAT**

***COMMUNITY WORKER ROLE IN IMPROVING SOCIAL FUNCTION OF PEOPLE WITH  
INTELLECTUAL DISABILITIES ON HOME CARE PROGRAM, STUDIES IN LEMBANG  
AND CILILIN DISTRICTS, WEST BANDUNG REGENCY***

**Dedek Roslina dan Ety Rahayu**

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia  
Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat  
Email: dedekroslina@gmail.com

Diterima: 20 Desember 2017; Direvisi: 1 April 2018; Disetujui: 11 April 2018

**Abstrak**

Penelitian ini membahas peran-peran pendamping dalam meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas intelektual melalui program berbasis *home care* bernama Program Pelayanan Jarak Jauh (PPJJ) Tahun 2017. Pendamping tersebut merupakan kader masyarakat yang memberikan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kepada penerima pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping yang berpengalaman menangani anak-anak disabilitas mampu menjalankan berbagai peranan dalam rehabilitasi penyandang disabilitas intelektual, antara lain sebagai pemercepat perubahan dalam mengungkap permasalahan dan kebutuhan penerima pelayanan, sebagai penghubung antara penerima pelayanan dengan sumber pelayanan, sebagai asisten personal yang mendampingi penerima pelayanan dalam proses bimbingan rehabilitasi dan mendorong keterlibatan keluarga dalam pelayanan *home care*, serta pembuatan laporan. Pendamping juga mampu berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses kedukaan yang dialami keluarga. Pemberdayaan pendamping dapat terus dikembangkan untuk memperluas pelayanan sosial. Namun, peran pekerja sosial profesional tetap dibutuhkan, sehingga keduanya diharapkan bekerjasama untuk meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas intelektual.

**Kata Kunci:** *pendamping, disabilitas intelektual, pelayanan di rumah, keberfungsian sosial.*

**Abstract**

*The research discusses about community worker roles in improving social functioning of people with intellectual disabilities on home-care based rehabilitation program, Program Pelayanan Jarak Jauh (PPJJ) in 2017. Those community workers are local community cadres who provide physically, mentally, social, and vocational services to beneficiaries (people with intellectual disabilities). This study used a qualitative approach with the type of descriptive research. The result of this study shows that community workers whose experienced in dealing with children with disabilities are capable of performing their roles in the rehabilitation program, such as enabler in revealing beneficiaries problems and needs, as a broker in connecting beneficiaries with service sources, as a care giver in accompanying beneficiaries in the rehabilitation guidance process and encouraging family involvement in home care services, and as a reporter. Some community workers are also capable in becoming a facilitator in grieving process experienced by the family. The empowerment of local community cadres as the program officer can be more improved to broaden the social services. However, social worker roles are still needed. Both of them should work together to improve the lives of people with intellectual disabilities.*

**Keywords:** *Community worker, intellectual disability, home care, social functioning.*

## PENDAHULUAN

Disabilitas intelektual merupakan istilah pengganti dari retardasi mental yang dinilai berkonotasi negatif. Menurut *American Association on Intellectual and Developmental Disabilities* (AAIDD) disabilitas intelektual ditandai dengan hambatan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang ditunjukkan dalam keterampilan konseptual, sosial, dan praktek adaptif, dan terjadi sebelum berusia 18 tahun (AAIDD, 2010). Gangguan perkembangan yang disebabkan oleh disabilitas pada fungsi intelektual menimbulkan berbagai hambatan dalam kehidupan, seperti penyesuaian diri dengan lingkungan sosial, kesulitan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari, kesulitan dalam proses belajar, kesulitan dalam menjalin relasi, serta kesulitan untuk mendapatkan keterampilan dan kesempatan kerja.

Salah satu upaya menangani permasalahan disabilitas intelektual adalah dengan melaksanakan program rehabilitasi sosial. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Hal ini dimaksudkan agar dapat memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya, serta memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Lemmi, V (2015) menjelaskan bahwa *Community Based Rehabilitation* (CBR) merupakan strategi yang dikembangkan WHO dan badan internasional lainnya untuk menjawab kebutuhan penyandang disabilitas

di negara-negara berkembang. CBR bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan pengampunya dengan mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta mewujudkan partisipasi dan inklusifitas dengan memanfaatkan sumber daya lokal. CBR diimplementasikan melalui seperangkat upaya-upaya masyarakat dan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan, dan pelayanan sosial yang memadai. Model CBR mampu melayani penyandang disabilitas di daerah terpencil dalam bentuk pelayanan di rumah (*home based services*), pelayanan penjangkauan, atau program pengembangan masyarakat di bidang disabilitas. Kirst-Ashman (2013) menyebut model CBR sebagai *deinstitutionalization*, dimana penyandang disabilitas intelektual dapat berasimilasi dengan masyarakat dan memperoleh kualitas hidup yang lebih baik dibanding pelayanan institusi.

Program rehabilitasi berbasis keluarga dinilai menjadi solusi atas kendala-kendala yang dihadapi proses rehabilitasi di dalam panti. Widodo (2012) menganalisa bahwa rehabilitasi di dalam panti hanya berfokus pada klien, bukan pada sistem klien. Keluarga, sebagai tempat asal klien, tidak dilibatkan dalam proses intervensi sehingga kemandirian klien tidak tercapai dan tak jarang keluarga yang tidak siap menerima anaknya kembali setelah pelayanan selesai. Strategi yang ditempuh Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Ciungwanara Bogor dalam rangka menyelenggarakan rehabilitasi sosial non-institusional dan berbasis keluarga (*home care*) adalah dengan membuat program pelayanan luar panti bernama Program Pelayanan Jarak Jauh (PPJJ). Program ini bertujuan untuk memperluas jaringan usaha kesejahteraan sosial penyandang disabilitas intelektual, memberdayakan orang tua/keluarga agar mereka dapat berperan serta dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial

kepada penyandang disabilitas intelektual, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas intelektual yang dilaksanakan di lingkungannya.

Pada Tahun 2017 PPJJ dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat dengan merekrut 10 orang pendamping sebagai pelaksana program. Dengan kata lain, pendamping/kader ini adalah perpanjangan tangan Kementerian Sosial untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial pada penyandang disabilitas intelektual. Zastrow (2004) mengemukakan "*Social workers are only one of numerous groups of professionals who provide services to persons with disability*" (Para pekerja sosial merupakan satu-satunya tenaga profesional yang menyediakan pelayanan bagi penyandang disabilitas). Namun, dengan bergesernya paradigma *medical model* menjadi *social model* yang menitikberatkan pada pembenahan hambatan dalam masyarakat dan lingkungan dimana penyandang disabilitas berinteraksi, serta jumlah tenaga pekerja sosial yang terbatas, maka *community worker* atau para praktisi lainnya mulai dilibatkan untuk menjalankan peran sebagai pendamping pelayanan bagi penyandang disabilitas intelektual.

Pendampingan oleh tenaga kader masyarakat merupakan langkah strategis yang memungkinkan proses rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual di dalam masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Keluarga dan masyarakat, sebagai sistem penerima pelayanan, seringkali kurang memahami permasalahan penyandang disabilitas intelektual, sehingga tidak mampu menciptakan kondisi yang promotif bagi tumbuh kembang kemandiriannya. Di sisi lain, penyedia layanan rehabilitasi sosial seperti panti mempunyai keterbatasan untuk memberikan bimbingan dan fasilitas kepada keluarga dan

penyandang disabilitas intelektual secara intensif di dalam masyarakat dan keluarga, terlebih dalam jangkauan wilayah yang jauh.

Terdapat beberapa penelitian yang menggambarkan peran kader masyarakat lokal dalam memberikan pelayanan kesehatan maupun sosial. Dovlo (2004) menjelaskan bahwa perbandingan *substitute health worker* (SHW) dan dokter hanya menunjukkan sedikit perbedaan hasil pada pasien. Kader masyarakat dinilai memiliki keterikatan yang lebih kuat dengan masyarakat dan mampu bertahan di tengah kondisi lingkungan asalnya. Selain itu pemberdayaan kader masyarakat dapat menghemat biaya program, baik dalam insentif, akomodasi, dan biaya pelatihan. Namun, kualitas pelayanan kader masyarakat berbeda dengan tenaga profesional. Penelitian Wardaningsih (2016) mengenai perbandingan tenaga profesional dan kader menggambarkan kader masyarakat yang menunjukkan perilaku negatif ketika melayani orang dengan gangguan jiwa meskipun mereka telah mengikuti pelatihan kesehatan mental. Hal ini menunjukkan kader masyarakat tidak memperhatikan kode etik saat bertugas.

Tujuan penelitian ini antara lain menggambarkan peran pendamping dalam meningkatkan keberfungsian sosial penerima pelayanan PPJJ, serta menggambarkan faktor pendukung dan penghambat pendamping dalam melaksanakan tugas dan peran mereka. Selain untuk memperkaya literatur studi penelitian evaluatif dan studi yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas intelektual, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program rehabilitasi berbasis masyarakat baik dalam aspek pemilihan kader, pelatihan pendamping, maupun kolaborasi antara kader dan tenaga profesional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober s.d Desember 2017 di Kecamatan Lembang dan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan lokasi pelaksanaan Program Pelayanan Jarak Jauh (PPJJ) Tahun 2017. Teknik pemilihan informan adalah dengan teknik *purposive sampling*, dimana 5 orang pendamping PPJJ dijadikan informan dengan kriteria: 1) Mewakili lokasi Kecamatan Cililin dan Lembang; 2) mewakili keberagaman antara yang berpengalaman dan yang tidak berpengalaman menangani disabilitas intelektual; dan 3) Mendampingi penerima pelayanan dengan jenis disabilitas intelektual yang berbeda. Sebanyak 6 orang tua penerima pelayanan (yang mewakili keberagaman berdasarkan jenis disabilitas intelektual dan sekolah/tidak sekolah), 1 orang supervisor, dan 1 orang petugas pelaksana turut dijadikan informan untuk triangulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Pendamping Program Pelayanan Jarak Jauh (PPJJ) Tahun 2017

Para pendamping PPJJ Tahun 2017 dipilih oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dengan pertimbangan aktivitas sosial yang mereka miliki, jarak dengan lokasi tempat tinggal penerima layanan, dan keterwakilan dari Kecamatan Lembang, Cililin, dan Dinas Sosial. Mereka memperoleh pelatihan pendampingan PPJJ selama tiga hari di PSBG Ciungwanara Bogor. Sebanyak empat orang pendamping ditetapkan dari Kecamatan Cililin untuk membimbing 12 penerima layanan, dan enam orang dari Kecamatan Lembang untuk membimbing 18 penerima layanan, atau dengan

perbandingan 1:3 sesuai arahan dari PSBG Ciungwanara Bogor.

Seluruh pendamping PPJJ Tahun 2017 berjumlah 10 orang, mencakup 2 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Mereka memiliki latar belakang pendidikan yang beragam antara lain Sarjana (1 orang), Diploma (1 orang), SMA (4 orang) dan SMP (4 orang). Hampir semua pendamping berpengalaman dalam kegiatan sosial seperti sebagai Kader Tuberculosis, PKK Desa, Ketua RW, guru PAUD, Perempuan Sadar Pemilu, kader posyandu, kader pos KB, Bunda Literasi, petugas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan anggota Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI). Pengalaman para pendamping dalam menangani anak-anak disabilitas sudah diperoleh sejak hadirnya RBM di Desa Lembang dan Desa Cililin. Ada pula yang pernah mengikuti diklat terapi bagi penyandang disabilitas fisik di Solo dan menjadi guru SD inklusi. PPJJ merupakan program pertama dimana mereka menangani isu disabilitas intelektual. Namun, ada pula pendamping yang tidak memiliki pengalaman intervensi sosial secara langsung dengan masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap kinerja pendampingan penerima pelayanan.

Para pendamping PPJJ Tahun 2017 bertugas memberikan pendampingan kepada penerima pelayanan sebanyak dua kali seminggu. Lama waktu pendampingan sangat bervariasi yakni 1-4 jam tergantung pada kondisi psikologis penerima pelayanan. Peran-peran yang dijalankan para pendamping dalam pelaksanaan PPJJ Tahun 2017, antara lain:

### Pembimbing penerima pelayanan

Para pendamping melaksanakan bimbingan ke rumah-rumah penerima pelayanan sebanyak dua kali dalam seminggu sesuai dengan instruksi PSBG Ciungwanara Bogor. Namun,



jumlah pertemuan bisa bertambah saat penerima layanan mengikuti bimbingan RBM di Desa atau saat salah satu pendamping berinisiatif mengumpulkan penerima pelayanan untuk belajar bersama. Jenis bimbingan dalam PPJJ ini terdiri dari bimbingan individu, bimbingan kelompok, dan bimbingan kemasyarakatan.

Tujuan bimbingan individu adalah untuk mencapai kemandirian bagi penerima pelayanan mengingat kekhawatiran mereka saat orang tua atau keluarga penerima pelayanan sudah tiada. Penerima pelayanan yang masih bergantung pada orang tua diajarkan untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti makan, mandi, BAK/BAB, membersihkan diri saat menstruasi, berpakaian, memotong kuku, mencuci, memasak, menyapu, melipat pakaian, membantu orang tua mengelola warung, dsb.

Pada umumnya pendamping memberikan pelajaran akademis kepada penerima pelayanan mulai dari memegang pensil, menyambungkan titik-titik, menulis, menggambar, membaca cerita, mendongeng, berhitung, mengenal warna, mengenal mata uang, dsb. Ada pula yang mengajarkan berbelanja ke warung, bernyanyi, dan bimbingan keagamaan seperti berwudhu, sholat, membaca Iqro, berdoa, dsb. Pada penerima pelayanan yang sedang bersekolah di SD inklusi, program PPJJ membantu meningkatkan pembelajaran akademis dimana setelah pulang sekolah, penerima pelayanan dapat kembali mengulang pelajaran di rumah, mengerjakan PR, dan belajar lebih intensif dengan pendampingan personal (1:1) yang tidak diperoleh di sekolah.

Terdapat beberapa pendamping yang mengalami kesulitan menangani penerima pelayanan dengan autisme, hiperaktif, dan gangguan tingkah laku. Supervisor PPJJ mengembalikan keputusan penanganan kepada pendamping untuk tetap menangani atau

mengganti penerima pelayanan. Pada akhirnya para pendamping tetap melaksanakan tugas bimbingan karena rasa tantangan sekaligus bersimpati kepada penerima pelayanan. Sebagai contoh, ada penerima pelayanan yang selalu melukai pendamping saat bimbingan, atau membenturkan kepalanya ke tembok dengan keras. Setelah beberapa minggu bimbingan tanpa hasil, pendamping tersebut memutuskan untuk belajar outdoor di sebuah pacuan kuda agar penerima pelayanan bisa berinteraksi dengan alam dan binatang. Belajar outdoor juga bertujuan untuk mencegah penerima pelayanan melukai dirinya sendiri. Keputusan pendamping tersebut membuahkan hasil dimana kondisi psikologis penerima pelayanan menjadi lebih stabil, kedekatan dengan pendamping terjalin lebih erat, dan proses bimbingan dapat dilanjutkan. Penerima pelayanan lain yang membutuhkan terapi khusus diajak mengikuti kegiatan terapi di RBM seperti terapi wicara, terapi motorik, terapi untuk mengendalikan hiperaktif, dan sebagainya.

Bimbingan individu juga meliputi pendekatan personal dimana mayoritas penerima manfaat mengalami trauma atas perlakuan masyarakat terhadap kondisi mereka. Penerima pelayanan yang pernah menjadi korban bullying menjadi lebih tertutup dan pemalu. Namun, setelah pertemuan intensif dengan pendamping, mereka menjadi memiliki teman untuk diajak berkomunikasi dan bermain. Selain itu, para pendamping dituntut untuk lebih kreatif dalam membimbing penerima pelayanan yang mudah bosan. Tak jarang pendamping mencari ide dan alat bimbingan (selain yang dipersiapkan PSBG Ciungwanara Bogor) yang menarik minat penerima pelayanan untuk belajar.

Di Kecamatan Lembang, pendamping mengumpulkan ke-18 penerima pelayanan di Kantor Desa untuk belajar mengaji Iqro, praktek sholat, dan berjalan-jalan melihat

lingkungan sekitar. Mereka melihat bunga, tanah, dan pohon, serta mengidentifikasi bentuk dan warnanya. Mereka juga melakukan praktek cuci tangan sambil diberikan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Pembelajaran berkelompok memberikan motivasi bagi para penerima pelayanan yang belum mandiri dengan kehadiran teman-teman yang lain untuk belajar bersama. Karena Kantor Desa saat ini sedang direnovasi, seluruh penerima manfaat dikumpulkan di rumah salah satu pendamping untuk belajar bersama. Masyarakat yang melihat kegiatan tersebut dan memiliki anak berkebutuhan khusus terkadang meminta untuk turut berpartisipasi. Sedangkan pendamping di Kecamatan Cililin melakukan bimbingan kelompok dengan olahraga bersama di Curug Sawyer. Mereka melakukan senam, berlari-lari, bermain air, bermain bola, *puzzle*, dsb. Penerima pelayanan yang tidak mau bergaul dengan orang lain menjadi terbiasa dengan kerumunan orang banyak, mau berkomunikasi, dan bermain bersama.

Bimbingan kemasyarakatan yang dilakukan pendamping meliputi pengenalan fasilitas umum kepada penerima pelayanan dimana mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat, seperti tempat ibadah, madrasah, atau warung. Pendamping juga mengajak penerima pelayanan untuk berkunjung ke rumah tetangga, atau memanggil tetangga ke rumah penerima pelayanan untuk bercengkrama dan membiasakan penerima pelayanan untuk berhadapan dengan orang banyak. Ada pula yang mendampingi penerima pelayanan untuk berbaur dengan teman-teman sebayanya meski usia psikologis mereka berbeda, melibatkan mereka dalam karang taruna, mengenalkan dengan tokoh agama, Ketua RT/RW, mengikuti pengajian, dan menengok orang sakit.

Pada saat pertemuan di Curug Sawyer, dimana masyarakat banyak yang berlari pagi kesana,

para pendamping sering memperkenalkan penerima pelayanan kepada masyarakat yang bertanya mengenai kondisi mereka. Selain itu, disana banyak ditemui komunitas-komunitas yang sedang berkumpul, seperti Komunitas Ular Sanca dimana penerima pelayanan diperkenalkan kepada mereka, mengenal beragam jenis ular, dan berkesempatan menyentuh ular sanca.

### **Pembimbing orang tua penerima pelayanan**

Tak hanya membimbing penerima pelayanan, para pendamping juga membimbing orang tua penerima pelayanan untuk mencapai tujuan program yang berkelanjutan. Pada saat bimbingan berlangsung, orang tua atau keluarga penerima pelayanan harus turut serta sehingga mereka tahu pendekatan terbaik bagi anak disabilitas intelektual, cara mengajar mereka, dan mengetahui potensi-potensi yang dapat dikembangkan untuk keberlangsungan hidupnya. Para pendamping mengarahkan orang tua untuk turut serta membantu proses bimbingan, antara lain memberikan PR dan melanjutkan pengajaran setelah bimbingan pendamping selesai.

Banyak ditemui orang tua yang pesimis, tak acuh, atau mencubit penerima pelayanan saat kesal dengan tingkah laku mereka. Para pendamping memberikan pengarahan kepada orang tua untuk tidak memarahi anak dan tidak mengatakan “anak bodoh” atau “tidak berguna”, melainkan harus menyayangi mereka, merangkul, tidak menyia-nyiakan, dan lebih sabar dalam membimbing mereka. Orang tua juga diajarkan untuk lebih berhati-hati dan melindungi penerima pelayanan dari resiko kejahatan terhadap disabilitas intelektual.

Pada saat bimbingan kelompok, orang tua berkesempatan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang tua penerima pelayanan lainnya. Mereka dapat melihat

kondisi anak yang berbeda satu sama lain dalam klasifikasi disabilitas intelektual yang dialami penerima pelayanan. Pertemuan ini menjadi media untuk berbagi pengalaman atau cerita hidup yang membuat orang tua lebih mensyukuri keadaan anaknya. Banyak pendamping yang menemukan rasa rendah diri pada orang tua penerima pelayanan atas kondisi yang dialami anak mereka. Pendamping berupaya menghilangkan rasa rendah diri tersebut dengan mengangkat potensi yang dimiliki anak dan mengajarkan orang tua untuk tidak malu mengajak anak mereka bersosialisasi dengan lingkungan luar.

### **Pembimbing kakak/adik penerima pelayanan**

Para pendamping PPJJ juga berperan membimbing kakak/adik penerima pelayanan dimana mereka ikut belajar bersama saat pendamping berkunjung ke rumah. Mereka mengerjakan PR dari sekolah dengan bimbingan pendamping, sehingga penerima pelayanan termotivasi untuk terus belajar. Salah satu pendamping juga memberikan bimbingan psikologis kepada kakak penerima pelayanan dimana ia sering mengalami depresi atas keadaan keluarganya yang miskin dan adik-adiknya yang mengalami disabilitas intelektual.

### **Pendengar keluh kesah keluarga**

Intensitas kunjungan bimbingan bagi penerima pelayanan membuat hubungan keluarga dengan pendamping menjadi semakin dekat. Karena kedekatan ini, pendamping PPJJ sering menjadi tempat berkeluh kesah keluarga mengenai berbagai permasalahan, diantaranya permasalahan kemiskinan, perilaku anak, dsb.

### **Pendidik keluarga**

Penyebab disabilitas intelektual yang terjadi pada salah satu penerima pelayanan adalah kekurangan gizi berat. Dengan

kondisi rumah tangga yang miskin, terdapat satu keluarga dengan tiga anak disabilitas intelektual. Pendamping memberikan saran penggunaan Metode Operatif Wanita (MOW) untuk menghentikan kehamilan kepada salah satu keluarga penerima pelayanan dengan pertimbangan ibu telah 7 kali melahirkan dan seluruh anaknya tidak diberikan gizi yang cukup sehingga mengalami disabilitas intelektual.

### **Penjalin kerja sama dengan pihak sekolah untuk mengembangkan sistem inklusi bagi penyandang disabilitas intelektual**

Di Kecamatan Cililin terdapat dua Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sebuah SD inklusi yang menerima murid disabilitas, termasuk penerima pelayanan PPJJ. Meskipun SLB dapat menampung anak-anak disabilitas intelektual disana, pendamping terus berupaya menjalin kerjasama dengan kepala sekolah SD lainnya agar mau menerima anak disabilitas intelektual dengan tujuan agar penyandang disabilitas dan SD inklusi berbaur dan saling mendukung.

### **Pendamping dalam pengelolaan bantuan stimulan**

Di akhir program, orang tua penerima pelayanan PPJJ memperoleh bantuan stimulan sebesar Rp 3.000.000,- untuk dijadikan modal usaha. Pendampingan bantuan stimulan meliputi beberapa kegiatan, pertama, asesmen jenis usaha yang akan dilakukan orang tua penerima pelayanan. Pendamping melakukan asesmen kebutuhan bantuan usaha setiap orang tua penerima layanan yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Diantara jenis usaha tersebut ada yang ingin mengembangkan usaha yang telah dijalankan, ada pula yang memulai usaha baru. Pendamping memberikan saran pilihan terbaik atas jenis usaha yang diputuskan orang tua. Sebagai contoh, salah satu orang tua penerima pelayanan meminta dibeli domba, tetapi pendamping mengarahkan orang tua

untuk mempertimbangkan pilihan berjualan asongan yang pernah dijalankan mengingat kondisi orang tua yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Usaha domba membutuhkan waktu yang lama, sedangkan berjualan asongan memberi peluang orang tua memperoleh penghasilan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Apabila bantuan stimulan tetap dibeli domba, besar kemungkinan domba tersebut dijual dalam waktu dekat.

Kedua, para pendamping menyusun proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) usaha penerima pelayanan bersama-sama karena tidak semua mahir menggunakan komputer. Proposal dan RAB diserahkan kepada PSBG Ciungwanara untuk ditindaklanjuti. Ketiga, mereka mendampingi pencairan uang bantuan stimulan ke bank. Setelah memperoleh informasi bantuan telah cair, para pendamping di masing-masing kecamatan berangkat ke bank bersama-sama. Di Kecamatan Lembang, proses pencairan dikendalikan sepenuhnya oleh Koordinator Pendamping, antara lain mendampingi ke bank, orang tua menandatangani penarikan uang kemudian menyerahkannya kepada Koordinator Pendamping. Koordinator Pendamping akan menyerahkan uang kepada pendamping yang menangani penerima pelayanan yang bersangkutan pada hari dimana mereka akan berbelanja. Ketatnya mekanisme kontrol bantuan stimulan tersebut dilakukan Koordinator Pendamping untuk mengantisipasi penggunaan bantuan yang tidak semestinya.

Adapun pendamping di Kecamatan Cililin menyusun mekanisme pencairan bantuan sendiri dimana seluruh orang tua penerima pelayanan dikumpulkan di SDN 1 Cililin untuk diberikan pengarahan dan berangkat ke bank bersama-sama. Setelah proses penarikan uang, para orang tua memegang uang bantuan tersebut sendiri dan berbelanja bersama pendamping. Keempat, para pendamping mendampingi orang tua

berbelanja bantuan stimulan sesuai RAB yang telah ditentukan. Selain perbedaan mekanisme pencairan terdapat pula perbedaan mekanisme pembelanjaan di kedua kecamatan tersebut. Orang tua penerima pelayanan di Lembang tidak diijinkan memegang uang sehingga pendamping yang melakukan pembayaran setelah orang tua selesai memilih barang. Ada pula orang tua yang hanya menunggu barang bantuan diantarkan ke rumah. Sedangkan di Cililin, orang tua memegang uang sendiri dan berbelanja sendiri dengan pengawasan pendamping. Para pendamping memastikan pembelanjaan bantuan sesuai RAB.

Kelima, para pendamping PPJJ 2017 menyusun laporan pembelanjaan yang berisi nota pembelian bantuan stimulan dan berita acara serah terima barang yang ditandatangani orang tua penerima pelayanan. Keenam, pendamping memastikan keberlanjutan wirausaha. Setiap pertemuan bimbingan penerima pelayanan, pendamping memantau perkembangan pengelolaan bantuan stimulan. Selama sebulan berjalan, perputaran modal usaha orang tua sudah terlihat, salah satunya usaha gas elpiji yang sudah habis dalam dua minggu, usaha kaktus hias yang sudah mengeksport hingga California, usaha warung, usaha keripik dan rempeyek, dsb. Adapun usaha yang memerlukan waktu lama adalah ternak domba dan sapi perah.

### **Penyusun laporan**

Para pendamping PPJJ diwajibkan untuk menyusun laporan hasil bimbingan penerima pelayanan sesuai format yang telah disiapkan. Pendamping juga mendokumentasikan kegiatan bimbingan dalam berbagai bentuk, seperti foto, video, atau hasta karya yang dibuat penerima pelayanan. Pendamping yang berlatar belakang guru atau tutor PAUD akan terbiasa membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan.

Diantaranya ada pendamping yang membuat laporan kondisi awal PM secara rinci meliputi aspek kondisi penerima pelayanan, keluarga, permasalahan, dan kebutuhan penerima pelayanan, termasuk rencana bimbingan setiap minggu.

### **Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas pendamping PPJJ Tahun 2017**

Pengalaman pendamping di berbagai kegiatan sosial dan kegiatan di bidang disabilitas sangat membantu proses bimbingan penerima pelayanan PPJJ. Mereka telah terbiasa melintasi desa untuk melaksanakan tugas dari pemerintah setempat sehingga tidak mengeluh akan jarak yang harus ditempuh saat membimbing penerima pelayanan. Selain itu, pembimbing yang terbiasa mengajar anak disabilitas memiliki pengalaman pendekatan personal yang lebih baik dan kreatifitas dalam mengajar. Faktor pendukung internal lainnya adalah rasa kepedulian terhadap anak berkebutuhan khusus yang dimiliki pendamping dimana dengan honor terbatas mereka tetap berusaha agar penerima pelayanan dapat mandiri. Kepedulian ini juga yang mendorong pendamping melaksanakan bimbingan melebihi waktu yang ditetapkan PSBG Ciungwanara, memberikan bimbingan kepada orang tua penerima pelayanan secara intensif, atau mengajak penerima pelayanan untuk bermain dan belajar bersama di rumah mereka.

Hadirnya Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) di Desa Lembang dan Desa Cililin merupakan faktor pendukung eksternal utama pendamping dalam melaksanakan perannya. Lembaga yang dibentuk *Save The Children* pada tahun 2013 ini telah ditindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan melaksanakan berbagai kegiatan bagi anak-anak disabilitas seperti belajar,

pelayanan terapi, serta pelayanan advokasi dan rujukan. Aktivitas para pendamping di RBM mempermudah mereka untuk melaksanakan tugas pendampingan penerima pelayanan PPJJ. RBM juga menjadi media penerima pelayanan PPJJ untuk memperoleh berbagai terapi yang tidak disediakan PPJJ.

Faktor pendukung lainnya antara lain solidaritas pendamping untuk bekerja sama menjalankan seluruh tugas pendampingan, menggantikan tugas pendamping lain yang berhalangan hadir, dan membantu sesama pendamping yang mengalami masalah dalam membimbing penerima pelayanan. Para pendamping juga memperoleh dukungan dari berbagai sistem sumber, seperti Kepala Desa Lembang yang rutin mensupervisi kegiatan pendamping, Ibu RT di Cililin yang memfasilitasi tempat tinggalnya untuk dijadikan tempat belajar bersama, dan SD inklusi yang mendukung aktivitas pendamping.

Beberapa pendamping mengalami kesulitan membuat laporan pembelanjaan bantuan stimulan karena faktor usia. Ada yang tidak jeli berhitung, tidak jeli melihat satuan barang di nota yang tidak sesuai RAB, atau lembar laporan yang tidak rapi. Ada pula pendamping yang mengalami stroke saat proses bimbingan berlangsung. Selama tiga bulan, pendamping tersebut mengajak penerima pelayanan belajar di rumahnya.

Rasa pesimis dan malas dari orangtua penerima pelayanan menjadi hambatan pendamping dalam melaksanakan tugasnya. Saat pendamping semangat mengajar dan meminta orang tua untuk melanjutkan, orang tua tersebut tak acuh karena sudah menyerah dengan kondisi anaknya yang sulit. Kondisi psikologis anak yang labil juga membuat proses bimbingan tidak berjalan dimana penerima pelayanan tidak mau belajar meski pendamping



sudah membujuk berjam-jam, penerima pelayanan yang diam dan menutup mukanya sepanjang hari karena marah, menangis meraung-raung, atau melukai diri sendiri. Tidak semua pendamping dapat menangani kondisi psikologis penerima pelayanan.

Terdapat penerima pelayanan yang mengalami gangguan lain di samping disabilitas intelektual, seperti autisme, ADHD, dan gangguan tingkah laku. Para pendamping tidak dibekali materi dan teknik penanganan berbagai gangguan tersebut, sehingga proses bimbingan menjadi tidak maksimal. Ada pula salah satu pendamping yang tidak memahami penyebab down syndrome, dimana kelainan tersebut dianggap karena ibunya terlalu lelah bekerja saat mengandung. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan pendamping tidak dapat memberikan penjelasan yang meringankan keduakaan yang dialami orang tua penerima pelayanan.

### **Peran Pendamping dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual**

Menurut Zastrow (2004) terdapat 7 peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial baik dalam praktek individu, keluarga, maupun kelompok yakni konseling klien, konseling keluarga, menelaah riwayat sosial, sebagai *case manager*, sebagai *broker*, merencanakan upaya tindak lanjut, dan memfasilitasi *grieving process*. Kirst-Ashman (2013) menambahkan peran *educator* dan advokat dapat dilakukan pekerja sosial saat menangani isu disabilitas. Sedangkan menurut Kementerian Sosial (2009), tugas pendamping dalam program *home care* bagi penyandang disabilitas intelektual antara lain melakukan penelaahan serta pengungkapan masalah dan kebutuhan penyandang disabilitas intelektual; melakukan wawancara dan konseling; menghubungkan

penyandang disabilitas intelektual dengan sumber pelayanan; mendampingi penyandang disabilitas intelektual dalam kegiatannya secara terprogram; mendorong keterlibatan keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam pelayanan *home care*; dan membuat laporan.

Sebagaimana dikemukakan oleh informan, membimbing penerima pelayanan merupakan tugas utama pendamping PPJJ. Dalam membimbing penerima pelayanan, pendamping melaksanakan berbagai peran antara lain: Pertama, mengungkap permasalahan dan kebutuhan penerima pelayanan. Pada pertemuan awal, pendamping melakukan pendekatan kepada penerima pelayanan maupun keluarga. Mereka mengidentifikasi kondisi, kebutuhan, dan potensi penerima pelayanan, serta bekerja sama dengan orang tua untuk menentukan prioritas bimbingan yang akan diberikan selama program berjalan. Sebagaimana dikemukakan Robson & Owens dalam Bollard (2009), *family carers* (termasuk orang tua) terkadang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak mengenai kondisi penerima pelayanan sehingga mereka tahu bagaimana melakukan pendekatan pada penerima pelayanan.

Kedua, mendampingi penerima pelayanan dalam proses rehabilitasi, dimana penerima pelayanan didampingi dalam kegiatan bimbingan individu, kelompok, maupun kemasyarakatan. Proses pendampingan ini disebut juga konseling klien menurut Zastrow (2004), yakni membantu klien menyesuaikan diri dengan kondisi disabilitas yang dialaminya atau penyesuaian dengan program rehabilitasi yang dijalannya. Selain itu pendamping juga mengarahkan penerima pelayanan untuk turut terlibat dalam pengelolaan bantuan stimulan yang diberikan pada orang tua, seperti turut mengelola warung, menggembala ternak, membungkus rempeyek dan keripik, dsb.

Ketiga, menjadi *broker*. Beberapa pendamping mampu menghubungkan penerima pelayanan dengan pelayanan lain antara lain terapi wicara dan tingkah laku di RBM dan partisipasi di sekolah inklusi.

Peran pendamping lokal memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan suatu program. Keberadaan pendamping di tengah-tengah masyarakat memungkinkan mereka untuk dapat memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi penerima pelayanan dan sistem yang menyertainya, yakni keluarga dan masyarakat. Berbeda dengan pelaksana program dari luar, pendamping lokal mampu menjembatani antara kepentingan pihak pemerintah (sebagai penyelenggara program) dan masyarakat (sebagai penerima layanan program). Pendamping menjadi kunci utama keberhasilan PPJJ melalui berbagai peran yang mereka jalankan untuk meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas intelektual.

Van Teijlingen (2017) menegaskan bahwa cara kita mendefinisikan masalah akan berdampak pada solusi yang kita cari. Pada perspektif *medical model*, penyandang disabilitas intelektual menjadi sasaran utama rehabilitasi medis, sedangkan pada perspektif *social model* solusi permasalahan penyandang disabilitas intelektual berada pada pembenahan di level masyarakat. Masalah sosial yang dialami penyandang disabilitas intelektual tidak hanya disebabkan hambatan dalam fungsi kognitif dan kemampuan adaptif saja, tetapi juga masalah hubungan timbal balik yang kompleks dengan keluarga dan masyarakat. Aktivitas pendamping dalam PPJJ mendorong penerima pelayanan memperoleh keberfungsian sosial mereka. Castro (2018) mengemukakan bahwa kerangka keberfungsian penyandang disabilitas mencakup interaksi timbal balik antara faktor sosial, psikologis, dan biologis sesuai konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Melalui PPJJ

Tahun 2017, para pendamping menyusun langkah intervensi yang menyesuaikan dengan kebutuhan penerima layanan, yakni memaksimalkan fungsi dan struktur tubuh melalui berbagai jenis terapi, latihan aktivitas hidup sehari-hari, meningkatkan partisipasi penerima pelayanan dalam aspek pendidikan dan aktivitas sosial kemasyarakatan, serta melakukan langkah promotif kepada masyarakat mengenai kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas intelektual.

Peranan konseling keluarga juga dijalankan pendamping PPJJ baik pada saat membimbing orang tua, membimbing kakak/adik penerima pelayanan, mendengarkan keluhan kesah keluarga, dan memberikan edukasi pentingnya KB dan pemenuhan gizi anak kepada orang tua. Peran mendorong keluarga untuk berpartisipasi dalam kegiatan program juga dilaksanakan pendamping dimana orang tua atau anggota keluarga harus hadir mendampingi saat kegiatan bimbingan penerima pelayanan. Tak hanya di dalam rumah, anggota keluarga turut berpartisipasi saat penerima pelayanan mengikuti bimbingan di luar rumah. Pada saat bimbingan kelompok dimana seluruh orang tua penerima pelayanan berkumpul, pendamping pun menjalankan peran memfasilitasi proses kedukaan (*grieving process*) yang dialami orang tua sehingga mereka saling berbagi kecemasan, kesedihan, dan dukungan sekaligus bersyukur atas kondisi yang dialami anak mereka. Sebagaimana dikemukakan Zastrow (2004) para orang tua dengan anak disabilitas mengalami kedukaan mendalam yang berlangsung tak hanya beberapa tahun, tetapi bisa seumur hidup. Bimbingan sosial kelompok merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kedukaan tersebut.

Adapun peran pendamping PPJJ dalam membuat laporan dilaksanakan sesuai dengan arahan penyelenggara program yakni membuat

laporan bimbingan penerima pelayanan (terdiri dari jenis bimbingan, metode, alat, hasil, dan paraf orang tua) dan laporan pembelanjaan bantuan stimulan.

Dari hasil temuan lapangan, para pendamping yang merupakan kader masyarakat lokal dapat menjalankan seluruh tugas sesuai dengan pedoman *home care* bagi penyandang disabilitas intelektual. Meskipun hanya mengikuti pelatihan tiga hari untuk menjalankan peran pendampingan PPJJ Tahun 2017, mayoritas kader sudah berpengalaman dalam membimbing anak-anak disabilitas melalui kegiatan RBM. Dengan demikian, kehadiran RBM di Desa Lembang dan Cililin menjadi faktor pendukung utama keberhasilan pendamping menjalankan peran-perannya.

Kader masyarakat lokal dapat dijadikan perpanjangan tangan pemerintah dalam program rehabilitasi sosial yang tidak dapat dijangkau karena jarak lokasi yang jauh atau sumber daya aparatur dan tenaga profesional yang terbatas. Pemberdayaan kader masyarakat dalam sebuah program juga mampu mencapai efektifitas biaya, waktu, dan pencapaian tujuan program. Namun, merujuk pada Zastrow (2004), ada beberapa peran pekerja sosial (sebagai tenaga profesional di bidang disabilitas) yang tidak dapat dijalankan kader masyarakat lokal, antara lain:

#### 1. Menelaah riwayat sosial

Pekerja sosial selalu melakukan asesmen mendalam mengenai riwayat sosial yang berisi informasi latar belakang keluarga klien dan kondisinya saat ini. Informasi juga berisi bagaimana kondisi keluarga sebelum memperoleh pelayanan, saat ini, dan kondisi yang mungkin terjadi di masa mendatang. Selain itu, latar belakang disabilitas, reaksi positif/negatif dari keluarga terhadap disabilitas, hubungan keluarga, kekuatan

dan kelemahan keluarga dalam menghadapi permasalahan disabilitas, kemampuan sosialisasi klien di sekolah, tempat kerja, dan setting lainnya, serta riwayat pelayanan yang pernah diberikan pada klien juga tertuang dalam riwayat sosial tersebut. Tak hanya dari klien dan keluarga, informasi riwayat sosial diperoleh dari lembaga penyedia layanan sosial dan medis yang pernah menangani klien.

#### 2. Menjadi Case Manager

Sebagai *Case Manager*, pekerja sosial melakukan asesmen kebutuhan klien, merencanakan dan menghubungkan pelayanan yang tersedia dari agen/lembaga rehabilitasi pada klien, termasuk pelayanan ekstensif seperti perawatan kesehatan, perumahan, pekerjaan, pendidikan, dsb. Pekerja sosial kemudian mengoperasikan proses pemberian layanan tersebut dan memastikannya berjalan dengan efektif.

#### 3. Merencanakan upaya tindak lanjut

Dalam setting rehabilitasi, pekerja sosial harus merencanakan pemberhentian layanan dan tindak lanjutnya. Penerima pelayanan yang telah selesai mengikuti program rehabilitasi dapat mengikuti kegiatan program lain atau dirujuk ke institusi lain sesuai dengan kebutuhan khususnya dan hasil evaluasi pelayanan.

Sebagaimana penelitian Dovlo (2004) dan Wardiningsih (2016), kualitas pelayanan kesehatan dan sosial yang diberikan oleh kader masyarakat lokal sangat bergantung pada kontrol dan supervisi dari tenaga profesional. Selain itu, kader masyarakat lokal tidak memperhatikan kode etik pelayanan sebagaimana yang dilakukan tenaga profesional. Keterbatasan yang dimiliki kader masyarakat lokal maupun pekerja sosial hendaknya diantisipasi dengan menggabungkan peran keduanya sehingga mereka bisa bekerjasama untuk meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas intelektual.

## KESIMPULAN

Kader masyarakat mampu menjalankan peran pendampingan sesuai panduan pelayanan *home care* bagi penyandang disabilitas intelektual dan kebijakan Program Pelayanan Jarak Jauh (PPJJ) Tahun 2017. Mereka menjalankan berbagai peran pekerja sosial dalam rangka meningkatkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas intelektual, meliputi: enabler dalam mengungkap permasalahan dan kebutuhan penerima pelayanan, broker dalam menghubungkan penerima pelayanan dengan sumber pelayanan, pendamping personal bagi penerima pelayanan dalam proses bimbingan rehabilitasi, konseling keluarga, dan mendorong keterlibatan keluarga dalam pelayanan *home care*, dan pembuat laporan.

Faktor pendukung keberhasilan para kader dalam menjalankan tugasnya tersebut antara lain pengalaman pendamping dalam menangani penyandang disabilitas dalam program RBM, rasa kepedulian terhadap penyandang disabilitas intelektual, serta dukungan dari sistem sumber pendamping. Hambatan pendamping dalam menjalankan tugasnya antara lain keterbatasan karena faktor usia, orang tua penerima pelayanan yang kurang proaktif, dan ketidakmampuan pendamping dalam menangani masalah psikologis dan gangguan perilaku yang dialami penerima pelayanan.

## SARAN

Terdapat tiga peran penting pekerja sosial profesional dalam rehabilitasi penyandang disabilitas yang tidak dijalankan kader masyarakat sebagai pendamping, antara lain menelaah riwayat sosial, menjadi *case manager*, dan mengupayakan rencana tindak lanjut. Proses supervisi antara pelaksana program dan pekerja sosial profesional kepada para pendamping sebaiknya dilakukan lebih intensif untuk menjalankan tiga peran

tersebut. Tenaga profesional lain juga harus dilibatkan dalam supervisi, terutama psikolog dan therapist untuk memberikan bekal pada pendamping yang menangani penerima pelayanan dengan hambatan-hambatan selain disabilitas intelektual.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala Panti dan Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial PSBG Ciungwanara Bogor, serta para pendamping PPJJ Tahun 2017 di Kecamatan Cililin dan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, atas kerjasama selama penelitian ini berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAIDD. (2010). *Intellectual disability: definition, clasification, and systems of supports (11<sup>th</sup> ed)*. Washington D.C: AAIDD.
- Bollard, M. (2009). *Intellectual disability and social inclusion*. London: Churchill Livingstone Elsevier.
- Castro,S & Palikara,O (2018). *An amerging approach for education and care: Implementing a worldwide classification of functioning and disability*. New York: Routledge.
- Dovlo, D. (2004). *Using mid-level cadres as substitute for internationally mobile health professionals in Africa. A desk review*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC455693/>. Diakses Tanggal 2 Desember 2017.
- Ichsan, T. (2013). *Anakku down syndrome: Bunga rampai*. Depok:Insos Books.
- Jewell, P. (2010). *Disability Ethics: A Framework for Practitioners, Professionals and Policy Makers*. Australia: Common

Ground.

Kementerian Sosial RI. (2009). *Pedoman home care bagi penyandang cacat mental tuna grahita*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Kirst-Ashman, K.K. (2013). *Social work & social welfare: Critical thinking perspectives (4<sup>th</sup> ed)*. Brooks/Cole Cengage Learning.

Lemmi, V. (2015). *Community-based rehabilitation for people with disabilities in low- and middle-income countries: A systematic review*. International Initiative for Impact Evaluation (3ie).

Mumpuniarti, dkk. (2014). *Efektifitas program pasca-sekolah bagi kemandirian penyandang disabilitas intelektual*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Luar Biasa. Malang: Asosiasi Progesi Pendidikan Khusus Indonesia. Volume 1, Nomor 2, Desember 2014, h.97-104.

Neuman, W.L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7<sup>th</sup> ed.)*. USA: Pearson Education, Inc.

Van Teijlingen, E.R. (2017). *The medical and social model of childbirth*. Kontakt XIX/2:81-82. <http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20170619133230503336.pdf>

Wardaningsih, S. & Takayuki, K. (2016). *Perception of Community Health Worker in Indonesia toward Patients with Mental Disorders*. <http://www.iaescore.com/journals/index.php/IJPHS/article/download/4759/3784/>. Diakses Tanggal 2 Desember 2017.

Widodo, N. (2012). *Evaluasi pelaksanaan*

*rehabilitasi sosial pada panti sosial: studi kasus pembinaan lanjut (after care services) pasca rehabilitasi sosial*. Jakarta: P3KS Press.

Zastrow, C. (2004). *Introduction to social work and social welfare (8<sup>th</sup> ed)*. Belmont: Thomson.



**REHABILITASI SOSIAL BERBASIS INSTITUSI BAGI KORBAN  
PENYALAHGUNAAN NAPZA:  
Studi Kasus pada Intitusi Penerima Wajib Lapor Lintas Nusa di Kota Batam**

***INSTITUTIONAL-BASED SOCIAL REHABILITATION FOR DRUG ABUSER:  
Case Study at Lintas Nusa Reporting Recipient Institution in Batam City***

**Suradi**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial  
Jln. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur, Telp. 021-8017146.  
E-mail: mas.soeradi@yahoo.co.id

Diterima: 24 Januari 2018; Direvisi: 28 Februari 2018; Disetujui: 26 Maret 2018

**Abstrak**

Penyalahgunaan napza di Kota Batam menempati urutan keempat secara nasional. Tingginya jumlah kasus penyalahgunaan napza tidak dapat dilepaskan dengan posisi geografis Kota Batam yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Kedua negara tersebut merupakan negara transit perdagangan narkoba sebelum memasuki Indonesia. Penelitian evaluatif dengan metode deskriptif diterapkan untuk mengetahui penanganan korban penyalahgunaan napza yang dilakukan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Penelitian ini berfokus pada aspek kelembagaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai. Pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam dengan pengurus IPWL dan klien, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian, bahwa IPWL Lintas Nusa selama tiga tahun telah melakukan rehabilitasi sosial, dan sebagian besar klien dapat berintegrasi kembali dengan keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian, IPWL masih perlu meningkatkan kapasitas sumber dayanya, terutama berkenaan dengan pekerja sosial, konselor adiksi, pendanaan dan jejaring kerja bagi kesinambungan lembaga dan pelayanan.

**Kata kunci:** penyalahgunaan NAPZA, IPWL, rehabilitasi sosial.

**Abstract**

*Drug abuse cases in Batam City has the fourth ranks in Indonesia. The big number of cases of drug abuse related the geographical position of Batam City bordering Malaysia and Singapore. Those two countries are a transit country of drug trade before entering Indonesia. Evaluative research with descriptive method is applied to know on handling of drug abuse victim that conducted by institutions for recipients are required report (IRRR). This research focuses on institutional aspects, implementation of activities and results achieved. Data collection with in-depth interview techniques with IRRR administrator's and client, observation, and documentation studies. The research results, that IRRR Lintas Nusa for three years had conducted social rehabilitation, and the result 95.5 percent of clients can reintegrate with family and society. But, IRRR still needs to improve its resources, especially with regard to social workers, addiction counselors, funding and networking for the institusion and servicess continuity.*

**Keywords:** drug abuse, IRRR, social rehabilitation.

**PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) saat ini sudah mengkhawatirkan. Pada tahun 2016, Provinsi Kepri masuk peringkat kesepuluh dalam hal peredaran narkoba setelah Jakarta. Berdasarkan

data BNN tahun 2016, di Provinsi Kepri tercatat 44 ribu kasus atau sekitar 4,3 persen dari seluruh kasus penyalahgunaan NAPZA di Indonesia, dengan rata-rata usai pengguna 10-59 tahun (BNN in Solusihukum.com, 2016; BNN in Wartakepri.com, 2016; Irawan, 2017; Nofriadi, 2017).

Khusus di Kota Batam, salah satu kabupaten/kota di wilayah provinsi Kepri - pada tahun 2016 jumlah pengguna NAPZA sekitar 0,2 persen dari jumlah penduduk atau 2.473 orang. Tingginya kasus penyalahgunaan NAPZA mengantarkan Kota Batam peringkat keempat nasional. Hal ini tidak lepas dari aspek geografis, di mana Kepri memiliki kerentanan karena wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau dan berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Kedua negara tersebut merupakan negara transit peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia. Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang (narkoba) yang terjadi di Kota Batam sepanjang 2016 diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun depan. Jumlah kasusnya diprediksi akan meningkat (*Batampos.co.id, 2016; Wartakepri.co.id, 2016*).

Fenomena penyalahgunaan NAPZA menjadi salah satu isu penting di dalam kesejahteraan sosial (Galvani, 2015, NASW, 2013; Zastrow, 2008). Pembahasan berhubungan dengan penyalahgunaan NAPZA, hendaknya dilihat dari faktor penyebab dan faktor akibat yang ditimbulkannya. Dari pendekatan faktor penyebab, Ongwae (2016), Spooner dan Hetherington (2004), Mokeona (2002) dan Jiloha (2009), mencermati betapa besarnya pengaruh lingkungan sosial. Seseorang menyalahgunakan NAPZA disebabkan oleh struktur budaya dan sosial di dalam masyarakat, perilaku dan standar keluarga, tekanan dari perilaku teman sebaya, ekonomi dan lingkungan fisik. Selain faktor lingkungan atau eksternal, seseorang memungkinkan untuk menyalahgunakan NAPZA disebabkan oleh faktor dari dalam dirinya atau faktor internal (Rahmdona & Agustin, 2014; Tam & Foo, 2012).

Dari pendekatan faktor akibat, penyalahgunaan NAPZA akan mengalami kerugian secara fisik, ekonomi, sosial, psikis dan mental

spiritual. Kerugian juga akan dirasakan oleh keluarga, masyarakat dan negara (Eric, 2017; UNODC, 2013). Penyalahgunaan NAPZA akan mengalami disharmoni secara individual maupun secara sosial. Mereka tidak mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan peranan sosialnya dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat, atau mengalami ketidakberfungsian sosial (Tracy, 2016; Room, 2015).

Pemerintah Daerah Kota Batam, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Batam dan Kementerian Sosial, telah menempuh langkah-langkah pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan NAPZA. BNNK Batam memberikan penyuluhan dan sosialisasi seputar bahaya narkoba untuk anak-anak siswa siswi kalangan TK, SD, SMP hingga SMA dan masyarakat luas (*Wartakepri.co.id, 2016*). Kemudian, Kementerian Sosial menempuh upaya melalui penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) sejak tahun 2015. Satu dari dua IPWL yang ditetapkan Kementerian Sosial di Kota Batam adalah LKS Lintas Nusa.

Kebijakan pemerintah dalam penanganan korban penyalahgunaan NAPZA dengan pendekatan rehabilitasi sosial merupakan komitmen politik yang humanis. Jika dahulu, korban penyalahgunaan NAPZA ditangani melalui pendekatan hukuman (dipenjara), maka setelah terbitnya Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, maka penanganan korban penyalahgunaan NAPZA bergeser melalui pendekatan rehabilitasi. Kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi ini dinilai banyak menghilangkan hal-hal negatif pada korban maupun keluarga korban (Gunawan, 2016; Hafrida, 2016).

Memperhatikan kasus penyalahgunaan NAPZA yang hingga saat masih cukup tinggi di satu sisi, dan komitmen negara untuk menangani penyalahgunaan NAPZA di sisi yang lain, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Berbasis Institusi. Peneliti secara khusus berminat untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan implementasi program, dan hasil yang dicapai dalam rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA melalui IPWL Lintas Nusa Kota Batam.

Penelitian yang mengangkat isu implementasi program dan manfaat atau hasil yang dicapai pada LKS atau IPWL sudah banyak dilakukan oleh peneliti maupun mahasiswa sampai saat ini (Arifin, 2016; Risdiyanto, 2014; Widiyanti, 2013). Sementara itu penelitian yang dilakukan di Kota Batam sejauh ini masih sangat terbatas, sehingga peneliti sejauh ini belum menemukan di dalam publikasi nasional maupun internasional. Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian tentang rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA dengan mengambil lokasi di Kota Batam.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan kelembagaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai oleh IPWL dalam rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA. Penelitian ini dipandang penting dilakukan, karena akan memberikan kontribusi keilmuan maupun praktik yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di Kota Batam dan Kepulauan Riau, serta umumnya bagi pengembangan kebijakan Kementerian Sosial RI.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih berdasarkan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan kelembagaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai oleh IPWL. Terkait dengan hasil, peneliti bermaksud untuk menjawab isu yang berkembang selama ini, bahwa IPWL belum diketahui hasil kerjanya. Padahal, IPWL-IPWL tersebut telah menyerap anggaran pemerintah yang cukup besar.

Penelitian dilaksanakan di IPWL Lintas Nusa, satu dari dua IPWL yang ada di Kota Batam. IPWL ini dipilih sebagai sasaran penelitian, dengan pertimbangan bahwa IPWL ini sudah berdiri sejak tahun 2015, cukup berpengalaman dalam penanganan korban penyalahgunaan NAPZA, dan telah membangun jejaring kerja dengan berbagai LSM dalam menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan.

Informan penelitian, yaitu tenaga administrasi, tenaga teknis dan klien IPWL. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumentasi dengan mempelajari laporan kegiatan, anggaran dasar, foto-foto dan lain-lain yang relevan; wawancara mendalam dilakukan kepada tenaga administrasi, tenaga teknis dan klien IPWL; dan pengamatan terhadap kondisi bangunan dan ruang kerja serta peralatan yang mendukung proses rehabilitasi sosial.

Data yang dikumpulkan dilakukan kategorisasi dan diinterpretasikan, sehingga dapat diperoleh informasi yang memadai berkaitan dengan kelembagaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai oleh IPWL. Selanjutnya penarikan kesimpulan yang akan menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sekilas Kota Batam

Kota Batam adalah salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam merupakan sebuah pulau yang terletak sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional. Kotanini juga begitu dekat dan berbatasan langsung disebelah utara dengan Negara Singapura dan Malaysia. Kota Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia. Ketiak dibangun pada tahun 1970-an awal, kota ini hanya dihuni sekita 6.000 jiwa. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional.

Penduduk Kota Batam tahun 2016 berjumlah 1.2 juta jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 14 persen. Maka pada tahun pada tahun 2030 diperkirakan penduduk Kota Batam berjumlah tiga juta jiwa (BPS Kota Batam, 2016). Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini menempatkan Kota Batam sebagai Kota terpadat di Indonesia setelah Jakarta dan Jayapura. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa kepadatan penduduk di Kota Batam tidak seimbang. Peningkatan kependudukan di Kota Batam tidak dapat dipungkiri lagi mengingat Kota Batam merupakan salah satu kota yang berkembang pesat di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat, baik karena kelahiran maupun migrasi - faktor utama yang menyebabkan kepadatan penduduk daripada jumlah kelahiran bayi setiap tahunnya - tentu membawa konsekuensi pada ketersediaan pelayanan dan lapangan pekerjaan.

Penduduk Kota Batam merupakan masyarakat heterogen. Di Kota Batam dapat hidup secara berdampingan berbagai suku bangsa. Beberapa suku yang dominan adalah Suku Melayu, Minang, Batak, Makassar, Jawa,

Flores, dan Tionghoa (BPS Kota Batam, 2016).

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam sebesar 6,89 persen lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,64 persen. Oleh karena itu, Kota Batam menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai jenis industri besar kini dibangun di Kota Batam sebagian besar berorientasi ekspor. Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia (*Indonesia Free Trade Zone*) merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan ini dilaksanakan oleh BP Batam (Badan Pengusahaan Batam) menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Pelabuhan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun memiliki izin bebas pajak barang ekspor-impor, sehingga cukup menarik bagi investor asing (BPS Kota Batam, 2016; Apriyani, 2016).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang pernah dicapai Kota Batam mulai tahun 2015 mengalami penurunan. Berdasarkan hasil survei, 11 perusahaan yang tutup dengan alasan tidak ada order ataupun pailit. Dampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah meningkatnya jumlah pengangguran. Setiap tahun angka pengangguran di Kota Batam terus meningkat dan hasil survei BPS Kota Batam pada 2015 menyebutkan, bahwa untuk tingkat pengangguran akan semakin melonjak seiring menurunnya perekonomian dan banyaknya perusahaan yang henggang dari Batam. Pada awal 2016 jumlah pengangguran di Kota Batam menembus 100 ribu orang (*Wartakepri.co.id*, 2016).

Penurunan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan tidak beroperasinya sejumlah perusahaan yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran,



sebagai gambaran bahwa Kota Batam saai ini menghadapi permasalahan ekonomi sekaligus sosial. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dipenuhi karena mengganggu di satu sisi, dan keberadaan Kota Batam sebagai kota peredaran NAPZA yang tinggi, dapat menjadi kondisi yang mendorong penduduk yang mengganggu tersebut masuk ke dalam lingkaran peredaran NAPZA.

### **Kelembagaan IPWL Lintas Nusa**

#### **1. Legalitas Lembaga**

Institusi Penerima Wajib lapor (IPWL) Lintas Nusa merupakan unit pelaksana teknis dari Yayasan Lintas Nusa (YLN), beralamat di Ruko Nusa Sentosa Blok A No. 1 Kelurahan Belian, Kecamatan batam Kota, Kota Batam. Yayasan Lintas Nusa berdiri tahun 2004, dan pada tahun 2015 mendirikan IPWL yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial RI.

Sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), YLN sudah memiliki legalitas pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM pada 2005, dari Kementerian Sosial tahun 2016, dan dari Dinas Sosial Kota Batam tahun 2017. Kepemilikan bukti-bukti legalitas lembaga ini membuktikan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Lintas Nusa dengan unit pelaksana teknisnya, telah syah secara hukum dan aturan yang berlaku.

Legalitas lembaga bagi organisasi pelayanan kemanusiaan (*human service organization*) ini sangat penting, karena akan berkaitan dengan perlindungan terhadap klien atas hak-haknya. Klien yang merasa dirugikan akibat dari pelayanan yang diberikan oleh LKS, dapat mengadukan kepada pihak yang berwenang. Jadi, legalitas ini sedbagai instrumen untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan dan pelayanan yang

diberikan oleh LKS.

Sebagai sebuah organisasi pelayanan sosial, YLN memiliki struktur organisasi, yang di dalamnya ada unsur pimpinan, tenaga administrasi dan tenaga teknis. Pada unsur-unsur tersebut telah diisi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kapasitasnya. Masing-masing SDM memiliki uraian tugas yang jelas. Meskipun demikian di antara mereka saling membantu dalam penyelesaian pekerjaan (YLN, 2017).

#### **2. SDM administratif**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan tugas-tugas administratif yang ada di YLN berjumlah tiga orang, yang terdiri unsur pimpinan, unsur tata usaha dan unsur keuangan. Dari ketiga unsur SDM administratif tersebut, unsur pimpinan yang memiliki peranan sangat penting dan strategis. Pimpinan bertugas untuk memberikan arahan, mengkoordinasikan kegiatan, pengendalian dan pengembangan jejaring kerja. Penelitian ini membuktikan, bahwa tugas-tugas pimpinan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dinamika dalam pelaksanaan kegiatan, yang diwarnai dengan hubungan pimpinan – bawahan yang cukup harmoni.

Pada sebuah organisasi, posisi pimpinan berperan dalam menentukan arah, tujuan, keberlanjutan dan masa depan sebuah organisasi. Pimpinan yang memiliki kapasitas manajerial yang kuat di bidang SDM, pengambilan keputusan, membangun tim, pembangkit semangat dan pemberi informasi, maka akan mampu membawa kemajuan sebuah organisasi yang dipimpinannya (Susilo, 2014; Pramudyo, 2013; Mansur, 2008).

Sementara itu, untuk tenaga tata usaha dan keuangan, telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian tugas-tugas



yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pimpinan. Pencatatan dan pendokumentasian dilaksanakan dengan menggunakan komputer, sehingga lebih mudah untuk diperoleh ketika sewaktu-waktu diperlukan.

### 3. SDM teknis

Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknis, adalah orang-orang yang tugasnya memberikan pelayanan langsung kepada klien. SDM teknis pada IPWL Lintas Nusa dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1:** Sumber Daya Manusia bidang Teknis pada IPWL Lintas Nusa

| No | Jenis SDM                   | Jumlah | Keterangan                                  |
|----|-----------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 1  | Pekerja Sosial              | 0      |                                             |
| 2  | Tenaga Kesejahteraan Sosial | 2      |                                             |
| 3  | Kanselor Adiksi             | 1      |                                             |
| 4  | Perawat                     | 1      |                                             |
| 5  | Psikolog                    | 1      | Kerja sama dengan Perguruan Tinggi setempat |
| 6  | Psikiater                   | 0      |                                             |
| 7  | Dokter                      | 1      | Rujukan dengan RS                           |
| 8  | Instruktur Vokasional       | 1      |                                             |
| 9  | Pembimbing Rohani           | 1      |                                             |

Sumber: IPWL Lintas Nusa, 2017

Berdasarkan data pada tabel tersebut, bahwa IPWL Lintas Nusa belum memenuhi kebutuhan SDM teknis yang seharusnya disiapkan. Ketiadaan pekerja sosial, menunjukkan bahwa IPWL belum memahami dengan tepat eksistensi dari lembaga kesejahteraan sosial. Meskipun belum memiliki pekerja sosial profesional, menurut pimpinan IPWL bahwa tugas-tugas pendampingan dan bimbingan psikososial selama ini sudah dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan sosial (TKS).

Penjelasan dari pihak IPWL ini belum bisa meyakinkan, bahwa bimbingan psikososial dapat di kerjakan oleh TKS yang tidak memiliki ilmu dan keterampilan pekerjaan sosial. Penjelasan tersebut belum didukung oleh data sebagai bukti empiris, bahwa klien mengalami perubahan perilaku sebagai hasil bimbingan psikososial yang dilakukan TKS. Data yang tersedia, bahwa klien diputus layanannya oleh IPWL, setelah menerima layanan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan dukungan anggaran dari Kementerian Sosial.

Untuk menguasai ilmu dan keterampilan bimbingan psikososial diperlukan pendidikan pekerjaan sosial, sekurang-kurangnya setingkat sarjana. Selain pendidikan formal, seorang sarjana pekerjaan sosial masih memerlukan pengalaman praktik menangani klien, sehingga memiliki kompetensi memberikan bimbingan psikososial. Keahlian yang ditopang oleh ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis, serta dikontrol oleh nilai, akan melahirkan pekerja sosial profesional yang kompeten melakukan bimbingan psikososial.

Bagaimanapun, ketiadaan pekerja sosial profesional di IPWL Lintas Nusa, akan berpengaruh pada proses rehabilitasi sosial, dan tujuan program tidak tercapai secara optimal. Karena pekerja sosial profesional di dalam LKS (termasuk IPWL) merupakan tenaga profesi utama, dan lembaga tersebut merupakan *primary setting* praktik pekerjaan sosial. Hal ini berarti, bahwa meskipun di IPWL sudah tersedia tenaga kanselor adiksi, TKS, dokter dan psikiater; belum dapat dikatakan IPWL sudah memenuhi standar lembaga pelayanan, apabila tidak ada pekerja sosial profesional. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan, bahwa peran pekerja sosial profesional memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan kondisi klien

(Dwiyantari, 2013; Risdiyanto, 2014).

Sedangkan untuk SDM teknis yang lain (kecuali psikater yang belum diperkukan), sudah cukup memadai jumlahnya, meskipun untuk tenaga dokter dan psikolog dilakukan melalui bentuk kerja sama. Ini kelebihan IWPL Lintas Nusa yang mampu membangun jejaring kerja dengan sistem sumber dalam proses rehabilitasi sosial.

Selain SDM administratif dan teknis, IPWL Lintas Nusa juga memiliki SDM untuk keamanan, kebersihan, dan tenaga memasak. Untuk tenaga tersebut, IPWL menugaskan klien secara bergiliran (piket).

#### 4. Klien

Klien merupakan istilah yang digunakan pada penerima manfaat program di IPWL Lintas Nusa. Pada penelitian ini disajikan data klien IPWL Lintas Nusa tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 2.** Klien pada IPWL Lintas Nusa

| No     | Tahun | Klien Inap | Klien Non-Inap | Jumlah |
|--------|-------|------------|----------------|--------|
| 1      | 2015  | 10         | 25             | 35     |
| 2      | 2016  | 10         | 67             | 77     |
| 3      | 2017  | 15         | 50             | 65     |
| Jumlah |       | 35         | 142            | 177    |

*Sumber: IPWL Lintas Nusa, 2017*

Berdasarkan data tabel di atas, sebagian besar klien dilayani dengan cara rawat jalan (non-inap). Rawat inap dibatasi antara 10-15 orang karena disesuaikan dengan fasilitas tempat tinggal yang tersedia dan dukungan anggaran. Berdasarkan hasil observasi, ruangan untuk rawap inap klien memang sangat terbatas. Bahkan untuk menjalankan shalat (bagi klien beragama Islam) dilakukan di ruang tamu atau di ruang kantor. IPWL tidak menyediakan ruang khusus untuk melaksanakan ibadah shalat. Terdapat ruang serba guna untuk kegiatan kelompok, dan makan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan TKS maupun kanselor adiksi, untuk klien rawat inap sebagian besar dari luar Kota Batam. Sedangkan klien rawat jalan, sebagian besar dari Kota Batam. Pada tahun 2017, IPWL Lintas Nusa menerima klien perempuan berjumlah 4 (empat) orang, dan laki-laki berjumlah 61 orang. Untuk klien perempuan, mereka mengikuti program rawat jalan. Sedang klien laki-laki, sebagian mengikuti program rawap inap dan sebagian lagi mengikuti program rawat jalan.

#### 5. Sarana Prasarana

Sarana kantor yang dipersyaratkan dalam pendirian IPWL meliputi ruang kerja pimpinan, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi/ruang data, dan ruang perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, ruang kantor yang ada di IPWL Lintas Nusa, yaitu ruang pimpinan, ruang rapat dan ruang tamu. Sedangkan ruang dokumentasi/ruang data dan ruang perpustakaan, memanfaatkan ruang tamu. Berkaitan dengan ketersediaan ruang secara fisik sebagaimana yang persyaratakan, terpenting adalah memfungsikan ruang yang ada sesuai dengan peruntukannya. IPWL Lintas Nusa telah berupaya untuk memanfaatkan ruang yang ada secara maksimal.

Ruang berikutnya adalah ruang pelayanan teknis yang dipersyaratkan meliputi ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnose/asesmen, ruang isolasi, ruang olah raga/pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial dan ruang praktik keterampilan. Berdasarkan hasil penelitian, ruang yang tersedia adalah ruang tidur, ruang pengasuh dan ruangan yang dimanfaatkan untuk asesmen, bimbingan mental spiritual (kerohanian) dan sosial. Untuk keterampilan dilaksanakan di luar IPWL, karena jenis keterampilannya budidaya ikan hias dan sablon.

Ruang penunjang yang dipersyaratkan, seperti ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan/poliklinik, pos keamana, gudang, tempat parkir dan ruamh dinas/petugas. Sementara itu, ruang yang tersedia, seperti kamar mandi, dapur, gudang dan tempat parkir (di halaman). IPWL Lintas Nusa berupaya memaksimalkan ruang-ruang yang ada untuk mendukung kegiatan rehabilitasi, terutama untuk klien rawat inap.

Keterbatasan ruang pada IPWL Lintas Nusa tersebut tidak dapat dihindari, karena IPWL Lintas Nusa berkantor di Ruko dua lantai. Oleh karena itu, kesulitan untuk menyiapkan ruang-ruang sebagaimana dipersyaratkan oleh Kementerian Sosial. Upaya yang dapat dilakukan adalah menggunakan ruang yang ada untuk berbagai fungsi adminstratif maupun teknis.

Ketersediaan sarana prasarana dalam kegiatan pelayanan di lembaga pelayanan sosial merupakan faktor yang memengaruhi kualitas layanan dan keberhasilan. Dikemukakan oleh Firarizta (2015), bahwa terdapat faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan sosial adalah ketersediaan sarana prasarana.

## 6. Anggaran

Ketersediaan anggaran dalam lembaga pelayanan sosial, merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberlangsungan program dan organisasi. Anggaran untuk mendukung program di IPWL Lintas Nusa berasal dari Kementerian Sosial RI.

Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan admistratif, seperti alat tulis kantor dan sewa gedung kantor. Kemudian untuk membiayai kegiatan teknis, mulai dari kegiatan pendekatan awal sampai dengan monitoring dan pembinaan lanjut. Pada tahun 2017, IPWL Lintas Nusa mendapat

bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp. 264.600.000 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan di dalam institusi (rawat inap) dan di luar institusi (rawat jalan). Anggaran untuk rawat inap sebesar Rp. 129.600.000 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian dana untuk rawat jalan sebesar Rp. 210.600.000 (dua ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan petugas administrasi, bahwa IPWL Lintas Nusa hanya didukung oleh anggaran dari Kementerian Sosial. Belum ada sumber anggaran lain, misalnya dari BNN, Pemenrintah Daerah, Iuran klien dan sumber lain yang tidak mengikat. Pada saat ini sedang dirintis usaha sablon, diharapkan menjadi salah satu sumber angggaran IPWL.

Keterbatasan sumber anggaran IPWL Lintas Nusa menggambarkan, bahwa IPWL masih sangat bergantung pada dukungan Kementerian Sosial RI. Ketidakmandirian dalam pendanaan ini tentu akan memengaruhi keberlanjutan program. Jika anggaran dari Kementerian Sosial ini dihentikan, maka IPWL tentu akan menghentikan pula kegiatannya. Dengan demikian, kondisi dana IPWL Lintas Nusa dapat dikatakan tidak sehat untuk keberlanjutan organisasi. Sebagaimana hasil penelitian Qamarina (2017) bahwa ketiadaan anggaran tersebut akan menghambat pelaksanaan kegiatan, dan menyebabkan tidak ada keputusan yang diambil dalam pelaksanaan program.

## 7. Jaringan kerja

Permasalahan yang dihadapi korban penyalahgunaan NAPZA bersifat multi-dimensional. Sehubungan dengan itu, penanganan korban penyalahgunaan NAPZA memerlukan sumber daya yang besar. Sementara itu, sumber daya yang tersedia

di IPWL Lintas Nusa relatif masih terbatas. Sehubungan dengan itu, pengembangan jaringan kerja menjadi kebutuhan untuk keberlanjutan program.

Berkaitan dengan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA, IPWL Lintas Nusa telah membangun jejaring kerja dengan Rumah Sakit dan Puskesmas setempat untuk pelayanan kesehatan bagi klien, dan jejaring kerja dengan perguruan tinggi untuk kebutuhan tenaga psikolog. Di samping itu, IPWL Lintas Nusa juga membangun jejaring kerja dengan tujuh LSM yang bergerak di bidang pelayanan kemanusiaan, antara lain dengan LSM yang bergerak dalam perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan, dan pelayanan bagi penyandang HIV/AIDS. Sementara itu, jejaring kerja dengan sistem sumber dalam proses rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA masih terbatas.

Kompleksitas permasalahan dalam rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan menghendaki adanya jejaring kerja yang kuat. Kesuksesan sebuah lembaga atau organisasi pelayanan sosial masih sangat bergantung pada keberhasilan menciptakan jejaring kerja (*networking*). Dengan kata lain, menjalin hubungan sosial dengan siapa pun menjadi bagian penting dalam segala aktivitas kehidupan setiap organisasi (LAN, 2014; Suhartanta dan Arifin, 2010). Oleh karena itu, pengembangan jejaring kerja yang dibangun oleh IPWL Lintas Nusa akan memberikan pengaruh positif. Keberadaan IPWL Lintas Nusa mulai dikenal oleh jajaran pemerintah daerah Kota Batam dan masyarakat. Seringnya IPWL terlibat langsung pada kegiatan kemanusiaan bersama jejaring kerjanya - misal, kampanye anti tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan - memberikan kepercayaan diri bagi pengelola.

Kepercayaan diri ini akan memotivasi pengelola untuk mengembangkan program dan kegiatan yang diperlukan masyarakat. Di samping itu, dalam melaksanakan program dan kegiataannya IPWL Lintas Nusa akan memperoleh dukungan, baik dari Pemerintah Daerah maupun dari masyarakat luas.

## Kegiatan yang dilaksanakan

### 1. Untuk klien

#### a. Jenis kegiatan

IPWL Lintas Nusa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam proses rehabilitasi sosial terhadap klien. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah diatur secara jelas di dalam pedoman palaksaan dan pedoman teknis yang disusun Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (RSKPN) tahun 2015. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan IPWL Lintas Nusa sudah sesuai dengan pedoman, dimulai dari tahap pendekatan awal, asesmen, rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, reintegrasi dan terminasi. Tahap kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3:** Pelaksanaan Kegiatan di dalam IPWL (Klien rawat inap) 2017

| No | Kegiatan                  | Frekuensi | Bukti                             |
|----|---------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1  | Pendekatan awal           | 1         | ◦ Lembar penerimaan klien         |
|    |                           | 1         | ◦ Surat pernyataan orang tua/wali |
|    |                           | 3         | ◦ Hasil tes urine                 |
| 2  | Asesmen                   | 1         | ◦ Form asesmen                    |
| 3  | Rencana pemecahan masalah | 1         | ◦ Case record                     |
| 4  | Pemecahan masalah         | 6         | ◦ Bimbingan fisik                 |
|    |                           | 6         | ◦ Konseling                       |
|    |                           | 2         | ◦ Outing/pengisian waktu luang    |

|   |             |   |                                  |
|---|-------------|---|----------------------------------|
|   |             | 6 | ◦ Bimbingan mental/spiritual     |
|   |             | 2 | ◦ Bimbingan vokasional           |
| 5 | Reintegrasi | 2 | ◦ Home visit                     |
|   |             | 1 | ◦ Asesmen akhir                  |
| 6 | Terminasi   | 1 | ◦ Surat Keterangan selesai rehab |

Sumber: IPWL Lintas Nusa, 2017.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dan hasil wawancara dengan TKS dan kanselor adiksi IPWL Lintas Nusa, bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan proposal yang disampaikan ke Direktorat RSKPN untuk tahun anggaran 2017. Di dalam proposal tersebut dijelaskan, bahwa pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi klien rawat inap secara keseluruhan (administratif dan teknis) selama tujuh bulan. Rinciannya, kegiatan adminsratif satu bulan dan kegiatan teknis selama enam bulan. Jadi, kegiatan yang disajikan di dalam tabel tersebut, merupakan kegiatan selama enam bulan efektif untuk kegiatan teknis dengan dukungan APBN.

Menurut pengurus IPWL Lintas Nusa, bahwa frekuensi pelaksanaan kegiatan untuk klien sebenarnya belum cukup jika dilaksanakan selama enam bulan. Oleh karena itu, di luar frekuensi kegiatan yang didukung APBN, TKS dan kanselor adiksi melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan bagi klien, sehingga menambah frekuensi kegiatan.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan kegiatan di luar IPWL atau rawat jalan, dilaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai pula dengan pedoman yang disusun Direktorat RSKPN. Kegiatan dimaksud, yaitu penjajagan, asesmen, tes urine, konseling, seminar psiko edukasi dan *home visit*. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada klien rawat jalan tampak

pada tabel berikut:

**Tabel 4:** Pelaksanaan Kegiatan di luar IPWL (Klien rawat jalan) 2017

| No | Kegiatan              | Frekuensi | Bukti                      |
|----|-----------------------|-----------|----------------------------|
| 1  | Penjangkauan          | 2         | ◦ Laporan penjangkauan     |
| 2  | Asesmen               | 2         | ◦ Hasil asesmen            |
| 3  | Tes urine             | 3         | ◦ Hasil tes urine          |
| 4  | Konseling             | 10        | ◦ Form konseling           |
| 5  | Seminar psiko edukasi | 2         | ◦ Laporan                  |
| 6  | Home visit            | 2         | ◦ Laporan home visit       |
| 7  | Case record           | 1         | ◦ Data masing-masing klien |

Sumber: IPWL Lintas Nusa, 2017.

Dari data tabel di atas, bahwa kegiatan yang paling banyak dilakukan pada klien rawat jalan adalah konseling. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan dalam bentuk kelompok. Meskipun demikian, beberapa konseling dilakukan secara individu, baik dengan tatap muka langsung atau pun menggunakan telepon. Untuk konseling secara kelompok, TKS dan kanselor adiksi membuat kesepakatan dengan klien, dimana kegiatan akan dilakukan. Biasanya konseling secara kelompok ini berpindah-pindah tempat, yang dirasa nyaman oleh klien. Untuk konseling secara individu, TKS maupun konselor adiksi membuat kesepakatan untuk bertemu secara tatap muka. Atau konseling dilakukan melalui telepon, sehingga dimana pun TKS dan kanselor adiksi dapat memberikan pelayanan konseling.

Kegiatan bagi klien rawat jalan dilaksanakan selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, dilakukan terminasi atau pemutusan dalam relasi pertolongan. Namun demikian, dikemukakan oleh



TKS maupun konselor adiksi, bahwa pertemuan atau komunikasi melalui telepon dengan klien masih dapat dilakukan.

Bimbingan psikososial atau konseling merupakan kegiatan teknis yang utama dalam proses pertolongan profesional bagi korban penyalahgunaan NAPZA. Di IPWL Lintas Nusa, kegiatan ini dilaksanakan oleh TKS dan atau konselor adiksi. Bimbingan psikososial dalam bentuk penyampaian arahan, nasehat, penjelasan dan informasi dalam upaya pemecahan masalah klien. Meskipun kegiatan teknis telah dilakukan, tidak ada bukti yang memperkuat keberhasilan bimbingan psikososial yang dilakukan TKS dan konselor adiksi. Tidak tersedia dokumen hasil evaluasi, bahwa selama enam bulan klien menerima pelayanan di IPWL, klien tersebut sudah benar-benar pulih dan siap reunifikasi dengan keluarga dan masyarakat.

Berkaitan dengan pelayanan, hasil penelitian Yusfar (2013), menunjukkan bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi pelayanan, yaitu hubungan antara dimensi kenyamanan, dimensi informasi, dimensi keamanan dan dimensi hubungan antarmanusia (relasi profesional) serta kualitas pelayanan. Jika faktor-faktor tersebut tidak dapat dipenuhi, maka implementasi pelayanan tidak maksimal dan hasil kegiatan yang dicapai tidak optimal. Hasil penelitian tersebut memperkuat argumentasi, bahwa bimbingan psikososial atau konseling merupakan relasi pertolongan profesional yang dapat memberikan hasil yang optimal, apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional.

b. Metode dan pendekatan

Implementasi program rehabilitasi sosial terhadap klien di IPWL Lintas Nusa dilakukan dengan menggunakan metode *Therapeutic Community* (TC), metode 12 langkah dan metode spiritual keagamaan. Ketiga metode tersebut dipraktikkan secara terintegrasi, dengan penekanannya disesuaikan dengan situasi pada klien. Di dalam metode terintegrasi tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada pemulihan klien secara psikososial. Metode dan pendekatan tersebut dilakukan untuk klien di dalam IPWL (rawat inap) maupun di luar IPWL (rawat jalan). Untuk kegiatan klien rawat jalan, TKS dan konselor adiksi melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan situasi yang dihadapi klien.

Meskipun demikian, menurut Septiyan (2014), metode intervensi sosial dapat dilaksanakan dengan tepat sangat tergantung pada profesionalisme pekerja sosial, atau tenaga teknis lainnya, seperti TKS dan konselor adiksi. Pada kerangka ini, ada korelasi yang sangat erat dan menentukan, antara metode yang digunakan dengan profesionalisme pekerja sosial. Sebaik apapun metode dan teknik intervensi sosial disusun, tidak akan mencapai hasil yang maksimal apabila tidak didukung dengan profesionalisme pekerja sosial.

2. Untuk keluarga

a. Jenis Kegiatan

Selain terhadap klien, IPWL juga memberikan program kepada keluarga. Namun demikian, program untuk keluarga ini tidak dapat diikuti oleh semua orang tua, karena sebagian besar orang tua klien berada di luar Kota Batam. Kegiatan ini bertujuan agar orang tua memiliki pengetahuan yang

cukup sekitar penyalahgunaan NAPZA dan respon yang seharusnya dilakukan terhadap anak/ anggota keluarga yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA. Kegiatan ini dilakukan secara berkala, sesuai dengan kesediaan orang tua klien.

Kegiatan untuk keluarga ini menurut peneliti penting untuk dilakukan, dan diharapkan agar keluarga (1) bersedia menerima eks klien apa adanya, (2) memberikan dukungan psikososial agar eks klien mampu mempertahankan kepulihannya, dan (3) memberikan kesempatan eks klien untuk melaksanakan tugas dan peranan sosial dalam kehidupan sosial. Kontribusi dukungan psikososial atau emosional dari keluarga bagi kepulihan klien ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siahaan dan Daulay (tt), Nurhidayati dan Nurdibyanandaru (2014), Firdha (2016), dan Abbas (2016).

#### b. Metode dan Pendekatan

Kegiatan untuk orang tua dilakukan dalam diskusi kelompok terarah. Di dalam diskusi tersebut, orang tua diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan terhadap anak atau anggota keluarga yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA.

### 3. Untuk Masyarakat

#### a. Jenis Kegiatan

Kegiatan dengan sasaran masyarakat dilakukan melalui penyebaran informasi berkenaan dengan isu-isu penyalahgunaan NAPZA, dan kegiatan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di IPWL

Lintas Nusa. Sosialisasi ini bertujuan agar lapisan masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai NAPZA dan penyalahgunaannya. Setelah memiliki pengetahuan, diharapkan masyarakat memberikan dukungan dalam pencegahan maupun penanganan korban penyalahgunaan NAPZA. Memang, sampai saat ini belum ada aksi sosial penanganan eks klien berbasis masyarakat. Maka pengurus IPWL akan terus melaksanakan sosialisasi ini ke masyarakat.

Dukungan masyarakat pada saat eks klien ini memasuki reintegrasi atau resosialisasi menurut peneliti sangat penting. Kemungkinan besar klien akan mengalami *relapse* apabila masyarakat atau lingkungan sosialnya menolak kehadirannya. Masyarakat diharapkan tidak memberikan stigma, apalagi memberikan sanksi sosial berupa pengucilan terhadap eks klien. Sebaliknya, sangat diharapkan memberikan dukungan atau sebagai supporting system dalam pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA (see Asisah, 2015).

#### b. Metode dan Pendekatan

Kegiatan bagi masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran leaflet, *talkshow* di radio dan televisi, pameran dan pemasangan poster/stiker. Kegiatan ini dinilai memberikan dampak positif, di mana warga masyarakat yang semula tak acuh dengan kegiatan IPWL, kini mulai memberikan dukungan dan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan IPWL. Masyarakat bersedia menerima klien setelah selesai menjalani rehabilitasi sosial, dan bersedia mempekerjakan eks klien IPWL Lintas Nusa. Sebagai contoh, A dan H yang dijumpai peneliti di tempat mereka bekerja (sebagai

pelayan toko pakaian di Kota Batam).

### Hasil yang Dicapai

Informasi berkaitan dengan hasil yang dicapai IPWL Lintas Nusa, diperoleh dari studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan pengurus. Hasil yang dicapai IPWL Lintas Nusa sebagaimana tampak pada tabel berikut:

**Tabel 5:** Hasil yang Dicapai IPWL Linats Nusa 2015-2017

| No | Tahun  | Membantu keluarga | Melanjutkan Sekolah | Bekerja | Usaha sendiri | Releapse | Dipenjara | Jumlah |
|----|--------|-------------------|---------------------|---------|---------------|----------|-----------|--------|
| 1  | 2015   | 6                 | 1                   | 24      | 3             | 1        | 0         | 35     |
| 2  | 2016   | 15                | 5                   | 48      | 2             | 4        | 3         | 77     |
| 3  | 2017   | 19                | 4                   | 39      | 3             | 0        | 0         | 54     |
|    | Jumlah | 40                | 10                  | 111     | 8             | 5        | 3         | 177    |

*Sumber: IPWL Lintas Nusa, 2917.*

Dari data pada tabel tersebut, diketahui bahwa keberhasilan IWPL Lintas Nusa cukup tinggi. Pada tahun 2015, dari jumlah klien 35 orang, sebanyak 34 orang (97,14 %) sudah mengalami kepulihan. Pada tahun 2016, dari jumlah klien 77 orang, sebanyak 70 orang (90,90 %) sudah mengalami kepulihan. Pada tahun 2017, dari jumlah klien 65 orang, seluruhnya berhasil pulih. Dari seluruh klien tahun 2015-2017 yang berjumlah 177 orang, yang tidak berhasil berjumlah 8 (delapan) orang atau 4,5 persen. Menarik dari penyajian data pada tabel di atas, bahwa sebagian besar eks klien atau sebanyak 62,71 persen diterima bekerja pada orang lain. Informasi ini memiliki makna, (1) secara ekonomi eks klien memiliki sumber pendapatan sebagai bekal kemandirian ekonomi, (2) reintegrasi sosial dengan masyarakat berjalan dengan baik, dan (2) IPWL Lintas Nusa berhasil meyakinkan masyarakat, bahwa keberadaannya turut membantu pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA. Kemudian, sebesar 23 persen klien membantu keluarga. Mereka tidak besekolah dan belum bekerja atau mengelola usaha sendiri. Meskipun demikian, dalam konteks kepulihan klien, mereka sebagai salah satu indikator keberhasilan pelayanan

tang diberikan oleh IPWL Lintas Nusa.

Hasil pelaksanaan kerja IPWL selama tiga tahun belum dipublikasi secara luas. Pengurus IPWL belum berfikir, bahwa program yang sudah dilaksanakan memberikan dampak positif bagi klien, maupun bagi eksistensi IPWL. Padahal, publikasi secara luas atas keberhasilan

program pada IPWL sangat penting untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Menarik dari data pada tabel tersebut, bahwa sebagian besar eks klien bekerja pada orang lain. Hal ini dimaknai, bahwa masyarakat memberikan dukungan terhadap aktivitas IPWL, yang antara lain bersedia menerima eks klien untuk bekerja pada mereka. Kedua terbesar adalah klien kembali ke keluarganya. Hal ini juga dimaknai, bahwa keluarga sudah siap untuk reunifikasi dengan eks klien. Dukungan-dukungan tersebut akan ikut menentukan keberhasilan IPWL dalam proses rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA (Abbas, 2016; Suradi, 2012). Dukungan masyarakat dan keluarga tersebut menjadi modal sosial jangka panjang bagi IPWL Lintas Nusa, dan oleh karena itu, IPWL perlu tetap membangun relasi profesional guna mempertahankan dukungan keluarga dan masyarakat.

### KESIMPULAN

Institusi Penerima Wajib laporan (IPWL) Lintas Nusa Kota Batam telah memiliki legalitas dalam penyelenggaraan rehabilitasi

sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial didukung dengan tenaga administratif maupun teknis sebagaimana diatur di pedoman Kementerian Sosial. IPWL telah berhasil melakukan reintegrasi atau resosialisasi, yaitu mengembalikan eks klien kepada keluarga dan masyarakat. Sebagian besar eks klien yang berhasil berintegrasi tersebut adalah bekerja, usaha sendiri, sekolah dan membantu orang tua di rumah.

Kelemahan-kelemahan IPWL temuan penelitian ini, adalah *pertama*, IPWL belum memiliki pekerja sosial profesional. Tugas-tugas pekerja sosial dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dan kanselor adiksi yang tidak berpendidikan pekerja sosial (profesional); *kedua*, jumlah kanselor belum sebanding dengan jumlah klien sebagaimana ditentukan, yaitu satu kanselor berbanding 9 klien; *ketiga*, masih bergantung pada anggaran Kementerian Sosial; *keempat*, jejaring kerja dalam proses rehabilitasi sosial korban NAPZA masih terbatas; *kelima*, hasil kerja IPWL belum dipublikasi secara luas; dan *keenam* sarana prasarana masih terbatas menuju IPWL yang ideal.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang perlu ditindaklanjuti adalah:

### 1. Kepada IPWL Lintas Nusa

Mengoptimalkan pencapaian hasil kegiatan disarankan kepada IPWL Lintas Nusa, adalah: mengisi sendiri pekerja sosial profesional, penambahan kanselor adiksi, kemandirain dana kegiatan melalui pengembangan usaha ekonomis produktif, iuran klien, dan berjejaring dengan dunia usaha di Kota Batam.

### 2. Kepada Dinas Sosial Kota Batam dan Kepulauan Riau

Memfasilitasi IPWL Lintas Nusa untuk mengakes program pada forum kemitraan dunia usaha di daerah, melakukan bimbingan teknis untuk pengembangan kapasitas pengelola IPWL, dan dukungan anggaran dari APBD.

### 3. Kepada Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA RSKPN – Kementerian Sosial

Menempatkan pekerja sosial profesional dan penambahan kanselor adiksi di IPWL Lintas Nusa; memberikan dukungan dana untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi IPWL; dan bantuan stimulan usaha ekonomis produktif (UEP) bagi klien menjangkau lebih banyak lagi klien yang berminat wira usaha dengan besar bantuan stimulan Rp. 2.5 juta. Dana stimulan sebesar ini menurut pertimbangan peneliti sudah cukup untuk membuka usaha baru.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Sejak penelitian sampai dengan penulisan artikel ini, peneliti memperoleh dukungan dan bantuan dari peneliti Puslitbangkesos, pengelola IPWL Lintas Nusa dan dukungan dari pimpinan dan staf Direktorat RSKPN. Untuk itu, diucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas.A.K, (2016), Dukungan Keluarga, Spritual, Motivasi Dengan Kondisi Psikologis Remaja Pengguna Narkoba Di Kota Payakumbuh, *Jurnal Human Care, Volume 1.No.1 Tahun 2016*.
- Apriyani, (2016), Batam, Penopang Pertumbuhan Kepri, <http://infobanknews.com/batam-penopang-pertumbuhan-kepri> [3/2/2017].
- Arifin.A, (2016), Rehabilitasi Sosial Korban Napza Di Panti Sosial Marsudi Putra

- Toddopuli Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (*Skripsi*), Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar.
- Asisah, (2015), Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta (*Skripsi*), Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Batam, (2016), Kota Batam dalam Angka, BPS Kota Batam.
- Batampos.co.id*, (2017), Narkoba Masih Jadi Ancaman Serius bagi Batam di 2017, Kamis, 29 Desember 2016 [10/12/2017].
- Dwiyantari.M.M.S, (2013), Penguatan Peran Pekerja Sosial Untuk Efektivitas Pelayanan Pekerjaan Sosial: Kajian Dengan Pendekatan Tujuh Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif Dari Stephen R. Covey/ Insani, Issn: 0216-0552 | No. 14/1/Juni 2013.
- Eric, P. (2017). Socioeconomic Effects of Drug Abuse Among Nigerian Youths. *Canadian Social Science*, 13 (1), 49-53. Available from: <http://www.cscanada.net/index.php/css/article/view/9072>. DOI: <http://dx.doi.org/10.3968/9072>.
- Firarizta.E.G, (2015), Faktor Determinan Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Di Panti Wreda Hanna Surokarsan Yogyakarta (*Skripsi*) Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Firdha.R, (2016), Rehabilitasi Sosial untuk Penyalahguna NAPZA di Yayasan Karya Peduli Kita Tangerang Selatan (*Skripsi*), Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universits Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Galvani.S, (2016), *Alcohol and other Drug Use: The Roles and Capabilities of Social Workers*, England: Menchester Metropolitan University.
- Gunawan, (2016), Dekriminalisasi Pecandu Narkotika: Pergeseran Pendekatan dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika Di Indonesia, *Sosio Informa* Vol. 2, No. 03, September - Desember, Tahun 2016.
- Hafrida, (2016) Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkotika sebagai Korban bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan daerah Jambi, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No 1 Tahun 2016.
- Irawan, (2017), Malaysia dan Singapura Pemasok Terbesar Narkoba ke Indonesia, *batamtoday.com*, Minggu, 204/2017.
- Jiloha.R.C, (2009), Social and Cultural Aspects of Drug Abuse in Adolescents, *Delhi Psychiatry Journal* Vol. 12 No.2 OCTOBER 2009, *Delhi Psychiatric Society*.
- Kota Batam Dalam Angka Tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), (2014), Jejaring Kerja, Materi Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintah Tingkat III, Yogyakarta, Badan Diklat DIY/<http://diklat.jogjaprovo.go.id>.
- Mokoena.T.L, (2002), *The Social Factors Influencing Adolescent Drug Abuse:*



*A Study of Inpatient Adolescents At Magaliesoord Centre, Faculty of Humanities Department of Social Work University of Pretoria.*

- Mansur.T, (2008), Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Pelayanan Publik pada Bagian Bina Sosial Setdakho Lhoukseumawe (*Tesis*), Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- National Assosiation of Social Worker (NASW), (2013), A Social Work Perspective on Drug Policy Reform: Public Health Approach, *Social Justice Brief*, NASW.
- Nofriadi.Y, (2017), Kepri Duduki Peringkat Empat Nasional Penyalahgunaan Narkoba, *Batamtoday.com*, Kamis, 13-07-2017 [15/12/2017].
- Nurhidayati.N & Nurdibyanandaru.D, (2014), Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan *Self Esteem* pada Penyalahguna Narkoba yang Direhabilitasi *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* Vol. 03 No. 03, Desember 2014.
- Ongwae.M.N, (2016), *Study of The Causes And Effects of Drug And Substance Abuse Among Students In Selected Secondary Schools In Starehe Sub County, Nairobi County*, Department of Educational Foundations, University of Nairobi.
- Pramudyo.A, (2013), Implementasi Manajemen Kepemimpinan Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi, *JBMA – Vol. I, No. 2*, Februari 2013 ISSN: 2252-5483
- Qamarina.N, (2017), Peranan Panti Asuhan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga Anak Asuh Di UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Kota Samarinda, *Ejournal Administrasi Negara*, 2017, Volume 5, Nomor 3: 6488-6501 Issn 0000.0000, Ejournal. An.Fisip-Unmul.org.
- Rahmadona.E & Agustin.H, (2014), Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba di RSJ Prof. HB. Sa'anin, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, p-issn 1978-3833/8(2)60-66/ <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/> [16/12/2017]
- Risdiyanto, (2014), Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkoba di Panti Sosial Paamrdi Putra Galih Pakuan Bogor (*Skripsi*), Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Room, R, (2015), *Addiction As Failure In Social Roles*, Centre for Alcohol Policy Research (CAPR), La Trobe University, Melbourne, Australia.
- Septiyan, F, (2014), Metode Intervensi Sosial dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta, Unit Bimomartani (*Skripsi*), Program Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Yogyakarta.
- Siahaan.E.P.D & Daulay.W,( tt ), Dukungan Psikososial Keluarga Dalam Penyembuhan Pasien Napza di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara/ <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=59033&val=4130> [13/12/2017].

- Solusihukum.com*, (2017), *Penyalahgunaan Narkoba Di Kepri Capai 44 Ribu Kasus* Jan 05, 2016 11/12/2017].
- Spooner.C & Hetherington.K, (2004), *Social Determinants Of Drug Use, Technical Report Number 228, National Drug And Alcohol Research Centre*, University Of New South Wales, Sydney.
- Suhartanta & Arifin.Z, (2010), *Jejaring Kerja Sama Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Lulusan Pendidikan Kejuruan*, APTEKINDO/ <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/aptekindo/article/view/90/84> [16/12/2017]
- Suradi, (2012), *NAPZA: Permasalahan dan Upaya Penanganannya*, Jakarta: P3K Press.
- Susilo, H. (2014). *Peran Kepemimpinan*, [herususilofia.lecture.ub.ac.id/files/2014/12/Peran-Kepemimpinan.pdf](https://herususilofia.lecture.ub.ac.id/files/2014/12/Peran-Kepemimpinan.pdf) [13/12/2017].
- Tam.C-L & Yie-Chu Foo.Y-C, (2012), *Contributory Factors of Drug Abuse and the Accessibility of Drugs*, *International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health*, Vol. 4 No. 9 (2012) /<http://iomcworld.com/ijcrimph/files/v04-n09-02.pdf> [16/12/2017].
- Tracy.N, (2016), *Effects Of Drug Addiction (Physical And Psychological)* /<https://www.healthyplace.com/Addictions/Drug-Addiction/Effects-Of-Drug-Addiction-Physical-And-Psychological> [10/12/2017].
- United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC), (2013), *Drug Abuse Treatment And Rehabilitation: A Practical Planning And Implementation Guide*, Vienna, New York.
- Wartakepri.co.id*, BNNK Batam: Pengguna Narkoba di Batam 0.2 Persen dari Jumlah Penduduk, August 2, 2016 [10/12/2017].
- Widianti, T. (2013), *Proses Pemulihan Korban Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika & Zat Adiktif) Di Lembaga Rehabilitasi Rumah Cemara Bandung Ditinjau Dari Konsep Pendidikan Agama Islām (Skripsi)*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yayasan Lintas Nusa (YLN), (2017), *Profil Yayasan Lintas Nusa dan Institusi Penerima Wajib Lapori Lintas Nusa*.
- Yusfar.A.A, Nurhayani & Balqis, (2013), *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar Tahun 2013/* <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5896/JURNAL%20ADNAN.pdf?sequence=1> [9/12/2017].
- Zastow, C. (2008), *Introduction to Social Work dan Social Welfare: Empowering People*, ninth Edition, USA: Thomson Brooks/Cole.

## PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI PERUNDUNGAN PADA PELAJAR DI KOTA PANGKAL PINANG

### *THE EARLY WARNING SYSTEM DEVELOPMENT OF BULLIYING ON STUDENTS IN PANGKAL PINANG CITY*

**Hari Harjanto Setiawan**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI  
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur  
E-mail: hari\_harjanto@yahoo.com

Diterima : 23 Januari 2018; Direvisi: 2 April 2018; Disetujui: 11 April 2018

#### **Abstrak**

Berbagai kasus perundungan yang dilakukan oleh pelajar, akhir-akhir ini banyak terjadi di Indonesia, antara di Kota Pangkalpinang Bangka Belitung. Perundungan di sekolah adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang/kelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Penelitian ini mengungkap gejala perundungan yang akan terjadi apabila terus dibiarkan. Penelitian dilakukan di tiga sekolah yang mewakili masing-masing tingkatan yaitu SD, SMP dan SMA. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data membagikan kuesioner kepada siswa. Hasil penelitian ini mengungkap pengetahuan dan pengalaman siswa mengenai perundungan. Penyebab seorang menjadi pelaku perundungan karena secara umum, tingkah laku *perundungan* ini berawal dari masalah yang dialami oleh pelaku, baik masalah keluarga maupun dengan lingkungan yang ada disekitar kehidupannya. Hal yang menyebabkan perundungan antara lain kepribadian (individu anak), sekolah, keluarga, masyarakat dan media. Penelitian ini juga mengungkap tentang intervensi sosial yang dibutuhkan untuk mengatasi perundungan yang diharapkan dapat dikembangkan menjadi Sistem Peringatan Dini (SPD) dalam mencegah terjadinya perundungan di sekolah.

**Kata Kunci:** *Perundungan, Pelajar, Sistem Peringatan Dini (SPD)*

#### **Abstract**

*Various cases of bullying have occurred in Indonesia, among the areas is Pangkalpinang City Bangka Belitung. Bullying in school areas commonly happened by an aggressive behavior perpetrated over and over by a student / group of students who have power, against other weaker students with the aim of hurting the person. The research was conducted in three schools representing each level of SD, SMP and SMA. This research uses descriptive quantitative method with data collection method of distributing anquet to students. The results of this study is to reveal the knowledge and experience of students about harassment. The cause of a perpetrator of harassment because in general, this behavior of abuse comes from problems experienced by the perpetrator, both family problems and with the environment around his life. Things that cause harassment include personality (individual child), school, family, community and media. The study also reveals the social interventions needed to overcome the harassment that is expected to be developed into the Early Warning System (EWS) in preventing the occurrence of abuse in schools.*

**Keywords:** *Bullying, Student, Early Warning System (EWS).*

## PENDAHULUAN

Kota Pangkalpinang adalah salah satu daerah otonomi yang letaknya di Pulau Bangka. Bulan Oktober 2017 Kota Pangkalpinang digemparkan oleh kasus perundungan oleh oknum guru kepada muridnya. Keterangan resmi KPAI disebutkan bermula ketika korban dengan sengaja mengejek guru dengan langsung memanggil nama dengan tanpa sapaan “Pak” (Tribunnews.com, 2017).

Perundungan di sekolah adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang/kelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Pada beberapa tahun terakhir ini, angka kasus *perundungan* semakin tinggi baik dilakukan oleh siswa SD, SMP dan SMA. Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak (*child abuse*). Tindakan tersebut akhir-akhir ini telah menjadi permasalahan bersama dan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja baik laki-laki maupun perempuan. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang ditujukan pada seseorang yang lebih berkuasa (Fahrudin, 2012).

Berdasarkan data *International Center for Research on Women* (ICRW) tahun 2015, sebanyak 84 persen siswa di Indonesia mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah. Sebanyak 45 persen siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Sebanyak 22 persen siswi menyebutkan bahwa guru dan petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Selain itu, 75 persen siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah. Data *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), menyebutkan bahwa 50 persen anak mengaku pernah mengalami

perundungan di sekolah. Adapun 40 persen pelajar berusia 13-15 tahun mengaku pernah mengalami kekerasan oleh teman sebaya.

Hasil survey, yang dilaksanakan di beberapa distrik Papua dan Papua Barat; *Multiple Indicator Cluster Survey/MICS* (2011), menunjukkan bahwa hukuman emosional dan fisik masih sangat lazim. Lebih dari 60 persen ibu atau pengasuh dilaporkan menggunakan hukuman fisik terhadap anak-anaknya. Bahkan, sekitar satu dari empat mengaku menggunakan hukuman fisik yang berat. Hukuman fisik adalah hukuman yang paling lazim dilakukan di 56 persen sekolah yang diwawancarai. Tindakan tersebut, dilakukan Guru karena mereka mengakui tidak tahu alternatif lain untuk mendisiplinkan murid-murid mereka, meski mereka mengetahui tentang dampak buruk dari hukuman fisik tersebut.

Selanjutnya, KPAI melaporkan bahwa kasus kekerasan (*bullying*) di sekolah, mengalami kenaikan dari 67 kasus pada 2014 menjadi 79 kasus di 2015. Anak sebagai pelaku tawuran juga mengalami kenaikan dari 46 kasus di tahun 2014 menjadi 103 kasus di tahun 2015. Laporan tersebut, sejalan dengan beberapa hasil penelitian, yang secara metodologis dapat dipertanggung jawabkan (Hartik, 2016). Kasus sebenarnya diduga lebih banyak lagi karena tidak semua kasus dilaporkan di KPAI. (bara news.co, 2016).

Hasil Survey Kekerasan Terhadap Anak, (2013) yang menunjukkan bahwa selama tahun 2012, sebanyak 72,34 persen laki-laki dan 60,41 perempuan mengalami kekerasan fisik dengan pelakunya adalah teman, dan sebanyak 60,94 persen perempuan mengalami kekerasan fisik dengan pelakunya adalah Guru. Hasil penelitian Yayasan Sejiwa, (2008) di 3 kota besar, Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta, menunjukkan bahwa perilaku perundungan pada 67,9 persen siswa/

siswi SLTA dan 66.1 persen pelajar SLTP dengan katagori tertinggi kekerasan psikologis seperti pengucilan dan katagori kedua adalah kekerasan verbal dan fisik seperti mengejek dan memukul.

Perundungan (*Bullying*) menurut Dan Olweus, dalam Buku "*Bullying at School: What We Know and What We Can Do*" (1993): "*A person is bullied when he or she is exposed, repeatedly and over time, to negative actions on the part of one or more others person, and he or she has difficulty defending himself or herself.*" Seseorang menjadi korban perundungan ketika dia berulang kali dan dari waktu ke waktu terkena aksi negatif oleh satu orang atau lebih siswa lainnya, dan dia kesulitan membela dirinya (Anti Perundungan, 2017)

Definisi tersebut mengandung tiga unsur penting: 1) Perundungan bersifat menyerang dengan perilaku aksi negatif dan tidak diinginkan dengan tujuan untuk menyakiti target (korban). 2) Perundungan menyangkut pola perilaku yang dilakukan secara berulang kali, atau ada kondisi terancam agresi selanjutnya. 3) Perundungan terkait dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan antara pelaku dan korban, sehingga korban mengalami kesulitan membela dirinya. Unsur perbedaan kekuatan inilah yang membedakan perundungan dengan konflik lainnya.

Berbagai perilaku dan tipe perundungan dapat terjadi di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja (*Workplace Bullying*), dan *cyber bullying* (Perundungan Siber). Bentuk- bentuk perundungan menurut Anti Perundungan (2017) antara lain: 1) Perundungan dengan perkataan (*Verbal Bullying*). Misalnya menghina dan mengejek dengan panggilan tertentu; 2) Perundungan secara sosial (*Social Bullying*) dengan mengucilkan atau mengisolasi seseorang; 3) Perundungan secara fisik,

misalnya meludah, mendorong, menendang, atau memukul; 4) Perundungan dengan cara menyebarkan kebohongan dan rumor palsu; 5) Perundungan dengan cara merampas uang, benda atau merusak barang korban; 6) Perundungan dengan cara mengancam atau memaksa untuk melakukan sesuatu hal kepada korban; 7) Perundungan Rasial (perbedaan ras atau suku); 8) *Sexual Bullying* (perbedaan gender, umumnya laki-laki terhadap perempuan yang membuat korbannya merasa di intimidasi atau merasa tidak nyaman); 9) *Cyber Bullying*.

Praktik perundungan pada usia sekolah dasar (SD) dapat memberikan dampak negatif pada diri korban yang bersifat traumatic (Nursasari, 2017). Sedangkan korban perundungan biasanya rentan atau mudah diserang karena kurang percaya diri. Mereka cenderung lebih gelisah dan merasa tidak aman dari pada siswa lainnya. Selain korban dan pelaku, dalam kejadian juga mungkin ada saksi berada dekat dengan kejadian.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial di lima provinsi yaitu Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat, Bangka Belitung dan Lampung, menunjukan bahwa 50% siswa SMA, 38,1% siswa SMP dan 49% siswa SD melakukan perundungan dengan alasan pernah menjadi korban (Kurniasari et al, 2017). Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku ada kecenderungan berantai antar generasi. Faktor penyebab dapat digunakan sebagai dasar untuk intervensi, sehingga sistem peringatan dini sebagai tindakan preventif (Suyono, H. & Suryanto. 2017). Agar perundungan tidak berkembang, yang dibutuhkan adalah mekanisme sistem peringatan dini (*early warning system*). Prinsip dasar mekanisme deteksi dini adalah pihak sekolah secara proaktif mendeteksi, memantau, menganalisis, dan menangani setiap benih perundungan sedini dan secepat mungkin.



Sistem peringatan dini yang akan diterapkan harus memperhatikan lingkungan sosial anak yang saling berkaitan. Menurut Bronfenbrenner's memperlihatkan bagaimana anak dipengaruhi oleh struktur lingkungan dimana ia tinggal, yang terdiri dari: "*microsystem, mezosystem, exosystem* dan *macrosystem*." (Santrock, 2009). Penyebab seorang menjadi pelaku perundungan karena secara umum, tingkah laku *perundungan* berawal dari masalah yang dialami oleh pelaku, baik masalah keluarga maupun dengan lingkungan yang ada disekitar kehidupannya. Pekerja Sosial yang menggunakan pendekatan ekologis akan memperhatikan interaksi yang terjadi antara faktor-faktor pada berbagai tingkatan pengaruh ekologis dan bagaimana semua itu membentuk perilaku individu dan lingkungannya (Stepney & Ford, 2008). Berdasarkan situasi anak di sekolah maka anak tidak terlepas dari kehidupan lingkungan sosial yang membentuk dalam masa perkembangan. Perspektif ekologi (*ecological perspective*) dalam penanganan anak harus dilakukan, karena dalam perkembangannya, anak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; keluarga, teman sebaya, sekolah dan budaya dilingkungannya.

Sebagai makhluk sosial, individu dengan segala aspek perkembangannya harus berinteraksi dengan individu lain dalam lingkungan sosialnya dan saling mempengaruhi. Model ekologi menjadi satu ruang lingkup perkembangan yang sifatnya eksternal dan memberikan kontribusi besar bagi konsep perkembangan individu. Menurut teori Bronfenbrenner's bahwa model ekologi memperlihatkan bagaimana anak dipengaruhi oleh struktur lingkungan dimana ia tinggal, yang terdiri dari: "*microsystem, mezosystem, exosystem* dan *macrosystem*." (Santrock, 2009, p. 29).

Posisi anak adalah masih dalam masa perkembangan yang dipengaruhi lingkungannya yang berada dalam unsur diatas, sehingga keberpihakan kepada anak dalam upaya perlindungan sangat penting dalam penanganan perundungan di sekolah. Lebih jauh lagi bahwa bullying adalah suatu fenomena yang berhubungan antara individu, keluarga, kelompok sebaya, sekolahan, komunitas dan budaya (Espelage & Swearer, 2004). Perundungan yang terjadi di sekolah disebabkan oleh; faktor kepribadian, sekolah, keluarga, masyarakat dan media.

Iklim sekolah memiliki pengaruh terhadap pencegahan perundungan. Iklim sekolah yang positif menandakan sekolah tersebut mampu membangun suasana psikologis yang sehat bagi setiap anggota sekolah, baik pimpinan sekolah, guru, staf akademik lainnya, maupun siswa (Rahmawati, 2016).

Berdasarkan pemikiran tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberi informasi atas beberapa pertanyaan berikut: 1) Bagaimana pengetahuan siswa tentang perundungan di lingkungan sekolah? 2) Bagaimana pengalaman siswa tentang perundungan yang terjadi di sekolah? 3) Bagaimana Sistem Peringatan Dini (SPA) dalam mencegah munculnya masalah perundungan di sekolah?

Diharapkan temuan kajian ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi program perlindungan terhadap anak di lingkungan sekolah. Lebih jauh lagi tulisan ini dapat memberikan masukan pada pemerintah akan pentingnya profesi pekerjaan sosial di lingkungan sekolah. Pencegahan akan jauh lebih murah dan efektif dari pada melakukan intervensi pada anak-anak yang telah terjadi masalah. Program pencegahan yang dilakukan secara efektif akan menjadi langkah untuk menahan atau mengurangi permasalahan perundungan di lingkungan sekolah.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan mengeksplorasi perilaku bullying (perundungan) anak yang ada di sekolah. Penelitian ini menggunakan survei, sedangkan dalam menganalisis data menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2008). Jenis penelitian kuantitatif merupakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2008). Penelitian ini diperkuat dengan menggunakan indikator-indikator perundungan dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Indikator inilah yang dipakai untuk membaca data untuk menentukan deteksi dini perilaku perundungan di Kota Pangkalpinang.

Provinsi dan kota Lokasi pengumpulan data dipilih secara purposive yaitu di Kota Pangkal Pinang. Pemilihan sekolah didasarkan atas keterwakilan dari tiga karakteristik yang berbeda yaitu SD, SMP, SMA.

Responden yang dapat berkontribusi dalam memberikan data pada penelitian secara langsung antara lain: 1) Responden Siswa keseluruhan berjumlah 90 anak yang terdiri dari sekolah SD sejumlah 30 anak, SMP 29 sejumlah anak dan SMA sejumlah 31 anak. 2) Informan adalah siswa yang berkasus di sekolah baik pelaku maupun korban yang datanya diperoleh dari guru Bimbingan dan Konseling berjumlah 6 anak yang mewakili berbagai tingkatan yaitu SD sejumlah 2 anak, SMP sebanyak 2 anak dan SMA sejumlah 2 anak. 3) Guru Bimbingan dan Konseling masing masing sekolah adalah satu orang. 4) Kepala sekolah/ wakil/wali kelas.

Pengumpulan dilakukan dengan tiga cara yaitu: 1) Pengisian angket untuk Responden

Siswa sekolah SD, SMP, SMA masing masing satu kelas. 2) Wawancara mendalam untuk Siswa yang berkasus di sekolah baik pelaku maupun korban, Guru BK, dan Kepala sekolah/ wakil/wali kelas. 3) Fokus Group Diskusi yang melibatkan 15 peserta yang terdiri dari kepala sekolah, guru Bimbingan dan konseling, wali kelas, dinas pendidikan, dan dinas sosial. 4) Observasi untuk mengamati Lingkungan sekolah. 5) Studi Dokumentasi yang berasal dari jurnal, buku, laporan dan dokumentasi lainnya.

Agar suatu konsep dapat diukur, maka harus didefinisikan secara operasional. Definisi operasional variabel berisikan indikator-indikator dari suatu variabel, yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang relevan. Variabel, indikator serta pengukuran penelitian dapat didiskripsikan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Variabel dan Indikator Perundungan

| No | Variabel                               | Indikator                                                                                         |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bentuk Perundungan                     | ◦ Fisik<br>◦ Verbal dan non verbal<br>◦ Seksual<br>◦ Cyber                                        |
| 2  | Penyebab Perundungan                   | ◦ Keluarga<br>◦ Masyarakat<br>◦ Kepribadian<br>◦ Sekolah<br>◦ Televisi dan Media Cetak/elektronik |
| 3  | Intervensi sosial terhadap Perundungan | ◦ Penanganan<br>◦ Pencegahan                                                                      |

Data yang telah terkumpul diolah menggunakan SPSS, kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) Mengorganisir informasi, b) membaca keseluruhan informasi dan memberi kode, c) membuat suatu uraian terperinci mengenai kasus dan konteksnya, d) peneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori, e) selanjutnya peneliti melakukan

interpretasi dan mengembangkan generalisasi natural dari kasus baik untuk peneliti maupun untuk penerapannya pada kasus yang lain dan f) menyajikan secara naratif. Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian. Analisis data dilakukan dengan tujuan dalam rangka penarikan simpulan.

Data kualitatif disajikan secara diskriptif, sedangkan analisa data observasi disajikan secara kualitatif menggunakan kutipan verbatim dari informan. Selain kutipan verbatim, yang dimaksud data adalah transkrip wawancara, catatan lapangan observasi, jurnal, dokumen literatur, foto, website, email dan lain sebagainya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan hasilnya terpetakan mengenai pengetahuan dan pengalaman siswa baik korban maupun pelaku anak mengenai perundungan. Data mengenai perundungan di kalangan siswa baik SD, SMP dan SMA dapat dijadikan indikator Sistem Peringatan Dini (SPD) dalam mencegah terjadinya perundungan.

### Pengetahuan Perundungan

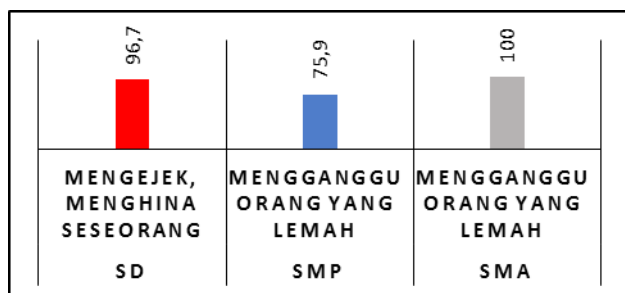
Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Adapun yang diukur tentang pengetahuan siswa tentang perundungan antara lain bentuk, akibat, penyebab menjadi korban dan penyebab melakukan perundungan.

#### 1. Bentuk

Perundungan (*bullying*) dapat dilakukan dalam banyak cara, tetapi semuanya tetap

berbahaya. Seperti pendapat Nursasari (2017), bahwa anak yang menjadi korban akan menimbulkan trauma dalam kehidupan selanjutnya. Meskipun tidak ada kontak fisik antara pelaku dengan korbannya, orang-orang yang mengalami perundungan dapat membawa sakit hati atau luka emosional atas apa yang dialami seumur hidupnya.

Ada 23 bentuk perundungan yang ditanyakan kepada siswa antara lain 1) Mengganggu orang yang lemah, 2) Mengejek, menghina seseorang, 3) Mengintimidasi (menakut-nakuti, meneror) orang lain, 4) Memalak, meminta dengan paksa, 5) Mengucilkan memusuhi seseorang tanpa sebab, 6) Memanggil nama dengan julukan buruk dan berulang-ulang, 7) Memfitnah atau menyebarkan informasi, berita tidak benar, 8) Memegang, meraba wilayah vital, 9) Menyebutkan wilayah vital di depan orang banyak, 10) Mengirimkan gambar porno tentang seseorang melalui media sosial, 11) Mengajak orang lain untuk menyakiti seseorang, 12) Merasa senang kalau sudah menyakiti orang lain, 13) Dilakukan secara berulang-ulang, 14) Dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa/senior, 15) Dilakukan secara kelompok atau perorangan, 16) Dilakukan dengan cara senda gurau atau serius, 17) Dilakukan karena tidak menyukai kelebihan orang lain, 18) Telah direncanakan terlebih dahulu, 19) Sengaja menyakiti orang lain, 20) Menyakiti dengan motif atau tujuan tertentu, 21) Dilakukan di depan orang banyak, 22) Dilakukan di tempat tertentu, (di lorong, sekolah, di kelas, di toilet, di kantin, di jalan, di Mall, di kendaraan umum), 23) Orang dibuli, biasanya tidak mampu melawan, tidak mampu mempertahankan diri. Dari dua puluh tiga pertanyaan tersebut, diambil yang paling dominan pada masing-masing tingkatan sebagai berikut:

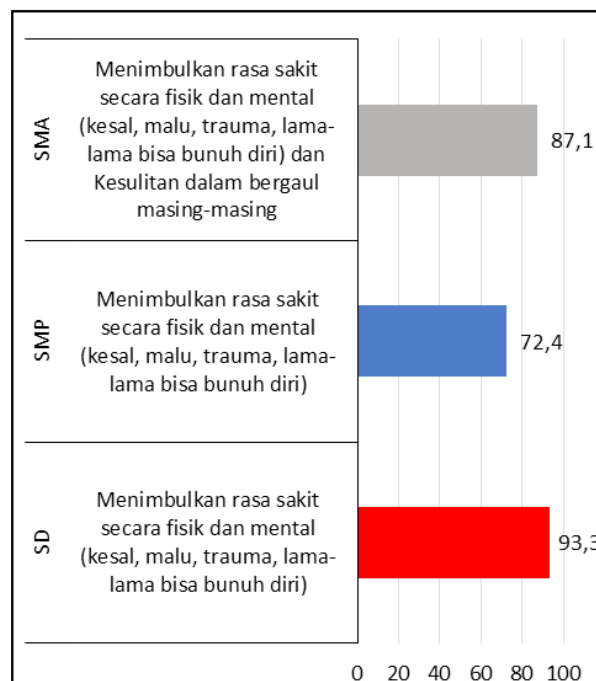


**Diagram 1: Presentase Pengetahuan Siswa Tentang Bentuk Perundungan Paling Dominan**

Bentuk perundungan yang diketahui siswa SD di Kota Pangkal Pinang yang paling dominan adalah mengejek atau menghina seseorang sebanyak 96,7%. Sedangkan pengetahuan siswa SMP (75,9%) dan SMA (100%) mengenai bentuk perundungan adalah mengganggu orang yang lemah.

## 2. Akibat

Pengetahuan siswa di Kota Pangkalpinang mengenai akibat perundungan masing-masing SD (93,3%) dan SMP (72,4%) menyatakan bahwa akibat perundungan adalah menimbulkan rasa sakit secara fisik dan mental (kesal, malu, trauma dan lama kelamaan bisa bunuh diri). Selain hal tersebut, menurut Novelia (2018) bahwa dari sisi korban sendiri, perundungan dapat berdampak secara akademis (menurunnya konsentrasi, prestasi, maupun semangat, bahkan menimbulkan *phobia* terhadap sekolah), secara sosial (mengucilkan diri, tidak percaya diri dalam berteman), secara psikologis (depresi, ingin melarikan diri dan bahkan bunuh diri), dan secara fisik (mudah cemas, sakit-sakitan, menghindari kontak mata), sehingga bukan tidak mungkin berdampak pula pada masa depannya akibat trauma masa lalu.

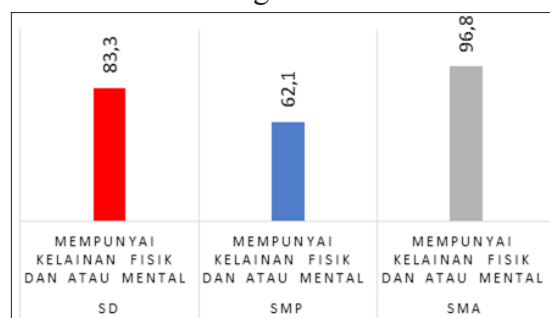


**Diagram 2: Presentase Pengetahuan Siswa Tentang Akibat Perundungan Paling Dominan**

Sedangkan untuk siswa SMA akibat perundungan adalah menimbulkan rasa sakit secara fisik dan mental (kesal, malu, trauma dan lama kelamaan bisa bunuh diri) ditambah kesulitan dalam bergaul yang masing-masing 87,1 %.

## 3. Penyebab Korban

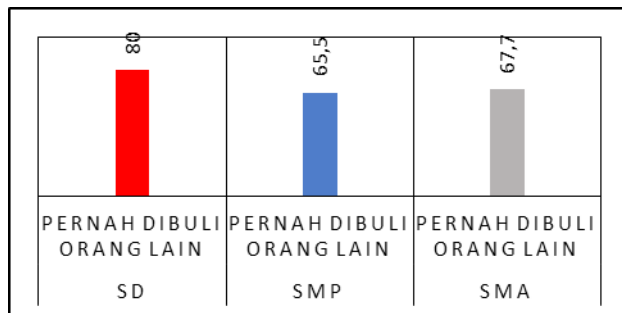
Penyebab seseorang menjadi korban perundungan menurut pengetahuan siswa SD, SMP dan SMA di Kota Pangkalpinang yang dominan disebabkan karena mempunyai kelainan fisik atau mental. Penyebab yang paling dominan dari keseluruhan pada masing-masing tingkatan kelas adalah sebagai berikut:



**Diagram 3: Presentase Pengetahuan Siswa Penyebab Menjadi Korban Perundungan Paling Dominan**

#### 4. Penyebab Melakukan

Pengetahuan siswa SD, SMP dan SMA di Kota pangkal Pinang mengenai penyebab seseorang melakukan perundungan adalah karena pernah menjadi korban perundungan. Pada siswa Sekolah Dasar sebanyak 80% tahu bahwa penyebab melakukan perundungan adalah pernah menjadi korban. Pengetahuan penyebab yang paling dominan pada masing-masing tingkatan kelas adalah sebagai berikut:



**Diagram 4: Presentase Pengetahuan Siswa Penyebab Melakukan Perundungan Paling Dominan**

Sedangkan siswa SMP sebanyak 65,5% mengetahui bahwa penyebab dibuli karena berawal dari menjadi korban. Dan siswa SMA sebanyak 67,7% mengetahui bahwa penyebabnya adalah pernah menjadi korban.

Banyak penyebab yang membuat seseorang menjadi pelaku perundungan. Penyebab yang kerap disorot adalah replikasi atau duplikasi dendam yang tak pernah teratasi dengan tuntas. Sehingga, seorang yang mendendam pada akhirnya mencari korban berikutnya. Korban yang bisa dijadikan sasaran pelampiasan atau kompensasi atas masalah yang tidak pernah berhasil mereka selesaikan. Salah satu sifat manusia apabila memiliki kelemahan di satu sisi, akan mendorong individu tersebut untuk mencari 'kekuatan' di sisi lain. Baik dengan cara yang konstruktif maupun yang tidak konstruktif atau negatif. Karena dulu saya pernah disakiti, kemudian setelah

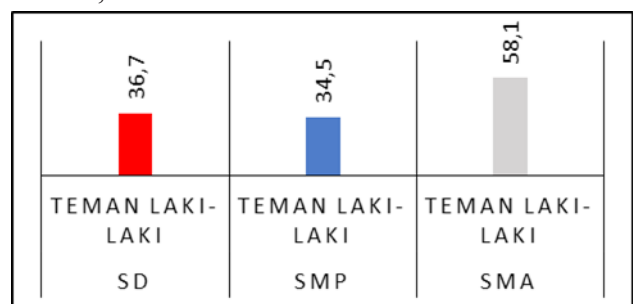
saya dewasa, dalam tanda petik saya cari penyelesaian masalah dengan menyakiti pihak lain.

#### Pengalaman Perundungan

Perundungan itu terjadi karena kita menganggap itu adalah wajar dan sok berkuasa, kita terbiasa untuk melakukan perundungan terus-menerus. Namun, kita tidak tahu dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

##### 1. Pelaku Perundungan

Pelaku perundungan di Kota Pangkal Pinang didominasi oleh teman laki-laki yang masing masing pada tingkat SD sebanyak 36,7%, tingkat SMP sebanyak 34,5% sedangkan untuk siswa SMA sebanyak 58,1%.



**Diagram 5: Presentase Pelaku Perundungan**

Perilaku Perundungan itu dipelajari dan dapat pula tidak dipelajari. Pelaku perundungan pada dasarnya merupakan korban keadaan. Jadi jangan memberi label, karena bisa berdampak akan mengkekalkan perilakunya. Pelaku perundungan mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) Memiliki karakter bersifat menyerang, baik terhadap orang dewasa maupun teman sebaya; 2) Pelaku perundungan seringkali bertindak menurut apa kata hatinya (Impulsif) tanpa dipikir dulu; 3) Mereka menunjukkan kebutuhan ingin atau sok berkuasa (mendominasi/intimidatif); 4) Kurang Empati (kurang dapat merasakan perasaan orang lain); 5) Seringkali menyelesaikan masalah konflik perbedaan dengan cara kekerasan.



Salah satu faktor terbesar penyebab anak melakukan perundungan adalah tempramen. Temperamen sebagai karakteristik atau kebiasaan yang terbentuk dari respon emosional. Hal ini mengarah pada perkembangan tingkah laku personalitas dan sosial anak. Seseorang yang aktif dan impulsif lebih mungkin untuk berlaku perundungan dibandingkan orang yang pasif atau pemalu. Rasa marah yang kuat, tanpa ada pengarahan kearah perilaku positif dan produktif, dapat membentuk sifat agresif.

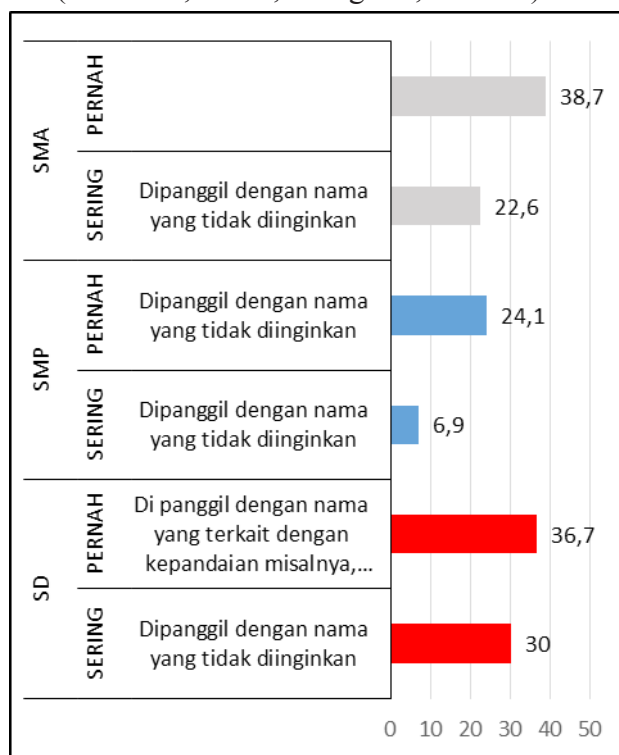
Beberapa anak pelaku perundungan sebagai alat untuk mendapatkan popularitas, perhatian, bahkan memperoleh barang-barang yang diinginkannya. Beberapa anak melakukan perundungan dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.

Biasanya mereka takut jika tindakan perundungan menimpa diri mereka sehingga mereka mendahului berlaku perundungan pada orang lain untuk membentuk citra sebagai pemberani. Meskipun beberapa pelaku perundungan merasa tidak suka dengan perbuatan mereka, namun mereka tidak menyadari akibat perbuatannya menyakitkan atau melukai orang lain.

Kemampuan adaptasi yang buruk, pemenuhan eksistensi diri yang kurang, adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan di aspek lain dalam kehidupannya, hubungan keluarga yang kurang harmonis, bahkan bisa jadi pelaku merupakan korban perundungan sebelumnya atau di tempat lain. Kemampuan pemecahan masalah yang kurang bisa membuat anak mencari jalan keluar yang salah, termasuk dalam bentuk perundungan. Contoh, anak yang sering “ditindas” kakaknya di rumah, kemudian mencari pelampiasan dengan “menindas” anak lain di sekolahnya.

## 2. Pernah Menjadi Korban

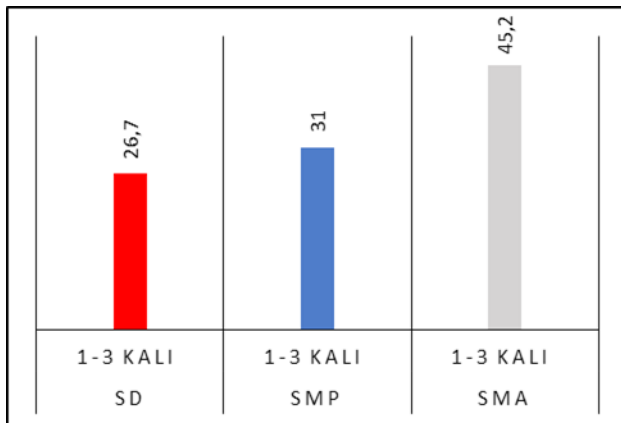
Perlakuan perundungan paling dominan yang sering dialami siswa bagi SD, SMP maupun SMA adalah dipanggil dengan nama yang tidak diinginkan yang masing-masing jumlahnya SD sebanyak 30%, SMP sebanyak 6,9% dan SMA sebanyak 22,6%. Sedangkan yang pernah dialami untuk siswa SD adalah dipanggil dengan nama yang terkait dengan kepandaian misalnya bodoh, menghambat atau lamban dsb, sebanyak 36,7%. Sedangkan yang pernah dialami siswa SMA adalah dikomentari atau menerima berita, info, pesan teks yang tidak menyenangkan melalui media sosial (facebook, twitter, instagram, WA dsb).



**Diagram 6: Presentase Pengalaman Siswa Yang Pernah Mengalami Perundungan Paling Dominan**

## 3. Kuantitas

Kuantitas perundungan yang dialami oleh siswa di Kota Pangkalpinang adalah 1–3 kali yang masing-masing SD sebanyak 26,7%, siswa SMP sebanyak 1-3 kali sebanyak 31% sedangkan siswa SMA sebanyak 45,2%.

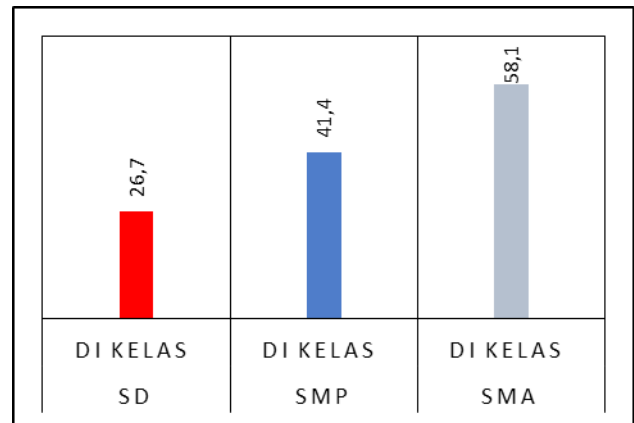


**Diagram 7 : Presentase Kuantitas Perundungan**

Kuantitas yang banyak akan mempengaruhi perkembangan siswa dan bahkan akan merasa tertekan. Anak yang tumbuh dan berkembang dalam tekanan biasanya akan menjadi seorang yang pendendam karena semakin anak tertekan maka akan ada keinginan untuk membalasnya. Pembalasan ini biasanya tidak langsung kepada yang bersangkutan melainkan kepada orang yang lebih lemah, misalnya kepada adik tingkatnya. Kuantitas yang paling banyak ada pada usia SMA yaitu sebanyak 45,2%. Usia inilah yang harus mendapatkan perhatian khusus karena usia ini kondisinya masih labil.

### 3. Tempat

Tempat melakukan perundungan oleh siswa di Kota Pangkalpinang adalah di kelas yang masing-masing siswa SD sebanyak 26,7%, siswa SMP sebanyak 41,4% dan siswa SMA sebanyak 58,1%. Baik SD, SMP maupun SMA yang menjadi tempat favorit untuk melakukan perundungan adalah di kelas. Ini menimbulkan pertanyaan bagi kita bahwa ada apa dengan kondisi kelas sehingga perlunya pengawasan dari berbagai pihak mengenai kondisi kelas ini.

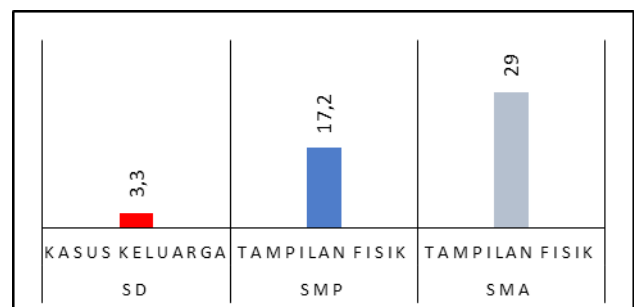


**Diagram 8: Presentase Tempat Perundungan Paling Dominan**

Hal ini memberikan peringatan dini bagi kita bahwa pengawasan di kelas harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya perundungan.

### 4. Sebab Menjadi Korban

Penyebab menjadi korban perlakuan perundungan untuk siswa SD adalah karena kasus keluarga sebanyak 3,3% sedangkan untuk siswa SMP dan SMA penyebabnya adalah tampilan fisik yang masing-masing SMP sebanyak 17,2% sedangkan untuk siswa SMA sebanyak 29%.

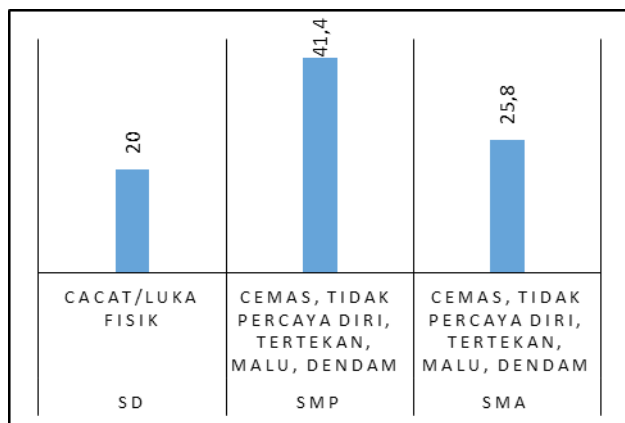


**Diagram 9: Presentase Penyebab Menjadi Korban Perundungan Paling Dominan**

### 5. Akibat Perundungan

Akibat dari perlakuan perundungan yang dominan untuk siswa SD adalah cacat atau luka fisik sebanyak 20%, sedangkan untuk siswa SMP dan SMA yang dominan adalah cemas, tidak percaya diri, tertekan,

malu, dendam. Masing-masing jumlahnya untuk siswa SD sebanyak 41,4% sedangkan untuk siswa SMA sebanyak 25,8%.



**Diagram 10: Presentase Akibat Perundungan Paling Dominan**

Perundungan berdampak negatif terhadap semua pihak yang terlibat, baik terhadap Target (Korban), Pelaku, Bystander (yang menyaksikan kejadian), dan terhadap Sekolah. Terhadap siswa yang menjadi korban perundungan akan berdampak: 1) Depresi. 2) Kurang menghargai diri sendiri. 3) Masalah kesehatan akibat psikologis. 4) Prestasi akademik menurun. 5) Pikiran untuk bunuh diri.

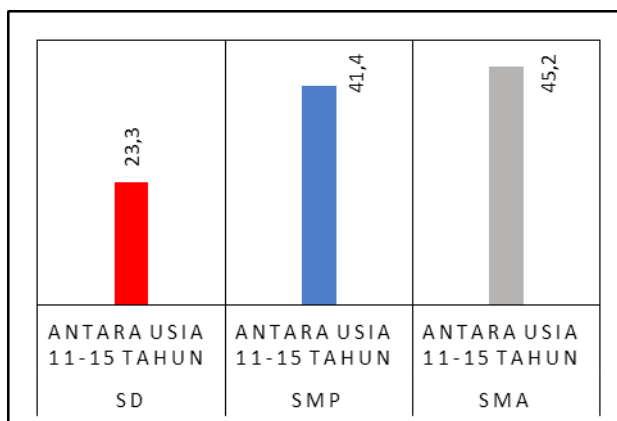
Terhadap siswa yang menyaksikan perundungan akan berdampak: 1) Merasa ketakutan. 2) Merasa tidak berdaya untuk berbuat. 3) Merasa bersalah karena tidak berbuat. 4) Dapat Cenderung Ikut berpartisipasi.

Terhadap sekolah terjadinya perundungan akan berdampak: 1) Terhadap sekolah dimana terjadi perundungan. 2) Sekolah secara tidak langsung menciptakan dan mengembangkan lingkungan yang tidak aman (ketakutan) dan tidak saling menghargai. 3) Siswa mengalami kesulitan dalam belajar. 4) Siswa merasa tidak aman.

5) Siswa Tidak menyukai sekolah. 6) Siswa merasa bahwa Guru dan Staff Sekolah kurang dapat mengontrol keadaan dan tidak peduli dengan mereka.

## 6. Usia Menjadi Korban

Pertama kali siswa di kota Pangkal Pinang menjadi korban adalah antara usia 11 sampai dengan 15 tahun, yang masing-masing untuk siswa SD sebanyak 23,3%, siswa SMP sebanyak 41,4% dan untuk siswa SMA sebanyak 45,2%.

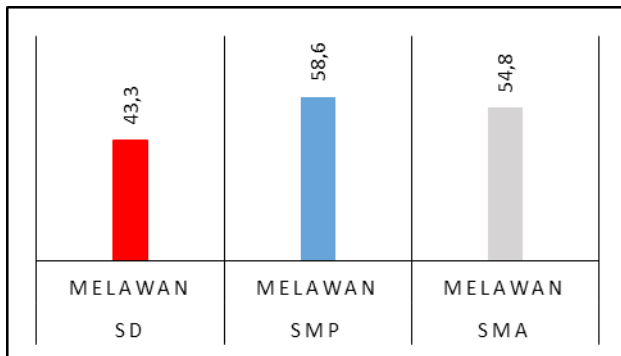


**Diagram 11: Presentase Usia Pertama Kali Menjadi Korban Perundungan**

Terhadap siswa pelaku perundungan akan berdampak: 1) Sering terlibat dalam perkelahian/tawuran. 2) Mencuri atau merusak (*Vandalisme*) properti bangunan. 3) Minum alkohol dan merokok. 4) Prestasi nilai akademiknya kurang. 5) Merasakan iklim negatif di sekolah. 6) Membawa senjata.

## 7. Reaksi Saat Menjadi Korban

Ketika siswa mendapatkan perlakuan perundungan maka reaksi mereka yang dominasi adalah melawan yang masing-masing untuk siswa SD sebanyak 43,3%, siswa SMP sebanyak 58,6% dan siswa SMA sebanyak 54,8%.

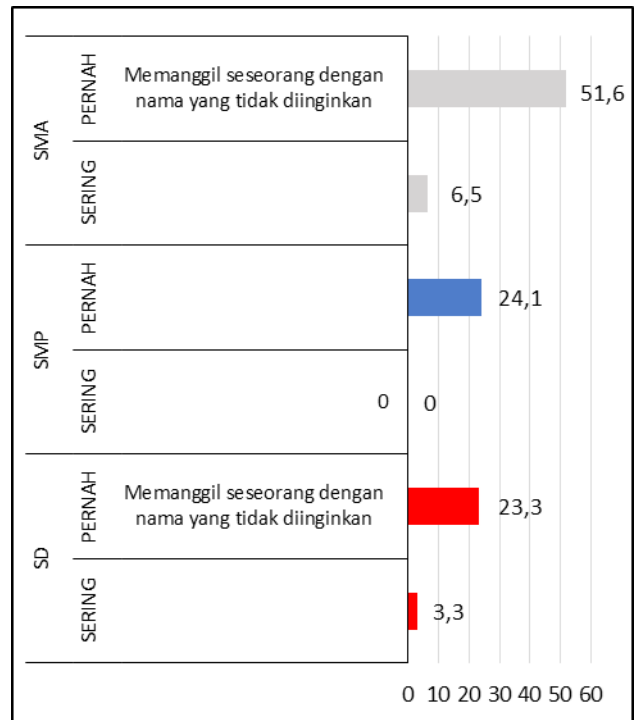


**Diagram 12: Presentase Reaksi Saat Menjadi Korban Perundungan Paling Dominan**

## 8. Sebagai Pelaku

Siswa sebagai pelaku, yang sering dilakukan untuk siswa SD adalah 1) menekan, menendang, mendorong pada seseorang secara berulang-ulang. 2) sengaja meninggalkan, mengucilkan atau mengabaikan seseorang, 3) mengolok-olok, menghina dengan cara menyakitkan, 4) menarik celana atau rok yang masing-masing jumlahnya sebanyak 3,3 % sedangkan yang merasa pernah melakukan perundungan untuk siswa SD adalah memanggil seseorang dengan nama yang tidak diinginkan yaitu sebanyak 23,3%.

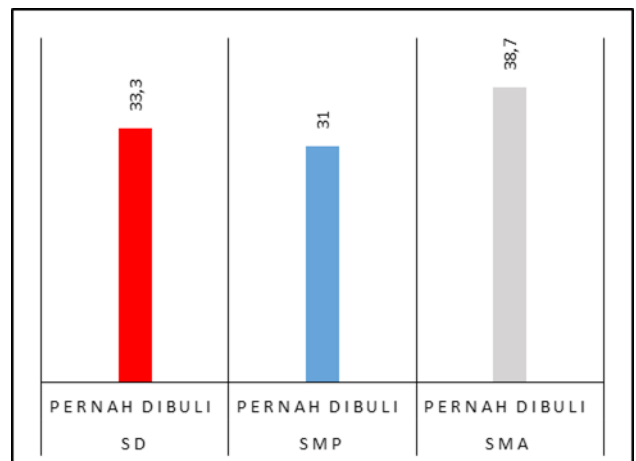
Pelaku siswa SMP yang pernah dilakukan adalah memanggil dengan nama yang terkait dengan kepandaian misalnya bodoh, menghambat, lamban dan seterusnya yaitu sebanyak 24,1%. Sedangkan untuk Siswa SMA perilaku perundungan yang sering dilakukan adalah memanggil dengan nama yang terkait dengan kepandaian misalnya bodoh, menghambat, lamban dan seterusnya yaitu sebanyak 6,5% dan yang pernah dilakukan adalah memanggil seseorang dengan nama yang tidak diinginkan. Hal ini memberi peringatan kepada kita bahwa orang dewasa, khususnya orang tua dan guru harus bisa dijadikan contoh kepada anak. Panggilan terhadap seseorang menjadi peringatan dini bahwa anak harus diberikan wawasan tentang etika memanggil.



**Diagram 13: Presentase Pelaku Perundungan**

## 9. Alasan Sebagai Pelaku

Siswa di Kota Pangkal Pinang melakukan perundungan yang dominan adalah karena mereka pernah menjadi korban perundungan. Masing-masing untuk siswa SD sebanyak 33,3%, siswa SMP sebanyak 31% dan siswa SMA sebanyak 38,7%.



**Diagram 14: Presentase Alasan Pelaku Perundungan Paling Dominan**

Peran siswa dalam melakukan perundungan terdiri dari: 1) Pelaku yaitu

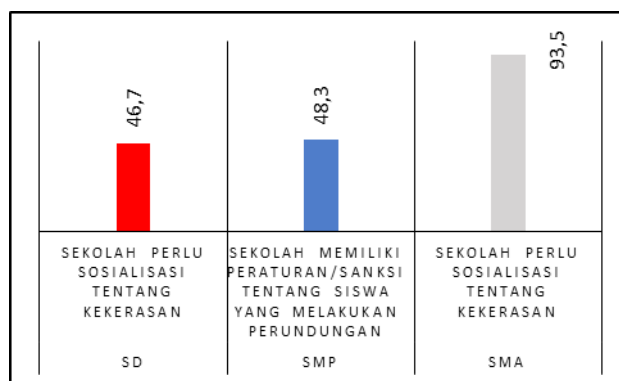
siswa ini ingin melakukan perundungan dan dia memulai bertindak sebagai pelaku utama; 2) Follower yaitu siswa seperti ini ikut aktif melakukan perundungan tetapi tidak memulai dan bukan pelaku utama; 3) Pendukung yaitu siswa ini secara aktif dan terbuka mendukung perundungan, misalnya mentertawakan korban tapi tidak bergabung sebagai pelaku; 4) Pendukung pasif yaitu siswa ini menyukai kejadian perundungan tetapi tidak memperlihatkan sebagai pendukung; 5) Penonton yaitu siswa ini jadi penonton saja, dia hanya ingin melihat apa yang akan terjadi dan merasa kejadian perundungan ini sama sekali bukan urusannya; 6) Kemungkinan jadi pembela yaitu siswa ini tidak menyukai kejadian perundungan dan berpikir harus menolong korban, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa; 7) Membela korban yaitu dia tidak suka perundungan dan menolong atau mencoba untuk menolong korban.

## 10. Kebijakan Sekolah

Kebijakan sekolah yang dibutuhkan untuk siswa SD adalah sekolah perlu sosialisasi tentang kekerasan sebanyak 46,7%, sedangkan untuk SMP adalah sekolah memiliki peraturan / sanksi tentang siswa yang melakukan perundungan sebanyak 48,3%, dan untuk SMA adalah sama dengan SD yaitu sekolah perlu sosialisasi tentang kekerasan sebanyak 93,5%.

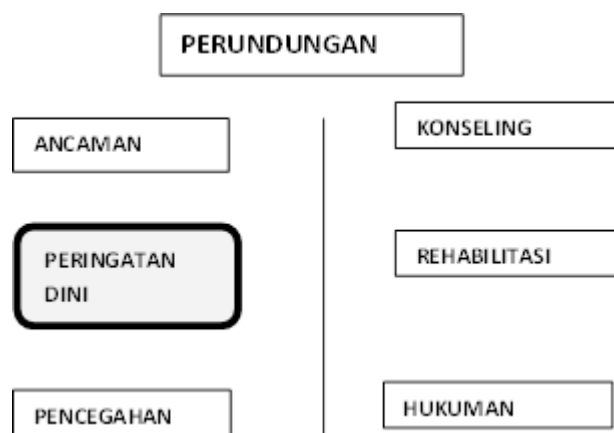
Mengingat sosialisasi dibutuhkan, maka perlu meningkatkan Sosialisasi tentang Perundungan (kekerasan). kepada guru maupun kepada anak, pada semua tingkat SD, SMP, SMA. Tujuannya agar meningkatkan kepekaan dari pihak sekolah maupun anak didik terhadap perilaku anak yang mengalami (korban) dan melakukan perundungan (pelaku). Termasuk sosialisasi

kepada orang tua melalui forum komunikasi orang tua. Program penguatan dapat dilakukan melalui seminar atau workshop tentang *parenting skill*.



**Diagram 15: Presentase Peraturan Sekolah Pengembangan Sisten Peringatan Dini (SPD) Dari Hasil Penelitian**

Informasi mengenai pengetahuan dan pengalaman siswa, pada dasarnya bertujuan untuk memetakan kondisi perundungan di sekolah, dan sekaligus menyusun model Sistem Peringatan Dini (*early warning system*) untuk mencegah terjadinya perundungan. Dengan adanya gejala mengenai fakta-fakta diatas merupakan peringatan bagi kita untuk segera ditangani dengan cepat sehingga dapat menciptakan suatu system pencegahan terhadap kasus yang lebih besar. Adapun model yang dapat dikembangkan dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.



**Diagram 16: Posisi Peringatan Dini Pada kasus Perundungan**



Diagram diatas menunjukan bahwa akibat yang lebih jauh lagi dengan perundungan ini bagi anak akan mengalami masalah yang lebih besar sehingga harus dilakukan konseling, rehabilitasi bahkan harus mengalami hukuman. Sehingga dari sebuah ancaman merupakan peringatan dini untuk segera dilakukan pencegahan.

Deteksi dini diutamakan pada titik-titik kelompok strategis di sekolah ataupun pada titik-titik persentuhan siswa dengan guru atau pihak sekolah. Pada pengembangan mekanisme peringatan dini, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. *Pertama*, menentukan siapa yang pantas menjadi penghubung dan pendeteksi kemungkinan terjadinya perundungan di sekolah. Pendeteksi sebaiknya dari siswa yang bisa berkomunikasi dengan guru atau pihak sekolah, seperti kelompok-kelompok organisasi atau kegiatan ekstra kurikuler yang ada di sekolah. Tugas pendeteksi menjadi mata dan telinga atas berbagai desas-desus dan ketidakpuasan siswa tentang perundungan. *Kedua*, menentukan dan menawarkan kepada siswa bentuk penyaluran keluhan keresahan di sekolah. Dari yang informal, semi-informal, hingga formal. Yang penting, saluran benar-benar dipercaya siswa, transparan, serta melindungi identitas dan keselamatan siswa yang melaporkan di sekolahnya. Posisi sekolah, yang lebih tinggi, tidak boleh serba dominan, apalagi represif. Pihak sekolah harus bijak dan apa pun keluhannya justru harus direspons secara proporsional.

**Tabel 2:** Indikator Level Peringatan Dini Pada kasus Perundungan

| Tahap   | Indikator                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WASPADA | 1. Meningkatnya intensitas dan jumlah keluhan siswa<br>2. Meningkatnya perbedaan antar kelompok siswa<br>3. Meningkatnya emosional siswa |

|       |                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIAGA | 1. Tingginya interaksi yang menyebabkan perundungan<br>2. Tingginya mobilitas antar kelompok siswa<br>3. Tingginya antar kelompok yang mengkaitkan dengan perlawanan dan penyerangan |
| AWAS  | 1. Meningkatnya permusuhan antar siswa.<br>2. Meningkatnya kasus perundungan<br>3. Meningkatnya tawuran antar kelompok siswa                                                         |

*Level Waspada*, Level terendah terjadinya perundungan, yaitu level waspada, adalah ketika siswa di sekolah mulai memperlakukan perbedaan dan menunjukkan ketidaksukaan terhadap perbedaan tersebut. Secara umum setiap individu berbeda satu dengan yang lain, namun memperlakukan perbedaan dan mulai menunjukkan ketidaksukaan dalam bentuk keluhan terkait dengan perbedaan adalah kondisi awal terjadinya perundungan. Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa pada level ini ada tiga ciri-ciri antara lain 1) meningkatnya intensitas dan jumlah keluhan siswa. 2) meningkatnya perbedaan antar kelompok siswa, 3) meningkatnya emosional siswa.

*Level Siaga*, Pada level ini, berkembang kebencian terhadap kelompok lain dan kelompok tersebut diposisikan sebagai lawan. Kebencian mendorong berkembangnya persepsi bahwa kelompok lain sebagai penyebab masalah yang dihadapi oleh kelompok yang merasa dirugikan. Dengan demikian, cara untuk mengembalikan kondisi sebelumnya, yang dianggap lebih baik, adalah dengan menyingkirkan kelompok tersebut. Ciri-ciri pada level ini antara lain; 1) tingginya interaksi yang menyebabkan perundungan. 2) tingginya mobilitas antar kelompok siswa. 3) tingginya antar kelompok yang mengkaitkan dengan perlawanan dan penyerangan.

*Level Awas*, adalah level tertinggi dalam tingkat kewaspadaan perundungan. Pada level ini, perundungan sudah siap meledak dari gesekan sekecil apapun, seperti: tawuran, masalah cinta, dan sebagainya. Pada level ini, beberapa gejala yang muncul adalah perilaku bermusuhan yang ditunjukkan oleh satu kelompok pada kelompok lain, seperti: ancaman, penghinaan, penyerangan, dan sebagainya. Perilaku bermusuhan ada yang ditunjukkan secara terbuka dan yang terselubung. Perilaku bermusuhan ini menjadi pola interaksi antar kelompok yang informasi yang bersifat menyerang kelompok lain. Namun demikian, sistem penanganan dini diatas bersifat kumulatif, artinya upaya penanganan pada level yang lebih tinggi tetap perlu menyertakan penanganan pada level-level sebelumnya. Ciri-ciri pada level ini antara lain: 1) meningkatnya permusuhan antar siswa. 2) meningkatnya kasus perundungan. 3) meningkatnya tawuran antar kelompok siswa.

Pembentukan iklim sekolah yang kondusif adalah bagian dari pencegahan setelah dilakukan deteksi dini. Terdapat 2 faktor dalam iklim sekolah yaitu primer dan sekunder. Faktor primer seperti rendahnya tingkat pengawasan di sekolah terhadap seringnya terjadi peristiwa perundungan di sekolah. Selain itu pola disiplin sekolah yang sangat kaku atau terlalu lemah; Bimbingan yang tidak layak dan peraturan sekolah yang tidak konsisten, lemahnya sanksi terhadap tindakan perundungan. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan berkembangnya perilaku perundungan di kalangan siswa. Pentingnya pengawasan dilakukan terutama di tempat bermain dan lapangan, karena biasanya di kedua tempat tersebut perilaku perundungan kerap dilakukan. Penanganan yang tepat dari guru atau pengawas terhadap peristiwa perundungan adalah hal penting karena perilaku perundungan yang tidak ditangani

dengan baik akan menyebabkan kemungkinan perilaku itu terulang. Selain itu peristiwa perundungan yang disosialisasikan oleh siswa senior. Hal ini merupakan salah satu warisan budaya feodalisme yang masih kental di masyarakat, dapat menjadi salah satu penyebab perundungan, wujudnya adalah timbul budaya senioritas, yang bawah harus nurut yang atas.

Faktor sekunder seperti suasana sekolah yang tidak mendukung berkembangnya aspek positif, terjadi karena, kurikulum penuh tekanan dan padat dengan teknik pengajaran yang terlalu kaku. Sehingga sulit bagi remaja untuk menyalurkan bakatnya. Penyalurannya lewat kejahilan-kejahilan dan menyiksa; yang memberi tempat secara spesifik terjadinya kekerasan oleh siapapun di sekolah. Adanya Perlakuan diskriminatif baik dikalangan guru maupun siswa; terdapat kesenjangan yang besar antara siswa yang kaya dan miskin; Pengabaian fihak sekolah terhadap peristiwa perundungan, maka anak sebagai pelaku perundungan akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain.

## KESIMPULAN

Pemahaman anak tentang perundungan terbagi kedalam bentuk perilaku, akibat, penyebab perundungan. Bentuk perilaku perundungan seperti (1) mengganggu orang yang lemah (SMP & SMA), (2) menghina & mengejek (SD). Akibat anak yang mengalami perundungan berupa (1) sakit fisik dan mental (malu, dendam), takut untuk sekolah, (3) sulit bergaul. Penyebab menjadi pelaku Perundungan, karena (1) pernah mengalami perundungan, (2) meniru orang dewasa atau lingkungan yang melakukan kekerasan dan (3) adanya kekesalan tidak tersalurkan, sehingga membuat anak melakukan perundungan. Adapun penyebab mengalami perundungan

karena anak memiliki kelainan fisik atau mental. Mempertimbangkan perbandingan persentasi antara pemahaman anak dengan pengalaman tentang perundungan, ditemukan bahwa secara kuantitatif pengetahuan mereka tentang perundungan cukup tinggi, terbatas pada perilaku mengganggu orang yang lemah, menghina dan mengejek. Namun dalam kenyataannya bentuk perilaku perundungan yang dilakukan anak cukup bervariasi, mulai dari bentuk perundungan secara verbal, non verbal atau emosional, dan fisik. Bahkan ada diantaranya yang melakukan perundungan lewat sosial media, meski sebatas menyebarkan berita bohong, menyebarkan gambar yang tidak disukai. Namun persentasenya cukup rendah dibandingkan dengan perilaku perundungan bersifat verbal dan non verbal.

Pengalaman perilaku perundungan memanggil dengan nama yang tidak diinginkan, cukup mendominasi pada semua tingkat sekolah, selain perundungan fisik seperti menendang, menekan, mendorong dan memukul. Mereka melakukan secara kelompok dan usia pertama kali mengalami perundungan antara usia 11-15 tahun, bahkan diantaranya ada yang sudah mengalami perundungan sejak usia kurang dari 10 tahun. Artinya kasus-kasus perundungan terjadi pada saat anak-anak menjelang usia remaja dan atau saat mereka berusia remaja. Merujuk pada dampak mengalami perundungan, yaitu cemas, tidak percaya diri, tertekan, malu dan dendam, maka perasaan-perasaan tersebut cukup rentan bagi seseorang untuk kembali menjadi melakukan perundungan pada orang lain, jika tidak segera mengalami pemulihan. Oleh karenanya penting untuk memahami sejak awal gejala-gejala anak mengalami perundungan sehingga kasus-kasus perundungan dapat dicegah sejak awal.

Peringatan Dini (*early warning system*) untuk mencegah terjadinya perundungan.

Adanya gejala mengenai fakta-fakta diatas merupakan peringatan bagi kita untuk segera ditangani dengan cepat sehingga dapat menciptakan suatu system pencegahan terhadap kasus yang lebih besar. Indikator pada Sistem Peringatan Dini ada tiga tingkatan antara lain; waspada, siaga dan awas.

## SARAN

Sebuah fakta tentang perundungan yang telah diungkapkan diatas merupakan peringatan dini bagi kita untuk segera ditangani. Sehingga dari data tersebut diatas memunculkan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Perlu dibangun suatu sistem yang membuat keterbukaan antara murid dengan guru sehingga permasalahan apapun yang dialami siswa akan tersampaikan, dan akan cepat diselesaikan.
2. Perlunya fungsi Pekerja Sosial di sekolah (*Peksos go to school*) bertitik tolak dari kasus perundungan yang akan berfungsi sebagai penghubung atas keluhan siswa agar cepat untuk ditangani.
3. Perlunya sosialisasi tentang perundungan baik kepada guru maupun kepada siswa untuk menciptakan kesadaran bersama.
4. Diperbanyak kegiatan positif, sehingga energi negatif akan tersalurkan pada kegiatan positif tersebut.
5. Penguatan pemahaman tentang perundungan kepada keluarga melalui forum komunikasi orang tua, atau melalui seminar dengan mengundang keluarga.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada para informan yang telah menyediakan waktu dan memberikan informasi dalam menyelesaikan tulisan ini. Puslitbangkesos yang telah memfasilitasi baik berupa legalitas maupun biaya dalam melakukan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anti Perundungan (2017), *Definisi Bulllying*, <https://antiperundungan.wordpress.com/perundungan/definisi-bullying/>
- Bara news (2016), *Perundungan Anak Meluas, Media Sosial Disalahgunakan untuk Meraih Pengakuan*, <http://baranews.co/blog/2017/07/24/perundungan-anak-meluas-media-sosial-disalahgunakan-untuk-meraih-pengakuan/>
- Espelage, D. L., & Swearer, S. M. (2004). *Bullying In American Schools: A Social-Ecological Perspective On Prevention And Intervention*. London: Lawrence Erlbaum Associated.
- Fahrudin, A (2012), Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan intervensi sosial, *Jurnal Psikologi UNDIP*, 1-9, Vol. 11, No.2, Oktober 2012
- Hartik, A (2016), *Kompas.com*. diambil kembali dari news: <http://regional.kompas.com/read/2016/11/29/16005801/84.persen.siswa.indonesia.alami.kekerasan.di.sekolah>
- Kurniasari, A. dkk (2017), *Prevalensi Terhadap Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Indonesia*, *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 6, No. 03, Mei - Agustus, Tahun 2017
- Kurniasari, A. dkk (2017), *Stop Perundungan di Sekolah*, Policy Brief, Jakarta: Puslitbangkesos
- Novelia (2018), *Dampak Perundungan Bukan Hanya Mengintai Korban*, *Validnews.co*, <http://validnews.co/DAMPAK-PERUNDUNGAN-TIDAK-HANYA-MENGINTAI-KORBAN-ZbL>
- Nursasari. (2017). Penerapan Antisipasi Perundungan (Bullying) Pada Sekolah Dasar Di Kota Tenggara. *SYAMIL Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol.5 No.2, 2017, IAIN Samarinda. <https://iain-samarinda.ac.id/ojs/index.php/syamil/article/view/926/575>
- Rahmawati, S. W (2016). *Peran Iklim Sekolah Terhadap Perundungan*. *Jurnal Psikologi Universitas Gajahmada*, Volume 43, Nomor 2, 2016: 167 – 180 <https://journal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/12480/15175>
- Santrock, J. W. (2009). *Child Development* (Twelfth Edition ed.). New York: Mc Graw Hill.
- Stepney, P., & Ford, D. (2008). *Berbagai Model, Metode Dan Teori Pekerjaan Sosial, Suatu Kerangka untuk Praktek*. Jakarta: Doea Lentera.
- Suyono, H. & Suryanto. (2017). Pengembangan Model Sistem Peringatan Dini Konflik Menggunakan Prediktor Identitas Sosial. *Humanitas: Jurnal Psikologi Indonesia*, 14(1), 66-77.
- Tribunnews.com (2017), Ini kronologis Pemukulan Guru Terhadap Siswa SMPN 10 Pangkal Pinang versi KPAI, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/11/07/ini-kronologis-pemukulan-guru-terhadap-siswa-smpn-10-pangkal-pinang-versi-kpai>

# PELIBATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)

## *INVOLVEMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANING AGENCY ON MONITORING AND EVALUATION OF THE INTEGRATED SERVICE AND REFERRAL SYSTEM*

**Habibullah**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial  
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur  
Email: habibullah@kemsos.go.id

Diterima: 7 Februari 2018; Direvisi: 20 Maret 2018; Disetujui: 26 Maret 2018

### **Abstrak**

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan inovasi baru dari Kementerian Sosial RI, dan merupakan program prioritas nasional. Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada monitoring dan evaluasi (Monev) SLRT merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti karena selama ini pada monev program-program Kementerian Sosial RI hanya dilakukan oleh internal Kementerian Sosial RI. Penelitian untuk mengetahui pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pelaporan Monev SLRT. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaksanaan monev di lingkungan Kementerian Sosial RI. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan, namun hasilnya belum sesuai dengan rencana. Pada perencanaan Bappeda Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Monev SLRT mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data di desa/kelurahan dan FGD di Kabupaten/Kota dan menyusun *policy brief* pelaksanaan SLRT di Kabupaten/Kota. Namun, penyusunan *policy brief* tidak dapat terlaksana karena lamanya pengolahan dan analisis data oleh tim pusat serta dukungan SDM dan pembiayaan kegiatan. Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota mempunyai muatan strategis bagi pelaksanaan SLRT apalagi jika SLRT akan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah daerah. Disarankan pelaksanaan Monev SLRT tetap melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota dengan tahapan yang lebih ringkas dan mudah dipahami dan menggunakan aplikasi yang lebih mudah digunakan; dan Kementerian Sosial dan Tim Seknas SLRT perlu mengadvokasi Bappeda Kabupaten/Kota, sehingga ketika SLRT sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Bappeda Kabupaten/Kota sudah mengetahui SLRT sejak awal.

**Kata Kunci:** *sistem layanan dan rujukan terpadu, monitoring dan evaluasi, kemiskinan, inovasi.*

### **Abstract**

*The Integrated Services and Referral System (SLRT) of social protection and poverty alleviation is a new innovation of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia and it is as a national priority program. The involvement of Bappeda Regency/City on Monitoring and Evaluation (M & E ) SLRT is an interesting thing to be observed because so far in the Ministry of Social Affairs M & E program has only done by internal Ministry of Social. The research is to know the involvement of Bappeda Regency/City in the planning, implementation, utilization and reporting stages of M & E SLRT. The benefits of this study are expected to provide learning for the implementation of M & E in the Ministry of Social. This research is as descriptive qualitative. The results of the research show that in general the involvement of Bappeda Regency/City can be implemented but the result is not in accordance with the plan. In the planning of Bappeda Regency/City as the implementer of SLRT M & E starting from the preparation stage, collecting data in the village / kelurahan and FGD in the Regency / City and preparing the SLRT implementation policy brief in Regency / City. However, the preparation of the policy brief can not be accomplished due to the length of processing and data analysis by the central team and the support of*



*human resources and financing activities. The involvement of Bappeda Regency / City has a strategic content for the implementation of SLRT especially if SLRT will be fully implemented by local government. The recommended to: Implementation of the SLRT M & E should still involve Bappeda Regency / City with a more concise and easily understood stage by implementers and using more user-friendly applications; and The Ministry of Social Affairs and the National Secretariat of SLRT team need to advocate to involve Bappeda Regency / City in SLRT activities so that when SLRT is fully implemented by Local Government, Bappeda Regency / City already know SLRT from the beginning.*

**Keywords:** *integrated service and referral system, monitoring and evaluation, poverty, innovation.*

## PENDAHULUAN

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan inovasi baru dari Kementerian Sosial RI dan telah menjadi program prioritas nasional. Hal tersebut sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. SLRT adalah sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik (Kementerian Sosial RI, 2016).

SLRT dilaksanakan secara bertahap, diawali uji coba di 5 kabupaten tahun 2015, dilanjutkan dengan perluasan di 50 kabupaten/kota tahun 2016 dan ditargetkan terlaksana di 150 kabupaten/kota pada tahun 2019. Berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT mempunyai empat fungsi utama, yaitu:

1. Integrasi Layanan dan Informasi. SLRT membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih komprehensif, responsif, dan berkesinambungan.
2. Identifikasi Keluhan, Rujukan dan Penanganan Keluhan. SLRT mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya, terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan keluhan tersebut, SLRT merujuk rumah tangga/keluarga miskin dan rentan ke program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu pengelola program di pusat, daerah dan desa untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut.
3. Pencatatan Kepesertaan dan Kebutuhan Program. SLRT menginventarisir program-program perlindungan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada. SLRT juga mencatat kebutuhan program dari rumah tangga/keluarga miskin yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
4. Pemutakhiran data secara dinamis. SLRT membantu melakukan pemutakhiran (verifikasi dan validasi) data secara dinamis dan berkelanjutan di daerah. SLRT juga dapat menjadi saran bagi masyarakat untuk mengakses program layanan sosial secara mandiri yang difasilitasi oleh fasilitator di tingkat masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya menyatakan bahwa SLRT bermanfaat bagi masyarakat miskin. Hal tersebut dapat dijumpai pada Kota Payakumbuh, meskipun dalam posisi sebagai institusi non struktural di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, dan dalam kondisi keterbatasan sumberdaya: manusia, sarana prasarana, dana, dan dari sisi regulasi, baru didukung Peraturan Walikota, akan tetapi telah melakukan peran penting dalam penanggulangan kemiskinan (Muhtar & Budi, 2016). Pada Pemerintah Kabupaten Sragen, SLRT dapat melakukan fungsi koordinasi dan sinkronisasi antar satuan kerja, serta berkontribusi secara positif dalam penanggulangan kemiskinan (Muhtar; Huruswati, 2015). Penyelenggaraan SLRT Kabupaten Berau sudah berjalan dan mendapat respon serta dukungan dari SKPD terkait dan dunia usaha (Sabarisman, 2015). SLRT dapat merupakan alternatif peningkatan layanan sosial keluarga miskin dan rentan terhadap program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara integratif. Namun, masih terdapat sejumlah kelemahan, antara lain pada aspek kebijakan dan sumber daya (Muhtar, 2017).

Secara internal, SLRT mempunyai instrumen untuk mengukur kinerja SLRT. Instrumen tersebut berupa Sistem monitoring dan evaluasi (Monev). Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari tiap program atau proyek untuk mengetahui kemajuan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi memungkinkan manajemen untuk memperoleh informasi guna perbaikan pelaksanaan SLRT. Sistem monitoring dan evaluasi (Monev) SLRT dijalankan mulai dari tahapan rancangan, perencanaan program, pengalokasian sumber daya, persiapan dan pelaksanaan kegiatan, pengendalian, perluasan dan keberlanjutan program. Tahapan-tahapan tersebut diharapkan dapat menyumbang pada

pencapaian dampak program yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan.

Monev SLRT terdiri dari empat (4) kelompok kegiatan utama yang saling terkait, yaitu:

1. Monitoring, supervisi, dan pelaporan Kelompok kegiatan ini berfungsi sebagai perangkat pengendalian internal seluruh penyelenggara SLRT yang akan dilaksanakan setiap tiga bulan menggunakan aplikasi monev.
2. Evaluasi program merupakan perangkat Seknas SLRT dalam melakukan penilaian rancangan program, kualitas proses pelaksanaan, keberhasilan pencapaian keluaran dan hasil, serta sumbangan SLRT terhadap dampak program. Evaluasi dapat dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal dan/atau secara partisipatif.
3. Strategi peningkatan kapasitas monitoring dan evaluasi Strategi peningkatan kapasitas monev dijalankan oleh Seknas SLRT untuk membangun kompetensi monev bagi seluruh penyelenggara SLRT sekaligus untuk membangun budaya monev di lingkungan SLRT.
4. Promosi penggunaan hasil-hasil monitoring dan evaluasi Untuk mendorong proses pengambilan keputusan berbasis fakta/bukti dilakukan diseminasi laporan hasil monev SLRT ke para pemangku kepentingan terkait di pelbagai jenjang dan promosi melalui sesi berbagi pengetahuan monev (Kementerian Sosial RI, 2016).

Untuk menjalankan 4 agenda tersebut SLRT membentuk kelembagaan yang terdiri dari:

1. Tim Monev Pusat, terdiri dari instansi teknis di bawah naungan Kemensos yaitu: Setnas SLRT dan Puslitbangkesos. Tim Monev Pusat bertugas:
  - a. Menyusun desain monitoring dan evaluasi SLRT.

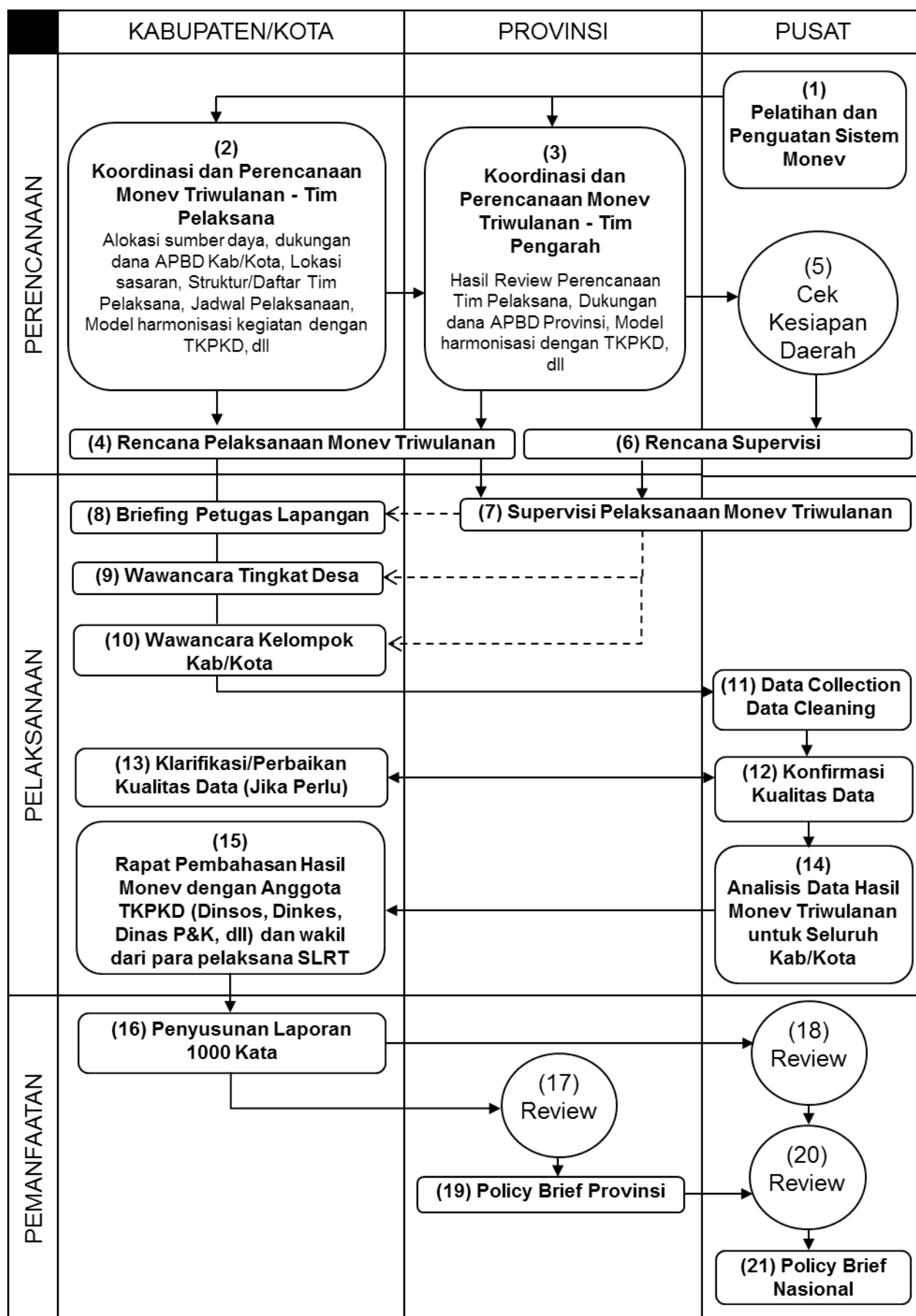


Diagram 1. Kerangka Kerja Monev Rutin SLRT

- b. Menyusun instrumen monitoring
  - c. Mempersiapkan alokasi dana stimulan untuk menunjang pelaksanaan monitoring
  - d. Menyusun desain peningkatan kapasitas monev
  - e. Menyusun strategi pelaksanaan monitoring rutin di daerah
  - f. Melakukan konsolidasi data hasil monev
  - g. Melakukan analisis data dan interpretasi hasil
  - h. Memberikan pendampingan kepada daerah dalam menyusun laporan dan *policy brief*
  - i. Menyusun laporan dan *policy brief* nasional
2. Tim Pengarah Provinsi, terdiri dari Bappeda Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi. Tim Pengarah bertugas:
- a. Koordinasi dan perencanaan monitoring rutin:
    - Menyusun alokasi sumberdaya monev
    - Membentuk kelembagaan Monev
    - Menyusun struktur tim Monev
    - Menyusun anggaran untuk mendukung pelaksanaan monitoring rutin
  - b. Harmonisasi dan sinergi kegiatan monitoring rutin SLRT dengan kegiatan monitoring terkait isu-isu kemiskinan lain terutama yang dikoordinasikan oleh TKPK di daerah masing-masing
  - c. Mengkoordinasikan kegiatan Pengembangan Kapasitas Monev & memastikan terlaksananya monitoring rutin SLRT di Kab/Kota di wilayahnya
  - d. Melakukan analisa laporan hasil monitoring kab/kota dan menyusun *policy brief* untuk didiseminasikan ke berbagai pihak terkait terutama sebagai umpan balik bagi penyelenggara SLRT
- e. Memastikan bahwa hasil-hasil Monev beserta kebijakan-kebijakan yang telah disusun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat efektif mejadi dasar perbaikan pelaksanaan SLRT ke depan
3. Tim Pelaksana Monitoring Kabupaten/Kota, terdiri dari Bappeda Kabupaten/Kota. Tim Pelaksana bertugas:
- a. Koordinasi dan perencanaan monitoring rutin:
    - Menyusun alokasi sumberdaya monev
    - Membentuk kelembagaan Monev
    - Menyusun struktur tim teknis Monev yang akan diterjunkan ke Desa/Kelurahan
    - Menyusun anggaran untuk mendukung pelaksanaan monitoring rutin
  - b. Harmonisasi dan sinergi kegiatan monitoring rutin SLRT dengan kegiatan monitoring terkait isu-isu kemiskinan lain terutama yang dikoordinasikan oleh TKPK di daerah masing-masing
  - c. Melaksanakan kegiatan monitoring rutin SLRT di tingkat desa/kelurahan dan kab/kota
  - d. Merangkum hasil monitoring tingkat desa/kel dan kab/kota dalam laporan 1000 kata tiap kab/kota

Ada hal yang menarik pada pelaksanaan monev SLRT yaitu pelibatan berbagai pihak yaitu tim monev pusat terdiri dari Setnas SLRT dan Puslitbangkesos, Tim pengarah provinsi terdiri dari Bappeda Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi dan Tim pelaksana Monev yaitu Bappeda Kabupaten/Kota. Bappeda Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Monev SLRT merupakan suatu hal yang baru bagi program Kementerian Sosial RI. Selain itu berbagai penelitian sebelumnya mengenai

SLRT belum pernah membahas secara khusus tentang pelaksanaan Monev SLRT. Oleh karena itu menarik untuk dilaksanakan penelitian mengenai “bagaimana pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada Monev SLRT?”

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pelaporan Monev SLRT. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi pelaksanaan monev di lingkungan Kementerian Sosial RI.

## **METODE**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan maksud agar peneliti fokus pada proses dan makna serta pemahaman yang didapat dari kata dan atau gambaran dengan menggunakan metode evaluasi dan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013). Informan penelitian ditentukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa informan terpilih memahami dan melaksanakan monev SLRT baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Untuk mendapatkan data yang akurat maka pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Pengumpulan data pada tingkat pusat dilaksanakan pada saat workshop, diskusi dan pelatihan monev SLRT. Sedangkan pengumpulan data di daerah dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Tanah Datar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tahap Perencanaan**

Monev SLRT dengan melibatkan Bappeda direncanakan mulai awal tahun 2017. Bappeda mulai terlibat pada kegiatan pelatihan Monev SLRT tingkat dasar pada tanggal 22-25 Maret 2017 di Kota Yogyakarta. Peserta pelatihan Monev SLRT tingkat dasar tersebut terdiri

dari 17 Bappeda Provinsi, 17 Dinas Sosial Provinsi dan 51 Bappeda Kabupaten/Kota lokasi SLRT tahun 2016. Namun tidak semua peserta pelatihan yang diundang hadir, terdapat 3 Bappeda Provinsi, 4 Dinas Sosial Provinsi dan 8 Bappeda Kabupaten/Kota.

Ketidakhadiran peserta pelatihan Monev SLRT tingkat dasar tersebut disebabkan ketidaktahuan atau tidak diterimanya undangan dan pada saat bersamaan Bappeda mempunyai kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Tujuan dari pelatihan Monev SLRT tingkat dasar yaitu:

- 1) Pemahaman peserta tentang kebijakan umum SLRT meningkat.
- 2) Pemahaman peserta tentang fungsi- fungsi utama dan cara kerja SLRT
- 3) Pemahaman peserta tentang kerangka program dan teori perubahan SLRT
- 4) Pemahaman dan keterampilan peserta tentang Monev SLRT. Tentang arti penting dan dasar-dasar pelaksanaan monev. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan monitoring rutin SLRT. Peningkatan keterampilan menyusun rencana monitoring rutin triwulan I 2017

Pelatihan Monev SLRT tingkat dasar dirasakan peserta, waktunya sangat terbatas hanya 2 hari efektif itupun tidak terjadi keseimbangan antar materi pelatihan. Alokasi waktu pelatihan cenderung pada materi tentang kebijakan umum SLRT dan kerangka program dan teori perubahan SLRT. Sementara peserta pelatihan menginginkan materi tentang keterampilan Monev SLRT yang akan langsung diimplementasikan. Pada materi dasar monev, peserta pelatihan sudah sering ikut pelatihan-pelatihan sejenis yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Sehingga pelatihan monev SLRT tingkat dasar dirasakan kurang oleh peserta untuk bekal pelaksanaan Monev SLRT.

Meskipun materi pelatihan Monev tingkat dasar dirasakan kurang oleh peserta,



namun peserta cukup puas dengan pelatihan tersebut karena memberikan pengetahuan dan pemahaman baru tentang SLRT dan Monev SLRT. Selain itu pelatihan ini meningkatkan jaringan kerja antar peserta yaitu yang berasal dari Bappeda provinsi, Dinas Sosial Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota pelaksana SLRT tahun 2016. Setelah pelatihan Monev SLRT tingkat dasar ini, peserta pelatihan intensif menjalin komunikasi melalui sarana grup *whatsapp* yang dibentuk oleh panitia.

Bagi peserta yang tidak hadir pada saat pelatihan dan memerlukan penguatan untuk melaksanakan Monev SLRT maka dilaksanakan penguatan di 15 lokasi SLRT pada bulan Juni 2017.

### **Tahap Pelaksanaan**

Pada perencanaan diharapkan yang menjadi pelaksana Monev SLRT adalah Bappeda Kabupaten/Kota sedangkan Bappeda Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi bertindak sebagai pengarah. Sesuai dengan rencana maka pelaksanaan Monev dilaksanakan 3 bulan sekali dalam setahun. Namun melihat kondisi kesiapan masing-masing daerah pelaksanaan Monev SLRT baru bisa dilaksanakan pada triwulan III tahun 2017.

Pada saat pelatihan diharapkan Bappeda Kabupaten/Kota pelaksana SLRT dapat melaksanakan Monev secara mandiri baik dari segi pendanaan maupun sumber daya manusia. Namun kenyataannya, Bappeda Kab/Kota belum siap melaksanakan Monev SLRT dan masih memerlukan pendampingan dari tim pusat sehingga pelaksanaan Monev Triwulan III baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus 2017.

Pada rencana awal pelaksanaan Monev Rutin Tanggal 1-10 atau 10 hari pertama Bulan Kedua Triwulan Berjalan, namun pelaksanaan Monev

Rutin Triwulan III tidak bisa dilaksanakan tepat waktu pada tanggal 1-10 Agustus 2017 akan tetapi dilaksanakan 4 tahap pada bulan Agustus 2017. Ketidaktepatan jadwal pelaksanaan tersebut disebabkan karena Bappeda Kabupaten/Kota tersebut masih memerlukan pendampingan dari Tim Pusat, sedangkan Tim Pusat sendiri terbatas SDM-nya sehingga diperlukan penjadwalan ulang. Pada sisi lain, Bappeda Kabupaten/Kota mempunyai keterbatasan SDM baik dari segi jumlah dan kualitas. Ada beberapa SDM Bappeda Kabupaten/Kota yang berkualitas namun pada jadwal yang direncanakan mempunyai kegiatan lain yang tidak bisa diwakilkan. Pada sisi lain, Monev SLRT mengharuskan adanya tim enumerator pengumpul data lapangan di 5 desa terpilih.

Pemilihan lokasi dan sasaran responden untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Memilih kecamatan dan desa/kelurahan secara purposive menggunakan aplikasi yang disediakan pada tautan berikut ini <http://slrt.kemsos.go.id/monev> akses masuk dapat menggunakan password dan ID yang telah dibagi ke tiap-tiap tim pelaksana Monev Daerah.
- Kuota 5 desa/kelurahan per kabupaten/kota sebagai sampel periode tersebut.
- 2 desa/kelurahan di antaranya adalah desa/kelurahan Puskesmas
- Setelah melakukan pemilihan desa/kelurahan, lalu acak data 1 keluarga miskin/rentan yang ada dalam daftar desa/kel tersebut secara otomatis pada menu pengacakan.
- Jika 10 data keluarga hasil pengacakan bagus (lengkap ada nama, NIK, dan alamat) simpan dan pilih 5 teratas sebagai daftar keluarga yang akan dikunjungi.
- Jika data hasil pengacakan kurang bagus, ulangi proses pengacakan.

- Tiap triwulan desa/kel dan responden keluarga miskin/rentan dipilih secara acak.
- Hasil pengacakan agar disimpan dengan menekan tombol penyimpanan yang telah disediakan pada aplikasi.

Wawancara tingkat desa, basis pelaksanaan monitoring adalah data kinerja penyelenggara SLRT di desa/kelurahan yang dikumpulkan melalui:

- Wawancara terhadap keluarga miskin/rentan yang datanya telah diinput/diupdate oleh fasilitator atau Puskesmas, tiap desa diwakili oleh 5 keluarga miskin. Instrumen yang digunakan FM01A <http://bit.ly/2nJ7II9>
- Wawancara terhadap kader desa/kel terpilih, tiap desa diwakili oleh 1 kader desa/kelurahan. Instrumen yang digunakan FM01B <http://bit.ly/2nNWgpy>.
- Wawancara terhadap aparat desa/kel terpilih, tiap desa diwakili oleh 1 aparat desa/kelurahan. Instrumen yang digunakan FM01C <http://bit.ly/2mxDYJ7>

Wawancara Kelompok, Wawancara ini dilaksanakan secara berkelompok di tingkat Kabupaten/Kota dengan melibatkan: 1. Wakil dari Fasilitator (3 orang) 2. Supervisor (3 orang) 3. Manager (1 orang) 4. Koordinator Puskesmas (2 orang). Instrumen yang digunakan adalah FM02 dapat diakses disini <https://ee.kobotoolbox.org/x/#YKeZ>

Dengan demikian untuk melaksanakan pemilihan lokasi, responden dan melaksanakan pengumpulan data menggunakan aplikasi berbasis android. Penggunaan aplikasi juga menyulitkan Bappeda dalam melaksanakan kegiatan Monev SLRT Triwulan III. Pada aplikasi pemilihan lokasi dan responden beberapa pelaksana Monev Rutin SLRT belum terlalu memahami aplikasi tersebut dan seringkali terjadi lokasi yang menjadi pilihan pelaksana Monev dengan pertimbangan lokasi

tersebut mudah dijangkau ternyata ditemukan data keluarga miskin masih kosong atau tidak mencapai 5 keluarga miskin/rentan. Kosongnya atau tidak mencapai 5 keluarga miskin/rentan tersebut disebabkan fasilitator SLRT belum mengupdate data keluarga miskin/rentan tersebut pada aplikasi SLRT.

Permasalahan lainnya ketika di desa/kelurahan tersebut sudah terpilih 5 keluarga miskin/rentan yang menjadi calon responden namun ketika didatangi calon responden tersebut tidak ada ditempat atau lokasi responden tersebut tersebar padahal pembiayaan pengumpulan data untuk 1 desa 1 hari oleh 1 petugas enumerator. Model pelaksanaan 1 desa 1 hari oleh 1 petugas enumerator ternyata tidak efektif. Hal tersebut disebabkan Bappeda Kabupaten/Kota kekurangan petugas enumerator yang kompeten dan mempunyai waktu untuk melaksanakan pengumpulan data di desa/kelurahan terpilih.

Wawancara kelompok tingkat kabupaten dengan pelaksana SLRT relatif mudah dilaksanakan yang jadi permasalahan instrumen wawancara kelompok tersebut terlalu banyak sehingga beberapa peserta bosan untuk menyelesaikan sampai akhir instrumen tersebut sehingga terlihat yang menjawab instrumen hanya beberapa orang saja. Model wawancara kelompok juga menggunakan aplikasi yang harus langsung disubmit ke tim pusat. Penggunaan aplikasi pada saat wawancara kelompok juga menyulitkan pelaksana Monev SLRT.

### **Tahap Pemanfaatan dan Pelaporan**

Pelaksanaan Monev SLRT Triwulan III baru selesai pengumpulan data lapangan bulan September 2017 dan hanya terealisasi di 49 Kabupaten/Kota sedangkan di Kepulauan Mentawai belum terlaksana karena terkendala jadwal dan cuaca yang tidak menentu.

Meskipun sudah terlaksana Monev SLRT selain Kabupaten Mentawai, Kabupaten yang belum dapat dipetakan profil SLRT adalah Kabupaten Sikka, Cianjur, Karawang dan Lombok Tengah karena masih terkendala pelaksanaan dan pengiriman data (Seknas SLRT, 2017).

Kendala pelaksanaan disebabkan kurangnya pemahaman pelaksana Monev terhadap mekanisme Monev Rutin SLRT khususnya mengenai aplikasi Monev SLRT. Kurang optimalnya pendampingan yang dilaksanakan oleh tim pusat juga merupakan suatu kendala sehingga data yang terkumpulkan tidak terkirim ke pusat. Meskipun sudah terlaksana di 49 Kabupaten/Kota namun tidak semua Kabupaten/Kota menyelesaikan secara tuntas pelaksanaan Monev SLRT. Semestinya tiap Kabupaten/Kota mengirimkan sebanyak 25 form untuk hasil wawancara terhadap keluarga miskin/rentan dari 5 desa terpilih, 5 form wawancara terhadap kader 5 desa/kel terpilih, 5 form wawancara terhadap aparat desa/kel terpilih, 1 form wawancara kelompok.

Berdasarkan hasil Monev SLRT Triwulan III dapat dilihat kinerja pelaksanaan SLRT ditingkat Kabupaten/Kota yang diukur berdasarkan aspek regulasi, kelembagaan, dukungan anggaran, pergerakan data dan penanganan keluhan, pemanfaatan data, dan inisiatif daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori sebagai berikut:

- Kategori Baik: Bandung, Sragen, Sukabumi, Kota Malang, Sleman, Kota Sukabumi dan Bantaeng
- Kategori Sedang: Jember, Musi Rawas, Pasaman, Deli Serdang, Sukoharjo, Malang, Tapin, Demak, Kutai Kartanegara, Tulungagung, Batang Hari, Semarang, Barito Kuala, Belitung Timur, Situbondo, Bandung Barat, Kulon Progo, Pidie, Berau, Kendal, Sidoarjo, Kota Payakumbuh, Pesisir Selatan, Timor Tengah Selatan,

Tanggamus, Hulu Sungai Selatan, Banyu Asin, Jenepono, Muaro Jambi, Takalar, Kubu Raya, Jombang, dan Pamekasan

- Kategori Kurang (Perlu Pembinaan Intensif): Kediri, Tanah Datar, Kepulauan Selayar, Pasaman Barat dan Gowa

Tahapan Monev SLRT setelah data diolah dan dianalisis oleh tim pusat maka data tersebut disampaikan kembali ke tim pelaksana tingkat kabupaten/kota untuk dibahas bersama dengan TKPD dan instansi terkait sebagai bahan penyusunan *policy brief* tingkat kabupaten/kota dan *policy brief* tingkat provinsi. Namun tahapan Monev SLRT tersebut tidak terlaksana karena tim pusat terlalu lama mengirimkan kembali hasil analisis, selain itu tidak ada lagi pendampingan yang dilakukan tim pusat serta Bappeda Kabupaten/Kota mempunyai keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk melaksanakan tahapan Monev Rutin SLRT selanjutnya.

### Pembahasan Penelitian

Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Monev SLRT merupakan salah satu inovasi SLRT karena selama ini sangat jarang program Kementerian Sosial RI melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Monev Rutin SLRT. Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota biasanya terbatas pada terlibat sebagai tim pengarah sedangkan pelaksana Monev biasanya tetap dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Jarangnya pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada kegiatan Monev Kementerian Sosial RI karena disebabkan secara tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten/Kota tidak bersentuhan langsung dengan Program Kementerian Sosial RI. Bappeda Kabupaten/Kota mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Bappeda Kabupaten/Kota lebih fokus pada pada program daerah yang dibiayai oleh APBD.

Sementara SLRT saat ini masih menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan utama sehingga di beberapa daerah mempertanyakan ketepatan pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota dalam kegiatan Monev SLRT.

Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada Monev SLRT mempunyai muatan strategis karena dengan melibatkan Bappeda maka SLRT tidak hanya merupakan program Kementerian Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial akan tetapi merupakan program Kementerian Sosial yang bisa merangkul berbagai instansi terkait dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah. Bappeda Kabupaten/Kota merupakan instansi yang strategis untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, khususnya untuk memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pengarah yang memberikan rambu-rambu kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan secara bertahap. Adanya perencanaan disebabkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai kegiatan yang harus segera dilakukan yang sifatnya mendesak. Oleh karena tahap perencanaan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan, maka Bappeda harus mampu menangkap isu strategis maupun permasalahan yang ada baik permasalahan sektoral maupun daerah Rahardian (2017) sehingga diharapkan

pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota dapat mengadvokasi bahwa SLRT merupakan issue strategis dan merupakan suatu alat untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.

Muatan strategis lainnya pelibatan Bappeda pada Monev SLRT karena SLRT diskenario awalnya Kementerian Sosial RI hanya membiayai kegiatan SLRT selama 3 tahun, keberlanjutan SLRT di kabupaten/kota diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk dalam pembiayaannya. Berdasarkan amanah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Hal tersebut membawa konsekuensi pemerintah daerah harus memprioritaskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah baik secara kelembagaan maupun pembiayaan (Sauqi & Habibullah, 2016).

Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota pada Monev SLRT merupakan suatu hal yang baru, secara umum dapat terlaksana baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemanfaatan data meskipun pelaksanaannya belum sesuai dengan rencana awal. Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan perencanaan tersebut disebabkan berbagai keterbatasan. Keterbatasan tersebut berasal dari tim pusat maupun Bappeda kabupaten/kota. Keterbatasan yang berasal dari tim pusat berupa materi pelatihan lebih banyak teori umum monev, kendali teknis aplikasi monev, keterbatasan SDM pendamping monev dan lamanya proses pengolahan data monev yang akan menjadi bahan penyusunan policy brief oleh Bappeda Kabupaten/Kota.

Sedangkan keterbatasan yang berasal dari Bappeda Kabupaten/Kota berupa kemampuan untuk menggunakan aplikasi Monev SLRT, kuantitas dan kualitas SDM yang terlibat Monev dan pembiayaan.



## KESIMPULAN

Secara umum pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan namun hasil belum sesuai dengan perencanaan awal. Pada perencanaan awal Bappeda Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Monev Rutin SLRT mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data di desa/kelurahan dan FGD di Kabupaten/Kota dan menyusun *policy brief* mengenai pelaksanaan SLRT di Kabupaten/Kota. Penyusunan *policy brief* tidak dapat terlaksana karena lamanya pengolahan dan analisis data oleh tim pusat serta dukungan SDM dan pembiayaan kegiatan.

Pelibatan Bappeda Kabupaten/Kota mempunyai muatan strategis bagi pelaksanaan SLRT perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan apalagi jika SLRT akan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah daerah namun tahapan Monev SLRT lebih dipersingkat dengan penggunaan aplikasi Monev yang lebih mudah digunakan.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan untuk:

1. Pelaksanaan Monev SLRT sebaiknya tetap melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota dengan tahapan yang lebih ringkas dan mudah dipahami dan menggunakan aplikasi yang mudah digunakan.
2. Kementerian Sosial dan Tim Seknas SLRT perlu mengadvokasi untuk melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota dalam kegiatan SLRT sehingga ketika SLRT sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Bappeda Kabupaten/Kota sudah mengetahui sejak awal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih buat Tim Pusat SLRT yang berasal dari Direktorat

Pemberdayaan Sosial Persorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Tim Seknas SLRT (Mahkota) yang telah menginspirasi penulisan naskah jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Habibullah, H. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. *Sosio Informa*, 3(1).
- Huruswati, I., dkk. (2014). *Pengembangan Kebijakan, Strategi, Model Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera: Perkembangan Konseptual Kebijakan*. Jakarta: Puslitbangkesos
- Kementerian Sosial. (2015). Peraturan Menteri Sosial RI No. 27 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial RI tahun 2015-2019
- Kementerian Sosial RI. (2016). *Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Muhtar. (2017). Peningkatan Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin terhadap Program Perlindungan Sosial melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. *Sosio Informa*, 3(1), 59–69.
- Muhtar; Huruswati, I. (2015). *Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen*, (1), 1–25.
- Muhtar, P., & Budi, A. (2016). Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kota Payakumbuh). *Sosio Konsepsia*, 5(3), 205–216.



- Rahardian, T.A., (2017). Peran Bappeda dan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Pembangunan Sanitasi di Desa Jambu Kabupaten Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2). Diambil dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/15953/15413>
- Sabarisman, M. (2015). Peluang dan Tantangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. *Sosio Informa*, 1(1), 53–68.
- Sauqi, & Habibullah. (2016). Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 2(1), 19–32. Diambil dari <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/181>
- Seknas SLRT. (2017). Laporan Hasil Monitoring Rutin SLRT 2017.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Press.

# PEMBERDAYAAN SOSIAL SUKU KAILI DA'A DI KABUPATEN SIGI

## *SOCIAL EMPOWERMENT TRIBES KAILI DA'A ON SIGI REGENCY*

**Irmawan**

Balai Besar Penelitian, Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial  
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Daerah Istimewa Yogyakarta  
**E-mail:** sirmawan@yahoo.co.id

Diterima: 14 Desember 2017; Direvisi: 13 Maret 2018; Disetujui: 9 April 2018

### **Abstrak**

Komunitas Adat Terpencil merupakan salah satu penyandang masalah sosial, dan menjadi sasaran program pemberdayaan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Suku Kaili Da'a setelah diberdayakan, yang dilihat dari aspek permukiman, pendidikan, kesehatan, agama dan kepercayaan, sarana dan prasarana serta mata pencaharian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan panduan wawancara, observasi, pemotretan, telaah dokumen dan internet. Analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa setelah diberdayakan terbukti ada perubahan pada permukiman, pendidikan, kesehatan, kepercayaan dan agama, sarana prasarana serta mata pencaharian. Rekomendasi kepada Kementerian Sosial RI dapat melanjutkan dan memperluas program pemberdayaan KAT.

**Kata Kunci:** pemberdayaan, komunitas adat terpencil, suku kaili da'a.

### **Abstract**

*Isolated Community is one among social problems that stated as a target of social empowerment that held by Ministry of Social Affairs of Indonesia. This research has aimed to dig up varies of social condition of Kaili Da'a ethnic, in terms of dwelling, education, health, religi and believe, and their income generating.. Data has been collected through interview, observation, mapping, and documentary study. Data has analyzed qualitatively. The result of study shows that after empowerment, those community have enhanced in terms of their dwelling, education, health, religi and belief, and also in their income generation. Hence, its recommended for the Ministry of Social Affairs to replicate the program in similar community*

**Keywords:** empowering, isolated community, tribe kaili da'a.

### **PENDAHULUAN**

Pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) merupakan salah satu program prioritas nasional, dan secara teknis diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI. Komunitas adat terpencil hidup dalam kemiskinan, pendidikan rendah, kesehatan memburuk dan tinggal di rumah tidak layak huni. Berdasarkan data pada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil – Kementerian Sosial RI (Kemensos RI), terdapat 231.266 kepala keluarga yang tinggal di berbagai wilayah terpencil di Indonesia. Mereka tinggal di daerah terpencil, dan memiliki keterbatasan untuk mengakses

layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya.

Untuk melakukan pemberdayaan KAT, Kemensos RI berpegang pada empat pilar, yaitu peningkatan jangkauan dan kualitas pemberdayaan sosial, peningkatan dan penguatan sumber daya manusia, sosial, dan budaya, ekonomi dan lingkungan, peningkatan peran pemerintah daerah, kelembagaan masyarakat dan perangkat pelayanan sosial tingkat lokal, serta peningkatan peran aktif masyarakat. Kementerian Sosial sudah menangani sebanyak 123.977 KK dari total 231.268 KK adat terpencil dengan program

pemberdayaan. Tahun 2017, diberdayakan 3.955 KK. “Sisanya, 123.336 KK, yang belum diberdayakan. Untuk akselesari pencapaian tujuan program, Kementerian Sosial RI memberikan kesempatan kepada semua pihak, termasuk dunia usaha.

KAT merupakan sekelompok warga masyarakat yang tinggal di daerah terpencil (terisolir), dan hidup sangat sederhana. Mereka hanya berfikir untuk memenuhi kebutuhan primer, dengan mata pencaharian sebagai perambah hutan, seperti mencari kayu, madu, burung dan hewan, berhuma, ladang berpindah dengan menanam jagung, ubi jalar, ataupun padi, dan sebagian kecil bidang pertanian..

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian adalah: Bagaimanakah kondisi Suku Kaili Da’a di Kabupaten Sigi setelah diberdayakan? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi Suku Kaili Da’a setelah diberdayakan. Manfaat hasil penelitian sebagai bahan masukan untuk menyusun kebijakan tentang pemberdayaan KAT yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.

## METODE

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu untuk menggambarkan kondisi Suku Kaili Da’a setelah diberdayakan, yang dilihat dari aspek permukiman, pendidikan, kesehatan, kepercayaan dan agama, sarana dan prasarana, serta mata pencaharian. Lokasi penelitian di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, untuk memperoleh informasi yang menyeluruh dan mendalam tentang kondisi Suku Kaili Da’a sebelum dan sesudah diberdayakan. Jumlah informan sebanyak 10 orang dan dipilih secara *purposive* yaitu tokoh adat, tokoh agama, wakil dari instansi pemerintah yang menangani

KAT, DPRD dan warga Suku Kaili Da’a yang telah diberdayakan. Selain itu dilakukan observasi di lingkungan.. Analisis data secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Permukiman

Sebelum diberdayakan, kondisi rumah Suku Kaili Topo Da’a sangat sederhana. Mereka tinggal di daerah pegunungan berupa bukit ataupun puncak gunung yang berkabut. Bangunan rumah mereka belum permanen dengan ukuran panjang empat meter dan lebar dua meter, ruangan rumah tanpa sekat atau kamar, dan menjadi tempat segala aktivitas keseharian. Pada bagian pojok belakang bangunan terdapat dapur (tungku) yang digunakan untuk memasak dan sekaligus sebagai penghangat di malam hari. Sebagian dari mereka juga ada yang membuat rumah di atas pohon disebut rumah pohon dengan ukuran dua meter persegi. Pohon tersebut menurut salah seorang warga yang dituakan dan berpengalaman tentang tradisi leluhurnya, dinamakan dengan pohon jawa, karena asal pohon tersebut dari pulau Jawa. Rumah warga yang belum permanen terbuat dari bahan bambu ataupun kayu untuk lantai dan dinding, serta beratapkan daun rumbia yang dianyam. Pada umumnya mereka tinggal di tepi jurang (tebing) demi menjaga keamanan karena dapat mengawasi musuh yang datang dari suku lain, serta untuk mempermudah dalam berburu binatang. Pemberdayaan Suku Kaili Da’a di Dusun III Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah, dimulai dengan memperbaiki tempat tinggal sebanyak 90 kepala keluarga yang belum permanen menjadi permanen dan penyekatan ruangan, seperti kamar tidur, ruang tamu, atau dapur. Selain itu, juga

penggantian bahan bangunan rumah yang lebih baik yakni berupa kayu, batu merah, seng/asbes. Lokasi pembangunan rumah tidak dipindah ke desa lain, namun hanya dipindah di dekat rumahnya yang dahulu, sehingga tidak banyak mengalami perubahan lingkungan sosial. Gambaran kondisi rumah sebelum dan sesudah diberdayakan, seperti tabel berikut.

**Tabel 1.** Kondisi Rumah Suku Kaili Da'a Desa Kalora Sebelum dan Sesudah Diberdayakan

| Kondisi Rumah         | Sebelum Diberdayakan           | Sesudah Diberdayakan           |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Bentuk bangunan rumah | Rumah panggung, tidak permanen | Rumah kampung, permanen        |
| Bahan bangunan        | Kayu, bambu, daun rumbia       | Kayu, batu bata, seng/asbes    |
| Pembagian ruang       | Belum ada                      | Sudah ada R. tidur, dapur, dll |

*Sumber: hasil observasi, 2017*

Berdasar tabel di atas dapat diketahui kondisi rumah warga KAT Suku Kaili Da'a, bahwa bentuk bangunan rumah KAT sebelum mereka diberdayakan adalah rumah panggung tidak permanen, dengan ukuran panjang empat meter dan lebar tiga meter, dinding berbahan kayu atau bambu, lantai juga dari papan, dan atap dengan dedaunan (rumbia). Sebagian dari mereka bahkan bertempat tinggal di atas pohon (rumah pohon) dengan ukuran dua kali dua meter. Setelah diberdayakan mereka mendapat bantuan rumah dengan ukuran panjang lima meter dan lebar empat meter, berbahan batu bata untuk dinding, berlantai plester semen, dan beratap dari seng dan atau asbes. Rumah bantuan tersebut sudah dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Perbaikan rumah KAT tersebut merupakan program dari Kementerian Sosial dengan bantuan dana untuk Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan

bantuan dana antara Rp. 17 juta hingga 26,5 juta dalam rangka memberdayakan KAT. Hal tersebut merupakan implikasi dari kebijakan pemerintahan Jokowi-JK tentang Nawacita, terutama cita yang ketiga, yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Sebab dengan membangun KAT, maka dapat mengurangi masalah kemiskinan dan keterisolasian serta dapat meningkatkan ketahanan sosial. Disamping itu, warga KAT merasakan bahwa negara dan pemerintah dapat hadir untuk membantu mengatasi kesulitan sesuai dengan Nawacita yang kedua. (Sumber data: Bahan workshop rancangan penelitian di B2P3KS Yogyakarta 2016 dari Kabid Perencanaan pada Asdep Infrastruktur Ekonomi dan Kesra BNPP oleh. Drs. Isnawan Harijono, M.Si)

Untuk membangun rumah mendapat bantuan dari Kementerian Sosial sebesar 17 juta rupiah setiap rumah. Pada awalnya sebanyak 30 keluarga warga KAT yang memperoleh rumah bantuan. Kemudian pada tahap kedua memperoleh bantuan 60 unit rumah per unit senilai 26,5 juta rupiah, pembangunannya mempekerjakan warga sekitar, dan ternyata hasilnya lebih baik dibanding kondisi rumah bantuan tahap pertama yang dikerjakan secara proyek. Rumah yang dibangun sudah ditempati semua, sedangkan rumah yang lama sebagian kecil dijadikan sebagai dapur ataupun gudang dan sebagian besar rumah yang lama sudah dibongkar. Pada umumnya Suku Kaili Da'a di Desa Kalora memiliki ternak kambing serta memiliki peralatan elektronika, seperti radio, televisi dan HP karena sudah memiliki listrik dari PLN. Dengan memiliki rumah yang layak huni, maka seluruh keluarga dapat hidup aman

dan nyaman. Apalagi mereka juga sudah menggunakan listrik dari PLN, sehingga dapat membantu kebutuhan keluarga, seperti lampu penerangan, kompa air, setrika listrik, dan radio ataupun televisi untuk mengetahui perkembangan dunia luar, sehingga tidak ketinggalan informasi dan tidak terisolir dengan dunia luar.

## **2. Pendidikan**

Suku Kaili Da'a dahulu belum mengenal pendidikan formal, sehingga mereka tidak dapat membaca ataupun menulis latin dan belum dapat berbahasa Indonesia. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Da'a. Ketika peneliti menyatakan kepada warga suku Kaili Da'a yang sudah tua (umur 60 tahun ke atas), mereka belum dapat berbahasa Indonesia, sehingga untuk menanyakan sesuatu, harus memakai penerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Da'a yang dibantu oleh seorang warga Da'a yang masih muda. Ketika itu, peneliti menanyakan berapa usianya? maka jawabannya setelah diindonesiakan adalah saya tidak tahu umurku. Namun ada tradisi dari leluhurnya, yaitu: pada zaman dahulu, orangtua yang melahirkan anaknya memiliki tradisi menanam pohon, sehingga umur anak yang dilahirkan setara dengan umur pohon tersebut.

Kondisi pendidikan di Kabupaten Sigi termasuk masih rendah, karena tingkat buta huruf masih tinggi. Hal tersebut juga terlihat dari kemampuan belajar rata-rata di Kabupaten Sigi selama delapan tahun atau setara dengan kelas dua SLTP, sedangkan wajib belajar secara nasional adalah 12 tahun atau setara dengan lulus SLTA. Sedangkan pemerintah dengan Nawacita ke lima antara lain menyatakan bahwa "Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui program Indonesia pintar dengan wajib belajar 12

tahun bebas pungutan".

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan KAT tidak hanya bersifat fisik tetapi juga membangun Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan serta menumbuhkan semangat cinta tanah air terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia. Setelah warga KAT memiliki pendidikan yang layak, diharapkan dapat meningkatkan meningkatkan kesejahteraan sosial.

## **3. Kondisi Kesehatan**

Suku Kaili Da'a sebelum diberdayakan kondisi fisik jasmaninya termasuk sehat. Mereka banyak melakukan kegiatan fisik dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti banyak berjalan kaki, memanjat pohon, mencangkul lahan dan berburu binatang. Apabila mereka mengalami sakit, pengobatannya dilakukan secara tradisional dengan jamu ataupun secara non medis dengan pertolongan tetua adat (dukun, supranatural, mistik). Sebagian warga KAT Suku Kaili Da'a memiliki kepercayaan, bahwa seseorang yang sakit dapat disebabkan oleh gangguan makhluk halus, sehingga mereka meminta pertolongan kepada tetua adat yang dianggap dapat menyembuhkan mereka yang sakit.

Para perempuan Suku Kaili Da'a dahulu melahirkan sendiri ataupun hanya dibantu oleh dukun beranak kemudian bayinya dimandikan, karena dipercaya sebagai cara menjaga kekebalan tubuh, agar kebal dari penyakit maupun senjata tajam. Untuk menjaga kesehatan jasmani suku Kaili Da'a banyak mengkonsumsi pisang dan kacang tanah, sehingga sebagian kecil warga ada yang menjual kacang dan pisang secara keliling desa. Untuk mengobati penyakit fisik, maka Habib



Shaleh sering memberikan pengobatan kepada warga masyarakat secara tradisional dengan memakai tanaman (herbal), seperti: dedaunan, akar-akaran, buah dan kulit kayu. Misalnya: sakit perut dengan ramuan daun sambirata, butrowali. Untuk mengobati cacingan dan meningkatkan nafsu makan dengan daun pepaya yang ditumbuk (jawa: dipipis) dan diminum air pepayanya. Untuk menjaga kesehatan jasmani dilakukan dengan memakan garam sedikit, sebelum dan sesudah makan. Hal tersebut dipercaya dapat mencegah keracunan tubuh serta dapat mencegah terjadinya 70 jenis penyakit tubuh. Sedangkan untuk mengobati penyakit psikis, maka diberi minuman air putih yang telah diberi doa untuk penyembuhan dan keselamatan. Air putih tersebut diperoleh pada waktu kegiatan pengajian rutin yang dilakukan Majelis Dzikir Nurul Khairat. Banyak warga yang membawa botol berisi air putih untuk mengatasi masalah kesehatan jasmani maupun rohani.

Setelah diberdayakan, maka pengobatan secara tradisional maupun secara religius masih dilakukan karena dianggap lebih murah dan mudah melakukannya. Namun seiring dengan kemajuan zaman, teknologi informasi dan program-program pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, semakin gencar sampai di kawasan pedesaan, maka warga KAT juga mulai menggunakan pengobatan secara medis dengan membeli obat di warung maupun berobat ke dokter, bidan, tenaga medis yang ada di pos kesehatan terdekat, seperti posyandu dan pos lansia. Hal ini dikarenakan belum ada Puskesmas ataupun rumah sakit di lokasi tersebut.

#### **4. Kepercayaan dan agama**

Suku Kaili Da'a dahulu memiliki kepercayaan yang berkenaan dengan konsep

ketuhanan, bahwa segala sesuatu di alam jagad raya ini memiliki penguasa (*Pue'*) masing-masing. Dunia atas (langit) dikuasai oleh *Pue Ri Langi/Pue Nulangi* dan dunia bawah (bumi) dikuasai oleh *Pue Ri Tana/Pue Nulino* sehingga hampir setiap aktivitas kehidupan yang dilakukan sehari-hari, selalu meminta izin kepada yang menguasai tempat di dunia langit dan dunia bumi. Suku Kaili Da'a di Desa Kalora sebelum diberdayakan menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu percaya dan menghormati arwah nenek moyang, yang dianggap memiliki kekuatan ataupun hubungan dengan kehidupan mereka serta percaya bahwa setiap benda (gunung, batu tinggi, gua, pohon besar, laut, sungai) yang dianggap keramat memiliki kekuatan dan harus dihormati sesuai adat setempat.

Setelah diberdayakan, maka Suku Kaili Da'a memeluk agama Islam. Perkembangan keagamaan di Desa Kalora ditandai dengan pembangunan masjid dan musholla sebagai tempat beribadah, pengajian dan kegiatan Islam. Bahkan untuk perkembangan generasi muda, sudah ada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) untuk belajar agama Islam bagi anak-anak. Kondisi masyarakat yang religius juga tampak pada model pakaian yang digunakan, seperti baju koko, jubah, kopiah untuk kaum laki-laki dan maju muslimah, jilbab untuk kaum perempuan. Pada acara pengajian selalu ada kesenian "Hadroh" dan acara makan bersama dalam satu tempat (nampan) seperti budaya bangsa Arab.

Sebagian dari mereka sudah dapat menjadi guru agama di masyarakat disekitarnya. Meskipun demikian, sebagian mereka juga masih dipertahankan tradisi. Misalnya tradisi mengolah sawah/ladang, masih didahului dengan makan bersama

sebelum menanam padi ataupun jagung. Tradisi sekarang untuk anak laki-laki sudah banyak yang disunat ketika masih bayi, umur di bawah satu tahun ataupun masih usia anak di bawah usia 10 tahun sehingga kehidupan Suku Kaili Da'a di Desa Kalora sudah religius islami. Hal tersebut sejalan dengan konsep pemberdayaan menurut peneliti, yaitu peningkatan pengetahuan dengan bukti dapat membaca dan menulis latin (bahasa Indonesia) serta bahasa Arab, penguatan nilai yang positif dan peningkatan komitmen keagamaan dengan menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan jamaah sholat wajib lima waktu di musholla ataupun masjid, kegiatan pengajian dan peringatan hari-hari besar Islam (Idul Fitri, Idul Adha, Isrok-Mikrod, Maulud Nabi, Nuzulul Qur'an).

Kegiatan yang bersifat budaya lokal tetap dilestarikan dengan menyesuaikan syariat Islam. Misalnya tradisi perkawinan dan kelahiran anak. Pemberdayaan pada aspek religius ini berkat dukungan dari Habib Shaleh, seorang tokoh agama yang konsisten menggunakan metode dakwah dengan menghargai budaya lokal.

## 5. Sarana dan Prasarana

Kehidupan Suku Kaili Da'a dahulu sangat sederhana, belum terjangkau fasilitas listrik, belum memiliki peralatan elektronik seperti radio dan televisi, sehingga mereka mengalami ketertinggalan informasi dan perkembangan teknologi. Prasarana transportasi berupa jalan tanah masih setapak, serta kondisi jalannya naik-turun dan berkelok-kelok karena lokasinya berada di puncak perbukitan (pegunungan) dan belum dilengkapi sarana transportasi seperti ojek dan angkot. Mereka belum terfasilitasi MCK dan air bersih, sehingga masih menggunakan air sungai untuk

mandi, mencuci dan buang air besar. Dalam memasak keseharian, mereka menggunakan bahan bakar kayu yang banyak terdapat di lingkungan setempat. Setelah diberdayakan, kondisi sarana dan prasarana berupa jalan, penerangan ataupun listrik, air bersih, MCK (Mandi, Cuci, Kakus), tempat belajar, tempat berobat, tempat beribadah, balai sosial warga KAT Suku Kaili Da'a di Desa Kalora menjadi baik. Berikut gambaran sarana dan prasarana permukiman warga KAT di Kabupaten Sigi sebelum dan sesudah diberdayakan.

**Tabel 2.** Jenis Sarana Permukiman Suku Kaili Da'a Desa Kalora Kabupaten Sigi

| Jenis Sarana   | Sebelum Diberdayakan | Sesudah Diberdayakan  |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| MCK            | Tidak ada            | Ada                   |
| Jalan          | Buruk                | Baik, Aspal           |
| Penerangan     | Lampu minyak         | Listrik PLN           |
| Tempat Belajar | Tidak ada            | Ada TPA, Pesantren    |
| Tempat Berobat | Tidak ada            | Ada sederhana         |
| Tempat Ibadah  | Tidak ada            | Ada Musholla, Masjid, |
| Balai Sosial   | Tidak ada            | Ada sederhana         |

*Sumber: hasil observasi, 2017*

Fasilitas mandi mencuci dan buang air (MCK) di permukiman warga KAT suku Kaili Da'a di Desa Kalora Kecamatan Kinovaro sudah tersedia meskipun sifatnya untuk bersama dan setiap satu unit MCK dimanfaatkan sekitar 20 rumah tangga. Air bersih diperoleh dari mata air di puncak bukit pegunungan setempat, kemudian disalurkan pada lingkungan rumah penduduk menggunakan pipa pralon, sehingga kebutuhan air bersih warga KAT terpenuhi secara memadai. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa potensi alam di lingkungan Suku Kaili Da'a seperti keberadaan sumber air sudah mereka

manfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Warga KAT Suku Kaili Da'a dapat dikatakan telah berhasil mendayagunakan sumberdaya alam dengan bertumpu pada kearifan lokal, yaitu menggunakan sumber air bersir dari puncak bukit disalurkan dengan pipa prolam ataupun selang plastik ke rumah-rumah penduduk ataupun MCK umum, sehingga hidupnya lebih sehat dan nyaman.

Kondisi jalan menuju permukiman KAT di Desa Kalora Kecamatan Kinovaro sudah beraspal atau sebagian telah di cor semen, sehingga mudah dilalui baik dengan kendaraan sepeda motor maupun mobil, meskipun kondisi jalan banyak tikungan, tanjakan, dan turunan karena merupakan daerah pegunungan, namun kondisi sudah baik, karena sudah diaspal, sehingga dapat dilalui motor maupun mobil dengan lancar. Sedangkan penerangan warga KAT sudah menggunakan listrik dari PLN, setiap keluarga dapat memanfaatkan lampu listrik dan memiliki peralatan elektronik seperti televisi, radio, dan *handphone*. Keadaan tersebut membuka warga Suku Kaili dari kondisi keterisolasian menjadi lebih terbuka, sehingga mereka dapat mengakses pelayanan publik. Keberadaan air bersih untuk MCK, listrik untuk penerangan dan bekerja, kondisi jalan yang baik merupakan bukti bahwa instansi yang terkait dengan pemberdayaan KAT sudah berkontribusi sesuai dengan peranannya, seperti MCK dengan Dinas Kesehatan, Listrik dengan PLS, jalan umum dengan Dinas PU.

Fasilitas untuk belajar membaca, menulis, dan berbahasa Indonesia sudah mulai dirintis dengan didirikannya Taman Pendidikan Al Quran (TPA). Bagi warga KAT yang ingin belajar agama Islam di permukiman tersebut sudah dibangun

mushola dengan keberadaan ustad (guru mengaji) pembimbing keagamaan di wilayah tersebut. Kegiatan keagamaan sangat dinamis seperti adanya pengajian, yasinan, dan hadroh. Anak lelaki warga Suku Kaili Da'a di daerah tersebut bahkan sudah disunat (dikhitan) ketika masih bayi. Pakaian yang mereka kenakan ketika di mushola telah bernuansa muslim seperti berbaju koko, memakai sarung, dan kopiah. Suku tersebut bahkan memiliki tradisi mengadakan makan bersama dengan satu tempat makanan

## 8. Mata Pencarian

Jenis pekerjaan suku Kaili Da'a baik sebelum maupun sesudah diberdayakan mayoritas adalah sebagai petani. Tanaman yang dibudidaya meliputi *pae* (padi ladang) dengan masa panennya enam hingga sembilan bulan, *kasubi* (ubi kayu), *'ntoku* (ubi jalar), keladi, dan jagung. Hasil panen tanaman tersebut hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, belum menjadi usaha ekonomi produktif. Alat produksi yang digunakan masih sederhana seperti parang, kampak, cangkul dan sekop. Mereka dahulu melakukan perladangan berpindah tempat sesuai dengan tradisi. Sumberdaya lain yang dimanfaatkan adalah hasil hutan seperti rotan dan durian yang memiliki nilai jual. Hasil penjualan rotan dan durian digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan keluarga. Pada musim rotan dan durian, warga Suku Kaili Da'a berinteraksi dengan dunia luar karena mereka membawa hasil hutan yang dibutuhkan oleh masyarakat di luar warga KAT. Sebagian mereka juga ada yang bekerja sebagai perambah hutan untuk mencari madu ataupun berburu binatang seperti musang dengan bantuan sekelompok anjing yang dilatih ataupun berburu burung

dengan senjata *sumpit* (tulup) yang dibuat dari bambu.

Tradisi Suku Kaili Da'a dalam pembukaan lahan untuk menanam padi di ladang melakukan beberapa tradisi sebagai tahapan, meliputi: a) *Mangala tanah* (melihat tanah), merupakan proses pemilihan lahan yang akan ditanami padi. Maksudnya adalah meminta izin pemakaian lahan untuk menanam padi kepada Yang Maha Kuasa. b) *Nantalu* (memaras) adalah tahap pembersihan lahan. Jika si pemilik lahan masih mampu membersihkan lahan sendiri, maka akan dilakukan sendiri, tetapi jika tidak mampu, maka meminta bantuan kepada kerabat. c) *Notunju* (membakar) adalah tahap membakar rumput dan kayu yang tersisa dari pembersihan yang dilakukan sebelumnya. Tujuannya mempersiapkan lahan untuk ditanami dengan cara membakar vegetasi yang tumbuh di atas lahan. d) *Nompepoyu* adalah ritual permohonan izin kepada penghuni tanah (*tupuntana*) sesuai kepercayaan mereka.

Suku Kaili Da'a pada umumnya percaya bahwa dunia atas memiliki penjaga (*tu rilangi*) dan yang menjaga bumi (*tupu tana*). *Tupu tana* mereka anggap sebagai faktor penentu keberhasilan dan berlimpahnya hasil panen. e) *Nolilondi nantunu manu* (bakar ayam), yakni prosesi adat yang dilakukan untuk memohon agar sang pencipta memberikan kesehatan bagi peladang dan memberi hasil panen yang berlimpah. f) *Nantiwa* (memetik) yaitu tahap pemetikan hasil panen. Pada pemetikan pertama tidak dilakukan secara sembarang, karena menurut masyarakat setempat jika proses pemetikan pertama dilakukan secara sembarangan, maka dapat mengakibatkan sakit pada tanaman.

Sumberdaya lain yang dimanfaatkan adalah hasil hutan seperti rotan dan durian yang memiliki nilai jual. Hasil penjualan rotan dan durian digunakan untuk membeli keperluan keluarga (Studi Kelayakan Komunitas Adat Terpencil Topo Daa Banjasio, 2012).

Suku Kaili Da'a sesudah diberdayakan memiliki jenis matapencaharian yang tidak banyak berubah, karena lokasi permukiman masih dalam satu desa, sehingga tidak mengalami perbedaan lingkungan secara menyolok. Jenis mata pencaharian warga KAT sebanyak 70 keluarga atau 88 persen adalah sebagai petani ladang dengan menanam padi, jagung, ubi jalar, dan ketela. Selanjutnya delapan keluarga atau 10 persen bekerja sebagai pedagang kecil (berjualan) dengan memasarkan pisang, kacang, dan sayuran hasil dari pertanian. Satu keluarga atau dua persen sisanya berburu binatang. Meskipun jenis matapencahariannya tidak banyak berubah, tetapi dengan diberikan bantuan stimulan berupa bibit tanaman dan peralatan pertanian, maka kehidupannya juga semakin baik dan sejahtera.

## KESIMPULAN

Pemberdayaan Suku Kaili Da'a di Kabupaten Sigi menunjukkan keberhasilan, karena dapat dapat menempati rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, kepercayaan dan agama, sarana prasarana serta mata pencaharaan. Sebagian warga KAT Suku Kaili Da'a menempati kawasan hutan lindung, sehingga sulit mengurus sertifikat tanah. Peran tokoh agama dalam pemberdayaan KAT Suku Kaili Da'a serta kontribusi lembaga terkait (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan/ Universitas, Bapeda, BPS dapat mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan KAT.



## SARAN

Indikator keberhasilan pemberdayaan KAT dapat diukur dan dinilai dengan aspek terjadi nya perbaikan permukiman, pendidikan, kesehatan, kepercayaan dan agama, sarana prasarana serta dapat hidup nyaman tanpa kehilangan tradisi. Hal tersebut membutuhkan kerjasama dan koordinasi lembaga yang terkait dengan pemberdayaan KAT, sehingga perlu mengaktifkan kembali Forum Pemberdayaan KAT. Kementerian Sosial RI bertugas memberdayakan KAT, antara lain dengan program perbaikan Rumah Layak Huni (Rutilahu)). Dana tersebut dari APBN disalurkan ke pemerintah daerah (Dinas Sosial Kabupaten/Kota). Pemerintah daerah diwajibkan berkontribusi untuk mengawal proses pemberdayaan KAT. Pemberdayaan KAT yang berhasil dapat dijadikan model dan dijadikan study banding serta diberi penghargaan bagi mereka yang memiliki kontribusi dalam memberdayakan KAT.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Drs. Benny Setia Nugraha, M.Si yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian Suku Kaili Da'a di Kabupaten Sigi Sulawesi tengah, kami menyampaikan banyak terimakasih yang setulusnya, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi lembaga serta masyarakat pada umumnya. Kepada Habib Shaleh Al Idrus, kami menyampaikan terimakasih yang mendalam, karena telah banyak dibantu dalam melakukan penelitian KAT serta informasi dan kisah-kisah yang inspiratif. Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sigi, dan para pendamping serta warga KAT, kami menghaturkan banyak terimakasih atas kerjasama dan bantuannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonym. "Dampak Perubahan Sosial Budaya". Dalam <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociologi/1992756-dampak-perubahan-sosial-budaya/#ixzzlbCRgQoCU>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2011.

Anonym "Sosial Budaya Sulawesi Tengah" dalam <http://www.google.co.id/sosial-budaya-Sulawesi-Tengah/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2018.

Harijono.I (2016). *Kebijakan Nawacita Presiden Jokowi-JK*. Bahan workshop rancangan penelitian di B2P3KS Yogyakarta, tanggal: 18 Maret 2016 dari Kabid Perencanaan pada Asdep Infrastruktur Ekonomi dan Kesra. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Irmawan (2015). *Pemberdayaan Jamaah Shalawatan Jawa Guna Memperkuat Modal Sosial di Desa Wonokromo Pleret Bantul*. Penerbit B2P3KS Press Yogyakarta.

Kementerian Sosial RI, (2017). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017* Badan Pusat Statistik (2016). *Kabupaten Sigi Dalam Angka*.

Kissumi D, & Retnaningdyah.W (2017). *Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Volume 16 No. 2 Juni 2017 Penerbit B2P3KS Yogyakarta.

Moleong (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Rosdakarya.

Mulyana, D (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya.

Nawawi, H, H. (2002). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University



Press. Yogyakarta.

Rusmiyati.C.et.al (2017). *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*. Penerbit B2P3KS Press Yogyakarta.

Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Bandung. PT Refina Aditama.

Siagian, S, P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.

Universitas Tadulako (2012). *Study Kelayakan Komunitas Adat Terpencil Topo Da'a Desa Bambakaenu Kecamatan Pinembani*. Universitas Tadulako Sulawesi Tengah.

**“HEKA HITI HEKA LEHA” SPIRIT BUDAYA PEMERSATU DI TENGAH  
KELANGGEGAN KONFLIK ORANG KULUR DAN ORANG PORTO KECAMATAN  
SAPARUA MALUKU TENGAH**

**“HEKA HITI HEKA LEHA” AS A UNIFYING CULTURE SPIRIT IN THE MIDDLE OF  
CONFLICT SUSTAINABILITY BETWEEN PEOPLE OF KULUR AND PORTO IN  
SAPARUA CENTRAL MOLLUCAS**

**Paulus Koritelu**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura, Ambon  
Jalan Ir M. Putuhena, Kampus Poka, Ambon, Maluku  
Email : koritelupoli@gmail.com

Diterima : 31 Januari 2018; Direvisi: 9 Maret 2018; Disetujui: 22 Maret 2018

**Abstrak**

Konflik merupakan sebuah konsep yang menjadi simbolisasi dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi dalam bentuk *dis-asosiatif* antara individu atau antar kelompok dalam satu komunitas atau antar komunitas. Dalam paradigma konfliktual, konflik menjadi penting dalam rangka menemukan arah perubahan sosial yang dikehendaki. Konflik dapat juga dijadikan sebuah rujukan atau pencapaian berbagai tujuan kehidupan sebuah komunitas. Sekalipun begitu banyak pandangan yang menolak gagasan ini. Bahwa kelanggegan konflik yang terjadi pada sebuah komunitas tidak serta merta dapat menjadi sebuah rujukan pencapaian berbagai kepentingan komunitas. Konflik biasanya menimbulkan perpecahan dan kehancuran. Tetapi dalam penelitian ini ada spirit budaya yang menjadi kekuatan pengikat antara dua kubu yang setiap waktu berkonflik untuk tetap bisa berdamai di dalam ikatan solidaritas dan kerjasama yang harmonis. Spirit budaya tersebut adalah: **Heka Hiti heka Leha** yang mengikat dan senantiasa mempersatukan Orang Kulur dan Porto.

**Kata Kunci:** Kelanggegan konflik, Perdamaian dan Budaya Lokal.

**Abstract**

*Conflict is symbolization concept of social interaction process that occurs in the form of dis-associative between individuals, groups within a community of between communities. In the conflictual paradigm, conflict becomes important in order to find the desired direction of social change. In the specific experience, conflict can also be used as a reference or achievement of various life goals of a community. Despite many views that reject this idea. That the conflict sustainability in a community does not necessarily become a reference to the achievement of various community interests. Conflicts cause discord and destruction. This study found that there is a certain cultural spirit that becomes a binding force between two stronghold to remain in peace and stay in harmonious solidarity bond and cooperation. It is Heka Hiti Heka Leha, the culture spirit that binds and has always be the unifier of people of Kulur and Porto.*

**Keywords:** Conflict sustainability, peace and Local Culture.

## PENDAHULUAN

Berbagai persoalan sosial yang terjadi termasuk konflik antar negeri di kepulauan Maluku Khususnya di pulau Saparua, menjadi bagian dari satu persoalan yang sangat serius terjadi, sehingga membutuhkan berbagai telaah kritis yang rasional dan profesional guna mendapatkan rujukan sistimatis dalam upaya mengatasi dan memberikan jalan keluar atas berbagai persoalan tersebut. Isue konflik yang terjadi di wilayah kepulauan memang menjadi salah satu penyebab terjadinya berbagai persoalan yang secara langsung ataupun tidak dialami oleh masyarakat, sekalipun diakui bahwa karakteristik konflik yang dialami berbeda-beda. Karenanya dampak dan akibatnyapun bisa beragam dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Keseriusan untuk melihat isu konflik di Maluku khususnya di pulaua Saparua ini dilatar-belakangi oleh satu alasan yang sangat universal yakni: berbagai bentuk pemahaman dan pola penanganan yang berhubungan dengan kemiskinan yang muncul sebagai akibat dari konflik. Padahal kemiskinan merupakan sebuah realitas dengan karakteristik yang bisa saja berbeda, apalagi pada penduduk yang berbeda tempat tinggal serta tersebar pada pulau-pulau yang berbeda.

Orang-orang yang mendiami negeri Kulur adalah 100% beragama Islam adalah orang-orang yang menjadi bagian integral dari orang Lease-Saparua yang mendiami wilayah negeri ini ratusan tahun yang lalu (Koritelu, 2011) Jumlah penduduk negeri Kulur berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana diperlihatkan dalam tabel di bawah ini:

Untuk ukuran negeri yang tersebar di pulau Saparua, jumlah penduduk demikian masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan negeri lain di sekitarnya. Misalnya desa Siri Sori (dusun Pia), desa Tuhaha, Nolothe, Kampung Mahu, Ihamahu hingga Itawaka di jasiara Hatawano saparua dan sebagainya. Kecilnya jumlah penduduk orang Kulur ini menjadi sebuah fenomena yang patut ditelusuri lebih jauh. Karena dalam pandangan orang Kulur, menempati satu wilayah dan beraktifitas serta hidup normal harus digaransikan oleh sebuah situasi damai dan ketenangan hidup yang menjadi dambaan semua orang. Sementara itu orang kulur berdasarkan hasil temuan studi ini menjadi sebuah negeri adat di Saparua yang selalu mengalami konflik dengan beberapa desa tetangga. Dan dalam pengakuan informan, desa atau negeri yang paling sering berkonflik dengan Kulur adalah negeri Porto. Hampir setiap tahun konflik antar komunitas kedua negeri tidak pernah terelakan, sehingga yang namanya hidup dalam ketenangan hanyalah sebuah mimpi yang tidak mudah menjadi kenyataan dalam hidup orang Kulur. “makanya itu kita punya orang Kulur yang ada di luar seng mau kembali lagi ke negeri (Kulur) karena hampir tiap musim kabong, tinggal baku hantam trus, makanya jumlah katong di kampung sadiki saja...beda deng kampung yang lain...” (*cerita Bpk. Hamad Tuahuns di Kulur Juli 2009*).

Hasil observasi awal sebelum studi ini dilakukan ternyata masalah orang Kulur dan orang Porto bukanlah masalah yang baru saja terjadi, sebab benturan dan atau konflik serta *violence* (kekerasan), sudah sering

**Tabel 1.** Jumlah Kk dan Jumlah penduduk negeri Kulur tahun 2009.

| Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Rumah Tangga Berkepala Keluarga Perempuan | Jumlah Populasi laki-laki | Jumlah Populasi perempuan | Jumlah remaja/anak muda (di bawah 18 tahun) |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 254                 | 39                                               | 556                       | 405                       | 215                                         |

*Sumber: Data hasil penelitian pada bulan Juli 2009 dalam tim MCLE World Bank*

terjadi berulang-ulang, dan tidak jarang pula menimbulkan korban jiwa (meninggal dunia) baik dari pihak orang Kulur maupun orang Porto. Menarik kemudian untuk mempertanyakan mengapa konflik atau benturan antara kedua negeri di pulau Saparua ini seakan menjadi sebuah bentuk konflik yang langgeng. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini hamper setiap tahun selalu terjadi kontak fisik antar kedua komunitas. Apa sesungguhnya yang melatar belakangi konflik ini dan mengapa hal itu terjadi. Mengingat waktu yang sangat terbatas maka jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dititik-beratkan pada satu pihak saja yakni dari sisi pandangan orang Kulur. Harapan penulis dalam kesempatan studi berikutnya akan diceritakan pandangan dari orang Porto terhadap konflik tersebut. Menarik untuk dikemukakan juga dibagian awal tulisan ini bahwa ternyata orang-orang yang mendiami negeri Porto 100% beragama Kristen Protestan

Studi tentang konflik yang terjadi merupakan bagian dari upaya untuk memahami atau mencari solusi atas bentuk konflik manifest yang sudah terjadi. Walaupun ada juga studi konflik yang terjadi dalam tataran konflik laten, artinya sesungguhnya ada potensi konflik dalam masyarakat tetapi tidak nampak. Sebab banyak kalangan yang menilai bahwa sebenarnya studi konflik dimaksudkan untuk mengungkapkan berbagai sebab atau issue serta akibat dari sebuah peristiwa konflik akan jauh lebih kontributif dalam proses rekonstruksi masyarakat ke arah yang lebih maju. Sebab pada akhirnya dapat setiap studi konflik tentu saja dapat pula mengungkapkan berbagai masalah yang dialami masyarakat dan bahkan menyengsarakan kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya permasalahan studi ini berkisar pada: *bagaimana kategori-kategori penting yang selalu berpotensi menimbulkan konflik antara orang kulur dan orang Porto? Bagaimana*

*realitas konflik orang Kulur dan Porto dapat berlangsung terus-menerus? Dan adakah konstruksi budaya tertentu yang mendasari konflik orang kulur dan orang porto? Mengapa pola hubungan orang Kulur dan orang Porto tetap baik (lancar dan aman) di kota Saparua, atau di kota Ambon pasca konflik yang terjadi di sekitar wilayah negeri kulur ?* Melalui rujukan Teori yang relevan gagasan utama dalam studi ini tentu memberikan sebuah kejelasan akademis atas apa yang dapat dikontribusikan dalam wacana intelektual khususnya dalam bidang sosiologi.

Untuk menjawab sejumlah pertanyaan di atas maka focus studi ini hanya dibatasi pada bagaimana pandangan orang Kulur terhadap fenomena kelanggengan konflik tersebut. Mengingat pandangan setiap Individu dan kelompok masyarakat bisa saja berbeda tentang konflik yang secara terus menerus terjadi (langgeng), maka pada tulisan ini sekali lagi bahasannya hanya dibatasi pada pandangan orang Kulur terhadap konflik antara kedua negeri di Saparua tersebut.

Atas dasar itu maka rumusan masalah penelitian yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik antara negeri Kulur dan negeri Porto menurut pandangan orang Kulur?
2. Bagaimana mekanisme budaya lokal dalam menyelesaikan konflik antar kedua negeri?

Bahasan tentang konflik merupakan sesuatu yang sangat menarik dan tetap aktual dalam berbagai diskursus baik diskursus publik maupun diskursus akademis. Alasan substansialnya karena konflik tetap merupakan bagian penting dalam rentetan perjalanan manusia dan oleh karena itu menurut perspektif tertentu, konflik menjadi prasarat adanya perubahan sosial yang

akan selalu terjadi dalam masyarakat. Konflik merupakan sebuah gejala yang bisa saja terjadi manakala ada relasi antar lembaga atau institusi yang saling berhubungan dan memiliki kepentingan. Itulah sebabnya dalam pengertian yang sederhana, konflik akan terjadi apabila: *“two or more persons or groups manifest or latens the belief that they have incompatible objectives”* (Krieger, 1998). Intinya: konflik (baik manifest atau laten) dapat terjadi jika ada dua kelompok atau institusi sosial atau lebih dimana masing-masing meminvestasikan kepentingannya yang berbeda. Dan perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan benturan atau bahkan perseteruan-perseteruan diantara kelompok manakala masing-masing kelompok berusaha untuk memenuhi kepentingan kelompoknya.

Atas dasar itu maka yang menjadi sangat krusial untuk diacu sebagai teori pokok dalam tulisan ini adalah: bagaimana atau apa saja issue-issue penting yang bisa menimbulkan konflik. Terkait dengan itu maka secara teoritis yang disebut issue konflik meliputi: *culture* (budaya), *power* (kekuasaan), *identity* (identitas), *Justice and human rights* (keadilan dan hak asasi manusia)... (Stewart, 2005). Perbenturan yang bersentuhan langsung dengan issue-issue di atas terkait erat dengan adanya upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang seringkali menimbulkan kecemburuan sosial diantara berbagai kelompok kepentingan yang berbasis pada kelompok budaya-etnis, kelompok kekuasaan, kelompok identitas yang dalam praktek hidup merasakan jika hak asasinya untuk mendapatkan perlakuan yang adil terabaikan dalam pelayanan publik yang diterima dari pemerintah setempat. Karena itu ketika berbagai interest group tadi merasa terabaikan, kecemburuan sosialpun muncul. Dan ketika kecemburuan sosial muncul maka saat dalam waktu bersamaan konflik laten

terjadi. Selanjutnya jika ada faktor pemicu maka secara manifest konflik bisa muncul dalam berbagai bentuk; apakah dalam bentuk perdebatan, perkelahian bahkan sampai pada tataran kekerasan (*violence*). Sebab pada akhirnya konflik yang terjadi pada kelompok-kelompok yang berbeda dapat menyebabkan sebuah proses kualiasi untuk menjadikan satu issue (kekuasaan, ekonomi, keadilan, dan lain-lain) sebagai bagian dari kepentingan bersama (*common interest*) Karena itu setiap kelompok atau individu yang menghalangi pencapaian kepentingan bersama itulah yang akan menjadi common enemies kelompok pemilik kepentingan tersebut (Simmel dalam Turner, 1997).

Gagasan teoritis di atas digunakan untuk melihat bagaimana gambaran konflik yang terjadi antara orang Kulur dan orang Porto. Dalam pengetahuan orang Saparua secara umum konflik antar kedua komunitas paling sering terjadi. Dan hampir tiap tahun kedua komunitas selalu diperhadapkan dengan kenyataan seperti itu.

## METODE

**Tipe Penelitian.** Penelitian ini bersifat kualitatif yakni penelitian yang bermaksud mengungkapkan berbagai makna dibalik kenyataan konflik yang selalu terjadi berulang-ulang diantara kedua negeri yakni Kulur dan Porto. Tetapi dibalik konflik yang terjadi berulang kali tersebut kedua masyarakat pada negeri masing-masing tetap bias hidup damai. Makna apa sebenarnya dibalik kenyataan tersebut akan didalami melalui penelitian tersebut.

**Informan Penelitian:** Penelitian ini akan dilakukan terhadap kurang lebih 10 orang dengan perincian masing-masing negeri akan diwakili oleh 5 orang antara lain:



- Raja (kepala desa) 2 orang (masing-masing 1 orang mewakili desa atau negerinya).
- Tokoh adat 2 orang (masing-masing 1 orang mewakili negeri/desanya)
- Staf pemerintahan desa 2 orang (masing-masing 1 orang mewakili desa atau negerinya).
- Masyarakat Kedua negeri terlibat dalam konflik maupun terlibat dalam interaksi pasca konflik di luar desa atau negeri masing sebanyak 4 orang. Untuk Masyarakat yang terlibat konflik terutama konflik batas tanah sebanyak 2 orang (1 mewakili setiap negeri atau desa masing-masing) dan 2 orang sisanya, masing-masing 1 orang dari tiap negeri atau desa yang biasanya terlibat interaksi secara damai pasca konflik yang terjadi diantara kedua negeri. Proses interaksi tersebut terjadi di luar lingkungan desa/negeri masing-masing.

Sehingga total seluruh informan yang diteliti sebanyak 10 orang. Adapun alasan utama mengapa 10 orang tersebut dipilih sebagai informan penelitian tersebut antara lain:

- Khusus Raja (kepala desa) bersama Staf desa setiap waktu selalu ada bersama rakyatnya dan memegang kendali atas setiap kejadian konflik. Artinya tidak mungkin setiap kelompok masyarakat dari desa masing-masing berani untuk saling menyerang tanpa perintah komando raja dan aparat pemerintah negeri masing-masing. Disamping itu sebagai tokoh mereka tentu mengetahui dengan dalam mengapa konflik sedang dan sudah terjadi tetapi damai tetap bias tercipta diantara kedua kelompok masyarakat. Apa rahasianya
- Khusus Tokoh adat pada masing-masing desa akan sangat penting bagi peneliti mewawancarai mereka secara mendalam berhubungan dengan pengetahuan mereka khususnya tentang makna heka hiti heka leha dan bagaimana makna itu

dapat terwujudkan dalam mengendalikan perilaku konflik untuk berubah menjadi damai terutama setelah konflik terjadi, baik di negeri masing-masing maupun di luar lokasi konflik, misalnya di pusat kota Saparua, di lokasi kantor kecamatan saat kedua kelompok masyarakat bertemu di sana. Tokoh adat akan mengetahui hal itu karena berdasarkan hasil observasi awal memang peran tokoh adat menjadi penting untuk keyakinan kelompok masing-masing untuk saling berkonflik atau saling menyerang berhubungan dengan kekuatan dan keberanian yang merepoleh karena doa para tokoh adat kepada leluhur (Koritelu, 2009).

- Informan masyarakat Yang terlibat konflik akan sangat memahami bagaimana situasi psikologis mereka saat berkonflik dan bagaimana kedua orang atau kubuh yang berkonflik bertemu setelah konflik selesai di tempat lainnya.
- Informan masyarakat yang berasal dari kelompok masing-masing yang adalah pejabat public yang bekerja di kantor camat Saparua, bagaimana mereka bias berdamai di lokasi kantor kecamatan sedang konflik sedang terjadi. Bagaimana mereka bias memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yang berasal dari negeri atau desa yang sedang berkonflik dengan desa atau negeri asalnya. Hal ini menjadi sangat penting sekali untuk didalami melalui penelitian tersebut.

**Teknik Penentuan Informan:** Oleh karena penulis bukan orang yang berasal dari lokasi penelitian sehingga pengetahuan dan pengenalan penulis terhadap kapasitas masing-masing informan untuk mengetahui, memahami serta dapat memberikan keterangan dan jawaban yang dibutuhkan juga menjadi sangat terbatas karena penentuan informan dilakukan melalui pendekatan *snow ball sampling* (Denzin dan Loncoln, 1994). Dimana

keterangan dan referensi serta rekomendasi dari informan sebelumnya tentang siapa yang mengetahui dan dapat memberikan informasi yang benar dan akurat tentang data yang diperlukan menjadi hal yang sangat penting dari penerapan teknik penentuan sample (informan tersebut). Dari setiap informan yang sebelumnya peneliti mewawancarai merekalah informan selanjutnya penulis peroleh. Dan faktanya keterangan serta rekomendasi mereka menjadi sangat tepat sekali.

**Teknik Pengumpulan Data:** Adapun cara yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data penelitian tersebut antara lain ialah melalui: *In-Dept Interview* yakni: proses wawancara mendalam yang dilakukan terhadap para informan (Marshal dan Rosman, 1989). Posisi informan tersebut dalam pandangan peneliti adalah orang yang sangat ahli dan tahu persis serta dapat memberikan data yang peneliti perlukan dalam penelitian tersebut. Pertanyaan yang peneliti berikan adalah menjadi bagian dari pedoman wawancara kualitatif dan akan dikembangkan sendiri dalam dinamika wawancara mendalam dengan informan saat proses indept interview terjadi. **Observasi:** Kegiatan Observasi yang dilakukan peneliti memang dibagi dalam dua tahap yakni: *pra-observasi* yang penulis lakukan jauh sebelum kehadiran peneliti secara resmi di lokasi untuk melakukan wawancara mendalam maupun observasi lanjutan. Kegiatan **Observasi** juga dilakukan bersamaan dengan kegiatan wawancara mendalam. Dimana tahapan observasi ini menjadi pembuktian atas keterangan dan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Singkat kata kedua cara ini yakni wawancara mendalam dan proses observasi dilakukan selain untuk memperoleh data penelitian, juga dilakukan untuk saling memperkuat dan menguji kebenaran data yang penelitia peroleh dari penerapan teknik

masing-masing. Contohnya: hasil wawancara mendalam dengan informan dapat dipraktekan dengan kenyataan yang diperoleh dari hasil wawancara. “ketika informan pegawai dari Porto yang kebetulan adalah PNS di kantor Kecamatan Saparua mengatakan bahwa tidak ada dendam terhadap orang Kulur karena memiliki spirit Heha Hiti Heka Leha, maka dari hasil observasi untuk membuktikan kebenaran itu terlihat dari perilaku informan yang ternyata lebih mendahulukan pelayanannya di kantor tersebut terhadap anggota masyarakat asal Kulur, padahal anggota masyarakat lainnya sedang antri menunggu giliran. Hal ini tidak terjadi sekali tetapi dalam setiap waktu seakan telah menjadi pola yang baku dari kedua kelompok masyarakat. Tipe data seperti ini diketahui peneliti tidak saja dari hasil wawancara mendalam tetapi dari hasil observasi yang penulis lakukan juga.

**Teknik Analisa Data:** Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan pola nalisa data kualitatif yang diemukakan Miles dan Huberman (1992) yang meliputi tiga aspek utama yakni: **Reduksi data** yakni upaya mengelompokan data baik data hasil observasi maupun data penelitian sesuai kategori data yang dibuat di lapangan untuk selanjutnya dilaporkan secara sistimatis. **Display data** pada tahap ini data disajikan sesuai kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan bila perlu untuk memperlengkapi proses penyajian data ini peneliti atau penulis akan menyajika pula hasil wawancara yang relevan agar semakin memperbesar kebenaran penjelasan yang tersusun dan tersajikan sesuai kategorisasi data yang sudah dibuat. **Ferifikasi dan Penarikan Kesimpulan:** Ini adalah tahapan terakhir dari sistim analisis yang mempermudah pembaca untuk memahami makna dari laporan penelitian tersebut secara utuh. Penarikan kesimpulan tersebut tentu sangat mempertimbangkan

berbagai aspek yang sudah menjadi bagian dari nilai dan makna penting dari laporan hasil penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Isu Utama Penyebab Konflik

Konflik termasuk kekerasan yang terjadi antara orang Kulur dan Porto dalam temuan studi ini merupakan kejadian yang sudah sering terjadi. Sejarah konflik kedua komunitas sudah dimulai sebelum kedatangan orang Belanda di kawasan Saparua ini. *“Waktu itu nenek moyang kami sudah saling bakhantam (conflic-violence), karena orang Porto mau menguasai semua tanah yang sudah ditempati nenek moyang kami”* (Wawancara dengan Autad Tutupoho, kades Kulur, 5 Agustus 2009 di Kulur).

- a. **Isue Batas tanah (Penyerobotan Tanah)** merupakan hal yang sangat dominan dalam konflik kedua negeri. Hampir setiap tahun kedua negeri selalu terlibat dalam sengketa yang mengarah pada benturan fisik. Orang Kulur selalu menganggap bahwa orang Porto setiap waktu menyerobot tanah milik mereka untuk membuka areal kebun yang baru. Itulah sebabnya ketegangan dan konflik biasanya terjadi pada waktu pembukaan lahan baru atau pada saat panen hasil akan dilakukan. Tentang fakta ini sepertinya sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah. Dari anak-anak sampe orang dewasa secara rutin setiap tahun mereka tahu bahwa konflik pasti terjadi karena isu tersebut (Fisher dan Smith, 2000). Pandangan yang berbeda tentang batas negeri maupun batas petuanan negeri menjadi semacam perbedaan Idiologi yang sulit sekali disederhanakan. Akibatnya setiap tahun konflik dan benturan fisik tidak dapat dihindari. Karena menurut pandangan orang kulur mereka sadar kalau orang

Porto mengakui kalau batas petuanan orang Porto adalah sesuai dengan pandangan orang Porto, sehingga klaim atas kebenaran pandangan masing-masing pada akhirnya membuat kedua negeri saling berbenturan (berkonflik satu sama lain), dan hal tersebut terjadi secara berulang-ulang.

- b. Kerenggangan sosial yang berbasis pada **Isue segregasi penduduk berdasarkan agama**. Umumnya di pulau Saparua yang terdiri 17 negeri (desa) merupakan sebaran komunitas yang secara jelas terpisah karena agama yang berbeda-beda. Tercatat dari 17 negeri tersebut hanya 3 negeri yang warganya beragama Islam yakni: negeri; Kulur, Siri Sori dan negeri Iha. Sedang 14 lainnya beragama Kristen Protestan. Bahkan yang unik adalah ada 2 negeri yang namanya sama tetapi dihuni oleh penduduk dengan agama yang berbeda. Kedua negeri ini pun sama-sama mendapatkan status sebagai negeri adat maupun negeri yang secara administrative pemerintahan diakui. Kedua negeri tersebut adalah negeri Siri Sori (Islam) dan negeri Siri Sori yang ditambahkan sebutan Amalatu (Kristen). Segregasi penduduk demikian secara sosio-historis berdasarkan penelitian ini, dilatar belakangi oleh konflik antar agama yang dimulai sejak penetrasi kolonial Belanda di Saparua pada pertengahan tahun 1600-an. Keadaan ini dalam kenyataannya terus terbawah hingga saat ini. Peristiwa konflik Ambon Maluku yang dimulai sejak 19 Januari 1999 juga mempengaruhi serta memiliki dampak yang besar atas kehidupan negeri-negeri di Saparua. Keadaan ini secara sosiologis dapat dipahami bahwa sebenarnya orang-orang di Saparua termasuk Orang Kulur dan Orang Porto juga hidup dalam jarak sosial yang jauh. Jarak sosial sosial ini menyerupai sebuah

*prejudice* (kecurigaan) yang terus-menerus, terhadap kelompok agama lain karena secara geografis tersegregasi berdasarkan agama yang berbeda dan dianut oleh warga kedua negeri. Pola interaksi dan hubungan sosial yang terjalin diantara mereka pun lebih banyak dikerangkai oleh berbagai persoalan yang bersifat formal. Pola dan bentuk interaksi antar orang Kulur dan Porto sangat termanifestasi dalam aktifitas kunjung-mengunjung, kerjasama antar kelompok dan sebagainya. Acara sunatan, syukuran keluarga, Ulang tahun, Kawinan, syukuran Wisuda yang diadakan orang Kulur jarang melibatkan atau mengundang orang Porto untuk dapat ikut serta. Ketika ditanya mengapa hal itu terjadi, hampir semua informan memiliki jawaban yang sama, yakni: memang sejak dulu ketika penetrasi kolonial Belanda, kedua negeri jarang melakukan pola dan bentuk interaksi sosial seperti itu. Itulah sebabnya jarak sosial diantara kedua komunitas cukup jauh. Mereka mengatakan bahwa jarak geografis bukanlah halangan bagi mereka, sebab mereka pun melibatkan orang Siri Sori Islam dan Iha yang masih se-agama dalam setiap acara yang mereka adakan.

Itulah sebabnya nyata dengan jelas bahwa sebenarnya jenis agama yang dianut sangat berpengaruh juga terhadap pola hubungan sosial yang terjalin diantara kedua komunitas. Dua negeri yang sama agamanya sekalipun terpisahkan dalam jarak geografis yang jauh, secara sosio-psikologis terasa lebih dekat, ketimbang 2 negeri yang dekat secara geografis tetapi berbeda agamanya. Dalam situasi seperti ini agama kerap kali dapat menimbulkan kekerasan diantara pemeluk agama yang berbeda (Koritelu, 2009). Agama dapat

menjadi solusi tetapi sebaliknya dapat melahirkan konflik jika isu-isu penting dihubungkan dengan agama.

- c. **Isue Ekonomi.** Hasil wawancara terhadap 8 orang informan kunci serta hasil observasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung menunjukkan bahwa issue ekonomi seringkali menjadi pemicu konflik maupun *violence* (kekerasan) yang melibatkan anggota masyarakat kedua negeri. Spesifikasi issue ekonomi yang dimaksudkan di sini tetap berhubungan erat dengan masalah batas tanah antara kedua negeri. Hubungan yang dimaksudkan di sini terkait dengan lokasi pembuatan kebun baru. Dalam pengakuan semua informan dapat disimpulkan bahwa setiap tahun frekwensi dan intensitas konflik atau *violence* secara kuantitatif dapat terjadi minimal 2 kali. Yakni pada waktu pembukaan lahan kebun baru, dan pada waktu tiba musim panen. Sebagaimana kutipan sebuah wawancara dengan salah seorang informan: “*oh kalo di Saparua ini samua orang tahu kalo tiap musim bikinkabongbarudengmusimambe hasil biasa 2 negeri ini pasti baku hantam, su seng bisa pele lai*” (wawancara dengan Bpk. Idris Tutupoho, Kaur Pemerintahan Negeri Kulur tanggal 3 agustus 2009). Artinya: di Saparua semua orang sudah tahu jika negeri Kulur dan Porto selalu terlibat konflik atau kekekerasan tiap kali pembuatan kebun baru serta saat panen. Konflik pasti terjadi dan tak ada yang menghalanginya.

- d. **Issu Agama.**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa konfigurasi penduduk yang menempati kedua negeri dikarakterisasi oleh perbedaan yang sangat tajam, yakni 100% penduduk yang mendiami negeri Kulur Saparua Maluku Tengah beragama Islam. Sebaliknya 100% penduduk yang



mendiami negeri Porto Saparua Maluku Tengah beragama Kristen Protestan. Situasi kondisi demikian menjadi sebuah cerminan dari *collectivity experience* (pengalaman kolektif) masa lalu orang-orang di kawasan Ambon Lease, dimana sejak kedatangan kolonialisme Belanda, orang-orang yang mendiami kawasan ini terus dikondisikan untuk berkonflik dengan karakter konflik agama.

Belanda merasa bahwa pola tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting untuk untuk terus melanggengkan politik *divide et impera*, agar penduduk lokal terus ada dalam keterpurukan dan kemudian menjadi mudah dijajah. Bahkan pola ini dianggap sukses karena hubungan kekerabatan apakah dalam konteks gandong yang bernuansa kerabat bahkan bisa dipisahkan Belanda menjadi dua negeri dari asal satu negeri. Dimana pecahan kedua negeri itu didasarkan pada penganut agama yang berbeda. Bisa dicatat dalam pengalaman sejarah hingga kini, negeri Siri Sori di Saparua ada dua, Siri Sori Islam dan Siri Sori Kristen.

Di pulau Ambon, ada Hila Kristen dan Hila Islam, ada juga Tengah-Tengah Kristen dan Islam. Semua bukti sejarah tersebut bahkan menjadi sebuah memori kolektif yang sulit terlupakan. Bahkan secara psikologis kemudian muncul berbagai sentiment yang dalam istilah atau terminology lokal disebut sebagai konstruksi katoran (kami) dan kamorang (Kalian/kamu). Katorang itu berkonotasi sebagai suatu kesatuan masyarakat pada agama yang sama. Kondisi ini memungkinkan munculnya social prejudice (prasangka social yang buruk) selalu tercipta dalam keseharian hidup bersama ketika sebuah kejadian/peristiwa terjadi.

Dalam konteks ini dapat dijelaskan bahwa baik isu agama maupun persoalan kebutuhan ekonomi (hasil kebun untuk makan) dalam pandangan orang Kulur kian mendorong orang Porto membuka areal sebagai tempat kebun baru melewati dan memasuki batas tanah milik orang Kulur. Itulah sebabnya orang kulur akan menentang habis-habisan sekalipun upaya tersebut selalu berakhir dengan kontak fisik (*conflict-violence*). Dan ternyata jika masalah ini tidak terselesaikan secara tuntas maka akan berlanjut juga saat musim panen tiba. Suatu hal menarik dalam temuan studi ini ialah: sekalipun dalam kontak fisik yang pertama saat awal pembuatan kebun baru tidak dapat secara tuntas terselesaikan, tetapi ada semangat kebersamaan untuk tidak merusak (mencabut) tanaman yang sudah tumbuh dalam lokasi kebun yang menjadi objek sengketa. Sehingga kemudian sampai pada saat musim panen konflik akan kembali terjadi. Ketika ditanya: apakah cara itu ditempuh dalam rangka bagi hasil antara 2 negeri yang berkonflik?, 8 informan mengatakan tidak seperti itu. Sebab yang terjadi setelah konflikpun ada di wilayah petuanan desa Kulur. Ada semacam *cultural spirit* yang dipegang dan dihargai secara bersama oleh masyarakat kedua negeri sekalipun sering terlibat konflik.

Spirit itulah yang juga mendorong orang Kulur untuk tidak merusak tanaman yang sudah tumbuh. Alasan mereka karena yang berulah adalah manusianya bukan tanaman sehingga yang perlu diselesaikan adalah dengan manusianya bukan merusak tanaman. Disamping itu sehebat apapun konflik yang terjadi orang Kulur tetap merasa bahwa orang Porto adalah saudara



mereka yang tetap dibutuhkan dalam kehidupan di masa-masa yang akan datang.

## 2. Sejarah Konflik Orang Kulur dan Porto Saparua Maluku Tengah

Kebanyakan orang Saparua terutama tokoh-tokoh adatnya mengakui jika nenek moyang mereka berasal dari bangsa Alifuru dan jauh sebelum masa kolonial mereka sudah turun dari Nunusaku untuk menempati wilayah tersebut. Dalam keterangan seorang tokoh masyarakat desa Kulur yang dijadikan informan mengakui bahwa: pada waktu kedatangan nenek moyang mereka turun dari Nunusaku mereka tidak menempati satu wilayah saja, tetapi menempati beberapa kawasan di Ambon – Lease. Sebagian kutipan wawancara tersebut antara lain:

*“samua orang di Saparua, pulau Haruku, Nusalaut termasuk pulau Ambon itu samua dari Orang Alifuru...dong samua turun dari Nunusaku, sulama sebelum orang Belanda deng Portogis datang rampas rampah-rampah di sini...”* Pandangan tersebut memberikan sebuah kejelasan bahwa sebenarnya ada pengakuan tentang tempat asal usul yang sama, sekalipun orang Ambon-Lease menempati wilayah yang berbeda. Bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama.

Konflik orang Kulur dan Porto menurut sejarahnya sudah dimulai sejak jaman dulu. Dan yang masih segar dalam ingatan mereka adalah konflik-konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia antara lain sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 2.** Sejarah konflik (kontak fisik) Orang Kulur Dan Orang Porto

| No. | Tahun     | Identifikasi Faktor Penyebab                                                                                                                                   | Jumlah Korban Jiwa (pihak Kulur)                                 | Keterangan / Tempat                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1946      | Soal ketersinggungan tentang masalah agama yang sudah dimulai sejak jaman Belanda di Saparua                                                                   | Tidak diingat dengan tepat                                       | Wilayah negeri Kulur sekitar Lokasi Air Putilesi                                                                                                                                      |
| 2   | 1953      | Batas tanah                                                                                                                                                    | 17 orang                                                         | Pantai depan negeri Kulur                                                                                                                                                             |
| 3   | 1961      | Batas tanah                                                                                                                                                    | 6 orang                                                          | Sebelah Air (antara Dusun Pia dan negeri Kulur                                                                                                                                        |
| 4   | 1963      | Batas Tanah                                                                                                                                                    | Tidak dipastikan/Tidak diingat                                   | Wilayah negeri Kulur                                                                                                                                                                  |
| 5   | 1973      | Batas Tanah                                                                                                                                                    | 4 orang                                                          | Dari wilayah Negeri Kulur ke Polres Pulau Ambon PP Lease dan ke Pengadilan negeri Ambon                                                                                               |
| 6   | 1980-1990 | Batas Tanah                                                                                                                                                    | Tidak ada korban Jiwa yang meninggal (hanya 3 orang luka ringan) | Lokasi negeri Kulur                                                                                                                                                                   |
| 7   | 1999-2003 | Issue agama yang tidak hanya melibatkan kedua negeri saja, tetapi hampir semua penduduk di Saparua dan daerah sekitarnya, bahkan konflik secara umum di Maluku | 19 orang Kulur Meninggal Dunia                                   | Lokasi konflik terjadi di negeri Iha, Batas Siri Sori dan Siri Sori Amalatu. Serta batas dengan negeri Ulat dan batas negeri Kulur dan dusun Pia serta batas petuanan Kulur dan Porto |
| 8   | 2004-2009 | Issue penyerobotan tanah untuk lahan kebun baru                                                                                                                | Hanya korban luka-ringan                                         | Di wilayah petuanan desa Kulur terutama di sebelah air (terletak antara negeri kulur dan dusun Pia desa Siri Sori Amalatu)                                                            |

Sumber: Data Hasil Penelitian

Dalam Catatan hasil penelitian yang diperoleh data bahwa tingkat intensitas dan frekwensi konflik antara kedua negeri paling sering terjadi antara tahun 2004 hingga 2009. Bahkan dalam satu tahun kedua negeri bisa mengalami 2 kali konflik, yakni pada saat musim tanam atau ketika membuka lahan untuk kebun baru (*pemerik kebon baru*) dan pada waktu masa panen tiba. Artinya bahwa dari issue penyerobotan tanah dari negeri Porto ke Tanah petuanan milik negeri Kulur, merupakan sebuah issue yang sangat penting dan sangat rentang dalam memunculkan konflik antara kedua negeri. Itulah sebabnya sejarah konflik kedua negeri lebih banyak dilatarbelakangi oleh isu yang berhubungan dengan batas tanah atau penyerobotan tanah yang terjadi diantara kedua negeri. Kondisi konflik yang terus-menerus secara logis memunculkan adanya rasa tidak aman terutama dalam kehidupan orang Kulur. Salah satu alasan paling mendasar adalah karena lokasi dan obyek sengketa yang dikonflikkan antara orang Kulur dan Porto selalu lebih dekat dengan desa Kulur dan jauh dari desa Porto. Itulah sebabnya setiap waktu orang Kulur diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang kurang tenang dan merasa terancam.

Atas dasar itulah hampir semua informan yang diwawancarai menagaku jika ada orang Kulur yang berhasil di daerah perantauan maka mereka cenderung membangun rumah bagus dan menetap di tempat rantau ketimbang harus kembali dan menetap di negeri Kulur yang setiap waktu berada dalam keadaan yang terus terancam. Itulah sebabnya perkembangan desa Kulur dari waktu ke waktu terkesan tidak ada kemajuan atau perubahan berarti, baik jumlah rumah maupun kualitas bangunan rumah yang dibangun di negeri Kulur.

Dari gambaran table tentang sejarah konflik di atas maka dengan jelas terlihat bahwa factor penyebab paling dominan adalah penyerobotan

batas tanah, terutama tanah petuanan negeri Kulur. Orang Kulur berpendapat bahwa ternyata naluri bertani Orang Porto termasuk sangat luar biasa sehingga jarak tempuh negeri mereka dengan lokasi tempat lading dan kebun cukup jauh, bahkan memasuki wilayah petuanan negeri Kulur (daerah sebelah air). Bahwa penentuan lokasi untuk membuka areal hutan sebagai tempat bercocok tanam dari orang Porto sudah melewati batas petuanan negeri mereka dan sudah setiap tahun memasuki wilayah petuanan negeri Porto. Dalam pandangan orang Kulur inilah penyebab kelanggengan konflik tersebut. Mereka juga mengakui kalau hal ini bukanlah satu-satunya penyebab, sebab ada juga penyebab lainnya. Karena itu sekalipun mereka memiliki semangat untuk tetap bisa bersatu tetapi mereka harus berkonflik demi mempertahankan apa yang menjadi milik pusaka mereka. Mereka juga sangat menyayangkan peran pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten yang tidak pernah bisa dan tidak pernah serius menyelesaikan konflik batas tanah tersebut. Karena itu orang Kulur tidak bermaksud untuk berkonflik, tetapi mereka hanya mau menunjukkan keberadaan mereka sebagai satu negeri adat yang sudah menghargai batas petuanan orang lain sehingga negeri lain atau orang lainpun harus menghargai dan menghormati batas petuanan negeri mereka.

### **3. *Heka Hiti Heka Leha*, Sebagai *Cultural Spirit* Yang Menjadi Simbol Kohesitas Sosial Orang Kulur dan Orang Porto Di Tengah Konflik**

Intensitas konflik orang Kulur dan orang Porto sebagaimana dijelaskan di atas cukup tinggi, karena terjadi dalam batas minimal 2 kali dalam setahun. Tetapi realitas ini sangat menarik terkait dengan keberadaan kedua komunitas jika mereka sama-sama bertemu di tempat netral. Lokasi Pasar, terminal angkutan kota Saparua, kantor

camat Saparua, bahkan kota Ambon dan tempat-tempat lain yang memungkinkan masyarakat pada kedua komunitas sering bertemu. Secara sosio-psikologis setiap kejadian konflik terutama yang terkait dengan kontak fisik di lokasi kejadian ternyata tidak berpengaruh atau terkesan sirna, ketika kedua komunitas bertemu di tempat netral seperti pasar atau tempat lain sebagaimana dikemukakan di atas. Beberapa hasil wawancara dengan informan terkait dengan situasi pasca konflik di lokasi kejadian, manakala kedua komunitas bertemu di tempat lain?

- 1) *“iyo, memang katong deng orang Porto itu laen, sebab kalo katong baku-dapa, biar baru habis bakalai lai, katong baku sayang malah sering kalo baku dapa katong sering baku polo” ... (wawancara dengan Fadlun Tuhulele, tanggal 4 agustus 2009).*
- 2) *“memang orang seng bisa rasa sama deng yang katong rasa, sebab bagini bapa: kalo katorang ketemu biasa saja, mala orang lain katong acuh deng dong tapi kalo orang Kulur deng orang porto pasti baku tagor, biar baru habis bakalai lai. Memang subiasa bagitu pa”... (Wawancara dengan Ibrahim syauta, Sekdes negeri Kulur pada tanggal 4 agustus 2009).*
- 3) *“beta pung pengalaman waktu kejadian taong 2004 di sebelah air yang kalo dari Pia datang, akan ada di sebelah kanan jalan,...akan lewat 2 hari beta musti pi urus surat keterangan di kantor camat... waktu itu banya yang ada urusan juga, kebetulan pegawai itu orang dari Porto... beta takajo skali karena waktu dia lia beta pertama kali, langsung dia bataria: e Kulur e, ose urus apa? Lalu beta jawab dia tentang beta pung urusan, maka dia langsung kasi tinggal dia pung kerja deng orang banya yang ada sedang antri lalu dia datang par urus beta pung barang-barang sampe siap skali baru dia bikin dia pung karja kombali...padahal*

*2 hari lalu dua kampung ada baku hantam ancor-ancor”... (wawancara dengan Hamad Tuahuns, Kaur Kemasyarakatan negeri Kulur pada tanggal 3 agustus 2009).*

Arti dari 3 diantara 8 orang informan kunci yang memberi keterangan tentang hal itu sebagaimana dikutip di atas sebagai berikut:

- 1) Iya memang ada pengecualian antara kami dan orang Porto, sebab ketika kami bertemu, sekalipun baru saja berkonflik, kami tetap saling menyayangi, malah sering kami saling berangkuhan ketika kami bertemu.
- 2) Memang orang lain tidak dapat merasakan seperti yang kami (orang Kulur dan orang Porto) rasakan, sebab begini pa: jika kami bertemu, ya biasa saja, malah orang lain kami cuek/abaikan, tetapi jika bertemu antara orang kulur dan orang Porto pasti bertegur sapa, sekalipun baru saja berkonflik. Memang sudah biasa begitu.
- 3) “Pengalaman saya waktu peristiwa konflik tahun 2004, tepatnya di sebelah air, (dari arah dusun Pia desa Siri Sori Amalatu sebelah kanan jalan), 2 hari setelah konflik, saya harus ke kantor camat Saparua untuk mengurus satu surat keterangan, setiba di kantor camat begitu banyak orang berurusan juga, kebetulan ada pegawai camat yang berasal dari negeri Porto... saya sangat terkejut ketika pertama kali melihat dia. Dia (pegawai asal Porto) langsung berteriak: e Kulur eeee, apa yang sedang kamu urus? Secara spontan juga saya menjelaskan urusan saya, maka dia segera meninggalkan segara urusannya bersama orang lain yang sedang antri. Bersama saya dia kemudian membantu mengurus semua keperluan saya hingga tuntas hari itu juga, setelah itu baru dia kembali bekerja... padahal 2 hari lalu warga masyarakat pada 2 negeri sedang terlibat konflik...

Realitas objektif yang tergambar dari data hasil wawancara di atas memberi

satu penjelasan rasional yang tidak mudah dimengerti, sebab bagaimana mungkin orang dari 2 negeri yang baru saja berkonflik kemudian bisa kembali berangkulan, bertegur sapa bahkan saling membantu jika bertemu di sebuah tempat netral (tempat yang bukan menjadi objek sengketa, bukan di salah satu tempat dari ke 2 desa? Kekuatan pengikat apa yang sebenarnya menjadi perekat kedua komunitas sehingga usai kontak fisik mereka tetap bisa berdamai (bertegur sapa, berangkulan dan bahkan saling membantu)?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan rasional tersebut memang tidak mudah. Namun kemudian terhadap semua informan yang diwawancarai mereka menyebut satu kalimat dalam bahasa lokal, yakni: "*Heka Hiti Heka Leha*". Informan umumnya mempunyai kesulitan untuk mengartikan atau memaknai kalimat ini dalam bahasa Indonesia. Kesulitan ini kemudian mereka siasati dengan menganjurkan agar peneliti dapat mewawancarai bekas kepala desa Porto yakni bapak Apono. Dengan bapak John Apono penulis bertemu dan melakukan wawancara di kampung Tuhaha Saparua pada tanggal 17 November 2009. Dalam kesempatan itu bpk. Apono mengatakan bahwa: memang benar ada sebuah semangat kebersamaan antara kedua negeri yang disebut: *Heka Hiti Heka Leha* yang artinya: "*jaga bae-bae atau pegang bae-bae jang sampe talapas lai*". Lebih lanjut dikatakan bahwa arti konsep itu ialah: "*kalo subakalai, jaga deng poloh kuat-kuat supaya jang sampai tapisah atau talapas*". Pengertian sederhana ini memberikan semacam symbol bahwa ada sebuah semangat yang mengikat masyarakat dari kedua negeri untuk tetap menjalin persaudaraan sekalipun banyak permasalahan dan atau konflik sedang terjadi diantara kedua negeri.

Hal tersebut secara rasional dapat dijelaskan bahwa: ada kesadaran bersama bahwa sekalipun banyak kepentingan dapat membuat konflik antar orang atau kelompok (Wolff, 1964). diantara kedua negeri. Itulah sebabnya sekalipun konflik atau bahkan kekerasan terjadi dalam upaya memperebutkan kepentingan tersebut tetapi kesadaran bahwa persekutuan dan persaudaraan harus tetap dipandang sebagai sesuatu yang berharga dalam kehidupan kini dan masa depan. Itulah sebabnya intensitas konflik yang terjadi diantara orang Kulur dan orang Porto menurut pandangan orang kulur: sekalipun berkonflik tetapi semangat "*heka hiti heka leha*" harus tetap dipegang teguh karena ada kesadaran bahwa: kedua negeri berasal dari satu tempat asal. Sebagaimana dikatakan seorang informan: "*...mau bilang apa lai, katong bakalai tapi sebenarnya katong ini samua dari alifuru lai to...batul bapa orang Lease ini samua dari Alifuru jua, jadi tar bisa balari dari itu...*"(wawancara dengan Bpk. Hamad Tuahuns, di Kulur tgl, 3 agustus 2009).

Atas dasar itu dapat penulis simpulkan bahwa kekuatan perekat ditengah realitas konflik baik antar individu maupun antar kelompok dari kedua negeri ini memberikan semacam kejelasan bahwa semangat budaya seperti *heka hiti heka leha*, merupakan sebuah refleksi kesadaran terbesar mereka bahwa: sesama orang Lease adalah orang saudara, karena mereka sama-sama berasal dari Alifuru (*sebutan untuk orang dari Seram dengan mentalitas pemberani dan tangguh dalam menyusuri semua wilayah pulau Seram maupun tempat lain di luar pulau Seram*). Mereka adalah satu kesatuan orang saudara yang harus tetap bersatu, dan tidak boleh terpecah-pecah walaupun banyak hal berbeda yang ada diantara mereka. Sebab sesungguhnya



mereka adalah satu kesatuan yang berasal dari tempat yang sama. Spirit seperti ini menjadi penting ketika peran negara menjadi sangat minimal untuk mencegah dan menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi (Prayogo, 2006). Mekanisme lokal dalam penyelesaian konflik menjadi sangat penting untuk menutupi kelemahan negara dalam penyelesaian berbagai konflik.

#### **4. Praktek Hubungan Sosial Karena Spirit Budaya *Heka Hiti Heka Leha* Dalam kehidupan Orang Kulur Dan Porto Saparua Maluku Tengah**

Pengalaman konflik orang Kulur dan Porto menyebabkan banyak pihak yang kuatir tentang situasi keamanan pada kedua negeri di pulau Saparua tersebut. Karena hampir setiap tahun konflik bahkan kekerasan (*violence*) terjadi antar kedua kelompok masyarakat yang kemudian melibatkan masyarakat secara keseluruhan pada kedua negeri. Yang menarik dari pengalaman konflik bahkan kekerasan yang terjadi antar kedua negeri adalah intensitas konflik serta faktor penyebabnya yang cenderung konstan dan tetap.

Setiap kenyataan dan ketegangan yang terjadi antara kedua negeri tidak lalu mengurangi intensitas interaksi serta hubungan sosial kedua negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan pengikat hubungan sosial itu terdapat pada semangat budaya yang diakui sebagai kepemilikan bersama, yakni *Heka Hiti Heka Leha*. Orang kulur memahaminya sebagai: *Polo dan pegang bae-bai supaya jang talapas...* yang artinya: (Dekap dan pegang dengan erat supaya jangan terlepas). Pengertian tersebut merupakan hasil pemaknaan atas sebuah kisah cinta yang terjalin antara nenek moyang kedua negeri yang diakui sudah sejak dahulu kala

sudah terjalin dalam badai pertentangan dan konflik sebelum kehadiran kolonial Belanda di Saparua.

Ketika terjadi pertumpahan darah karena peperangan perebutan lahan dalam tradisi masyarakat Nomaden dulu, dua orang sahabat tersebut tetap bisa hidup bersama dengan rukun dan damai mereka saling melengkapi dan membantu sekalipun di sekeliling mereka penuh dengan ketegangan dan pertumpahan darah.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa: menurut pandangan orang Kulur; spirit budaya ini sudah mulai dilupakan terutama oleh generasi muda, karena lemah dan mulai merosotnya budaya tutur yang terjadi antar generasi. Bagi generasi tua yang mendengar cerita itu dari orang tua mereka, masih tersimpan dengan baik dalam ingatan mereka, tetapi bagi generasi muda sekarang, mereka lebih tertarik memahami dan mengerti berbagai kisah dan cerita yang tersaji melalui media (Koran, TV, DVD, maupun internet). Sepertinya ada nilai budaya dan pengetahuan masa lalu yang terputus. Menurut para informan yang diwawancarai di Kulur, pengetahuan generasi muda di negeri Porto tentang hal itu makin hilang karena baik Porto maupun negeri Sarani (kampong “negeri” Kristen lain) mulai kehilangan bahasa asli. Artinya hanya beberapa orang tua saja yang mengetahui hal ini karena menguasai bahasa asli. Sehingga kebanyakan golongan muda mudi sudah tidak bisa berbahasa daerah asli dan telah kehilangan banyak kesempatan untuk memahami berbagai warisan cerita berharga yang diwariskan kepada generasi penerus melalui budaya tutur.

Meskipun demikian dari beberapa orang tua yang mengetahui secara persis tentang spirit *Heka Hiti Heka Leha* baik dari pihak



orang Kulur maupun orang Porto, diakui oleh para informan bahwa mereka sangat serius mengupayakan agar spirit ini tetap menuansai hubungan sosial antara kedua negeri. Keseriusan itu ditunjukkan melalui proses sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh adat kepada masyarakat tentang pentingnya damai antar kedua negeri karena mereka secara kultural diikat dalam sumpah kedua moyang mereka. Pola sosialisasi yang dilakukan terutama terhadap anggota masyarakat kedua negeri yang berhubungan dengan peran-peran publik yang mereka jalani dalam masyarakat.

Informan menjelaskan bahwa: jika ada guru, Camat, pegawai camat dan sebagainya yang berasal dari negeri Porto atau sebaliknya Kulur, mereka dimintakan oleh para tokoh adat untuk memprioritaskan dan mendahulukan urusan dari kedua negeri. Misalnya jika pegawai camatnya adalah orang Porto, maka urusan orang Kulur akan diprioritaskan, demikian sebaliknya, sekalipun urusan dari negeri lain masih tertumpuk. Kondisi ini terjadi bukan saja saat damai. Bahkan saat konflik sedang merebakpun pola pelayanan dengan spirit *heka hiti heka Leha* ini tetap dipegang teguh.

Diakui bahwa dalam situasi konflik yang penuh ketegangan ataupun dalam situasi damai pola ini tetap terjaga, sehingga sekalipun konflik sedang terjadi di tempat lain tetapi kondisi hubungan ini tetap terjaga dan berlangsung. *Heka hiti heka Leha* membuat tidak ada dendam, tidak ada perluasan areal dan wilayah konflik dari satu tempat ke tempat lainnya. *Heka hiti Heka leha* bahkan menciptakan tanggung jawab untuk saling melindungi antar kedua negeri. Bahkan diakui informan bahwa *Heka hiti Heka Leha* lebih dari sekedar hubungan

Pela yang terjalin antar kedua negeri adat di Lease tersebut.

Heka Hiti Heka Leha menjadi semacam katub pengaman yang cepat meredakan konflik bahkan tensi dan dinamika konflik dapat didinamisir ke arah yang jauh lebih sederhana serta menghilangkan kecurigaan. Heka hiti Heka Leha membuat kebekuan interaksi dan komunikasi terpecahkan. Heka Hiti Heka Leha membuat kebencian berubah menjadi belas kasihan serta hasrat untuk menolong. Yang patut dijelaskan lagi; ternyata spiritnya mampu meniadakan dendam dan hasrat generasi muda kedua negeri untuk saling mencederai di luar kedua negeri maupun di luar Saparua. Heka Hiti Heka Leha membuat semakin jauh orang Kulur dan Porto merantau ke luar Saparua, semakin kompak dan penuh solidaritas kedua negeri terjalin secara lebih intensif.

## **5. Heka Hiti Heka Leha Menjadi Sebuah Cara Mengatasi Kemiskinan.**

Berdasarkan Data penelitian ini, terdapat satu kenyataan yang tidak logis dan belum tentu dapat ditemukan di tempat lain. Hal menarik tersebut meliputi:

- a. Antara orang Kulur dan Orang Porto, sehabis konflik biasanya akan saling menolong dalam segala kebutuhan dan kepentingan. Baik pada desa atau negeri masing-masing maupun di wilayah pusat kota kecamatan di kota Saparua.

Seorang Informan yang diwawancarai mengatakan: “*memang katong bakalai, tapi sebagai orang Kulur katorang seng mungkin liat basudara orang Porto kekurangan makanan apalagi sampi mati lapar...katorang pasti bantu dan itu sudah biasa, tanpa dong minta tolong katorang langsung bantu, dimana katorang tahu saja, Dong juga biasanya bantu katorang juga*

*tanpa katorang minta, dimana dong tahu saja.”* keterangan/ucapan informan tersebut dapat penulis translate ke Bahasa Indonesia sebagai berikut: *“Memang kami berkonflik/berkelahi tetapi sebagai orang Kulur kami tidak mungkin membiarkan saudara kami orang Porto kekuarangan makanan apalagi sampai mati kelaparan, kami pasti membantu dan hal itu sudah biasa, tanpa mereka minta tolong, kami langsung bantu pada saat kami mengetahui masalah mereka. Mereka juga biasanya membantu kami pada saat dimana mereka mengetahui kalau kami mempunyai masalah, sekalipun konflik baru saja usai”*

Paparan pandangan informan di atas menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bukanlah alasan untuk kedua negeri saling menolong untuk menyelesaikan persoalan masing-masing. Kata Mati Lapar (kelaparan) adalah satu symbol dari rumitnya persoalan yang dihadapi baik oleh Porto maupun Kulur. Dan sebagaimana Informan katakana memang mereka akan selalu saling membantu sekalipun konflik baru saja terjadi diantara mereka.

- b. Tidak ada dendam sama sekali diantara keduanya masyarakat tersebut setelah mereka berkonflik. Buktinya mereka bias saling membantu dalam semua bentuk masalah yang mereka hadapi masing-masing.
- c. Baik pin satu maupun point dua bias terjadi demikian karena mereka memiliki yang namanya budaya Heka Hiti Heka Leha. Dimana setelah mereka terlanjur berkelahi maka mereka langsung merasa saling membutuhkan dan mereka merasa harus segera memberikan bantuan kepada negeri Kulur atau sebaliknya negeri Porto. Karena itu kemiskinan akibat konflik tidak akan mungkin terjadi.

- d. Kekuatan budaya inilah yang menjadi bukti bahwa konflik yang terjadi tidak pernah berimbas pada kenyataan dimana kedua masyarakat atau negeri saling menyerang dan membakar desa atau negeri masing-masing. Mereka hanya berkelahi di wilayah konflik seputar perbatasan tanah dan tidak ada keinginan untuk saling menyerang dan membumi-hanguskan negeri atau desa masing-masing. Atas dasar itulah maka kekuatan budaya ini mampu menjadi sebuah factor penentu yang menghindari kedua masyarakat dari kenyataan dimana mereka menjadi miskin karena berkonflik. Justru sebaliknya kedua masyarakat tetap bias makan dan beraktifitas dengan bebas sekalipun melintasi wilayah desa dan petuanan masing-masing. Jadi sangat berbeda dengan konflik antara dua negeri atau kelompok masyarakat ditempat lain. Dimana setelah berkonflik tentu saja mereka akan saling curiga dan waspada terhadap ancaman kelompok lain. Karenanya mereka tertekan dan menjadi tidak bebas beraktifitas secara normal. Kenyataan ini sesungguhnya menjadi terbalik dalam konteks konflik antara orang Kulur dan orang Porto. Kekuatan penentu dank unci dari semua itu adalah budaya local kedua negeri yang disebut Heka Hiti Heka Leha.

## KESIMPULAN

Konflik sebagaimana diketahui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Terkait dengan peristiwa konflik yang secara terus menerus terjadi antara orang Porto dan orang kulur menurut pandangan orang Kulur memuat beberapa kesimpulan penting yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Sejarah kehidupan orang kulur dan orang Porto hingga saat ini diakui sebagai bagian dari proses peradaban kemanusiaan yang

telah, sedang dan akan terus terjadi. Realitas konflik yang secara dominan dinuansai oleh issue penyerobotan tanah telah membawa sebuah babak baru dalam perkembangan peradaban kemanusiaan di negeri Kulur. Orang-orang Kulur mengakui jika mereka menjadi bagian dari satu komunitas yang tetap eksis namun tidak dalam artian perkembangan negeri mereka secara fisik.

2. Ada keengganan dalam pandangan orang Kulur untuk terus berjuang membangun negerinya untuk maju, karena ada sebuah model pemahaman bahwa secara ekonomi mereka merasa lebih baik menghasilkan uang dalam jumlah banyak dari tanah kelahirannya di Kulur dalam rangka membangun SDM ketimbang membangun negerinya. Alasannya karena perang atau konflik yang sejak masa lalu terjadi antara Kulur dan Porto akan terus terjadi. Perasaan tidak tenang, merasa terancam oleh karena sewaktu-waktu ketenangan mereka direnggut melalui peristiwa konflik bahkan *Violence* (kekerasan) yang sudah terjadi sejak dulu. Bahkan intensitas dan frekwensinya kian meningkat setelah tahun 2003 dengan issue utama adalah: masalah ekonomi yang berbasis pada penyerobotan tanah.
3. Konflik yang terjadi terus-menerus antara orang Kulur dan Porto memiliki keunikan sendiri, yakni secara kultural kedua negeri mempunyai semangat yang sama untuk mempertahankan solidaritas diantara kedua negeri. Semangat budaya ini dalam sebutan aslinya disebut: "*Heka Hiti Heka Leha*". Konsep tersebut merupakan sebuah semangat persaudaraan untuk saling melindungi atau menolong jika mereka berada di tempat lain yang bukan termasuk wilayah negeri mereka. Termasuk ketika mereka sedang berada di daerah perantauan. Itulah sebabnya konflik yang terjadi antar kedua negeri tidak berpengaruh bagi keberadaan mereka di luar negeri mereka.

4. Issue Penyebab konflik paling dominan antara Kulur dan Porto lebih banyak dinuansai oleh issue penyerobotan tanah. Dan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terutama pasca konflik Ambon Maluku (1999-2003) intensitas konflik cukup meningkat hampir 2x dalam setahun terjadi antara kedua negeri terutama di wilayah petuanan negeri Kulur.

## SARAN

Berdasarkan beberapa butir kesimpulan di atas maka ada beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan melalui tulisan ini antara lain:

1. Budaya lokal seperti *Heka Hiti Heka Leha* terbukti dapat menjadi sebuah solusi untuk bisa mempercepat harmonisasi hubungan kedua negeri pasca konflik. Sehingga dibutuhkan sebuah mekanisme untuk terus mengembangkan budaya tersebut dalam konteks kehidupan masa kini.
2. Memelihara dan meningkatkan fungsi sentral budaya local tersebut sama artinya dengan mengupayakan sebuah proses rekonsiliasi secara parmanen pada setiap kejadian konflik. Hal ini terbukti dari skala prioritas yang dilakukan kedua masyarakat pasca konflik untuk saling mendahului dalam menopang dan menolong sesama mereka saat membutuhkan.
3. Pemerintah pada aras negeri, Kecamatan dan Kabupaten beserta stakeholders lainnya diharapkan tetap serius memperhatikan hal tersebut sebagai satu prioritas untuk mengembangkan masyarakat tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah model penanganan konflik di negeri lainnya.
4. Sebagai Rekomendasi Untuk menutup tulisan ini, menurut penulis sudah saat proses pelebagaan Spirit heka-hiti-heka leha dilembagakan secara radikal dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam tatanan kehidupan bersama secara

formal. Pemerintahan kedua negeri sudah sepatutnya melakukan sosialisasi agar kehidupan masyarakat kedua negeri tidak sekedar mengingat tetapi harus terus mempraktekkan nilai pemersatu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Praktek tersebut dimulai dari hal-hal yang bersifat informal hingga yang bersifat formal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui kesempatan ini iijinkan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pimpinan kedua negeri Kulur dan Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah serta semua informan yang sudah memberikan bantuan dan dukugannya, sehingga semua proses penelitian dapat terselesaikan. Selain itu penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dimulai dari proses penelitian hingga perampungan hasil penelitian melalui jurnal ini terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan yang dimiliki sehingga setiap kepedulian untuk memberikan saran dan masukan sangatlah penting demi menyempurnakan hasil penelitian ini baik bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk menemukan berbagai solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Denzin, K, N., Loncoln, S, Y. (1994). *Handbook Of Qualitative Research*. London-New delhi: Sage Publications.
- Fisher, Simon, & Smith, R. (2000). *Working With Conflict: skill and strategies for action*. Brimingham Zed Books responding RTC
- Koritelu, P. (2009). *Agama, Politik Dan Kekerasan dalam Masyarakat*. Diterbitkan Oleh: STAKPN Ambon (Jurnal Ilmiah Tangkoleh Putai, Volume No.1, Januari 2009).
- Koritelu, P. (2009). *Agama Masa Depan: Proses Intersubjektif Antar Manusia Dan Sang Khalik*". Diterbitkan oleh: Inopstek Jurnal Inovasi Pembelajaran Sains Dan Teknologi . Volume 2, Nomor 3, September 2009 (ISSN 1978-9572). Hal. 81-87
- Koritelu, P. (2011). *Kampung Radjawali dan Konflik masyarakat Di Banda Neira*. Diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Logika-Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, volume 8 nomor: 2 November tahun 2011, (ISSN: 1693-9018). Hal. 17-25.
- Kriesberg, L. (1998). *Constructive Conflict: from escalation to resolution*. Rowman and Littlefield.
- Marshall, C., & Rosman, B,G (1989). *Designing Qualitative Research*. London-New Delhi:Sage Publications.
- Miles, B, M., & Huberman, M. (1992). *Analisa Data Kualitatif (buku sumber tentang metoda-metoda baru)*. Jakarta UI Press.
- Prayogo, D. (2006). *Dinamika, Sebab dan Peran negara Dalam Konflik Antar korporasi Dengan Komunitas Lokal Dalam Jurnal masyarakat (jurnal Sosiologi UI) Edisi Pembangunan Sosial dan Lingkungan Vol.VIII. No.2. Des 2006. Hal 34-67*.
- Stewart, M, H. (2005). *The New Imperial Order: indegenious responses to Globalization*. London, Zed Books: Huia Publishers.
- Turner, H, J. (1997). *The Structure Of Sociological Theory (sixth edition)*. Boston: Wadsworth Publishing Company.
- Wolff, H. K. (1964). *The Sociology Of Georg Simmel*. New York. The Free Press.



## PEDOMAN BAGI PENULIS

Redaksi menerima kiriman artikel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Artikel berupa hasil penelitian lapangan, bidang kesejahteraan sosial maksimal 3 tahun terakhir, dan belum pernah dipublikasikan oleh media lain.
2. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12 poin, 1,5 spasi, 15 - 25 halaman (A4), dan diserahkan dalam bentuk *soft copy* ke [www.ejournal.kemsos.go.id](http://www.ejournal.kemsos.go.id)
3. Sistematika artikel disusun tanpa penomoran sub judul (lihat *journal template*), dengan urutan sebagai berikut:
  - a). Judul (huruf besar) dan nama penulis (tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel), disertai lembaga, alamat dan email penulis. Jika penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan adalah nama penulis utama, nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah (dengan melampirkan identitas penulis);
  - b). Abstrak terdiri dari 150 - 200 kata, huruf Times New Roman dalam 1 (satu) paragraf berisi latar belakang (1-2 kalimat), tujuan, metode, hasil penelitian, dan kata kunci (*keywords*) maksimal 3 kata.
  - c). Pendahuluan (huruf besar); berisi narasi tentang latar belakang, tinjauan daftar pustaka, tujuan penelitian, dan metode;
  - d). Hasil dan Pembahasan (huruf besar);
  - e). Kesimpulan;
  - f). Saran;
  - g). Ucapan Terima Kasih;
  - h). Daftar Pustaka (huruf besar): Berasal dari Jurnal (diutamakan Jurnal Kesejahteraan Sosial/Pekerja Sosial), hasil-hasil penelitian, dan buku.
4. Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris
5. Kutipan yang langsung dan panjang (lebih dari tiga baris) diketik dengan jarak baris satu dengan bentuk indented style (bentuk berinden). Semua kutipan dan rujukan yang digunakan oleh penulis harus tercantum dalam daftar pustaka.
6. Penggunaan singkatan, harus dituliskan secara lengkap pada saat pertama kali disebutkan lalu dibubuhkan singkatannya dalam kurung. Istilah/kata asing atau daerah ditulis dengan *Italic* (dimiringkan). Simbol/lambang ditulis dengan jelas dan dapat dibedakan, seperti penggunaan angka 1 dan huruf I (juga angka 0 dan huruf O).
7. Tabel dan gambar dan judul tabel dan gambar ditulis dengan Times New Roman berukuran 10. Penomoran tabel menggunakan angka Arab (ikuti format APA). Tabel/gambar maksimal 3.
8. Penulisan daftar pustaka mengikuti format APA (*American Psychological Association*). Daftar pustaka sedapat mungkin menggunakan sumber primer (buku atau jurnal), diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama keluarga/penulis. Minimal 80% rujukan berasal dari sumber yang up to date (diterbitkan tidak lebih dari 10 tahun terakhir). Rujukan dari internet mencantumkan tanggal diakses.
  - a) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku dengan pengarang tunggal:  
Arikunto, S. (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
  - b) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku dengan 2 pengarang:  
Wijaya, C. & Rusyan, T. (1992). Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
  - c) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku lebih dari 2 pengarang:  
Suharto, E., Suradi, Luhpuri, D., Sudrajat, A., Koswara, A., Marbun, J., Masngudin & Sabeni. (2003). Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial, Studi Kasus Rumah Tangga Miskin Indonesia. Bandung: STKS Bandung Press.
  - d) Bila daftar pustaka dirujuk dari jurnal:  
Mujiyadi, B & Gunawan, (2000). Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Suatu Kajian terhadap Masyarakat di Sekitar Kawasan Industri, Informasi Vol.5 No. 1, Januari 2000. Jakarta: Balitbang Depsos RI,
  - e) Bila daftar pustaka dirujuk dari website:  
Hamidah, (2000). Dampak Pelecehan Seksual, <http://Viking-Trisna.Blogspot.com/2010/04/Dampak-Pelecehan-seksual.html>, diakses 23 Juli 2012
  - f) Bila daftar daftar pustaka dirujuk dari Lembaga:  
Kementerian Sosial RI. (2000). Pedoman Panti Sosial Bina Remaja, Jakarta: Direktorat Rehsos
  - g) Bila daftar pustaka dirujuk dari media massa:  
Surbakti R. (2012). Otonomi daerah dari Presiden, Kompas 31 Juli 2012:6
  - h) Bila daftar daftar pustaka dirujuk dari Undang-Undang:  
Republik Indonesia, (2002). Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kementerian Sosial



